WALI KOTA JAYAPURA

PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA JAYAPURA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2014 Nomor 71);
15. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2024 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 188);
16. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 065-7 Tahun 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua.
2. Daerah adalah Kota Jayapura.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Jayapura.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Jayapura.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perencana peneylenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRK dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau disingkat RPJMD adalah dokumen perencanan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025-2030 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah kota yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPTD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra.PD Adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 2

(1) Walikota melalui Bappeda menyusun RPJMD.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah.

(3) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
   a. RPJPD;
   b. RTRWK; dan
   c. RPJMN.

(4) Selain berpedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyusunan RPJMD selaras dengan:
   a. RPJMD Provinsi; dan
   b. rencana aksi percepatan pembangunan Papua.

Pasal 3

RPJMD menjadi pedoman:

a. perangkat daerah dalam penyusunan Rentra. PD;
b. pemerintah kota dalam menyusun RKPD; dan
c. walikota dalam menyusun RPJMD;

Pasal 4

(1) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. Bab I pendahuluan;
   b. Bab II gambaran umum Daerah;
   c. Bab III visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah;
   d. Bab IV program perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
   e. Bab V penutup.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(2) Teknis pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 6

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional; atau
   d. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kerugian terhadap kepentingan daerah dan nasional.
(2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RKPD, dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2017 Nomor 119) dan Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2020 Nomor 162), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku).

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Kota Jayapura
pada tanggal 19 Agustus 2025

WALI KOTA JAYAPURA,
TTD
ABISAI ROLLO

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 19 Agustus 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD
EVERT NICOLAS MERAUJE, S. SOS., M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690319 199610 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2025 NOMOR
NOMOR REGISTER : 02/2025

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM

HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Pelantikan kepala daerah menjadi titik awal dimulainya proses penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jayapura Tahun 2025-2029 disusun dengan tahapan-tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Dalam penyusunannya, tim penyusun melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah. Dokumen RPJMD harus ditetapkan dengan peraturan daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengamanatkan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Daerah perlu menetapkan dokumen RPJMD dengan peraturan daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan Kepala Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan “dokumen perencanaan lainnya” adalah berbagai dokumen selain rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) yang memuat informasi perencanaan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dokumen-dokumen ini digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 201

WALI KOTA JAYAPURA,

TTD

ABISAI ROLLO

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM

HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jayapura Tahun 2025-2029 telah selesai disusun. RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, serta mengakomodasi berbagai masukan dari pemangku kepentingan. Dokumen ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan 5 tahun kedepan untuk mewujudkan visi daerah **"**Terwujudnya Kota Jayapura sebagai Kota Jasa yang Berbudaya, Religius, Maju, Mandiri, dan Sejahtera Menuju Jayapura Emas".

Penyusunan RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025–2029 telah melalui beberapa tahapan mulai dari persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan, Musrenbang, rancangan akhir, pembahasan dan penyepakatan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah, serta evaluasi RPJMD oleh Gubernur. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah, pemangku kepentingan, serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah secara terarah.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029 ini, Saya ucapkan terima kasih.

Wali Kota Jayapura,

(.....)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I
DAFTAR ISI II
DAFTAR TABEL III
DAFTAR GAMBAR XI

BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang I.1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I.4
1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya I.9
1.4 Maksud dan Tujuan I.13
1.5 Sistematika Penulisan I.14

BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah II.1
2.2 Gambaran Keuangan Daerah II.239
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis II.278

BAB III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran III.1
3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah III.24

BAB IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
4.1 Program Perangkat Daerah IV.1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah IV.51

BAB V. PENUTUP
5.1 Kesimpulan V.1
5.2 Kaidah Pelaksanaan V.2
5.3 Pengendalian dan Evaluasi V.3
5.4 Pedoman Transisi V.3

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Wilayah Administrasi Kota Jayapura	II.3
Tabel 2.2	Luas Persebaran Morfologi di Kota Jayapura	II.7
Tabel 2.3	Luas Curah Hujan Kota Jayapura	II.10
Tabel 2.4	Jasa Penyedia Air (Ha)	II.14
Tabel 2.5	Jasa Pengatur Tata Air (Ha)	II.15
Tabel 2.6	Luas Rawan Banjir Distrik Abepura (Ha)	II.17
Tabel 2.7	Luas Rawan Banjir Distrik Heram (Ha)	II.17
Tabel 2.8	Luas Rawan Banjir Distrik Jayapura Selatan (Ha)	II.17
Tabel 2.9	Luas Rawan Banjir Distrik Jayapura Utara (Ha)	II.18
Tabel 2.10	Luas Rawan Banjir Distrik Muara Tami (Ha)	II.18
Tabel 2.11	Luas Rawan Longsor Distrik Abepura (Ha)	II.19
Tabel 2.12	Luas Rawan Longsor Distrik Heram (Ha)	II.19
Tabel 2.13	Luas Rawan Longsor Distrik Jayapura Selatan (Ha)	II.20
Tabel 2.14	Luas Rawan Longsor Distrik Jayapura Utara (Ha)	II.20
Tabel 2.15	Luas Rawan Longsor Distrik Muara Tami (Ha)	II.21
Tabel 2.16	Ketersediaan Air Berdasarkan Cadangan (Prediksi Ekplorasi GIS)	II.21
Tabel 2.17	Standar Kebutuhan Air Domestik	II.23
Tabel 2.18	Potensi Ketersediaan Air Kota Jayapura yang Dapat Dimanfaatkan PDAM (Sumber RTRW 2013-2033)	II.23
Tabel 2.19	Kebutuhan Air Domestik dalam satuan liter/hari	II.23
Tabel 2.20	Standar Kebutuhan Air Non Domestik	II.24
Tabel 2.21	Kebutuhan Air Domestik	II.25
Tabel 2.22	Kebutuhan Air Non Domestik (M3/Tahun)	II.26
Tabel 2.23	Total Kebutuhan Air dan Ketersediaan Air Eksplorasi GIS (M3/Tahun)	II.27
Tabel 2.24	Potensi Ketersediaan Air Bersih Kota Jayapura yang Dapat Dimanfaatkan PDAM (Sumber RTRW 2013-2033)	II.27
Tabel 2.25	Kebutuhan Air Domestik dan Non Domestik (M3/Tahun)	II.28

Tabel 2.26	Ketersediaan Pangan Tiap Distrik	II.29
Tabel 2.27	Kebutuhan Pangan Tiap Distrik	II.29
Tabel 2.28	Pola Ruang Kota Jayapura (Berdasarkan RTRW 2013-2033) (Ha)	II.31
Tabel 2.29	Standar Kebutuhan lahan menurut jumlah penduduk (Yeates)	II.33
Tabel 2.30	Daya Dukung Demografis/Lahan di Distrik Kota Jayapura	II.33
Tabel 2.31	Daya Dukung Lahan Tiap Distrik	II.35
Tabel 2.32	Luas Layak Pemukiman dan Daya Dukung Pemukiman Tiap Distrik di Kota Jayapura	II.36
Tabel 2.33	Cadangan Karbon Per Hektar Untuk 22 Tipe Penutupan Lahan Skala Nasional	II.37
Tabel 2.34	Beban Pencemaran Di Hilir Sungai Anafre (Ton/Bulan)	II.41
Tabel 2.35	Beban Pencemaran di Hilir Hanyaan (Ton/Bulan)	II.44
Tabel 2.36	Beban Pencemaran di Hilir Kali Acai (Ton/Bulan)	II.45
Tabel 2.37	Beban Pencemaran di Hilir Siborgonyi (Ton/Bulan)	II.46
Tabel 2.38	Konstanta Perhitungan Potensi Beban Pencemaran	II.47
Tabel 2.39	Potensi Beban Pencemaran Tiga Parameter (kg/hari)	II.47
Tabel 2.40	Beban Air Limbah (Ltr/Hari)	II.48
Tabel 2.41	Timbulan Sampah (Kg/Hari)	II.48
Tabel 2.42	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kota Jayapura Tahun 2021-2024	II.52
Tabel 2.43	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Hasil Registrasi di Kota Jayapura Tahun 2020-2024	II.57
Tabel 2.44	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan di Kota Jayapura Tahun 2024	II.57
Tabel 2.45	Jumlah Penduduk Menurut Umur di Kota Jayapura Tahun 2024	II.58
Tabel 2.46	Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Jayapura Tahun 2025-2030	II.59
Tabel 2.47	PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kota Jayapura (2020-2024)	II.60

Tabel 2.48	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kota Jayapura (2020-2024)	II.62
Tabel 2.49	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Jayapura Tahun 2020–2024	II.63
Tabel 2.50	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Kota Jayapura menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024	II.66
Tabel 2.51	Prevalensi Stunting Kota Jayapura Tahun 2021-2024	II.79
Tabel 2.52	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Unsur Penyusunnya Tahun 2024	II.85
Tabel 2.53	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial dalam Setahun Terakhir dan Jenis Jaminan Sosial di Kota Jayapura Tahun 2022 dan 2023 (Persen)	II.85
Tabel 2.54	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima di Kota Jayapura Tahun 2024	II.87
Tabel 2.55	Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Jayapura Tahun 2020-2024	II.88
Tabel 2.56	Indeks Perlindungan Anak Kota Jayapura Tahun 2021-2023	II.88
Tabel 2.57	Tingkat Ketergantungan Di Kota Jayapura Tahun 2020 – 2024	II.90
Tabel 2.58	Tingkat Kegemaran Membaca Kota Jayapura Tahun 2024	II.91
Tabel 2.59	Distribusi Persentase PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan di Kota Jayapura Tahun 2020–2024	II.91
Tabel 2.60	Distribusi Persentase PDRB ADHB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kota Jayapura Tahun 2020–2024	II.92
Tabel 2.61	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Jayapura Tahun 2020-2024	II.93
Tabel 2.62	Indeks Inovasi Daerah Kota Jayapura Tahun 2020-2024	II.94

Tabel 2.63	Produk Domestik Regional Bruto Kota Jayapura Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (Juta Rupiah) Tahun 2019–2023	II.94
Tabel 2.64	Produk Domestik Regional Bruto Kota Jayapura Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (Juta Rupiah) Tahun 2019–2023	II.95
Tabel 2.65	Produk Domestik Regional Bruto Kota Jayapura Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Net Ekspor Barang dan Jasa (Juta Rupiah) Tahun 2019–2023	II.95
Tabel 2.66	Produk Domestik Regional Bruto Kota Jayapura Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Net Ekspor Barang dan Jasa (Juta Rupiah) Tahun 2019–2023	II.95
Tabel 2.67	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Jayapura Tahun 2019-2023	II.99
Tabel 2.68	Hasil Evaluasi AKIP Kota Jayapura Tahun 2023-2024	II.104
Tabel 2.69	Perolehan Opini BPK Kota Jayapura Tahun 2020-2024	II.105
Tabel 2.70	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Jayapura Tahun 2022-2024	II.106
Tabel 2.71	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kota Jayapura	II.107
Tabel 2.72	Indeks SPBE Pemerintah Kota Jayapura Tahun 2023-2024	II.108
Tabel 2.73	Indeks Daya Saing Kota Jayapura Tahun 2024	II.110
Tabel 2.74	Angka Partisipasi Kasar Kota Jayapura Tahun 2020-2023	II.111
Tabel 2.75	Angka Partisipasi Murni Kota Jayapura, Tahun 2020-2023	II.112
Tabel 2.76	Jumlah Gedung Sekolah Dasar di Kota Jayapura Berdasarkan Distrik Tahun 2020- 2024	II.113
Tabel 2.77	Jumlah Murid Sekolah Dasar di Kota Jayapura berdasarkan Distrik Tahun 2020 – 2024	II.114
Tabel 2.78	Jumlah Guru Sekolah Dasar di Kota Jayapura Berdasarkan Distrik Tahun 2020 – 2024	II.115
Tabel 2.79	Jumlah Gedung Sekolah Menengah Pertama di Kota Jayapura Menurut Distrik Tahun 2019-2023	II.117

Tabel 2.80	Jumlah Murid Sekolah Menengah Pertama Menurut Distrik Tahun 2019-2023	II.119
Tabel 2.81	Perkembangan Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama Menurut Distrik Tahun 2019-2023	II.121
Tabel 2.82	Jumlah Gedung Sekolah Menengah Atas di Kota Jayapura Berdasarkan Distrik Tahun 2019 – 2023	II.122
Tabel 2.83	Jumlah Murid SMA Menurut Distrik Tahun 2019-2023	II.124
Tabel 2.84	Perkembangan Jumlah Guru SMA Menurut Distrik Tahun 2019-2023	II.125
Tabel 2.85	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Jayapura Tahun 2023	II.128
Tabel 2.86	Jumlah Dokter dan Rasio Dokter Per Penduduk Kota Jayapura Tahun 2019 – 2023	II.130
Tabel 2.87	Perkembangan Status dan Kondisi Permukaan Jalan di Kota Jayapura Tahun 2019 – 2023	II.132
Tabel 2.88	Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022-2024	II.133
Tabel 2.89	Capaian Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II.134
Tabel 2.90	Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan di Kota Jayapura Tahun 2020-2024	II.136
Tabel 2.91	Capaian Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019-2023	II.143
Tabel 2.92	Capaian Penanaman Modal Tahun 2019 – 2023	II.145
Tabel 2.93	Jumlah Nelayan di Kota Jayapura Tahun 2019-2023	II.147
Tabel 2.94	Perkembangan Jumlah Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan Tahun 2019-2023	II.148
Tabel 2.95	Perkembangan Jumlah Unit Pengolahan Ikan di Kota Jayapura Tahun 2019-2023	II.149
Tabel 2.96	Data Produksi Perikanan per Jenis Budidaya (ton) Tahun 2019 – 2023	II.150
Tabel 2.97	Jumlah Distributor dan Pengecer Ikan di Kota Jayapura Tahun 2019-2023	II.151
Tabel 2.98	Perkembangan Jumlah Dan Jenis Armada Tangkap di Kota Jayapura Tahun 2019-2023	II.153
Tabel 2.99	Perkembangan Jumlah dan Jenis Alat Tangkap di Kota Jayapura Tahun 2019-2023	II.154

Tabel 2.100	Hotel dan Pariwisata Di Kota Jayapura Tahun 2019-2023	II.157
Tabel 2.101	Produksi Tanaman Pangan Tahun 2023 (Ton)	II.159
Tabel 2.102	Tingkat Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2019-2023	II.160
Tabel 2.103	Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kota Jayapura (ha) Tahun 2021–2024	II.161
Tabel 2.104	Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kota Jayapura Tahun 2021–2024 (kuintal)	II.162
Tabel 2.105	Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kota Tahun 2021–2024 Jayapura (m2)	II.162
Tabel 2.106	Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kota Jayapura Tahun 2021–2024 (kg)	II.162
Tabel 2.107	Produksi Buah-buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Kota Jayapura (Kuintal) Tahun 2019-2023	II.164
Tabel 2.108	Populasi Ternak Tahun 2019 – 2023	II.165
Tabel 2.109	Produksi Daging Tahun 2019-2023	II.167
Tabel 2.110	Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2020-2024	II.169
Tabel 2.111	Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan Tahun 2020-2024	II.170
Tabel 2.112	Perkembangan Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019 – 2023	II.171
Tabel 2.113	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kota Jayapura Tahun 2022-2024	II.172
Tabel 2.114	Capaian SPM Urusan Pendidikan	II.187
Tabel 2.115	Alokasi Anggaran SPM Urusan Pendidikan	II.192
Tabel 2.116	Capaian SPM Urusan Kesehatan	II.193
Tabel 2.117	Alokasi Anggaran SPM Urusan Kesehatan	II.208
Tabel 2.118	Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum	II.210
Tabel 2.119	Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat	II.213
Tabel 2.120	Capaian SPM Urusan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	II.219

Tabel 2.121	Capaian SPM Urusan Sosial	II.226
Tabel 2.122	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kota Jayapura 2020-2024	II.241
Tabel 2.123	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Jayapura Tahun 2020-2024	II.244
Tabel 2.124	Penerimaan dan Realisasi Otonomi Khusus Kota Jayapura Tahun 2020-2024	II.247
Tabel 2.125	Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran Daerah Pemerintah Kota Jayapura Tahun 2020–2024	II.251
Tabel 2.126	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Jayapura Tahun 2020-2024	II.253
Tabel 2.127	Neraca Daerah Kota Jayapura Tahun 2020–2023	II.255
Tabel 2.128	Analisis Rasio Lancar Pemerintah Kota Jayapura Tahun 2020–2024	II.258
Tabel 2.129	Analisis Rasio Cepat Pemerintah Kota Jayapura Tahun 2020–2024	II.259
Tabel 2.130	Analisis Rasio Cepat Pemerintah Kota Jayapura Tahun 2020–2024	II.259
Tabel 2.131	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Jayapura Tahun 2020–2024	II.261
Tabel 2.132	Penutup Defisit Rill Anggaran Pemerintah Kota Jayapura Tahun 2020–2024	II.266
Tabel 2.133	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Kota Jayapura Tahun 2020–2024	II.267
Tabel 2.134	Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Jayapura Tahun 2025-2030	II.270
Tabel 2.135	Proyeksi Belanja Daerah Kota Jayapura Tahun 2025-2030	II.273
Tabel 2.136	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Jayapura Tahun 2025-2030	II.275
Tabel 2.137	Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Kota Jayapura Tahun 2025–2030	II.276
Tabel 2.138	Permasalahan Utama Kota Jayapura	II.278
Tabel 2.139	Permasalahan Berdasarkan Distrik	II.327
Tabel 2.140	Highlight Indikasi Intervensi Provinsi Papua Tahun 2025-2029	II.336
Tabel 2.141	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Daerah Kota Jayapura	II.366

Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029	III.9
Tabel 3.2	Agenda Prioritas dan Program Kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura Tahun 2025-2029	III.16
Tabel 3.3	Strategi Pembangunan Kota Jayapura	III.29
Tabel 3.4	Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Jayapura Tahun 2025-2029	III.33
Tabel 3.5	Arah Kebijakan RPJMD Kota Jayapura	III.58
Tabel 3.6	Highlight Pembangunan Kewilayahan Kota Jayapura	III.60
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah Kota Jayapura Tahun 2025-2029	IV.2
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Jayapura Tahun 2025-2029	IV.52
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Daerah Kota Jayapura Tahun 2025-2029	IV.55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya	I.13
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Jayapura	II.4
Gambar 2.2	Jasa Penyedia Air	II.15
Gambar 2.3	Jasa Pengatur Tata Air	II.16
Gambar 2.4	Grafik Jasa Pengatur Air di Kota Jayapura	II.16
Gambar 2.5	Kandungan karbon Tiap Distrik	II.39
Gambar 2.6	Beban Pencemaran Maksimum dan Beban Pecemaran Aktual Sungai Anafre	II.42
Gambar 2.7	Indeks Pencemaran Udara	II.50
Gambar 2.8	Indeks Ketahanan Pangan Kota Jayapura Tahun 2020-2024	II.50
Gambar 2.9	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kota Jayapura Tahun 2020-2024	II.51
Gambar 2.10	Titik Gempa Periode 02 Januari s/d 05 Januari 2023	II.53
Gambar 2.11	Peta Rawan Bencana Longsor	II.54
Gambar 2.12	Indeks Risiko Bencana Kota Jayapura Tahun 2020-2024	II.56
Gambar 2.13	Jumlah Penduduk Kota Jayapura Tahun 2020-2024	II.56
Gambar 2.14	Pertumbuhan Ekonomi Kota Jayapura Tahun 2020-2024	II.64
Gambar 2.15	Pertumbuhan Ekonomi Kota Jayapura, Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2020-2024	II.65
Gambar 2.16	Indeks Gini Kota Jayapura, Provinsi Papua, dan Nasional Tahun 2020–2024	II.67
Gambar 2.17	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) Kota Jayapura Tahun 2020–2024	II.68
Gambar 2.18	Jumlah Penduduk Miskin Kota Jayapura Tahun 2020-2024 (data dalam ribuan)	II.68
Gambar 2.19	Persentase Penduduk Miskin Kota Jayapura, Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2020 – 2024	II.69
Gambar 2.20	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Jayapura Tahun 2020-2024	II.70
Gambar 2.21	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Jayapura, Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2020 – 2024	II.71
Gambar 2.22	Indeks Pembangunan Manusia Kota Jayapura, Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2020-2024	II.73

Gambar 2.23	Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Kota Jayapura dan Provinsi Papua Tahun 2020-2024	II.76
Gambar 2.24	Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Jayapura dan Provinsi Papua Tahun 2020 – 2024	II.77
Gambar 2.25	Rata-Rata Lama Sekolah Kota Jayapura dan Provinsi Papua Tahun 2020-2024	II.81
Gambar 2.26	Angka Harapan Lama Sekolah Kota Jayapura dan Provinsi Papua Tahun 2020–2024	II.83
Gambar 2.27	Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Kota Jayapura dan Provinsi Papua Tahun 2022-2024	II.84
Gambar 2.28	Indeks Ketimpangan Gender Kota Jayapura dan Provinsi Papua Tahun 2020-2024	II.89
Gambar 2.29	Rasio Kewirausahaan di Kota Jayapura Tahun 2022–2024	II.92
Gambar 2.30	Peta Kawasan Strategis Kota Jayapura	II.96
Gambar 2.31	Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Jayapura Tahun 2019-2023	II.98
Gambar 2.32	Inflasi Kota Jayapura Tahun 2019-2023	II.101
Gambar 2.33	Capaian Nilai AKIP Kota Jayapura Tahun 2020-2024	II.104
Gambar 2.34	Indeks Daya Saing Kota Jayapura dan Provinsi Papua Tahun 2023 dan 2024	II.109
Gambar 2.35	Angka Kesakitan Menurut Daerah Tempat Tinggal di Kota Jayapura Tahun 2023-2024	II.127
Gambar 2.36	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin di Kota Jayapura Tahun 2021-2023 (jiwa	II.137
Gambar 2.37	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Jayapura dan Provinsi Papua Tahun 2020-2024	II.139
Gambar 2.38	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Jayapura Tahun 2020-2023	II.140
Gambar 2.39	Indeks Ketahanan Pangan Kota Jayapura dan Provinsi Papua Tahun 2020-2024	II.141
Gambar 2.40	Persentase Penanganan Sampah di Kota Jayapura Tahun 2023-2024	II.142
Gambar 2.41	Jumlah Wisatawan di Kota Jayapura, Tahun 2019-2023	II.156
Gambar 2.42	Sasaran Pembangunan Provinsi Papua	II.336
Gambar 2.43	Tahapan Pembangunan Provinsi Papua Dalam RPJPD Tahun 2025-2045	II.349
Gambar 2.44	Isu Strategis Provinsi Papua Tahun 2025-2029	II.350

Gambar 3.1	Pohon Kinerja RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029	III.13
Gambar 3.2	9 Agenda Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura Tahun 2025-2029	III.15
Gambar 3.3	Penahapan Pembangunan Jangka Menengah Kota Jayapura Tahun 2025-2029	III.24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Jayapura terletak di bagian Utara Provinsi Papua dengan batas wilayah administratif yang unik dan strategis. Di sebelah Utara, Kota Jayapura berbatasan langsung dengan Lautan Pasifik, memberikan akses langsung ke perairan internasional. Sementara itu, di sebelah Selatan, Kota Jayapura berbatasan dengan Distrik Arso yang merupakan bagian dari Kabupaten Keerom. Posisi Timur Kota Jayapura memiliki signifikansi Internasional karena berbatasan langsung dengan negara tetangga, Papua New Guinea (PNG). Sedangkan di sebelah Barat, Kota Jayapura berbatasan dengan 2 (dua) distrik yang termasuk dalam Kabupaten Jayapura, yaitu Distrik Sentani dan Distrik Depapre. Konfigurasi geografis ini memberikan Kota Jayapura posisi yang unik, menggabungkan akses laut, perbatasan internasional, dan konektivitas dengan wilayah-wilayah sekitarnya di dalam Provinsi Papua.

Perencanaan pembangunan Kota Jayapura disusun dengan memperhatikan kondisi riil daerah, potensi yang dimiliki, serta tantangan yang dihadapi. Dengan luas wilayah 835,94 km² dan jumlah penduduk mencapai 404.799 jiwa pada tahun 2024, kepadatan hampir 1.000 jiwa per km² menuntut strategi pembangunan yang cermat dan terintegrasi. Kondisi ini mengharuskan pemerintah kota merancang perencanaan yang responsif terhadap kebutuhan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Pemerintah kota menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan kewenangannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa

jabatan Kepala Daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Dengan dilantiknya **ABISAI ROLLO, SH., MH.** sebagai **Wali Kota** dan **Dr. Ir. H. RUSTAN SARU, MM** sebagai **Wakil Wali Kota Jayapura Tahun 2025-2029** pada tanggal 20 Februari 2025 menandai dimulainya pemerintahan jangka menengah yang baru. Pelantikan kepala daerah juga menjadi titik awal dimulainya proses penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029. Dokumen ini harus ditetapkan dengan peraturan daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jayapura Tahun 2025-2029 disusun dengan tahapan-tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan Musrenbang; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Dalam penyusunannya, tim penyusun melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah. Perencanaan pembangunan Kota Jayapura diarahkan untuk mendukung visi “Terwujudnya Kota Jayapura sebagai Kota Jasa yang Berbudaya, Religius, Maju, Mandiri, dan Sejahtera Menuju Jayapura Emas”.

Penyusunan RPJMD dilakukan dengan beberapa pendekatan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan. Adapun keempat pendekatan yang dimaksud, yaitu:

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan.

Selain pendekatan secara proses sebagaimana dijelaskan diatas, penyusunan RPJMD juga menggunakan pendekatan substansi, meliputi:

a. Pendekatan Holistik-Tematik: dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
b. Pendekatan Integratif: dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
c. Pendekatan Spasial: dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Dalam rangka memastikan bahwa dokumen RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029 telah disusun dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, maka dilakukan pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. KLHS RPJMD perlu diperhatikan dalam proses penyusunan RPJMD untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) melalui penyusunan alternatif skenario dan rekomendasi bagi RPJMD.

Dokumen RPJMD disusun bersamaan dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah merupakan rencana operasional dari RPJMD, yang menjabarkan kebijakan dalam RPJMD kedalam program, kegiatan, dan sub kegiatan

sesuai kewenangan masing-masing. Selanjutnya, RPJMD dan Renstra Peragkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen rencana tahunan yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah. Penyusunan kedua dokumen tersebut berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Seluruh proses dan substansi RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kota Jayapura menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksananya, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);

19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 533);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
32. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2025 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2014 Nomor 71, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Jayapura Nomor 47);

34. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110); dan
35. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2024 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 188).

1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak wali kota dan wakil wali kota dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan. Dokumen ini memiliki peran strategis sebab merupakan pelaksanaan tahapan pertama dari RPJPD, dan sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Dearah dan RKPD.

Dokumen RPJMD disusun dengan mengacu pada RPJPD dan RTRW serta memperhatikan RPJMD Provinsi Papua dan RPJMN. Hubungan antara RPJMD Kota Jayapura dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya dijelaskan sebagai berikut:

a. RPJMD Kota Jayapura dengan RPJPD Kota Jayapura

   Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 tahun. Dokumen RPJPD memuat arah kebijakan

pembangunan jangka menengah, yang akan menjadi pedoman penyusunan RPJMD. Pembangunan jangka menengah periode tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan dari RPJPD Kota Jayapura Tahun 2025-2045 pada tahap pertama (2025-2029).

Penelaahan RPJPD dilakukan dengan menelaah sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD serta tingkat capaian kinerja sampai dengan periode penyusunan RPJMD. Hasil penelaahan sampai dengan periode terakhir dibandingkan dengan target kinerja sasaran pokok periode RPJMD yang akan disusun, menjadi bahan bagi penyusunan tujuan dan sasaran RPJMD.

b. RPJMD Kota Jayapura dengan RTRW Kota Jayapura

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan itu, penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam RPJMD selaras dengan, atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW.

Penelaahan rencana tata ruang dalam RTRW bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang berikut asumsi-asumsinya, dengan cara menelaah rencana struktur ruang, menelaah rencana pola ruang dan menelaah indikasi program pemanfaatan ruang.

c. RPJMD Kota Jayapura dengan RPJMD Provinsi Papua

Penyusunan RPJMD Kota Jayapura memedomani RPJMD Provinsi Papua yang dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah kota dengan muatan RPJMD provinsi dan kebijakan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Mengingat pada saat penyusunan dokumen ini, Provinsi Papua belum menyusun RPJMD sebab adanya pemilihan ulang, maka

telaahan dilakukan terhadap RPJPD Provinsi Papua dan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Papua.

d. RPJMD Kota Jayapura dengan RPJMN

RPJMN tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. Memedomani RPJMN dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan asta cita/prioritas nasional, sasaran, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

e. RPJMD Kota Jayapura dengan Renstra Perangkat Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Renstra-PD merupakan rencana operasional dari RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai periode RPJMD, disusun sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah.

f. RPJMD Kota Jayapura dengan RKPD Kota Jayapura

Arah pembangunan 5 (lima) tahun yang dimuat dalam RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Rancangan Awal RKPD berpedoman pada RPJMD, Renstra PD, hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya dam kebijakan pemrintah pusat. RKPD merupakan perencanaan tahunan yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD yang akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

g. RPJMD Kota Jayapura dengan KLHS RPJMD Kota Jayapura

Penyusunan RPJMD Kota Jayapura tidak meninggalkan aspek pelestarian lingkungan hidup. Sebagaimana amanat dalam peraturan, bahwa penyusunan RPJMD harus memerhatikan dokumen lain salah satunya adalah Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS), maka dalam penyusunan RPJMD juga memerhatikan dokumen tersebut. KLHS perlu diperhatikan dalam proses penyusunan RPJMD untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi.

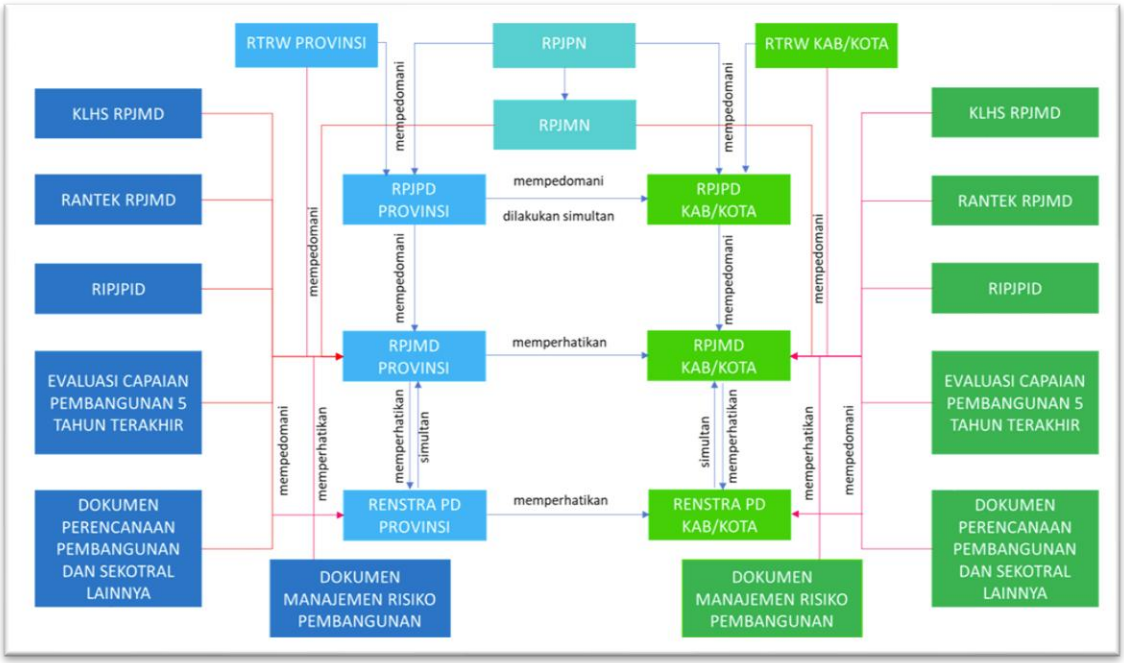
h. RPJMD Kota Jayapura dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP)

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041. RIPPP membawa semangat, paradigma, desain, dan terobosan baru dalam rangka mewujudkan lompatan kesejahteraan Papua dalam 2O tahun mendatang. RIPPP dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Orang Asli Papua (OAP). RIPPP dirancang sebagai pedoman bagi Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian program dan kegiatan serta sinergi sumber pendanaan dalam rangka percepatan pembangunan di Papua. Untuk itu dalam penyusunan RPJMD Kota Jayapura, dilakukan penyelarasan dengan RIPPP.

i. Penyusunan RPJMD Kota Jayapura juga memerhatikan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya, antara lain Rencana lnduk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek di Daerah (RIPJPID), juga kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat yang terbit setelah ditetapkannya RPJMN Tahun 2025-2029.

Keterkaitan RPJMD Kota Jayapura dengan dokumen lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah.

Gambar 1.1.
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya



Sumber: Inmendagri No. 2 Tahun 2025

1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jayapura Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud menyediakan pedoman pembangunan daerah jangka waktu 5 (lima) tahun bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi dan misi wali kota dan wakil wali kota Jayaoura periode 2025-2039, yang penyusunannya selaras dengan RPJMD Provinsi Papua dan RPJMN Tahun 2025-2029.

Tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029, yaitu:

a. Menyajikan analisis gambaran umum kondisi daerah.
b. Menyajikan proyeksi keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah.
c. Merumuskan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.

d. Menetapkan visi dan misi kota yang selanjutnya dijabarkan ke tujuan dan sasaran yang terukur.
e. Menentukan strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan.
f. Menentukan program perangkat daerah.
g. Menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai tolok ukur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
h. Menyediakan instrumen untuk tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah yang akan dievaluasi dan dilaporkan secara periodik.

1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029 disajikan disajikan dengan sistematika 5 (lima) bab sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, bungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penyusunan RPJMD.

Bab II. Gambaran Umum Daerah

Bab ini memuat pengolahan data dan informasi yang dikelompokkan kedalam 4 (empat) aspek pembangunan yang disertai analisis deskriptif. Adapun keempat aspek, yaitu Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing, dan Aspek Pelayanan Umum. Selain itu, dimuat juga analisis gambaran keuangan daerah, baik kondisi keuangan daerah dalam lima tahun terakhir, maupun proyeksi keuangan daerah untuk lima tahun ke depan.

Bab ini juga menyajikan identifikasi permasalahan dan isu strategis daerah untuk pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.

Bab III. Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini memuat visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan kedalam tujuan dan sasaran serta indikator yang terukur selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya, dipilih strategi dan arah kebijakan serta program prioritas pembangunan daerah dalam rangka mencapai sasaran RPJMD.

Bab IV. Program Pembangunan Daerah dan Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah

Bab ini memuat rencana program perangkat daerah dan kerangka pendanaan untuk mendanai pelaksanaan seluruh program. Program perangkat daerah dilengkapi dengan indikator, target dan pagu anggaran selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya, dimuat juga indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Bab V. Penutup

Bah ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, serta pedoman transisi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

A. Luas dan Batas Wilayah

Kota Jayapura secara resmi dibentuk pada 21 September 1993 melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 1993. Awalnya, Kota Jayapura memiliki luas 940 Km² yang terbagi menjadi 5 (lima) Distrik, 25 Kelurahan, dan 14 Kampung. Namun, seiring waktu, luas wilayah Kota Jayapura mengalami perubahan signifikan. Perubahan ini didasari oleh beberapa regulasi dan penyesuaian, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 dan Nomor 40 Tahun 2022 yang mengatur batas daerah dengan Kabupaten Keerom dan Kabupaten Jayapura. Selain itu, penyesuaian juga dilakukan terhadap garis batas negara berdasarkan Geodatabase Nasional Batas Negara Edisi Maret 2021 dan garis pantai sesuai dengan Berita Acara Asistensi dan Supervisi Peta Dasar Skala 1:25.000 Revisi RTRW Kota Jayapura.

Luas wilayah Kota Jayapura kini menjadi sekitar 835,94 Km² atau 83.594 Ha. Kota Jayapura terbagi menjadi 5 (lima) Distrik Utama, yakni: (1) Distrik Muara Tami; (2) Distrik Jayapura Utara; (3) Distrik Jayapura Selatan; (4) Distrik Abepura; dan (5) Distrik Heram. Total luas wilayah Kota Jayapura berdasarkan data BPS adalah 940 Km², sementara berdasarkan Tapal Batas 2020 adalah 835,59 Km², dengan pembagian wilayah masing-masing Distrik, sebagai berikut:

1. Distrik Muara Tami adalah yang terluas, dengan ibu kota di Skouw Mabo. Distrik ini terdiri dari 8 Kelurahan/Kampung, dengan luas total 626,7 Km² (*BPS*) atau 431,99 Km² (*Tapal Batas 2020*).

Kelurahan terluas di Distrik Muara Tami adalah Koya Barat dan Koya Timur.

2. Distrik Jayapura Utara, dengan ibu kota di Tanjung Ria, memiliki 8 Kelurahan/Kampung. Luas totalnya 51 km² (BPS) atau 67,35 Km² (*Tapal Batas 2020*). Kelurahan terluas di Distrik Jayapura Utara adalah Tanjung Ria dan Bhayangkara.
3. Distrik Jayapura Selatan ibu kota di Entrop, terdiri dari 7 Kelurahan/ Kampung. Luas totalnya 43,4 Km² (*BPS*) atau 42,6 Km² (*Tapal Batas 2020*). Kelurahan Ardipura merupakan yang terluas di Distrik Jayapura Selatan.
4. Distrik Abepura dengan ibu kota di Kota Baru memiliki 11 Kelurahan/ Kampung. Luas totalnya 155,7 Km² (*BPS*) atau 252,21 Km² (*Tapal Batas 2020*). Kampung Koya Koso dan Nafri adalah terluas di Distrik Abepura.
5. Distrik Heram, ibu kota di Waena, terdiri dari 5 Kelurahan/Kampung. Luas totalnya 63,2 Km² (*BPS*) atau 41,13 Km² (*Tapal Batas 2020*). Kelurahan Hedam merupakan yang terluas berdasarkan data BPS, sementara Kampung Yoka terluas menurut Tapal Batas 2020.

Dalam konteks Provinsi Papua, Kota Jayapura menempati posisi sebagai daerah terkecil kedua setelah Kabupaten Supiori, mencakup hanya 1,07 persen dari total luas Provinsi Papua. Posisi geografisnya berada pada 1°28'17,26"-3°58'0,82" Lintang Selatan dan 137°34'10,6"-141°0'8,22" Bujur Timur. Kota Jayapura memiliki posisi strategis yang sangat penting di Provinsi Papua. Secara geografis, kota ini terletak di bagian utara Papua. Di sebelah utara, Jayapura berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik sehingga memiliki akses ke jalur laut internasional; di timur berbatasan dengan negara Papua New Guinea (PNG) yang menegaskan perannya sebagai beranda depan negara; di selatan berbatasan dengan Distrik Arso Kabupaten Keerom; sementara

di barat berbatasan dengan Distrik Sentani dan Depapre Kabupaten Jayapura.

Posisi tersebut memberi Kota Jayapura tiga keunggulan utama. Pertama, dari sisi geopolitik dan pertahanan, Jayapura menjadi pintu gerbang Indonesia di Pasifik yang memiliki nilai strategis untuk keamanan dan diplomasi antarnegara. Kedua, dari aspek ekonomi, Jayapura berperan sebagai simpul perdagangan, jasa, dan logistik regional yang menghubungkan hasil pertanian, perikanan, dan komoditas unggulan dari berbagai kabupaten/kota di Papua menuju pasar domestik maupun internasional. Ketiga, dari perspektif sosial-budaya, keberadaannya sebagai ibukota provinsi menjadikan Jayapura pusat layanan pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan yang melayani masyarakat dari seluruh wilayah Papua.

Rincian wilayah administrasi Kota Jayapura dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 2.1
Wilayah Administrasi Kota Jayapura

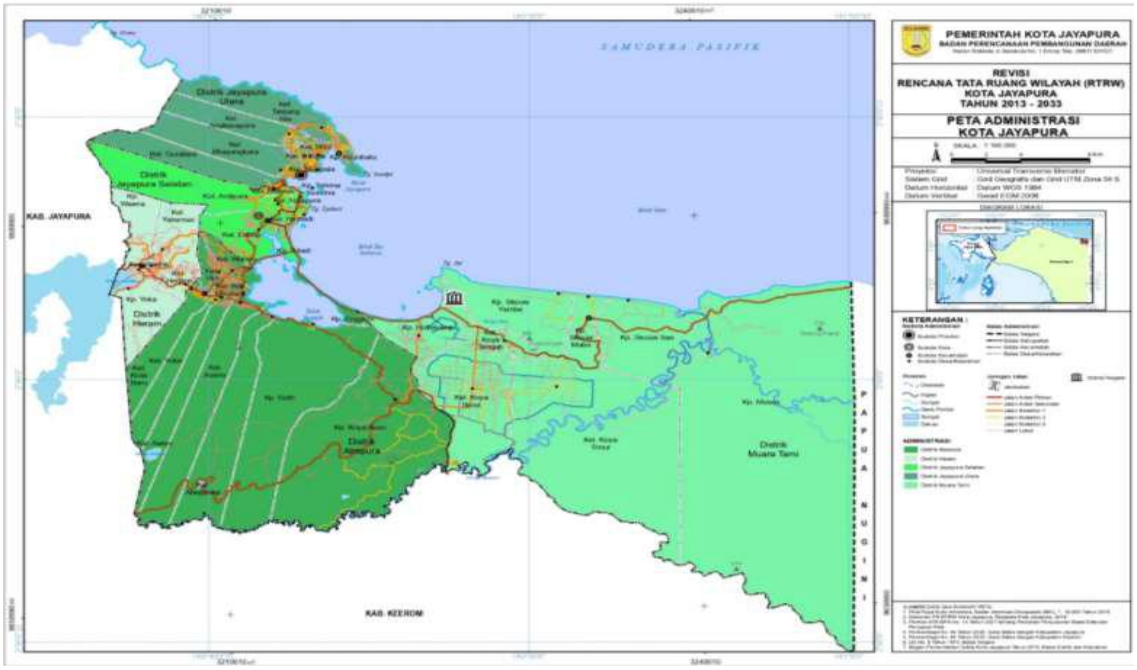
NO	DISTRIK	IBU KOTA DISTRIK	KELURAHAN dan KAMPUNG	LUAS WILAYAH BERDASARKAN BPS (Km²)	LUAS WILAYAH BERDASARKAN TAPAL BATAS 2020 (Km²)
I	**Muara Tami**	**Skouw Mabo**	1. Kelurahan Koya Barat	217	36,07
			2. Kelurahan Koya Timur	96,2	99,25
			3. Kampung Holtekamp	13,3	16,05
			4. Kampung Skouw Sae	52,7	27,76
			5. Kampung Skouw Yambe	81,5	23,71
			6. Kampung Skouw Mabo	87,7	9
			7. Kampung Koya Tengah	45,6	5,19
			8. Kampung Mosso	32,7	214,96
			LUAS DISTRIK MUARA TAMI	626,7	431,99
II	**Jayapura Utara**	**Tanjung Ria**	1. Kelurahan Angkasapura	13,2	12,56
			2. Kelurahan Trikora	0,9	1,25
			3. Kelurahan Mandala	0,3	0,56
			4. Kelurahan Tanjung Ria	5,9	18,25
			5. Kelurahan Imbi	9,4	1,76
			6. Kelurahan Bhayangkara	13,6	17,23
			7. Kelurahan Gurabesi	7,2	14,68
			8. Kampung Kayobatu	0,5	1,06
			LUAS DISTRIK JAYAPURA UTARA	51	67,35
III	**Jayapura Selatan**	**Entrop**	1. Kelurahan Numbay	9,3	1,02
			2. Kelurahan Argapura	2,7	1,05
			3. Kelurahan Hamadi	10	1,7
			4. Kelurahan Ardipura	16,4	25,83
			5. Kelurahan Entrop	2,7	11,24
			6. Kampung Tobati	0,5	1,7
			7. Kampung Tahima Soroma (Kayopulo)	1,8	0,05
			LUAS DISTRIK JAYAPURA SELATAN	43,4	42,6
IV	**Abepura**	**Kota Baru**	1. Kelurahan Asano	10,8	28,83
			2. Kelurahan Awiyo	6,7	16,28
			3. Kelurahan Abe Pantai	12,7	29,79
			4. Kelurahan Kota Baru	11,6	12,24
			5. Kelurahan Yobe	4,5	11,26

NO	DISTRIK	IBU KOTA DISTRIK	KELURAHAN dan KAMPUNG	LUAS WILAYAH BERDASARKAN BPS (Km²)	LUAS WILAYAH BERDASARKAN TAPAL BATAS 2020 (Km²)
			6. Kelurahan Vim	6,8	3,48
			7. Kelurahan Wahno	5,9	4,37
			8. Kelurahan Wai Mhorock	5,3	1,93
			9. Kampung Enggros	4,7	2,46
			10. Kampung Nafri	49,5	59,34
			11. Kampung Koya Koso	37,2	82,22
			LUAS DISTRIK ABEPURA	155,7	252,21
V	**Heram**	**Waena**	1. Kelurahan Hedam	28,11	4,45
			2. Kelurahan Yabansai	12,48	11,07
			3. Kelurahan Waena	8,33	0,5
			4. Kampung Waena	4,16	11,68
			5. Kampung Yoka	10,12	13,42
			LUAS DISTRIK HERAM	63,2	41,13
			LUAS WILAYAH KOTA JAYAPURA	940	835,59

Sumber: BPS Kota Jayapura Tahun 2023 dan Hasil Analisis 2023

Berikut disajikan peta administrasi Kota Jayapura yang meliputi 5 (lima) distrik.

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kota Jayapura



Sumber: Revisi RTRW Kota Jayapura, 2023

Sekitar 30% wilayah Kota Jayapura dianggap tidak cocok untuk pemukiman karena terdiri dari perbukitan curam, daerah rawa, dan hutan lindung dengan kemiringan 40% yang berfungsi sebagai area konservasi. Wilayah Kota Jayapura tidak hanya meliputi daratan, tetapi juga mencakup area laut dan pulau-pulau kecil. Perairan di sekitarnya menghubungkan pantai dan pulau-pulau, termasuk muara sungai,

teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna. Total luas wilayah laut Kota Jayapura adalah 2,81 Km² dengan garis pantai sepanjang 116,77 Km. Dari keseluruhan wilayah, kawasan yang dapat dibudidayakan mencakup 14.219,82 hektar (15,13%), sementara kawasan lindung atau non-budidaya meliputi area yang lebih luas, yaitu 79.780 hektar (84,87%). Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kota Jayapura masih didominasi oleh kawasan alami yang dilindungi.

B. Topografi

Topografi suatu wilayah dapat dianalisis melalui dua parameter utama: kemiringan lereng dan elevasi atau ketinggian tempat. Kedua faktor ini merupakan indikator awal dalam memahami karakteristik bentang alam suatu daerah, seperti yang dikemukakan oleh Santosa dan Muta'ali (2014). Kemiringan lereng bervariasi dari datar hingga sangat curam, sementara ketinggian tempat berkisar dari kurang dari 5 meter hingga melebihi 1000 meter di atas permukaan laut.

1. Kemiringan Lereng

Kota Jayapura menampilkan topografi yang beragam, tercermin dari variasi kelerengan di lima distriknya dengan total luas wilayah 835,28 Km². Distrik Muara Tami, yang terluas, didominasi oleh kelerengan 0-8%, menjadikannya area potensial untuk pengembangan pertanian dan pemukiman. Abepura, Distrik terbesar ke-dua, memiliki dominasi kelerengan 8-15%, menunjukkan topografi bergelombang ringan yang cocok untuk pengembangan perkotaan. Distrik Heram, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Jayapura Utara memiliki distribusi kelerengan yang lebih bervariasi, dengan Jayapura Utara cenderung lebih berbukit. Secara keseluruhan, Kota Jayapura didominasi oleh area dengan kelerengan 0-8% (49,25% dari total luas), diikuti oleh area 8-15% dan 15-25%. Wilayah dengan kelerengan tinggi (>25%) relatif terbatas, namun penting untuk fungsi ekologis. Variasi kelerengan ini memberikan tantangan sekaligus peluang dalam perencanaan tata ruang, memerlukan pendekatan yang berbeda untuk setiap kategori

dalam pengembangan infrastruktur dan tata guna lahan. Pola kelerengan juga berimplikasi pada manajemen air dan drainase Kota Jayapura, di mana area datar memerlukan perhatian khusus untuk pencegahan banjir, sementara area berlereng curam membutuhkan strategi konservasi tanah dan air yang efektif. Karakteristik topografi yang beragam memberikan potensi besar untuk pengembangan Kota Jayapura yang berkelanjutan, namun juga memerlukan perencanaan yang cermat dan terpadu untuk mengoptimalkan penggunaan lahan sesuai dengan karakteristik kelerengannya.

2. Ketinggian

Data ketinggian wilayah Kota Jayapura menunjukkan variasi topografi yang signifikan di seluruh distriknya. Mayoritas wilayah kota berada pada ketinggian 0-100 meter di atas permukaan laut, mencakup area seluas 371,93 Km^2 atau sekitar 45% dari total luas kota. Distrik Muara Tami mendominasi kategori ini dengan 252,97 Km^2, menegaskan karakteristiknya sebagai wilayah dataran rendah. Ketinggian 100-200 meter menjadi kategori terluas kedua dengan 152,84 Km^2, diikuti oleh ketinggian 200-300 meter seluas 116,65 Km^2.

Sebagian besar wilayah Kota Jayapura berada di ketinggian rendah hingga menengah. Namun, Kota Jayapura juga memiliki area dengan ketinggian lebih dari 500 meter, meskipun dalam proporsi yang lebih kecil. Distrik Jayapura Utara menunjukkan distribusi ketinggian yang paling merata, dengan area yang signifikan di setiap kategori ketinggian hingga 800 meter, menggambarkan topografi yang lebih berbukit dan bervariasi. Sebaliknya, Distrik Abepura dan Heram memiliki konsentrasi area di ketinggian yang lebih rendah. Variasi ketinggian ini berimplikasi penting pada perencanaan tata ruang dan pengembangan infrastruktur Kota Jayapura.

Area dataran rendah yang luas menawarkan potensi untuk pengembangan perkotaan dan pertanian, sementara wilayah yang lebih tinggi dapat dimanfaatkan untuk konservasi, pariwisata, atau

pengembangan terbatas dengan memperhatikan aspek lingkungan. Pola ketinggian ini juga mempengaruhi iklim mikro, aliran air, dan risiko bencana alam di berbagai bagian kota, yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan Kota Jayapura.

Analisis topografi wilayah menunjukkan variasi yang signifikan dalam karakteristik ketinggian di seluruh distrik.

Tabel 2.2
Luas Persebaran Morfologi di Kota Jayapura

DISTRIK	LUAS KETINGGIAN (Km2)				
	DATAR	LANDAI	PERBUKITAN	GUNUNG/ PEGUNUNGAN	JUMLAH
Muara Tami	294,30	60,92	44,99	31,78	431,99
Abepura	84,73	105,69	46,10	15,68	252,2
Heram	12,95	13,48	7,32	7,39	41,14
Jayapura Selatan	12,26	12,03	9,98	8,33	42,6
Jayapura Utara	7,15	17,67	23,56	18,97	67,35
KOTA JAYAPURA	**411,39**	**209.79**	**131,95**	**82.15**	**835,28**

Sumber: Revisi RTRW Kota Jayapura 2023

Tabel di atas menunjukan secara keseluruhan, wilayah ini didominasi oleh area datar seluas 411,39 Km², yang mewakili hampir setengah (49,25%) dari total luas wilayah. Area landai mencakup seperempat (25,12%) dari total luas dengan 209,79 Km². Perbukitan dan pegunungan, meskipun lebih sedikit, tetap signifikan dengan luas masing-masing 131,95 Km² (15,80%) dan 82,15 Km² (9,83%). Distribusi ini mencerminkan keragaman lanskap yang menawarkan berbagai peluang dan tantangan dalam perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah. Area datar dan landai yang luas, mencakup lebih dari tiga perempat (74,37%) total wilayah, menyediakan ruang yang substansial untuk ekspansi perkotaan dan pertanian. Sementara itu, wilayah perbukitan dan pegunungan yang mencakup seperempat (25,63%) dari total luas, berpotensi untuk konservasi alam dan pengembangan pariwisata berbasis alam.

C. Geologi

Kota Jayapura memiliki struktur geologi yang beragam, terdiri dari berbagai jenis batuan dan sedimen yang tersebar luas. Keragaman ini berpotensi menghasilkan beberapa jenis bahan galian.

Muara Tami, dengan luas 431,99 Km², menonjol sebagai distrik terbesar. Dominasi formasi Alluvium (198,69 Km²) dan Batuan Gunung (187,51 Km²) di wilayah ini menandakan potensi signifikan untuk pengembangan sektor pertanian dan eksplorasi mineral. Kontras dengan Muara Tami, Abepura (252,21 Km²) menunjukkan keragaman geologis yang lebih besar. Formasi Nubai (121,67 Km²) dan Formasi Makats (79,62 Km²) mendominasi wilayah ini, mengindikasikan prospek untuk industri batu gamping dan bahan konstruksi.

Meskipun lebih kecil, Heram (41,13 Km²) menawarkan variasi geologis yang menarik. Kombinasi Formasi Makats (18,33 Km²) dan Batuan Ultramafik (14,08 Km²) di wilayah ini berpotensi mendukung pengembangan industri mineral khusus. Sementara itu, Jayapura Selatan (42,60 Km²) dan Jayapura Utara (67,35 Km²) menonjol dengan proporsi Batuan Ultramafik yang signifikan, masing-masing 24,84 Km² dan 6,99 Km², menunjukkan potensi besar untuk eksplorasi logam berharga. Secara keseluruhan, wilayah ini didominasi oleh Alluvium (254,37 Km²), Batuan Gunung (194,71 Km²), dan Formasi Nubai (176,51 km²). Distribusi ini menciptakan lanskap yang beragam, mulai dari dataran aluvial subur hingga pegunungan kaya mineral. Kehadiran Endapan Pantai Muda, meski terbatas pada 5,57 Km² di Muara Tami, membuka peluang untuk pengembangan kawasan pesisir.

D. Hidrologi

Wilayah di Kota Jayapura dianugerahi sumber daya air yang melimpah, dengan 17 Daerah Aliran Sungai (DAS) tersebar di seluruh area. Potensi ini membuka peluang besar untuk pengembangan energi listrik terbarukan, yang dapat menjadi pendorong ekonomi produktif, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan memenuhi kebutuhan dasar

masyarakat. Debit air sungai-sungai di wilayah ini bervariasi, dengan Sungai Tami menonjol sebagai sumber air terbesar, mencatatkan volume debit lebih dari 500 M^3 per detik.

Kota Jayapura memiliki dua jenis akuifer: akuifer bebas *(unconfined aquifer)* yang merupakan sumber air tanah dangkal, dan akuifer tertekan *(confined aquifer)* yang menjadi sumber air tanah dalam. Masyarakat memanfaatkan berbagai sumber air bersih, termasuk air sumur, mata air alami, dan pasokan dari PDAM. Air digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, industri, dan irigasi pertanian. Keragaman penggunaan air ini mencerminkan kompleksitas sistem hidrologi Kota Jayapura.

Meskipun kaya akan sumber daya air, Kota Jayapura menghadapi beberapa tantangan hidrologi. Distribusi air yang tidak merata di seluruh wilayah kota dan potensi pencemaran air akibat aktivitas manusia dan industrialisasi menjadi perhatian utama. Untuk mengatasi hal ini, upaya konservasi dilakukan melalui perlindungan kawasan lindung, pembatasan pembangunan di area kritis, dan pengelolaan DAS secara terpadu. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya air.

Sumber daya air Kota Jayapura menawarkan potensi besar untuk pengembangan di berbagai sektor. Ini mencakup pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah, peningkatan pasokan air bersih untuk mendukung pertumbuhan, dan pengembangan ekowisata berbasis sungai dan danau. Realisasi potensi ini memerlukan pengelolaan yang bijak dan terintegrasi untuk memastikan ketersediaan air jangka panjang, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Kondisi hidrologi Kota Jayapura yang kaya menjadi aset penting bagi pembangunan berkelanjutan kota. Pengelolaan sumber daya air yang efektif dan efisien tidak hanya akan memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjamin ketersediaan air untuk generasi mendatang.

Dengan pendekatan yang tepat, Kota Jayapura dapat memanfaatkan kekayaan hidrologisnya sebagai fondasi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, sambil tetap menjaga keseimbangan ekosistem alaminya.

E. Klimatologi

Klimatologi wilayah ini menunjukkan variasi curah hujan yang signifikan antar distrik. Distrik Muara Tami mencatat curah hujan tertinggi, dengan area seluas 427,61 km² menerima 2000-2500 mm hujan per tahun. Abepura, distrik terbesar kedua, memiliki 252,6 km² wilayah dengan curah hujan serupa. Heram, meskipun lebih kecil, juga menerima curah hujan 2000-2500 mm/tahun di area seluas 39,77 Km².

Tabel 2.3
Luas Curah Hujan Kota Jayapura

Distrik	1500 - 2000 (mm/tahun)	2000 - 2500 (mm/tahun)
Muara Tami	0	427,61
Abepura	0	252,6
Heram	0	39,77
Jayapura Selatan	2,74	39,89
Jayapura Utara	55,74	11,66

Sumber: Rencana Revisi RTRW Kota Jayapura 2023

Jayapura Selatan menampilkan pola curah hujan yang lebih bervariasi, dengan 2,74 Km² wilayahnya menerima 1500-2000 mm/tahun, sementara 39,89 Km² lainnya menerima 2000-2500 mm/tahun. Jayapura Utara menunjukkan pola yang unik, dengan sebagian besar wilayahnya (55,74 Km²) menerima curah hujan lebih rendah yaitu 1500-2000 mm/tahun, dan hanya 11,66 Km² yang menerima 2000-2500 mm/tahun. Pola distribusi curah hujan hal ini mencerminkan kompleksitas topografi dan pengaruh iklim lokal di setiap distrik. Variasi ini memiliki implikasi penting bagi manajemen sumber daya air, pertanian, dan perencanaan infrastruktur diseluruh wilayah. Pemahaman mendalam tentang pola curah hujan ini sangat penting untuk adaptasi terhadap perubahan iklim dan pengembangan strategi pembangunan berkelanjutan di masa depan.

Rata-rata suhu udara minimum mutlak dan maksimum mutlak di wilayah Kota Jayapura selama periode 2019-2023. Analisis terhadap suhu minimum mutlak menunjukkan adanya tren penurunan dari tahun 2019 hingga 2022, namun sedikit meningkat pada tahun 2023. Rata-rata terendah tercatat pada tahun 2022 (24.0°C), sedangkan tertinggi pada tahun 2020 (25.9°C). Tahun 2023 menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya, dengan rata-rata 24.6°C.

Umumnya, suhu minimum terendah terjadi pada bulan Juli-Agustus, sementara suhu maksimum tertinggi cenderung terjadi pada bulan September-November. Namun, terdapat beberapa anomali, seperti suhu maksimum yang sangat tinggi pada September 2020 (36.0°C).

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

A. Kawasan Budidaya

Berdasarkan analisis tata ruang wilayah, beberapa area telah diidentifikasi sebagai kawasan potensial untuk pengembangan budidaya. Alokasi lahan terbesar diberikan untuk sektor perumahan, dengan luasan sekitar 3.746 Hektar. Ini menunjukkan prioritas tinggi pada pemenuhan kebutuhan tempat tinggal penduduk. Sektor perkantoran dan perdagangan serta jasa mendapat alokasi yang lebih kecil, masing-masing 95 Hektar dan 327 Hektar, mencerminkan fokus pada pengembangan ekonomi dan layanan publik. Industri diberi ruang sekitar 27 Hektar, yang relatif kecil dibandingkan sektor lain. Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah ini lebih berfokus pada sektor jasa dan perdagangan daripada manufaktur. Sementara itu, pariwisata yang meliputi wisata alam, budaya, dan buatan belum mendapat alokasi spesifik, Dimana hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam pengembangan kedepan sesuai potensi yang ada.

Fasilitas publik mendapat perhatian signifikan dengan alokasi untuk pendidikan (115 Hektar), kesehatan (18 Hektar), dan tempat ibadah (35 Hektar). Proporsi ini mencerminkan prioritas pada pengembangan sumber daya manusia dan pelayanan sosial. Ruang

terbuka non-hijau masih dialokasikan sekitar 3 Hektar, dan perlu ditinjau kembali mengingat pentingnya ruang publik dalam perencanaan Kota Modern. Sektor ekonomi primer, seperti pertambangan dan perikanan mendapat alokasi yang berbeda secara signifikan. Pertambangan dialokasikan 28 Hektar, sementara perikanan mendapat 893 Hektar. Ini menunjukkan potensi perikanan yang jauh lebih besar di Kota Jayapura. Pertanian mendapat alokasi total sekitar 5.686 hektar, terbagi menjadi tanaman pangan (2.767 Hektar), perkebunan (2.482 Hektar), hortikultura (261 Hektar), dan peternakan (176 Hektar). Distribusi ini menggambarkan diversifikasi sektor pertanian dengan fokus utama pada tanaman pangan dan perkebunan.

Kota Jayapura memiliki potensi perikanan yang signifikan dengan alokasi kawasan perikanan seluas ±893 hektar. Letak geografis kota yang berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik dan memiliki garis pantai sepanjang 116,77 km, serta perairan teluk, laguna, dan muara sungai, menjadikan sektor perikanan tangkap sebagai salah satu kekuatan utama. Selain itu, keberadaan perairan pesisir yang relatif tenang seperti Teluk Youtefa dan perairan Muara Tami membuka peluang bagi pengembangan perikanan budidaya, termasuk tambak, keramba jaring apung, dan budidaya laut (marikultur).

Sektor pertanian di Kota Jayapura juga menunjukkan daya dukung yang cukup luas dengan alokasi sekitar 5.686 hektar. Luasan ini terdiri dari tanaman pangan (2.767 ha), perkebunan (2.482 ha), hortikultura (261 ha), dan peternakan (176 ha). Wilayah Distrik Muara Tami, terutama kawasan Koya Barat, Koya Timur, dan Koya Tengah, menjadi sentra utama pertanian kota dengan dominasi padi sawah, jagung, hortikultura (sayuran, cabai, tomat), dan buah-buahan tropis. Sektor perkebunan di wilayah ini juga berkontribusi melalui komoditas kakao, kelapa, dan pala, meskipun skalanya relatif lebih kecil dibandingkan kabupaten sentra perkebunan seperti Keerom dan Sarmi.

Hutan produksi mendapat alokasi terbesar dengan total 48.278 Hektar, terbagi menjadi hutan produksi umum (19.242 Hektar), terbatas

(18.474 Hektar), dan konversi (10.562 Hektar). Hal ini menunjukkan pentingnya sektor kehutanan dalam ekonomi dan ekologi wilayah tersebut. Proporsi yang besar ini juga mengindikasikan upaya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi sumber daya hutan. Perhatian pembangunan terhadap sektor informal terlihat dari rencana pengembangan di kawasan perdagangan, perkantoran, dan pusat pedagang kaki lima di Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. Meskipun belum terdapat alokasi lahan spesifik, pengakuan terhadap sektor ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya ekonomi informal dalam struktur ekonomi lokal. Rencana kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat juga mencerminkan pendekatan inklusif dalam pengembangan ekonomi.

Secara keseluruhan, perencanaan ini mencerminkan upaya komprehensif untuk mengoptimalkan penggunaan lahan dan mendorong perkembangan ekonomi yang seimbang di berbagai sektor. Namun, beberapa aspek, seperti alokasi untuk industri dan ruang terbuka non-hijau perlu ditinjau kembali untuk memastikan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan seimbang di masa depan.

B. Kawasan Lindung

Kawasan lindung merupakan area yang secara resmi ditetapkan untuk menjaga keberlangsungan lingkungan, baik yang bersifat alami maupun buatan. Penetapan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 yang mengatur tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Tujuan utama dari penetapan kawasan lindung ini adalah untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap wilayah-wilayah di sekitarnya. Fungsi perlindungan ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama, kawasan lindung berperan dalam menjamin pasokan air bagi daerah sekitarnya. Kedua, area ini berfungsi sebagai benteng alami untuk mencegah terjadinya tanah longsor. Ketiga, kawasan lindung memiliki peran dalam meminimalkan dampak yang ditimbulkan

oleh gempa bumi. Terakhir, area ini juga berperan penting dalam mempertahankan fungsi hidrologi ekosistem di kawasan sekitarnya.

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kota Jayapura, sebagai ibukota Provinsi Papua, menghadapi tantangan yang signifikan untuk daya tampung lingkungan khususnya dalam pengelolaan sumber daya air seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi yang pesat. Dalam konteks ini, pemahaman tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi krusial untuk menjamin keberlanjutan penyediaan air bersih bagi masyarakat kota.

A. Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Berbasis Kondisi Jasa Lingkungan

1. Jasa Penyedia Air

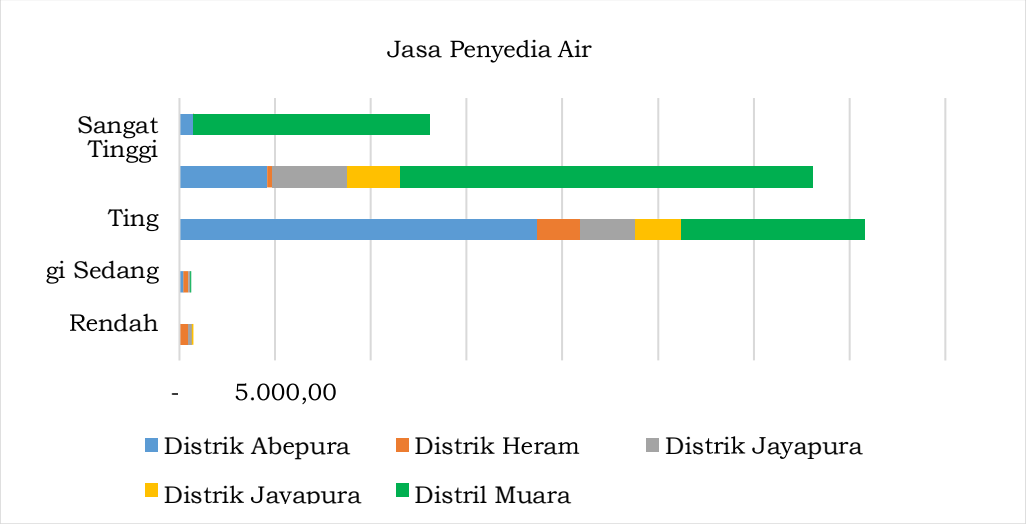
Distrik Abepura sebagian besar memiliki jasa penyedia air sedang sebesar 18.694,46 ha. Pada Distrik heram tidak terdapat jasa penyedia air sangat tinggi. Pada Distrik Jayapura Selatan didominasi oleh jasa penyedia air tinggi. Pada Distrik Jayapura Utara tidak terdapat jasa penyedia air rendah. Pada Distrik Mara Tami sebagian memiliki jasa penyedia air tinggi sebesar 21.559,49 ha.

Tabel 2.4
Jasa Penyedia Air (Ha)

Distrik	Fungsi Jasa Penyediaan Air					
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Luas (Ha)
Distrik Abepura	42,15	206,36	18.694,46	4.586,14	720,21	24.249,32
Distrik Heram	451,06	259,84	2.244,85	273,50		3.229,26
Distrik Jayapura Selatan	149,12	93,10	2.868,08	3.915,55	4,06	7.029,92
Distrik Jayapura Utara	93,66		2.414,00	2.750,19	3,92	5.261,76
Distrik Muara Tami		46,36	9.567,62	21.559,49	12.344,39	43.517,86
Luas Total (Ha)	**735,99**	**605,67**	**35.789,02**	**33.084,87**	**13.072,57**	**83.288,12**

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Gambar 2.2.
Jasa Penyedia Air



Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Berdasarkan gambar dan tabel di atas, Distrik Muara Tami memiliki jasa penyedia air yang sangat tinggi sebesar 12,344.39 ha dan tinggi sebesar 21,559.49 ha.

2. Jasa Pengatur Tata Air

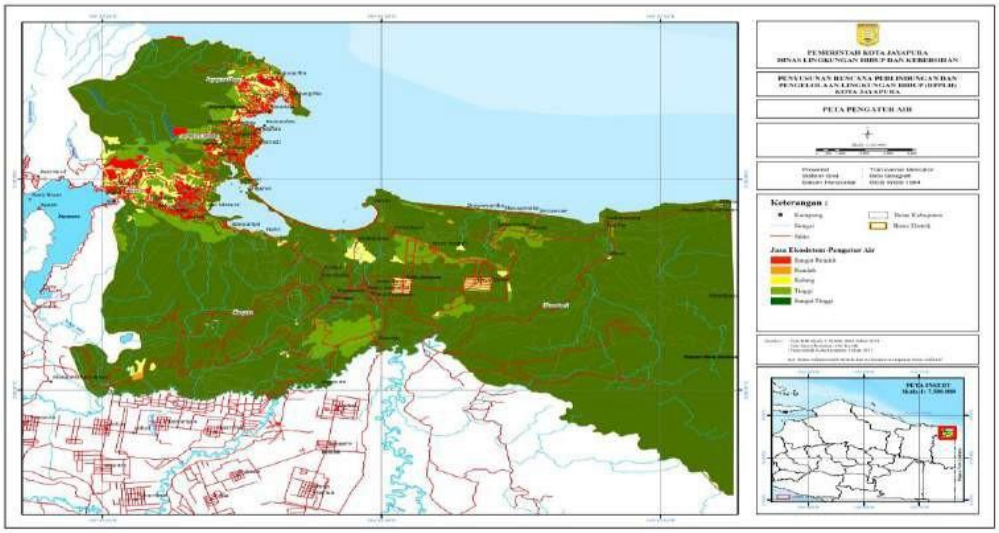
Jasa pengatur tata air di Kota Jayapura dimuat pada tabel dan gambar di bawah.

Tabel 2.5
Jasa Pengatur Tata Air (Ha)

Fungsi Jasa Pengatur Tata Air						
Distrik	**Sangat Rendah**	**Rendah**	**Sedang**	**Tinggi**	**Sangat Tinggi**	**Luas (Ha)**
Distrik Abepura		53.93	284.34	2,182.71	21,728.34	24,249.32
Distrik Heram	229.37		837.93	929.62	1,232.33	3,229.26
Distrik Jayapura Selatan	83.29	27.72	433.52	1,993.19	4,492.20	7,029.92
Distrik Jayapura Utara	80.42		946.74	703.67	3,530.93	5,261.76
Distril Muara Tami		26.98	665.94	1,597.51	41,227.43	43,517.86
Luas Total (Ha)	393.08	108.62	3,168.48	7,406.69	72,211.24	83,288.12

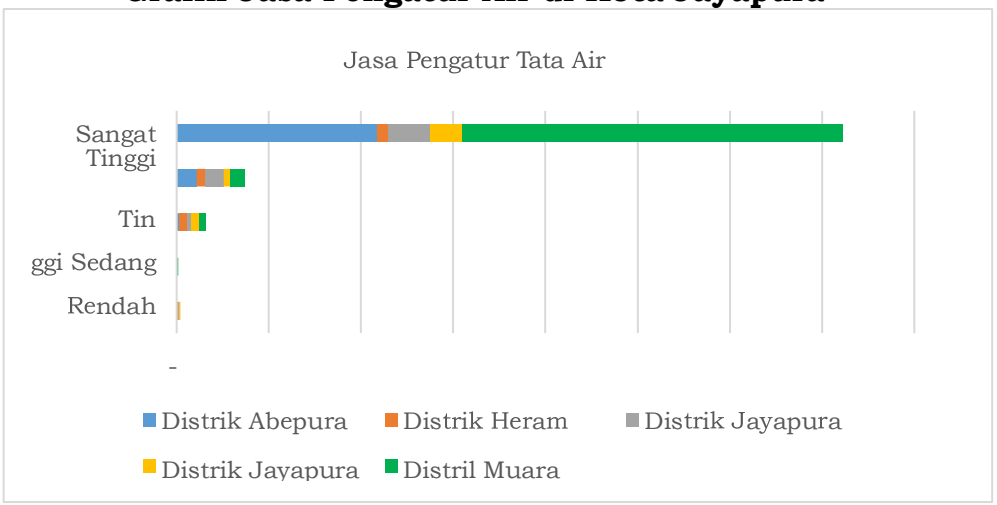
Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Gambar 2.3.
Jasa Pengatur Tata Air



Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Gambar 2.4.
Grafik Jasa Pengatur Air di Kota Jayapura



Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Berdasarkan tabel dan gambar di atas Distrik Muara Tami memiliki jasa pengatur tata air sangat tinggi sebesar 41,227.43. Ha.

3. Rawan Banjir

Setiap kelurahan dan kampung di distrik Abepura memiliki kerawananan banjir rendah sampai sangat tinggi. Adapun rincian kondisi per kelurahan dan kampung dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 2.6
Luas Rawan Banjir Distrik Abepura (Ha)

Kelurahan/Kampung	Tidak Rawan	Rawan Banjir Renda	Rawan Banjir Sedan	Rawan Banjir	Luas (ha)
Kel. Abepantai	2196.92	496.21	265.90	20.36	2979.39
Kel. Asano	2365.40	262.96	203.59	50.92	2882.87
Kel. Awiyo	1417.07	151.19	60.10	1.08	1629.43
Kel. Kota Baru	1122.94	95.38	5.90		1224.22
Kel. Vim	231.66	19.53	96.91	0.03	348.14
Kel. Wahno	339.94	22.64	73.99		436.57
Kel. Wai Mhorock	28.22	5.23	128.36	31.58	193.39
Kel. Yobe	1030.61	65.92	27.38	1.92	1125.82
Kp. Enggros	77.13	136.26	19.81	12.60	245.81
Kp. Koya Koso	6352.08	1389.17	470.54	10.40	8222.19
Kp. Nafri	4931.47	543.61	420.23	38.65	5933.97

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Tabel 2.7
Luas Rawan Banjir Distrik Heram (Ha)

Kelurahan/Kampung	Tidak Rawan	Rawan Banjir Rendah	Rawan Banjir Sedang	Rawan Banjir TInggi
Kel. Hedam	363.44	74.92	6.93	
Kel. Waena	9.90	23.92	15.99	
Kel. Yabansai	990.59	112.50	4.39	
Kp. Waena	972.51	30.69	112.32	52.88
Kp. Yoka	1200.19	44.57	61.17	36.50

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Kampung Waena dan Kampung Yoka memiliki potensi kerawanan banjir tinggi, sementara Kelurahan Hedam, Kelurahan Waena dan Kelurahan Yabansai berpotensi raan banjir rendah dan sedang.

Tabel 2.8
Luas Rawan Banjir Distrik Jayapura Selatan (Ha)

Kelurahan/Kampung	Tidak Rawan
Kel. Ardipura	2582.59
Kel. Argapura	105.03
Kel. Entrop	1124.22
Kel. Hamadi	170.36
Kel. Numbai	102.27
Kp. Tahima Soroma	4.88
Kp. Tobati	170.44

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Kelurahan dan Kampung di Distrik Jayapura Selatan seluruhnya tidak rawan banjir.

Tabel 2.9
Luas Rawan Banjir Distrik Jayapura Utara (Ha)

Kelurahan/Kampung	Tidak Rawan
Kel. Angkasapura	1.256,04
Kel. Bhayangkara	1.723,39
Kel. Gurabesi	1.467,96
Kel. Imbi	176,36
Kel. Mandala	56,24
Kel. Tanjung Ria	1.824,76
Kel. Trikora	124,61
Kp. Kayobatu	105,52

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Kelurahan dan kampung di Distrik Jayapura Utara seluruhnya tidak rawan banjir.

Tabel 2.10
Luas Rawan Banjir Distrik Muara Tami (Ha)

Kelurahan/Kampung	Tidak Rawan	Rawan Banjir Rendah	Rawan Banjir Sedang	Rawan Banjir TInggi
Kel. Koya Barat	747.91	720.11	1481.62	657.23
Kel. Koya Tengah	239.30	185.10	93.63	0.88
Kel. Koya Timur	3196.73	4162.91	1725.36	840.39
Kp. Holtekamp	286.83	443.40	779.46	95.56
Kp. Mosso	14366.15	5292.31	1691.33	145.99
Kp. Skouw Mabo	444.51	442.99	12.86	
Kp. Skouw Sae	423.38	1163.50	731.99	457.09
Kp. Skouw Yambe	1473.65	850.68	46.54	

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Kampung Skouw Mabo dan Skouw Yambe di Distrik Muara Tami tidak berpotensi rawan banjir tinggi.

4. Rawan Longsor

Luas rawan longsong berdasarkan kecamatan dimuat sebagai berikut:

Tabel 2.11
Luas Rawan Longsor Distrik Abepura (Ha)

Kelurahan/Kampung	Tidak	Rawan Longsor	Rawan Longsor	Rawan Longsor
Kel. Abepantai	1717.84	34.74	1226.82	
Kel. Asano	1589.55	158.84	1134.49	
Kel. Awiyo	753.50	232.39	643.54	
Kel. Kota Baru	694.07	2.79	527.36	
Kel. Vim	135.48		212.65	
Kel. Wahno	139.98		296.59	
Kel. Wai Mhorock	186.70		6.69	
Kel. Yobe	589.44	147.36	389.02	
Kp. Enggros	245.81			
Kp. Koya Koso	5657.48		2564.71	
Kp. Nafri	4072.48		1861.49	

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Seluruh kelurahan dan kampung di distrik Abepura tidak rawan longsor tinggi.

Tabel 2.12
Luas Rawan Longsor Distrik Heram (Ha)

Kelurahan/Kampung	Tidak Rawan	Rawan Longsor Rendah	Rawan Longsor Sedang	Rawan Longsor Tinggi
Kel. Hedam	171.94		273.36	
Kel. Waena	48.89		0.92	
Kel. Yabansai	312.14		795.33	
Kp. Waena	533.49		634.91	
Kp. Yoka	737.12		605.31	

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Seluruh kelurahan dan kampung di Distrik Heram tidak rawan longsor tinggi.

Tabel 2.13
Luas Rawan Longsor Distrik Jayapura Selatan (Ha)

Kelurahan/Kampung	Tidak Rawan	Rawan Longsor Rendah	Rawan Longsor Sedang	Rawan Longsor Tinggi
Kel. Ardipura	826.37		1756.22	
Kel. Argapura	38.70		66.33	
Kel. Entrop	466.54		657.69	
Kel. Hamadi	127.69		42.67	
Kel. Numbai	32.68		69.59	
Kp. Tahima Soroma	4.88			
Kp. Tobati	170.44			

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Seluruh kelurahan dan kampung di distrik Jayapura Selatan tidak rawan longsor tinggi.

Tabel 2.14
Luas Rawan Longsor Distrik Jayapura Utara (Ha)

Kelurahan/Kampung	Tidak Rawan	Rawan Longsor Rendah	Rawan Longsor Sedang	Rawan Longsor Tinggi
Kel. Angkasapura	237.23		234.31	784.50
Kel. Bhayangkara	508.96		899.53	314.90
Kel. Gurabesi	436.93		1031.02	
Kel. Imbi	50.50		125.86	
Kel. Mandala	53.86		2.38	
Kel. Tanjung Ria	319.75		368.11	1136.89
Kel. Trikora	36.00		88.61	
Kp. Kayobatu	69.42		36.09	

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Kelurahan Gurabesi, Kelurahan Imbi, Kelurahan Mandala, Kelurahan Trikora dan Kampung Kayubatu tidak berpotensi rawan longsor tinggi, namun seluruh kelurahan dan kampung berpotensi rawan longsor sedang.

Tabel 2.15
Luas Rawan Longsor Distrik Muara Tami (Ha)

Kelurahan/Kampung	Tidak Rawan	Rawan Longsor Rendah	Rawan Longsor Sedang	Rawan Longsor Tinggi
Kel. Koya Barat	3381.38		225.49	
Kel. Koya Tengah	335.69		183.21	
Kel. Koya Timur	8830.69		1094.70	
Kp. Holtekamp	1437.67		167.59	
Kp. Mosso	15248.54		6247.24	
Kp. Skouw Mabo	596.24		304.11	
Kp. Skouw Sae	2735.21		40.74	
Kp. Skouw Yambe	1526.76		844.11	

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Seluruh kelurahan dan kampung di Disrik Muara Tami tidak berpotensi rawan longsor tinggi, namun seluruhnya berpotensi rawan longsor sedang.

B. Daya Dukung dan Daya Tampung Air

1. Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Serta Penduduk Yang Terlampaui Kebutuhan Air

Status daya dukung dan daya tampung air diketahui dengan menghitung selisih antara ketersediaan air dan kebutuhan air. Status DDDTLH air diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu terlampaui dan belum terlampaui. Kategori terlampaui dipahami sebagai kondisi pada saat kebutuhan air melampaui/melebihi ketersediaannya. Sebaliknya, kategori belum terlampaui didefinisikan sebagai kondisi pada saat kebutuhan air masih lebih rendah dibandingkan ketersediaannya.

Pada tabel di bawah terlihat bahwa cadangan air secara alami pada tiap distrik masih aman.

Tabel 2.16
Ketersediaan Air Berdasarkan Cadangan (Prediksi Ekplorasi GIS)

DISTRIK	KELURAHAN/KAMPUNG	KETERSEDIAAN AIR (M^3/Tahun)
Distrik Abepura	Kel. Abepantai	381,233,278
	Kel. Asano	747,472,581
	Kel. Awiyo	289,787,170
	Kel. Kota Baru	289,315,318
	Kel. Vim	196,872,399
	Kel. Wahno	212,005,562
	Kel. Wai Mhorock	162,726,240
	Kel. Yobe	176,667,794
	Kp. Enggros	3,027,423,553
	Kp. Koya Koso	2,610,461,035
	Kp. Nafri	1,283,829,793
Distrik Heram	Kel. Hedam	164,177,502
	Kel. Waena	53,946,141
	Kel. Yabansai	680,784,898
	Kp. Waena	1,141,950,598
	Kp. Yoka	519,045,079
Distrik Jayapura	Kel. Ardipura	571,730,409
	Kel. Argapura	77,801,942
	Kel. Entrop	341,070,849
	Kel. Hamadi	137,050,416
	Kel. Numbai	49,062,677
	Kp. Tahima Soroma	316,157
	Kp. Tobati	894,523,472
Distrik Jayapura Utara	Kel. Angkasapura	284,220,157
	Kel. Bayangkara	212,061,177
	Kel. Gurabesi	147,569,651
	Kel. Imbi	322,946,110
	Kel. Mandala	55,788,511
	Kel. Tanjung Ria	844,148,688
	Kel. Trikora	82,805,336
	Kp. Kayobatu	23,564,508
Distrik Muara Tami	Kel. Koya Barat	1,868,345,628
	Kel. Koya Tengah	340,582,238
	Kel. Koya Timur	2,981,913,983
	Kp. Holtekamp	2,483,204,144
	Kp. Mosso	3,353,099,001
	Kp. Skouw Mabo	451,965,459
	Kp. Skouw Sae	885,443,850
	Kp. Skouw Yambe	617,599,057
Grand Total		34,608,522,088

Sumber KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Status Daya dukung dan daya tampung air berdasarkan yang telah tereskploitasi atau termanfaatkan melalui PDAM, tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.17
Standar Kebutuhan Air Domestik

No.	Kategori Kota	Jumlah Populasi Orang	Konsumsi Air (1/orang/hari)
1	Metropolitan	>1.000.000 capita	190
2	Large City	500.000-1.000.000	170
3	Medium City	100.000-500.000	150
4	Small City	20.000-100.000	130
5	Kecamatan/sub-regional city	3.000-20.000	100
6	Rural City	0-3.000	60

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

SNI kebutuhan air domestic untuk kota sedang sebesar 150 l/orang/hari.

Tabel 2.18
Potensi Ketersediaan Air Kota Jayapura yang Dapat Dimanfaatkan PDAM (Sumber RTRW 2013-2033)

No	Nama Intake	Debit Andalan (L/det)
1	Sungai APO	13
2	Sungai Anafre	34
3	Sungai Kloofkamp	242
4	Sungai Entrop	123
5	Sungai Kujabu	282
6	Sungai Hubai	135
7	Sungai Siborogonyi	140
8	Sungai Buper	5
9	Sungai Tami	26300
10	Danau Sentani	1850
11	Air tanah Dangkal	3
12	Mata Air	500
	Total	**29.627**

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Tabel 2.19
Kebutuhan Air Domestik dalam satuan liter/hari

Tahun	Kebutuhan Air (liter/hari)
2021	54,984,120.00
2022	56,012,323.04
2023	57,059,753.48
2024	58,126,770.88
2025	59,213,741.49
2026	60,321,038.46
2027	61,449,041.88

Tahun	Kebutuhan Air (liter/hari)
2028	62,598,138.96
2029	63,768,724.16
2030	64,961,199.30

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Ketersediaan air PDAM sebesar 81.302.400 liter/hari. Pada tabel di atas terlihat bahwa kebutuhan air terus meningkat dari tahun 2021 sampai tahun 2030, dimana meningkat dari 54.984.120 liter/hari menjadi 64,961,199.30 liter/hari. Data pada tabel di atas dengan catatan ketersediaan air akan konstan jika tidak ada perubahan penutupan lahan di hulu daerah resapan air dan tangkapan air, namun jika terjadi perubahan tutupan lahan maka krisis air Kota Jayapura akan mengalami percepatan sebelum tahun 2043. Analisis keutuhan air pada tabel di atas hanya dikaji untuk kebutuhan air domestik saja.

Tabel 2.20
Standar Kebutuhan Air Non Domestik

No.	Jenis Kegiatan	Standar Kebutuhan Air
1	Pertanian (Ha)	300 m3/ha/Tahun
2	Industri (Ha)	0,3 liter/detik/ha
3	Perdagangan dan Jasa	5 m3/hari/ha
4	Fasilitas Umum dan Sosial	30% kebutuhan domestik
5	Fasilitas Pemadam Kebakaran	14% kebutuhan domestik
6	Taman dan Lajur Hijau	3% kebutuhan domestik
7	Kehilangan Air	28% kebutuhan domestik

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Tabel pola ruang dijadikan dasar untuk menghitung kebutuhan air non domestik. Adapun kebutuhan air domestik disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.21
Kebutuhan Air Domestik

Tahun	Kebutuhan Air Domestik (m3/Tahun)
Jan 1, 2020	59,771.70
Jan 1, 2022	61,372.20
Jan 1, 2024	63,015.56
Jan 1, 2026	64,702.92
Jan 1, 2028	66,435.46
Jan 1, 2030	68,214.40
Jan 1, 2032	70,040.96
Jan 1, 2034	71,916.44
Jan 1, 2036	73,842.14
Jan 1, 2038	75,819.41
Jan 1, 2040	77,849.61
Jan 1, 2042	79,934.18
Jan 1, 2044	82,074.57
Jan 1, 2046	84,272.27
Jan 1, 2048	86,528.82
Jan 1, 2050	88,845.80
Jan 1, 2052	91,224.81

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Standar SNI kebutuhan air domestik untuk kota sedang adalah 150 l/orang/hari. Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa kebutuhan air domestic tahun 2022-2052 meningkat dari 61372,20 m3/tahun menjadi 91224,81 m3/Tahun pada akhir perencanaan. Laju pertumbuhan penduduk dalam lima tahun terakhir (2016-2020) adalah 6,65% dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebesar 398478 jiwa.

Kebutuhan Air Non Domestik:

Kebutuhan air non domestic terdiri dari Kebutuhan air pertanian, Kebutuhan air perdagangan dan jasa, Kebutuhan air fasilitas pemadam kebakaran, Kebutuhan air industry, Kebutuhan air fasilitas umum dan social, Kebutuhan air Taman dan Jalur hijau. Selain kebutuhan air domestic dan non domestik terdapat juga prediksi kehilangan air.

Tabel 2.22

Kebutuhan Air Non Domestik (M^3/Tahun)

Tahun	Kebutuhan Air Pertanian	Kebutuhan Air Perdagangan & Jasa	Kebutuhan Air Fasilitas Pemadam Kebakaran	Kebutuhan Air Industri	Kebutuhan Air Fasilitas Umum dan Sosial	Kebutuhan Air Taman & Jalur Hijau	Kehilangan Air
Jan 1, 2022	44,801,706,172.29	746,695,102.87	8,592.11	5,161,156,551.05	18,411.66	1,841.17	17,184.22
Jan 1, 2024	46,001,356,530.28	766,689,275.50	8,822.18	5,299,356,272.29	18,904.67	1,890.47	17,644.36
Jan 1, 2026	47,233,129,793.94	787,218,829.90	9,058.41	5,441,256,552.26	19,410.88	1,941.09	18,116.82
Jan 1, 2028	48,497,886,114.79	808,298,101.91	9,300.96	5,586,956,480.42	19,930.64	1,993.06	18,601.93
Jan 1, 2030	49,796,508,676.52	829,941,811.28	9,550.02	5,736,557,799.53	20,464.32	2,046.43	19,100.03
Jan 1, 2032	51,129,904,311.73	852,165,071.86	9,805.74	5,890,164,976.71	21,012.29	2,101.23	19,611.47
Jan 1, 2034	52,499,004,135.20	874,983,402.25	10,068.30	6,047,885,276.37	21,574.93	2,157.49	20,136.60
Jan 1, 2036	53,904,764,194.03	898,412,736.57	10,337.90	6,209,828,835.15	22,152.64	2,215.26	20,675.80
Jan 1, 2038	55,348,166,135.33	922,469,435.59	10,614.72	6,376,108,738.79	22,745.82	2,274.58	21,229.43
Jan 1, 2040	56,830,217,891.64	947,170,298.19	10,898.95	6,546,841,101.12	23,354.88	2,335.49	21,797.89
Jan 1, 2042	58,351,954,384.80	972,532,573.08	11,190.79	6,722,145,145.13	23,980.26	2,398.03	22,381.57
Jan 1, 2044	59,914,438,248.65	998,573,970.81	11,490.44	6,902,143,286.24	24,622.37	2,462.24	22,980.88
Jan 1, 2046	61,518,760,571.04	1,025,312,676.18	11,798.12	7,086,961,217.78	25,281.68	2,528.17	23,596.24
Jan 1, 2048	63,166,041,655.79	1,052,767,360.93	12,114.04	7,276,727,998.75	25,958.65	2,595.86	24,228.07
Jan 1, 2050	64,857,431,804.94	1,080,957,196.75	12,438.41	7,471,576,143.93	26,653.74	2,665.37	24,876.82
Jan 1, 2052	66,594,112,122.07	1,109,901,868.70	12,771.47	7,671,641,716.46	27,367.44	2,736.74	25,542.95

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Tabel 2.23
Total Kebutuhan Air dan Ketersediaan Air Eksplorasi GIS (M^3/Tahun)

Tahun	Total Kebutuhan Air Kota Jayapura (m3/Tahun)	Ketersediaan Air Eksplorasi (m3/Tahun)	Selisih Ekplorasi (m3/Tahun)
Jan 1, 2020	49,387,228,833.68	34,608,522,088.00	-14,778,706,745.68
Jan 1, 2022	50,709,665,227.56	34,608,522,088.00	-16,101,143,139.56
Jan 1, 2024	52,067,512,355.29	34,608,522,088.00	-17,458,990,267.29
Jan 1, 2026	53,461,718,406.21	34,608,522,088.00	-18,853,196,318.21
Jan 1, 2028	54,893,256,959.18	34,608,522,088.00	-20,284,734,871.18
Jan 1, 2030	56,363,127,662.52	34,608,522,088.00	-21,754,605,574.52
Jan 1, 2032	57,872,356,931.99	34,608,522,088.00	-23,263,834,843.99
Jan 1, 2034	59,421,998,667.60	34,608,522,088.00	-24,813,476,579.60
Jan 1, 2036	61,013,134,989.50	34,608,522,088.00	-26,404,612,901.50
Jan 1, 2038	62,646,876,993.67	34,608,522,088.00	-28,038,354,905.67
Jan 1, 2040	64,324,365,527.78	34,608,522,088.00	-29,715,843,439.78
Jan 1, 2042	66,046,771,987.83	34,608,522,088.00	-31,438,249,899.83
Jan 1, 2044	67,815,299,136.21	34,608,522,088.00	-33,206,777,048.21
Jan 1, 2046	69,631,181,941.49	34,608,522,088.00	-35,022,659,853.49
Jan 1, 2048	71,495,688,440.91	34,608,522,088.00	-36,887,166,352.91
Jan 1, 2050	73,410,120,625.77	34,608,522,088.00	-38,801,598,537.77
Jan 1, 2052	75,375,815,350.65	34,608,522,088.00	-40,767,293,262.65

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Laju pertumbuhan penduduk dalam lima tahun terakhir (2016-2020) adalah 6,65% dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebesar 398478 jiwa. Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan daya dukung air kota Jayapura telah terlampaui sejak tahun 2020–2052. Ketersedian dan kebutuhan air eksisting yang dimanfaatkan oleh PDAM:

Tabel 2.24
Potensi Ketersediaan Air Bersih Kota Jayapura yang Dapat Dimanfaatkan PDAM (Sumber RTRW 2013-2033)

No	Nama Intake	Debit Andalan (L/det)
1	Sungai APO	13
2	Sungai Anafre	34
3	Sungai Kloofkamp	242
4	Sungai Entrop	123
5	Sungai Kujabu	282
6	Sungai Hubai	135
7	Sungai Siborogonyi	140
8	Sungai Buper	5
9	Sungai Tami	26300
10	Danau Sentani	1850
11	Air tanah Dangkal	3
12	Mata Air	500
	Total	29.627

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Idealnya sebuah kota memerlukan kebutuhan air non domestic terdiri dari Kebutuhan air pertanian, Kebutuhan air perdagangan dan jasa, Kebutuhan air fasilitas pemadam kebakaran, Kebutuhan air industry, Kebutuhan air fasilitas umum dan social, Kebutuhan air Taman dan Jalur hijau. Selain kebutuhan air domestic dan non domestik terdapat juga prediksi kehilangan air. Namun kebutuhan air eksisting saat ini untuk di kota Jayapura adalah Kebutuhan air perdagangan dan jasa, Kebutuhan air fasilitas pemadam kebakaran, Kebutuhan air fasilitas umum dan social, dan Kebutuhan air Taman dan Jalur hijau.

Tabel 2.25
Kebutuhan Air Domestik dan Non Domestik (M3/Tahun)

Tahun	Kebutuhan Air Domestik (M3/Tahun)	Kebutuhan Air Non Domestik (M3/Tahun)
2022	61,372.20	50,709,603,855.36
2024	63,015.56	52,067,449,339.74
2026	64,702.92	53,461,653,703.29
2028	66,435.46	54,893,190,523.72
2030	68,214.40	56,363,059,448.12
2032	70,040.96	57,872,286,891.03
2034	71,916.44	59,421,926,751.16
2036	73,842.14	61,013,061,147.36
2038	75,819.41	62,646,801,174.27
2040	77,849.61	64,324,287,678.16
2042	79,934.18	66,046,692,053.65
2044	82,074.57	67,815,217,061.63
2046	84,272.27	69,631,097,669.22
2048	86,528.82	71,495,601,912.09
2050	88,845.80	73,410,031,779.97
2052	91,224.81	75,375,724,125.84

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Standar SNI kebutuhan air domestik untuk kota sedang adalah 150 l/orang/hari. Berdasarkan hasil simulasi di atas terlihat kebutuhan air pada Tahun 2022- 2052 meningkat lebih besar dari ketersediaan air, artinya telah terjadi krisis air di Kota Jayapura.

C. Daya Dukung Penyediaan Energi Pangan

Kapasitas kebutuhan pangan masyarakat dihitung berdasarkan rata–rata kebutuhan kalori per hari selama periode satu tahun yaitu 2500 kkal/hari. Kestersedian energi pangan Kota Jayapura 26.408.123,923 kkal/tahun dan kebutuhan energy pangan 130.694.000

kkal/tahun, sehingga selisih energy pangan kota Jayapura sebesar 26.277.429.923 kkal/tahun (RPPLH Papua Final, 2022). Produksi pangan kota Jayapura adalah : padi (5846,87 ton), ubi jalar (618,24 ton), dan sagu (742,50 ton).

Tabel 2.26
Ketersediaan Pangan Tiap Distrik

Distrik	Ketersedian Pangan (Kkal/Thn)
Distrik Abepura	3,388,587,865
Distrik Heram	56,038,942
Distrik Jayapura Selatan	24,016,689
Distrik Jayapura Utara	96,066,757
Distrik Muara Tami	22,585,634,549
Grand Total	26,408,123,934

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Berdasarkan tabel di bawah, terlihat prediksi kebutuhan pangan penduduk Kota Jayapura. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebutuhan pangan penduduk Distrik Abepura tertinggi dan terendah adalah Distrik Muara Tami.

Tabel 2.27
Kebutuhan Pangan Tiap Distrik

Tahun	Keb. Pangan Japut	Keb. Pangan Japsel	Keb. Pangan Abepura	Keb. Pangan Muara Tami	Keb. Pangan Heram
2021	16,840,950.00	21,192,916.67	22,107,733.33	3,397,000.00	11,864,595.83
2023	17,476,690.64	21,992,942.70	22,942,293.41	3,525,235.70	12,312,480.65
2025	18,136,430.30	22,823,169.47	23,808,357.88	3,658,312.25	12,777,272.98
2027	18,821,074.92	23,684,737.04	24,707,116.01	3,796,412.41	13,259,611.07
2029	19,531,564.66	24,578,828.52	25,639,801.98	3,939,725.80	13,760,157.28
2031	20,268,875.17	25,506,671.68	26,607,696.55	4,088,449.22	14,279,598.95
2033	21,034,018.93	26,469,540.63	27,612,128.85	4,242,786.91	14,818,649.38
2035	21,828,046.62	27,468,757.58	28,654,478.15	4,402,950.81	15,378,048.80
2037	22,652,048.61	28,505,694.67	29,736,175.82	4,569,160.83	15,958,565.38
2039	23,507,156.43	29,581,775.80	30,858,707.24	4,741,645.24	16,560,996.27
2041	24,394,544.29	30,698,478.67	32,023,613.87	4,920,640.88	17,186,168.75
2043	25,315,430.78	31,857,336.72	33,232,495.37	5,106,393.54	17,834,941.29
2045	26,271,080.44	33,059,941.31	34,487,011.77	5,299,158.32	18,508,204.80

Tahun	Keb. Pangan Japut	Keb. Pangan Japsel	Keb. Pangan Abepura	Keb. Pangan Muara Tami	Keb. Pangan Heram
2047	27,262,805.59	34,307,943.84	35,788,885.77	5,499,199.90	19,206,883.79
2049	28,291,968.05	35,603,058.09	37,139,905.11	5,706,792.99	19,931,937.70
2051	29,359,981.07	36,947,062.49	38,541,925.02	5,922,222.66	20,684,362.17
2053	30,468,311.25	38,341,802.65	39,996,870.74	6,145,784.73	21,465,190.43

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

D. Daya Dukung Keanekaragaman Hayati

1. Daya Dukung Kelestarian Hutan

Daya dukung kelestarian hutan didekati dengan daya dukung fungsi lindung yang menggambarkan alokasi fungsi lindung di suatu wilayah. Alokasi fungsi lindung tersebut ditentukan berdasarkan alokasi fungsi ruang yang terdapat dalam pola ruang wilayah. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan buatan. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan (Muta'ali, 2003).

Kasus alih fungsi lahan terjadi pada beberapa wilayah yang terdapat di Kota Jayapura. Alih fungsi lahan yang terjadi dapat berdampak pada penurunan fungsi beberapa jenis ekosistem seperti hutan lindung, mangrove, pantai, daerah aliran sungai, bencana alam (banjir dan kekeringan) serta konflik sosial yang dapat mengancan keberlangsungan hidup dari makhluk hidup yang ada, maka perlu dilakukan kajian terhadap daya dukung fungsi lindung yang ada di Kota Jayapura. Daya dukung fungsi lindung (DDL), memiliki kisaran nilai antara 0 (minimal) sampai 1 (maksimal). Oleh karena itu, semakin mendekati nilai 1, semakin baik fungsi lindung yang ada dalam wilayah tersebut.

Analisis daya dukung fungsi lindung di Kota Jayapura dihitung berdasarkan per wilayah administrasi, yaitu tiap distrik yang berada di Kota Jayapura. Hasil perhitungan daya dukung fungsi lindung yang dilakukan disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.28
Pola Ruang Kota Jayapura (Berdasarkan RTRW 2013-2033) (Ha)

POLA RUANG	Distrik Abepura	Distrik Heram	Distrik Jayapura Selatan	Distrik Jayapura Utara	Distrik Muara Tami	Grand Total
Cagar Alam		1290.04	2632.83	5771.14		9694.02
Hutan Lindung	567.82	119.66	116.93		5546.24	6350.64
Cagar Budaya	43.06	16.22	1.75		271.90	332.92
Resapan Air	1533.68	642.37	319.08	809.19	3238.18	6542.50
RTH Perlindungan	6.39	33.14	98.42	166.43	215.15	519.54
RTH Sempadan Jalan	48.90	1.84	21.46	0.43	7.61	80.24
RTH Sempadan Sungai	362.48	33.33	10.03	124.72	2302.27	2832.83
Ruang Terbuka Hijau	15.27	29.11	17.80	13.17		75.36
Sempadan Danau	49.97	192.15			12.76	254.89
Sempadan Pantai					116.12	116.12
Sungai	2.44		1.26	5.46	553.85	563.01
Hutan Kota Botani	598.09					598.09
Taman Wisata	127.93		180.34			308.26
Danau	50.11	1222.13			7.03	1279.26
Gambut					1175.92	1175.92
Hutan Kota	400.16	305.35	795.82	381.21	82.56	1965.09
Hankam	10.75	16.81	30.10	11.48	51.80	120.93
Hortikultura	69.58				191.36	260.95
Hutan Produksi	5769.83	921.07		1857.83	1752.67	10301.40
Hutan Produksi	12410.97	2909.93			2951.66	18272.56
Hutan Produksi Tetap	1710.89	198.09			15673.25	17582.22
Industri	5.83	7.32	16.80	1.00		30.95
Kesehatan	4.71	3.57	0.86	7.20	9.67	26.01
Pantai			11.09	9.95		21.04
Pariwisata	1.53			66.14	47.63	115.30
Pendidikan	74.53	55.02	11.22	21.65	2.25	164.67
Perdagangan dan Jasa	81.70	18.40	65.02	32.69	187.22	385.03
Peribadatan	19.62	6.47	8.44	16.24		50.77
Perikanan	2.43				893.38	895.82
Perkantoran	32.72	23.01	15.80	64.74		136.27
Perkebunan	1151.47				1330.31	2481.78

POLA RUANG	Distrik Abepura	Distrik Heram	Distrik Jayapura Selatan	Distrik Jayapura Utara	Distrik Muara Tami	Grand Total
Perkuburan	13.61	2.09	0.87	1.13		17.70
Permukiman Kepadatan Rendah	275.50	10.84	11.77		667.36	965.46
Permukiman Kepadatan Sedang	599.22	300.16	273.39	309.94	2214.55	3697.27
Permukiman Kepadatan Tinggi	92.58		118.30	134.97		345.85
Pertambangan		14.63	12.98			27.61
Pertanian Tanaman		0.00			2766.68	2766.68
Peternakan					175.95	175.95
Ruang Terbuka Non	0.10		2.35	0.85		3.30
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	17.24					17.24
Grand Total	26151.11	8372.78	4774.69	9807.56	42445.31	91551.45

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data-data daya dukung fungsi lindung di tiap distrik, pada Kota Jayapura memperlihatkan nilai tertinggi terdapat pada Distrik Jayapura Utara dengan nilai sebesar 0,867. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hampir mendekati angka 1 yang artinya semakin baik fungsi lindung di wilayah tersebut. Sedangkan untuk nilai terendah untuk fungsi lindung di Kota Jayapura yaitu Distrik Muara Tami dengan nilai sebesar 0,665. Namun nilai yang didapatkan oleh Distrik Muara Tami hampir masih mendekati angka satu, sehingga distrik ini dapat dikatakan memiliki fungsi lindung yang baik. Secara keseluruhan daya dukung fungsi lindung di kota Jayapura dalam keadaan baik karena nilainya mendekati 1 yaitu 0.707.

E. Daya Dukung dan Daya Tampung Demografis

Daya Dukung Demografis adalah kemampuan untuk mendistribuskan penduduk ke suatu daerah tertentu. Daya dukung demografi ini berhubungan dengan ketersediaan lahan. Lahan merupakan bagian dari bentang alam (landscape) yang mencakup pengertian lingkungan fisik termasuk iklim, topografi atau relief, hidrologi bahkan keadaan alami (natural vegetation) yang semuanya

secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan. Lahan dalam pengertian yang lebih luas termasuk yang telah dipengaruhi oleh berbagai aktifitas manusia baik di masa lalu maupun pada masa sekarang. Dalam usaha melakukan penyebaran penduduk dari daerah padat ke daerah yang kurang diperlukan perhatian terhadap penyediaan lahan. Untuk melihat apakah luas lahan yang ada di tiap kecamatan pada Kota Jayapura telah sesuai dengan jumlah penduduk yang ada, maka dapat digunakan perhitungan daya dukung demografis. Hasil perhitungan daya dukung kemudian dibandingkan dengan standar konsumsi lahan sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.29
Standar Kebutuhan Lahan Menurut Jumlah Penduduk (Yeates)

Penduduk (jiwa)	Nilai Daya Tampung (ha/jiwa)
10.000	0,1
25.000	0,091
50.000	0,086
100.000	0,076
250.000	0,07
500.000	0,066
1.000.000	0,061
2.000.000	0,057

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Berdasarkan perhitungan daya dukung daya tampung demografis, maka didapatkan daya dukung demografis di setiap kecamatan di Kota Jayapura sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah.

Tabel 2.30
Daya Dukung Demografis/Lahan di Distrik Kota Jayapura

No	Distrik	Luas Wilayah (km2)	Luas wilayah (ha) 1Km2=100ha	Jumlah Penduduk	Daya Dukung Lahan (Ha/Jiwa)
1	Abepura	156	15,600.00	123,392	0.126426
2	Heram	63	6,300.00	66,221	0.095136
3	Jayapura Selatan	43	4,300.00	101,726	0.04227
4	Jayapura Utara	51	5,100.00	93,996	0.054258
5	Muara Tami	627	62,700.00	18,960	3.306962

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Berdasarkan Tabel di atas bahwa daya dukung demografis (lahan) yang memiliki nilai tertinggi pada Distrik Muara Tami dengan nilai sebesar 3,307 ha/jiwa dan untuk nilai terendah terdapat pada distrik Jayapura Selatan sebesar 0,0422 ha/jiwa. Hal tersebut terlihat bahwa daya dukung demografis berbanding lurus dengan luas lahan yang ada dan berbading terbalik dengan jumlah penduduk. Artinya jika semakin banyak jumlah penduduk pada luas lahan yang sama maka daya dukung demografis akan kecil dan berlaku sebaliknya sehingga pada suatu wilayah dengan jumlah penduduk besar maka luas lahanya juga harus lebih besar.

Berdasarkan data, secara keseluruhan dari hasil analisis di atas untuk daya dukung dan daya tamping demografis tiap distrik di Kota jayapura terdapat beberapa daerah yang sudah melampaui batas daya tamping yaitu Distrik Jayapura Utara dan Distrik Jayapura Selatan. Daya Tampung Distrik Jayapura Utara dan Jayapura Selatan masing-masing sebesar 66 234 jiwa dan 61429 jiwa. Defisit daya tamping demografis distrik Jayapura Utara dan distrik Jayapura Selatan masing–masing sebesar -27762 jiwa dan – 40297 jiwa. Sebaliknya Distrik yang yang masih memenuhi daya tamping yaitu Distrik Abe, Distrik Heram dan Distrik Muara Tami. Tabel di bawah ini adalah hasil perhitungan daya dukung dan daya tampung demografis tiap distrik di Kota Jayapura.

Tabel 2.31
Daya Dukung Lahan Tiap Distrik

No	Distrik	Luas Wilayah (km2)	Luas wilayah (ha) 1Km2=100 ha	Jumlah Penduduk	Daya Dukung Lahan (Ha/Jiwa)	Standar Kebutuhan Lahan per jiwa (Ha/Jiwa)	Daya Tampung (Jiwa)	Defisit/ Surplus (Jiwa)	Keterangan Daya Tampung
1	Abepura	156	15,600.00	123,392	0.126426	0.075	208,000.00	84,608.00	Surplus (Memenuhi)
2	Heram	63	6,300.00	66,221	0.095136	0.083	75,903.61	9,682.61	Surplus (Memenuhi)
3	Jayapur a Selatan	43	4,300.00	101,726	0.04227	0.070	61,428.57	(- 40,297.43)	Defisit (Tidak Memenuhi)
4	Jayapur a Utara	51	5,100.00	93,996	0.054258	0.077	66,233.77	(- 27,762.23)	Defisit (Tidak Memenuhi)
5	Muara Tami	627	62,700.00	18,960	3.306962	0.095	660,000.00	641,040.00	Surplus (Memenuhi)

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

F. Daya Dukung Pemukiman

Daya dukung wilayah untuk permukiman dapat diartikan sebagai kemampuan wilayah dalam menyediakan lahan permukiman guna menampung jumlah penduduk tertentu bertempat tinggal secara layak (Muta'ali, 2015). Dalam menentukan luas layak permukiman, erat hubunganya dengan kebijakan penyediaan perumahan. Terdapat beberapa lokasi yang tidak dapat dibangun, terdiri dari kawasan lindung, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan rawan bencana longsor. Kawasan lindung yaitu berupa daerah perlindungan setempat, cagar budaya, sempadan sungai dan lain-lain. Kemudian untuk kawasan rawan bencana alam meliputi rawan bencana banjir. Pada tabel di bawah disajikan luas layak permukiman yang terdapat pada tiap kecamatan di Kota Jayapura.

Tabel 2.32
Luas Layak Pemukiman dan Daya Dukung Pemukiman
Tiap Distrik di Kota Jayapura

No	Distrik	Luas Wilayah (km2)	Luas Wilayah (m2) (1ha = 10000 m2)	Luas Layak Pemukiman (ha)	Luas Layak Pemukiman (M2)	Koef/Luas Kebutuhan (M2/Kapita)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kapita Yang Layak (Kapit	Daya Dukung Pemukiman (Kapita/Jiwa)	Keterangan
1	Abepura	156	156.000.000,00	145,26	1.452.631,12	26	123.392	55,870	0,45	Tidak Memenuhi
2	Heram	63	63.000.000,00	705,09	7.050.895,80	26	66.221	271.188	4,10	Memenuhi
3	Jayapura Selatan	43	43.000.000,00	297,94	2.979.441,10	26	101.726	114.594	1,13	Memenuhi
4	Jayapura Utara	51	51.000.000,00	365,62	3.656.163,18	26	93.996	140.622	1,50	Memenuhi
5	Muara Tami	627	627.000.000,00	793,34	7.933.404,48	26	18.960	305.131	16,09	Memenuhi

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Dari hasil GIS di atas didapatkan hasil untuk luas layak permukiman tertingi pada Distrik Muara Tami dengan nilai sebesar 793,34 hektar. Sedangkan distrik yang memiliki luas layak permukiman terendah terdapat pada distrik Abepura dengan nilai sebesar 145,26 hektar.

Dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, Kota Jayapura harus memiliki strategi pengembangan kawasan perumahan baru pada areal tanah yang masih kosong baik yang dimiliki oleh pemerintah, swasta maupun lahan miliki masyarakat. Kebijakan konsep pengembangan rumah baru yaitu alokasi ruang untuk perumahan swadaya, perumahan formal, dan perumahan vertikal.

Setelah luas layak permukiman tiap distrik yang ada di Kota Jayapura diketahui, maka dapat dihitung daya dukung permukiman pada tiap distrik. Berdasarkan hasil perhitungan daya dukung permukiman yang disajikan dalam Tabel di atas bahwa hampir seluruh distrik yang terdapat pada Kota Jayapura mampu mendukung penduduk untuk bermukim kecuali untuk Distrik Abepura tidak mendukung untuk penduduk bermukim. Artinya dalam hal ini nilai daya dukung permukiman yang didapatkan lebih dari 1.

Nilai daya dukung permukiman tertinggi terdapat pada distrik Muara Tami sebesar 16,09 kapita/jiwa, sedangkan nilai daya dukung permukiman terendah terdapat pada Distrik Abepura sebesar 0,45 kapita/jiwa.

G. Daya Dukung Karbon

Menurunnya Jasa pengatur Iklim di Kota Jayapura dipengaruhi oleh menurunnya kandungan karbon pada vegetasi. Berikut adalah kondisi kandungan Karbon di lima distrik di Kota Jayapura.

Tabel 2.33
Cadangan Karbon Per Hektar Untuk 22 Tipe Penutupan Lahan Skala Nasional

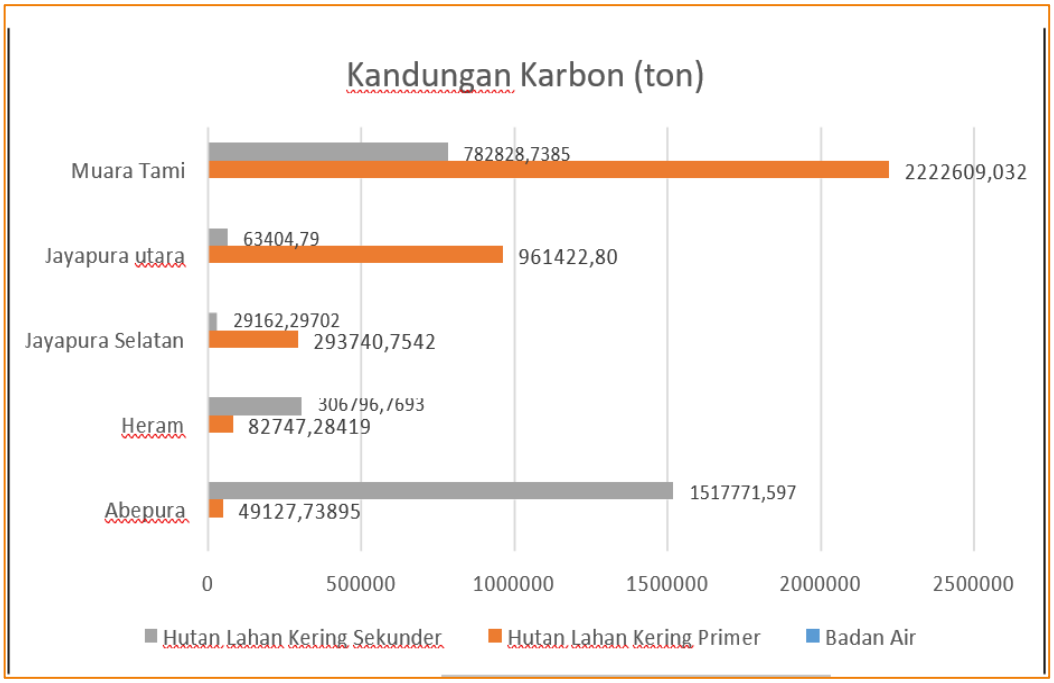
No	Kelas Penutupan Lahan	Kode	Kandungan Karbon (C ton/Ha)	Sumber Data
1	Hutan Lahan Kering Primer	HP	132,99	NFI (1996-2013),2014
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	Hs	98,84	NFI (1996-2013),2014
3	Hutan Mangrove Primer	Hmp	188,3	Litbanghut,2014
4	Hutan Rawa Primer	Hrp	96,35	NFI (1996-2013),2014

No	Kelas Penutupan Lahan	Kode	Kandungan Karbon (C ton/Ha)	Sumber Data
5	Hutan Tanaman	Ht	98,38	Litbanghut,2014
6	Semak/Belukar	B	30	Juknis PEP RAD GRK,2013
7	Perkebunan	Pk	63	Juknis PEP RAD GRK,2013
8	Permukiman	Pm	4	Juknis PEP RAD GRK,2013
9	Lahan Terbuka	T	2,5	Juknis PEP RAD GRK,2013
10	Savanna	S	4	Juknis PEP RAD GRK,2013
11	Tubuh Air	A	0	Juknis PEP RAD GRK,2013
12	Hutan Mangrove Sekunder	Hms	94,07	Litbanghut,2014
13	Hutan Rawa Sekunder	Hrs	79,67	Juknis PEP RAD GRK,2013
14	Belukar Rawa	Br	30	Juknis PEP RAD GRK,2013
15	Pertanian Lahan Kering	Pt	10	Juknis PEP RAD GRK,2013
16	Pertanian Lahan Kering Campur	Pc	30	Juknis PEP RAD GRK,2013
17	Sawah	Sw	2	Juknis PEP RAD GRK,2013
18	Tambak	Tm	0	Juknis PEP RAD GRK,2013
19	Bandara/Pelabuhan	Bdr	0	Juknis PEP RAD GRK,2013
20	Transmigrasi	Tr	10	Juknis PEP RAD GRK,2013
21	Pertambangan	Tb	0	Juknis PEP RAD GRK,2013
22	Rawa	Rw	0	Juknis PEP RAD GRK,2013

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

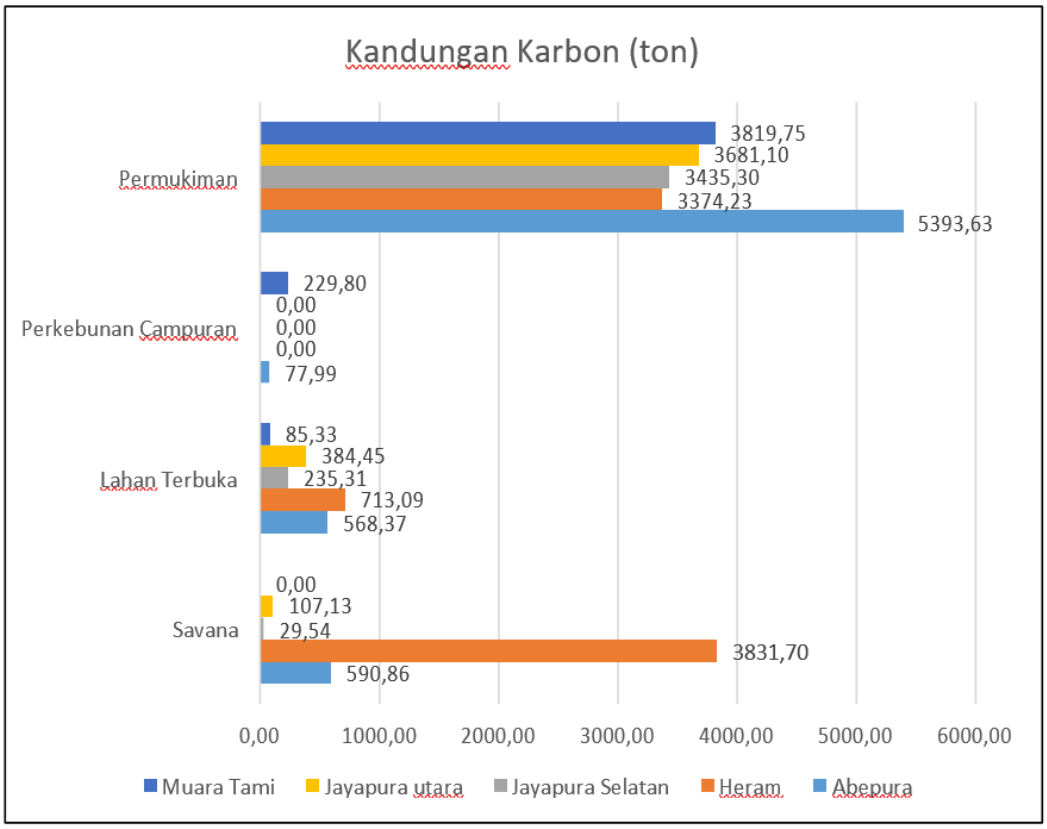
Kandungan karbon pada hutan lahan kering sekunder tertinggi di distrik Abepura sebesar 1.517.771,597 ton dan terendah di distrik Jayapura Selatan. Kandungan Karbon pada hutan lahan kering primer tertinggi di distrik Muara Tami sebesar 2.222.609,032 ton.

Gambar 2.5.
Kandungan karbon Tiap Distrik



Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

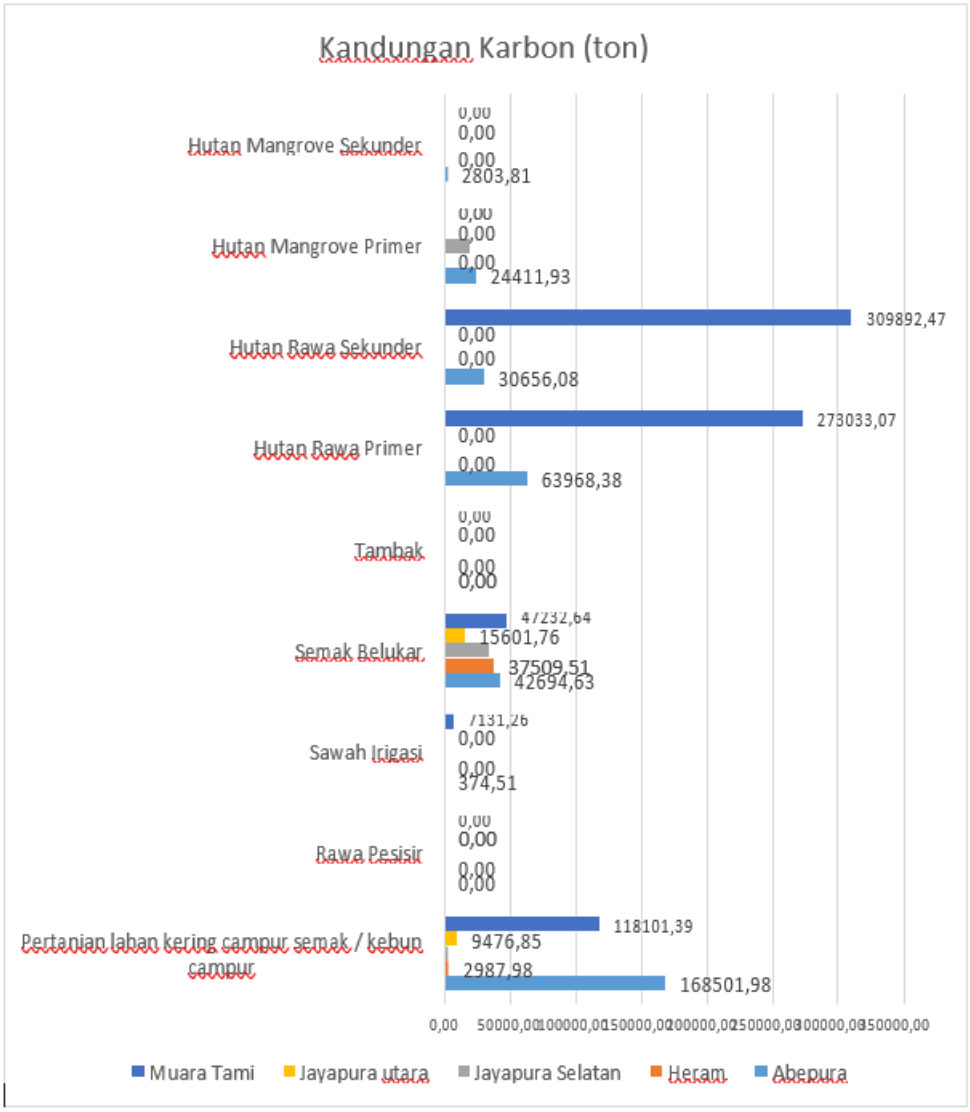
Lanjutan Kandungan Karbon Tiap Distrik



Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Kandungan karbon di kawasan pemukiman tertinggi di distrik Abepura sebesar 5393,63 ton. Kandungan karwon di perkebunan campuran tertinggi di distrik Muara Tami sebesar 229,80 ton. Kandungan karbon pada lahan terbuka tertinggi di distrik Heram sebesar 713,09 ton. Kandungan karbon pada Savana tertinggi di distrik Heram sebesar 3831,70 ton.

Lanjutan Kandungan Karbon Tiap Distrik



Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Kandungan karbon di hutan mangrove sekunder tertinggi di distrik Abepura sebesar 2803,81 ha. Kandungan karbon di hutan mangrove primer tertinggi di distrik Abepura. Kandngan karbon di hutan rawa primer tertinggi di distrik Muara Tami. Kandungan Karbon di semak belukar tertinggi di distrik Muara Tami sebesar 47232,64 ton. Kandungan karbon di sawah irigasi tertinggi di distrik Muarat Tami sebesar 7131,26 ton. Kandungan karbon di kawasan pertanian lahan kering campur semak/kebun campur tertinggi di distrik Abepura sebesar 168501,98 ton.

H. Daya Dukung dan Daya Tampung Pencemaran Lingkungan Hidup

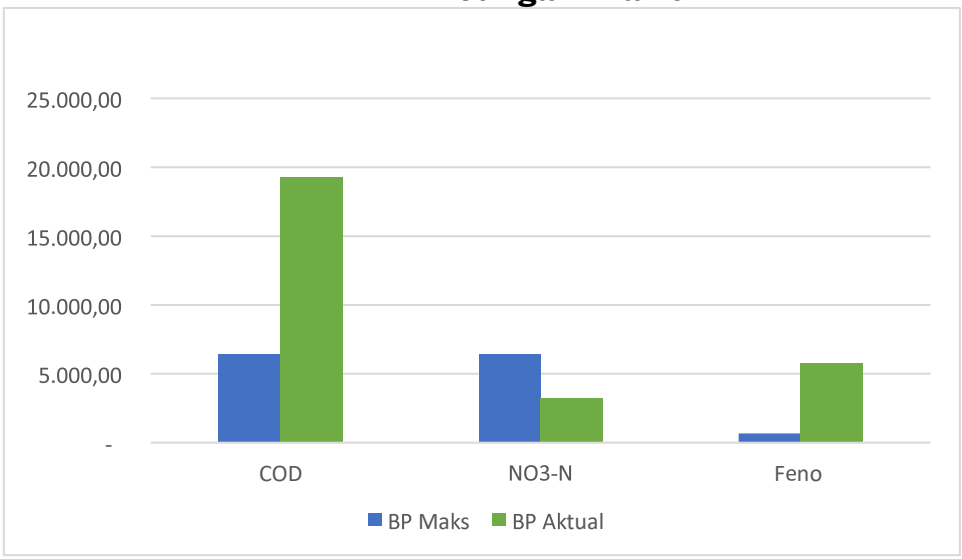
Tabel 2.34
Beban Pencemaran Di Hilir Sungai Anafre (Ton/Bulan)

No	Parameter	BP Maks	BP Aktual
	A.Pemerikaan Fisika/ Lapangan		
1	Zat Padat Terlarut (TDS) mg/L	642,971.52	167,172.60
2	Zat Padat Tersuspensi (TSS) mg/L	32,148.58	88,087.10
	B. a.pemeriksaan kimia Anorganik bukan logam	-	-
3	pH		
4	Bichemical Oxygen Demand (BOD) mg/L	1,285.94	2,443.29
5	Chemical Oxygen Demand (COD) mg/L	6,429.72	19,289.15
6	Dissolved Oxygen (DO) mg/L		-
7	Ammonia sebagai (NH3-N) mg/L	321.49	295.77
8	Chlorida (Cl) mg/L	385,782.91	16,074.29
9	Flourida (F) mg/L	321.49	257.19
10	Nitrat sebagai (NO3-N) mg/L	6,429.72	3,279.15
11	Phosphat sebagai (PO4-P) mg/L	128.59	771.57
12	Sulfida (S-H2S) mg/L	1.29	4.50
	B.b.Pemeriksaan kimia Anorganik Logam Terlarut	-	-
13	Besi (Fe) mg/L	192.89	23.79
14	Chromium (Cr valensi 6) mg/L	32.15	31.51
15	Zinc (Zn) mg/L	32.15	53.37
	C. Pemeriksaan Kimia Organik		
16	Detergen sebagai MBAS (µg/L)	128,594.30	41,150.18
17	Minyak/lemak (µg/L)	642,971.52	176,817.17
18	Senyawa Fenol sebagai Fenol (µg/L)	642.97	5,786.74

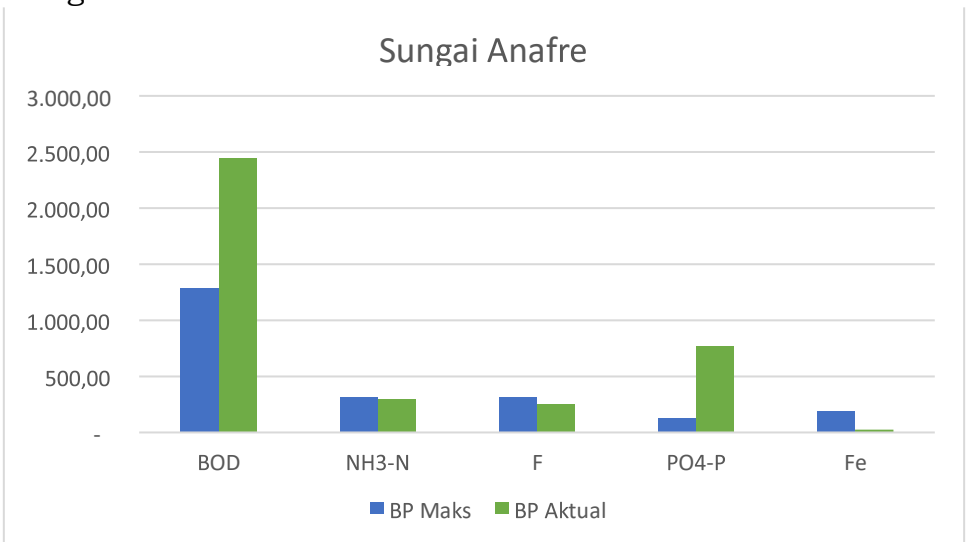
Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Hasil analisis beban pencemaran pada Sungai Anafre menunjukkan bahwa beban pencemaran actual lebih besar dari beban pencemaran actual untuk parameter COD dan Fenol. Hal ini menunjukkan bahwa Sungai Anafre telah tercemar oleh para meter COD dan Fenol. Gambar di atas menunjukkan baahwa Sungai Anafre belum tercemar oleh parameter NO3-N.

Gambar 2.6.
Beban Pencemaran Maksimum dan Beban Pecemaran Aktual Sungai Anafre



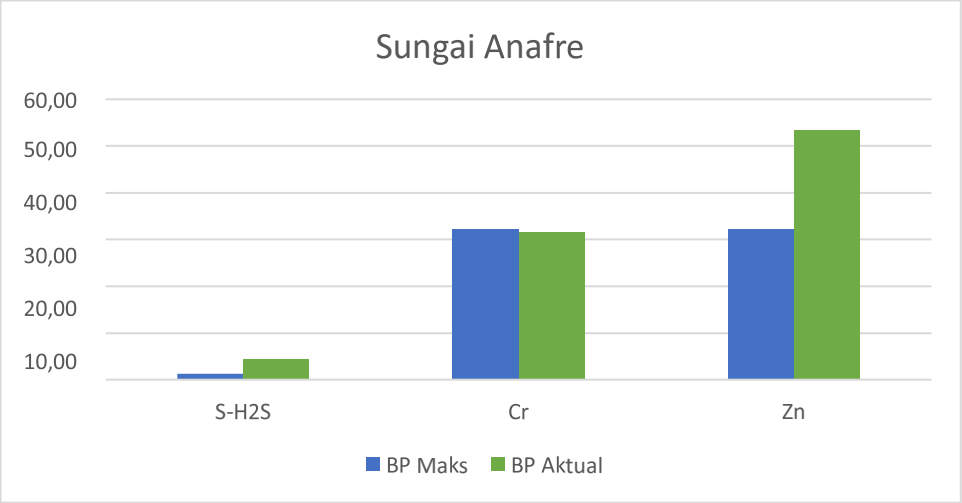
Lanjutan Beban Pencemaran Maksimum dan Beban Pecemaran Aktual Sungai Anafre



Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Gambar di atas menunjukkan bahwa sungai Anafre telah tercemar oleh parameter BOD, PO4-P oleh karena beban pencemaran actual lebih besar ari beban pencemaran maksimum.

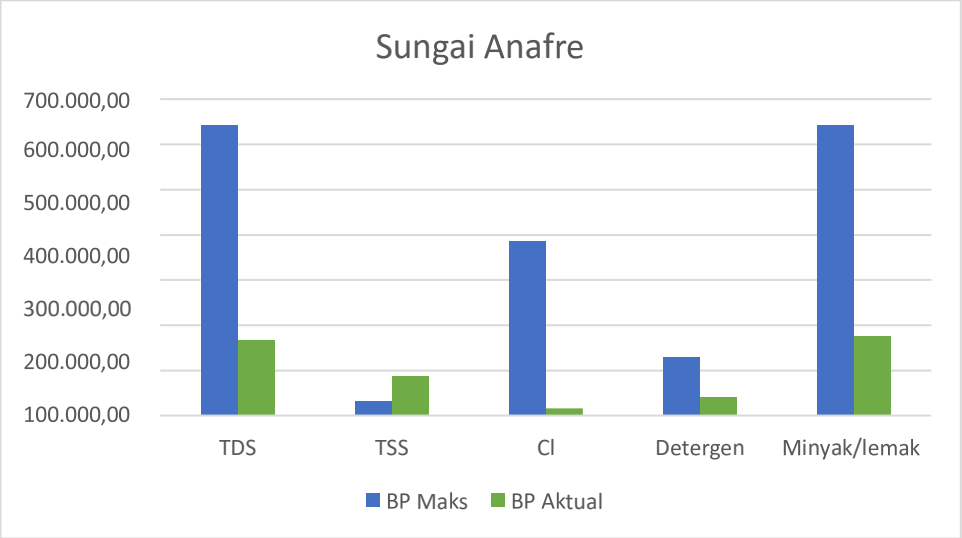
Lanjutan Beban Pencemaran Maksimum dan Beban Pecemaran Aktual Sungai Anafre



Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Gambar di atas menunjukkan bahwa Sungai Anafre telah tercemar parameter S-H2S dan Zn.

Lanjutan Beban Pencemaran Maksimum dan Beban Pecemaran Aktual Sungai Anafre



Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Berdasarkan table dan gambar di atas parameter yang telah melebihi beban pencemaran maksimum adalah COD, Fenol, BOD, PO4-P, S-H2S, Zn, dan TSS. Artinya bahwa sungai Anafre telah tercemar oleh parameter COD, Fenol, BOD, PO4-P, S- H2S, Zn, dan TSS.

Tabel 2.35
Beban Pencemaran di Hilir Hanyaan (Ton/Bulan)

No	Parameter	BP Maks	BP Aktual
	A.Pemerikaan Fisika/ Lapangan		
1	Zat Padat Terlarut (TDS) mg/L	190,434.24	115,022.28
2	Zat Padat Tersuspensi (TSS) mg/L	9,521.71	18,091.25
	B. a.pemeriksaan kimia Anorganik bukan logam	-	-
3	pH		-
4	Bichemical Oxygen Demand (BOD) mg/L	380.87	685.56
5	Chemical Oxygen Demand (COD) mg/L	1,904.34	6,665.20
6	Dissolved Oxygen (DO) mg/L		-
7	Ammonia sebagai (NH3-N) mg/L	95.22	704.61
8	Chlorida (Cl) mg/L	114,260.54	44,561.61
9	Flourida (F) mg/L	95.22	194.24
10	Nitrat sebagai (NO3-N) mg/L	1,904.34	399.91
11	Phosphat sebagai (PO4-P) mg/L	38.09	209.48
12	Sulfida (S-H2S) mg/L	0.38	1.14
	B.b.Pemeriksaan kimia Anorganik Logam Terlarut	-	-
13	Besi (Fe) mg/L	57.13	8.76
14	Chromium (Cr valensi 6) mg/L	9.52	8.38
15	Zinc (Zn) mg/L	9.52	11.43
	C. Pemeriksaan Kimia Organik	-	-
16	Detergen sebagai MBAS (µg/L)	38,086.85	17,139.08
17	Minyak/lemak (µg/L)	190,434.24	80,934.55
18	Senyawa Fenol sebagai Fenol (µg/L)	190.43	1,333.04

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Parameter – parameter yang telah melebihi beban pencemaran maksimum adalah TSS, BOD, COD, F, PO4-P, S-H2S, Zn dan Fenol. Artinya bahwa sungai Hanyaan telah tercemar oleh parameter TSS, BOD, COD, F, PO4-P, S-H2S, Zn dan Fenol.

Tabel 2.36
Beban Pencemaran di Hilir Kali Acai (Ton/Bulan)

NO	Parameter	BP Maks	BP Aktual
	A.Pemerikaan Fisika/ Lapangan		
1	Zat Padat Terlarut (TDS) mg/L	268,323.84	162,067.60
2	Zat Padat Tersuspensi (TSS) mg/L	13,416.19	25,490.76
	B. a.pemeriksaan kimia Anorganik bukan logam	-	-
3	pH		-
4	Bichemical Oxygen Demand (BOD) mg/L	536.65	965.97
5	Chemical Oxygen Demand (COD) mg/L	2,683.24	9,391.33
6	Dissolved Oxygen (DO) mg/L		-
7	Ammonia sebagai (NH3-N) mg/L	134.16	992.80
8	Chlorida (Cl) mg/L	160,994.30	62,787.78
9	Flourida (F) mg/L	134.16	273.69
10	Nitrat sebagai (NO3-N) mg/L	2,683.24	563.48
11	Phosphat sebagai (PO4-P) mg/L	53.66	295.16
12	Sulfida (S-H2S) mg/L	0.54	1.61
	B.b.Pemeriksaan kimia Anorganik Logam Terlarut	-	-
13	Besi (Fe) mg/L	80.50	12.34
14	Chromium (Cr valensi 6) mg/L	13.42	11.81
15	Zinc (Zn) mg/L	13.42	16.10
	C. Pemeriksaan Kimia Organik	-	-
16	Detergen sebagai MBAS (µg/L)	53,664.77	24,149.15
17	Minyak/lemak (µg/L)	268,323.84	114,037.63
18	Senyawa Fenol sebagai Fenol (µg/L)	268.32	1,878.27

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Parameter–parameter yang telah melebihi beban pencemaran maksimum adalah TSS, BOD, COD, NH3, F, PO4-P, S-H2S, Zn dan Fenol. Artinya bahwa sungai Kali Acai telah tercemar oleh parameter TSS, BOD, COD, NH3, F, PO4-P, S-H2S, Zn dan Fenol.

Tabel 2.37
Beban Pencemaran di Hilir Siborgonyi (Ton/Bulan)

No	Parameter	BP Maks	BP Aktual
	A.Pemerikaan Fisika/ Lapangan		
1	Zat Padat Terlarut (TDS) mg/L	128,589.12	77,667.83
2	Zat Padat Tersuspensi (TSS) mg/L	6,429.46	12,215.97
	B. a.pemeriksaan kimia Anorganik bukan logam	-	-
3	pH		-
4	Bichemical Oxygen Demand (BOD) mg/L	257.18	462.92
5	Chemical Oxygen Demand (COD) mg/L	1,285.89	4,500.62
6	Dissolved Oxygen (DO) mg/L		-
7	Ammonia sebagai (NH3-N) mg/L	64.29	475.78
8	Chlorida (Cl) mg/L	77,153.47	30,089.85
9	Flourida (F) mg/L	64.29	131.16
10	Nitrat sebagai (NO3-N) mg/L	1,285.89	270.04
11	Phosphat sebagai (PO4-P) mg/L	25.72	141.45
12	Sulfida (S-H2S) mg/L	0.26	0.77
	B.b.Pemeriksaan kimia Anorganik Logam Terlarut	-	-
13	Besi (Fe) mg/L	38.58	5.92
14	Chromium (Cr valensi 6) mg/L	6.43	5.66
15	Zinc (Zn) mg/L	6.43	7.72
	C. Pemeriksaan Kimia Organik	-	-
16	Detergen sebagai MBAS (µg/L)	25,717.82	11,573.02
17	Minyak/lemak (µg/L)	128,589.12	54,650.38
18	Senyawa Fenol sebagai Fenol (µg/L)	128.59	900.12

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Parameter–parameter yang telah melebihi beban pencemaran maksimum adalah TSS, BOD, COD, NH3, F, PO4-P, S-H2S, Zn dan Fenol. Artinya bahwa sungai Siborgonyi telah tercemar oleh parameter TSS, BOD, COD, NH3, F, PO4-P, S-H2S, Zn dan Fenol.

Tabel 2.38
Konstanta Perhitungan Potensi Beban Pencemaran

Faktor Emisi	
BOD (gr/org/hari)	40
COD (gr/org/hari)	55
TSS (gr/org/hari)	38
Nilai (Alfa)	
0-100 meter	1
100-500 meter	0.85
Lebih dari 500 meter	0.3
Sangat jauh (tidak dekat dengan segmen)	0.1
Rasio Ekivalen Kota	
Kota	1
Pinggiran kota	0.8125
Pedalaman	0.625
Pengolahan	
Ada	0,5
Tidak	1

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Tabel 2.39
Potensi Beban Pencemaran Tiga Parameter (kg/hari)

Tahun	Potensi BP BOD Kg	Potensi BP COD Kg	Potensi BT TSS Kg
2025	5,224.74	7,184.02	4,963.50
2027	5,421.97	7,455.21	5,150.88
2029	5,626.65	7,736.65	5,345.32
2031	5,839.06	8,028.70	5,547.10
2033	6,059.48	8,331.78	5,756.51
2035	6,288.22	8,646.31	5,973.81
2037	6,525.60	8,972.70	6,199.32
2039	6,771.94	9,311.42	6,433.34
2041	7,027.58	9,662.92	6,676.20
2043	7,292.87	10,027.69	6,928.22
2045	7,568.17	10,406.24	7,189.76
2047	7,853.87	10,799.07	7,461.17
2049	8,150.35	11,206.73	7,742.83
2051	8,458.02	11,629.78	8,035.12
2053	8,777.31	12,068.80	8,338.44

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Tabel di atas menunjukkan bahwa potensi beban pencemaran BOD, COD, dan TSS terus meningkat dari tahun 2021-2053. Hal ini akan mengancam kelestarian kualitas air Sungai dan Kualitas air teluk Youtefa serta Teluk Yos Sudarso. Kualitas air yang tercemar akan

mengakibatkan tercemarnya populasi ikan, kerang dan mahluk lain di teluk tersebut dan akan mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia yang mengkonsumsi ikan dan mahluk lain. Potensi beban pencemaran yang berasal dari domestik teringgi adalah parameter COD, diikuti oleh BOD dan terendah TSS.

- -Beban Air limbah (ltr/hari)

Tabel 2.40
Beban Air Limbah (Ltr/Hari)

Tahun	Air Limbah Grey Water Kota Jayapura	Air Limbah Black Water Kota Jayapura	Jumlah IPAL Komunal
2019	28,818,432.00	7,204,608.00	300.19
2022	29,524,407.54	7,381,101.89	307.55
2025	30,247,677.63	7,561,919.41	315.08
2028	30,988,665.92	7,747,166.48	322.80
2031	31,747,806.47	7,936,951.62	330.71
2034	32,525,543.96	8,131,385.99	338.81
2037	33,322,333.97	8,330,583.49	347.11
2040	34,138,643.22	8,534,660.81	355.61
2043	34,974,949.91	8,743,737.48	364.32
2046	35,831,743.90	8,957,935.97	373.25
2049	36,709,527.08	9,177,381.77	382.39
2052	37,608,813.63	9,402,203.41	391.76

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Berdasarkan Tabel di atas air limbah grey water dan black water terus meningkat maka di kota Jayapura membutuhkan IPAL Komunal sebanyak 307 – 391 unit pada tahun 2022- 2052.

- Beban Timbulan Sampah (Kg/hari)

Tabel 2.41
Timbulan Sampah (Kg/Hari)

Tahun	Timbulan Sampah
2022	92,905.06
2024	93,370.16
2026	93,837.60
2028	94,307.37
2030	94,779.50
2032	95,253.99
2034	95,730.85
2036	96,210.10

Tahun	Timbulan Sampah
2038	96,691.76
2040	97,175.82
2042	97,662.31
2044	98,151.23
2046	98,642.60
2048	99,136.43
2050	99,632.73
2052	100,131.52

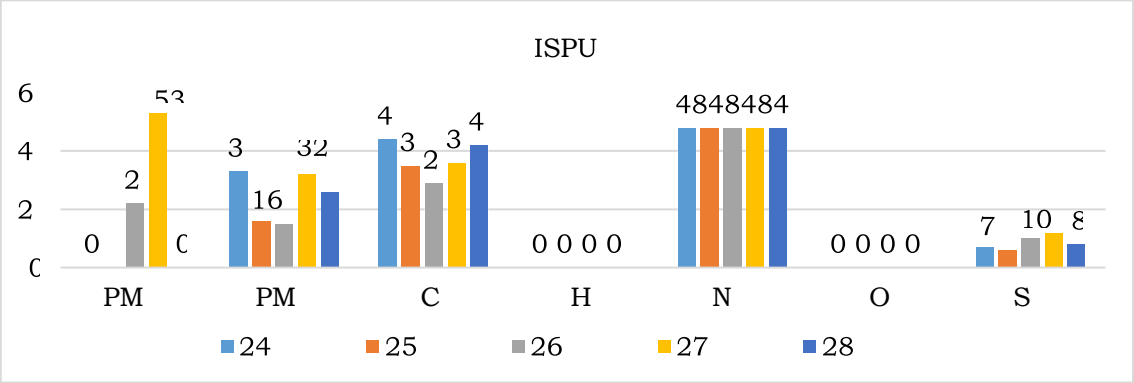
Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Laju pertumbuhan penduduk Kota Jayapura dalam lima tahun terakhir (2016-2020) sebesar 6,65% dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebesar 398478 jiwa. Timbulan sampah Kota Jayapura terus meningkat dari Tahun 2022–2042 dimana pada tahun 2022 sebesar 92.905,06 ton/tahun menjadi 100.131,52 ton/tahun pada akhir perencanaan tahun 2052.

Daya Dukung Kualitas Udara /Indeks Standar Pencemaran Udara

Indeks Standar Pencemaran Udara yang selanjutnya disingkat ISPU adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu, yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya. Pemeliharaan kualitas udara antara lain: Kapasitas mengatur sistem kimia udara adalah Kualitas udara yang baik merupakan salah satu manfaat yang diberikan oleh ekosistem. Kualitas udara . sangat dipengaruhi oleh interaksi antar berbagai polutan yang diemisikan ke udara dengan faktor–faktor meteorologis (angin, suhu, hujan, sinar matahari) dan pemanfaatan ruang permukaan bumi. Semakin tinggi intensitas pemanfaatan ruang, semakin dinamis kualitas udara. Jasa pemeliharaan kualitas udara pada kawasan bervegetasi dan pada daerah bertopografi tinggi umum lebih baik dibanding dengan daerah non-vegetasi. Pada gambar di bawah terlihat bahwa kondisi mutu udara di Kota Jayapura semuanya dalam kondisi sangat baik.

Gambar 2.7.
Indeks Pencemaran Udara



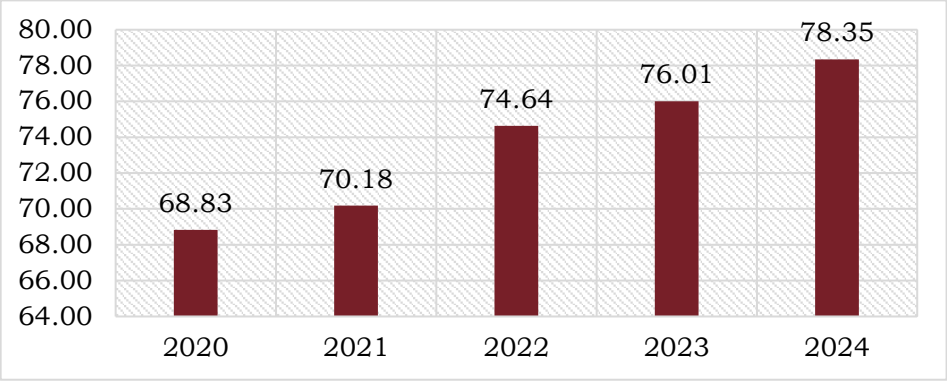
Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

1. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran komposit yang menunjukkan kondisi ketahann pangan di suatu wilayah. IKP merupakan alat untuk mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan. Indeks Ketahanan Pangan Kota Jayapura pada tahun 2020 sebesar 68,83 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi 78,35. Ini berarti selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, ketahanan pangan Kota Jayapura naik sebesar 9,52 poin.

Gambar 2.8.
Indeks Ketahanan Pangan Kota Jayapura Tahun 2020-2024

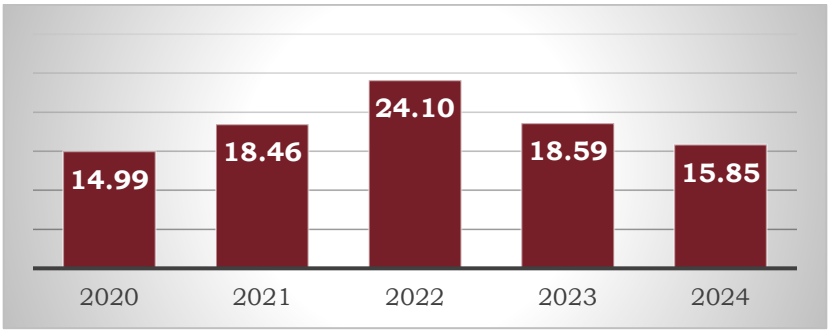


Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah sampai level kabupaten/kota yang mengonsumsi kalori kurang dari yang dibutuhkan berdasarkan standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

Gambar 2.9.
Prevalensi Ketidakcukupan Pangan
Kota Jayapura Tahun 2020-2024



Sumber: BPS RI, 2025

Data BPS sebagaimana dimuat pada gambar di atas menunjukkan pada periode tahun 2020 sampai dengan 2024, Prevalensi Ketidakcukupan Pangan di Kota Jayapura menunjukkan fluktuasi. Prevalensi Ketidakcukupan Pangan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yakni 24,10. Namun mulai tahun 2023 sampai 2024 menunjukkan penurunan, yang berarti ketidakcukupan pangan di Kota Jayapura semakin kecil.

2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLH merupakan alat untuk mengukur kualitas lingkungan hidup secara komprehensif.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kota Jayapura pada tahun 2021 yaitu sebesar 75,43 dan menurun di tahun 2022 menjadi 73,88, namun pada tahun 2023 dan 2024 kembali meningkat menjadi 75,50. Peningkatan IKLH Kota Jayapura diikuti pula oleh IKA, IKU dan IKL. Adapun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kota Jayapura Tahun 2021-2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.42
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kota Jayapura Tahun 2021-2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air (IKA)	N/A	N/A	49,00	50,00
Indeks Kualitas Udara (IKU)	N/A	N/A	93,32	92,26
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	N/A	N/A	88,03	88,31
IKLH	75,43	73,88	75,50	75,50

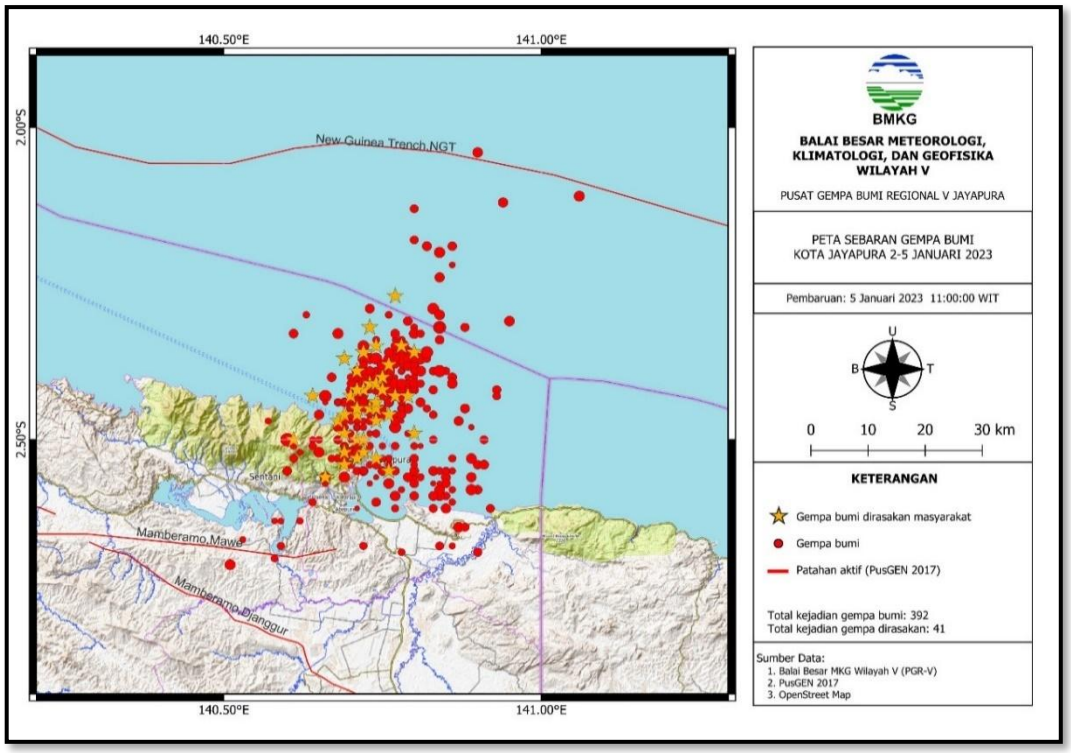
Sumber: LPPD Kota Jayapura Tahun 2023-2024

2.1.1.6. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kota Jayapura, yang terletak di pesisir utara dan memiliki wilayah kepulauan, diidentifikasi sebagai daerah yang rentan terhadap berbagai jenis bencana alam. Hal ini diungkapkan dalam *Masterplan* Kawasan Rawan Bencana Kota Jayapura tahun 2018. Wilayah ini menghadapi ancaman beragam bencana, termasuk gempa bumi, bencana hidrometeorologi, dan tsunami. Berdasarkan klasifikasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi, dan Tsunami, sebagaimana dikutip oleh Kementerian ATR/BPN pada tahun 2018, seluruh wilayah Kota Jayapura dikategorikan sebagai daerah dengan tingkat kerawanan gempa yang tinggi. Klasifikasi ini berlaku baik untuk skenario gempa dengan periode ulang 500 tahun maupun 2500 tahun.

Gambar 2.10.

Titik Gempa Periode 02 Januari s/d 05 Januari 2023



Sumber: BMKG Wilayah V Kota Jayapura, 2023

Kerentanan Kota Jayapura terhadap gempa bumi tidak hanya berasal dari aktivitas seismik lokal, tetapi juga dipengaruhi oleh zona-zona gempa di sekitarnya. Wilayah ini berpotensi terkena dampak getaran gempa yang berasal dari Lajur Ofiolit Papua dan Sesar Kepulauan Yapen. Selain itu, gempa-gempa dengan pusat gempa (episenter) yang berasal dari wilayah Papua New Guinea di sebelah timur juga dapat memberikan pengaruh terhadap Kota Jayapura. Kota Jayapura menghadapi berbagai ancaman bencana alam, dengan gempa bumi dan bencana hidrometeorologi sebagai risiko utama. Berdasarkan data dari berbagai sumber, termasuk media elektronik dan BMKG, dapat diuraikan beberapa poin penting mengenai kerawanan bencana di wilayah ini:

1. Gempa Bumi:

Kota Jayapura memiliki tingkat kerawanan gempa yang tinggi, mencakup area seluas 59.148,48 hektar atau 1,77% dari total

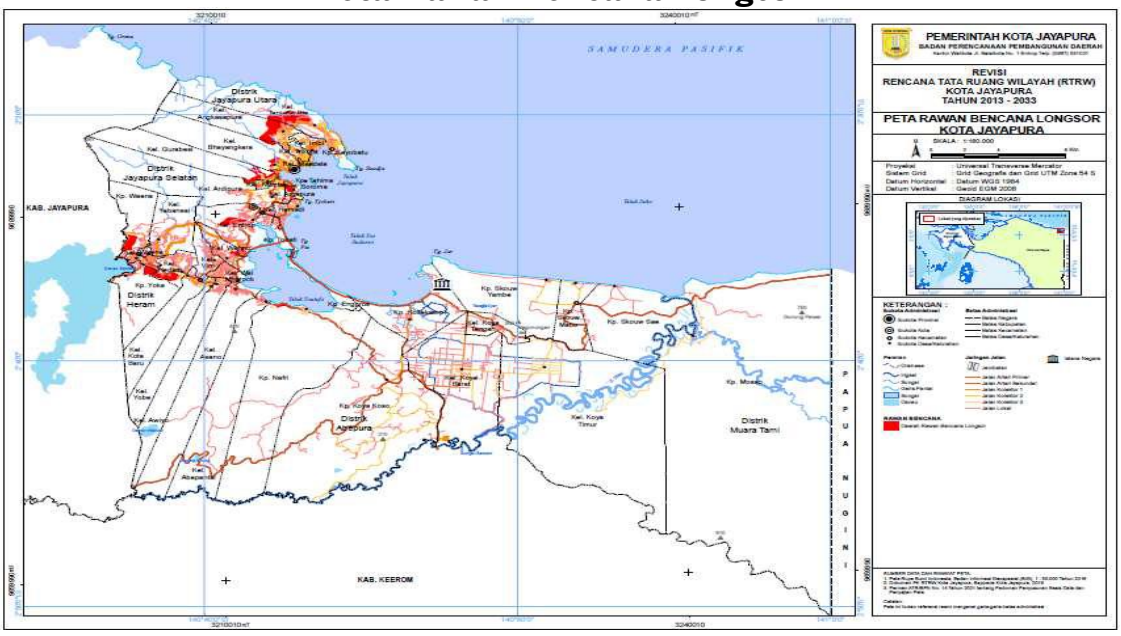
wilayahnya. Aktivitas seismik di sekitar kota ini cukup intens, dengan catatan 1.072 gempa terjadi antara 2 Januari hingga 9 Februari 2023, di mana 128 di antaranya terasa. Gempa-gempa ini umumnya bermagnitudo di bawah 5,0, namun beberapa mencapai magnitudo 5,4. Karakteristik gempa di wilayah ini cenderung dangkal, sering disebabkan oleh aktivitas sesar lokal, dan umumnya tidak berpotensi tsunami. Meskipun demikian, dampaknya cukup signifikan, termasuk kerusakan bangunan dan infrastruktur.

2. Longsor:

Area dengan risiko longsor tinggi di Kota Jayapura mencakup 2.314,49 hektar. Longsor sering terjadi akibat curah hujan tinggi atau sebagai dampak sekunder dari gempa bumi. Contoh terbaru adalah longsor pada 9 Februari 2023 di Bucend Menara Jaya, yang dipicu oleh gempa berkekuatan 5,4. Bencana longsor dan banjir pada Januari 2022 di Distrik Jayapura Selatan menyebabkan kerugian material yang signifikan. Upaya mitigasi termasuk pemasangan sistem peringatan dini di beberapa lokasi, namun masih perlu diperluas ke area-area rawan lainnya.

Gambar 2.11.

Peta Rawan Bencana Longsor



Sumber: Revisi RTRW Kota Jayapura, 2023

3. Banjir:

Wilayah dengan risiko banjir tinggi di Kota Jayapura mencakup area seluas 3.939,93 hektar. Seluruh distrik di kota ini rentan terhadap banjir genangan saat curah hujan tinggi. Faktor alam dan aktivitas manusia berkontribusi pada variasi dampak banjir di berbagai wilayah.

4. Upaya Mitigasi:

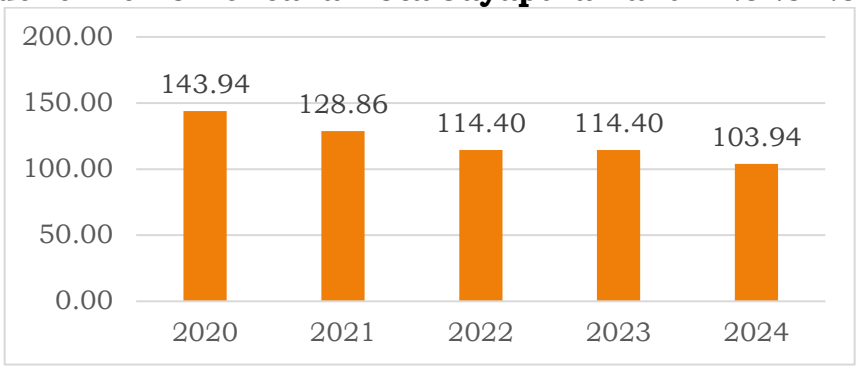
Pemerintah dan lembaga terkait telah melakukan beberapa upaya mitigasi, termasuk pemasangan sistem peringatan dini untuk longsor dan prakiraan cuaca oleh BMKG. Namun, masih diperlukan peningkatan dalam hal cakupan sistem peringatan dini dan koordinasi antar lembaga untuk manajemen bencana yang lebih efektif.

Kesimpulannya, Kota Jayapura menghadapi berbagai ancaman bencana alam yang signifikan, terutama gempa bumi, longsor, dan banjir. Kerentanan terhadap gempa bumi tidak hanya berasal dari aktivitas seismik lokal, tetapi juga dipengaruhi oleh zona-zona gempa di sekitarnya, termasuk Lajur Ofiolit Papua, Sesar Kepulauan Yapen, dan wilayah Papua New Guinea. Wilayah ini memiliki tingkat kerawanan gempa yang tinggi, dengan aktivitas seismik yang intens dan berpotensi menyebabkan kerusakan bangunan serta memicu bencana sekunder seperti longsor. Upaya mitigasi telah dilakukan, namun masih perlu ditingkatkan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana di masa depan.

Salah satu alat ukur terkait risiko bencana yang digunakan di Indonesia adalah Indeks Risiko Bencana. Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana di setiap kabupaten/kota di Indonesia. Perhitungan tingkat risiko setiap kabupaten/kota dilakukan dengan mepmerhatikan faktor *hazard, vulnerability*, dan *capacity*. Selanjutnya, disajikan tingkat risiko bencana di kabupaten/kota sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut. Dengan demikian, Indeks Risiko Bencana ini merupakan penilaian seluruh kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan risiko bencana yang ada.

Berdasarkan data dari BNPB, Kota Jayapura memiliki IRB yang cenderung menurun dari tahun ke tahun dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2020, nilai IRB adalah 143,94 lalu turun hingga berada pada angka 103,94 dengan kategori Sedang. Perkembangan indeks risiko bencana Kota Jayapura selama tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah.

Gambar 2.12.
Indeks Risiko Bencana Kota Jayapura Tahun 2020-2024

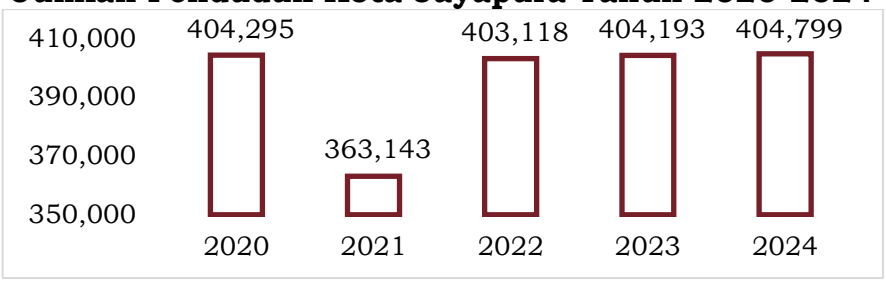


Sumber: BNPB, 2025

2.1.1.7. Demografi

Data jumlah penduduk Kota Jayapura pada tahun 2020 yaitu berjumlah 404.295 jiwa dan menurun di tahun 2021 menjadi 363.143, namun pada tahun berikutnya terus mengalami peningkatan hingga menjadi 404.799 jiwa di tahun 2024.

Gambar 2.13.
Jumlah Penduduk Kota Jayapura Tahun 2020-2024



Sumber: Kota Jayapura Dalam Angka 2025

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin sejak tahun 2020 sampai 2024, diketahui bahwa untuk jenis kelamin laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.43
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Hasil Registrasi di Kota Jayapura Tahun 2020-2024

Tahun	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2020	215.114	189.181	404.295
2021	191.165	171.978	363.143
2022	213.712	189.406	403.118
2023	214.055	190.138	404.193
2024	214.026	190.773	404.799

Sumber: Kota Jayapura Dalam Angka 2025

Jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2024 berada pada kecamatan Abepura dengan jumlah 120.946 jiwa yang terdiri dari 63.986 jiwa penduduk laki-laki dan 56.960 jiwa penduduk perempuan, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu kecamatan Muara Tami dengan jumlah 26.243 jiwa yang terdiri dari 13.676 jiwa penduduk laki-laki dan 12.567 jiwa penduduk perempuan.

Tabel 2.44
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan di Kota Jayapura Tahun 2024

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Muara Tami	13.676	12.567	26.243
Abepura	63.986	56.960	120.946
Heram	33.818	29.226	63.044
Jayapura Selatan	52.812	47.760	100.572
Jayapura Utara	49.734	44.260	93.994
Kota Jayapura	**214.026**	**190.773**	**404.799**

Sumber: Kota Jayapura Dalam Angka 2025

Trend Pertumbuhan Penduduk Kota Jayapura yang terus mengalami Peningkatan yang Signifikan dan Heterogen, terdiri dari semua Suku Bangsa yang ada di Indonesia berdomisili di Wilayah Kota Jayapura dengan Jumlah Penduduk sesuai data Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 adalah sebanyak 404.779 Jiwa yang terdiri dari Penduduk Laki-laki sebanyak 214.026 Jiwa dan Jumlah Penduduk Perempuan sebanyak 190.773 Jiwa.

Adapun Jumlah Penduduk Menurut Umur di Kota Jayapura Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.45
Jumlah Penduduk Menurut Umur
di Kota Jayapura Tahun 2024

Struktur Usia	2024
0 – 4	20.510
5 – 9	30.091
10 – 14	33.688
15 – 19	34.836
20 – 24	38.025
25 – 29	38.010
30 – 34	41.311
35 – 39	40.777
40 – 44	34.185
45 – 49	27.384
50 – 54	20.799
55 – 59	17.138
60 – 64	11.534
65 – 69	7.565
70 – 74	4.366
> 75	4.580
Total	**404.779**

Sumber: LPPD Kota Jayapura Tahun 2024

Proyeksi penduduk Kota Jayapura untuk periode 2025-2030 menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dan signifikan. Diperkirakan populasi Kota Jayapura akan meningkat dari 430.984 jiwa pada tahun 2025 menjadi 466.445 jiwa pada tahun 2030, menandakan pertambahan sekitar 35.461 jiwa atau 8,2% selama lima tahun. Dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 1,59%, proyeksi ini mencerminkan perkembangan Kota Jayapura yang konsisten dan dinamis.

Tabel 2.46
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Jayapura Tahun 2025-2030

Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk
2025	430.984
2026	437.831
2027	444.798
2028	451.888
2029	459.103
2030	466.445

Sumber: Hasil Analisis Data Bappeda Kota Jayapura, 2025

Proyeksi ini memiliki nilai strategis yang tinggi bagi berbagai aspek perencanaan dan pembangunan Kota Jayapura. Bagi pemerintah, data ini menjadi landasan penting dalam merencanakan infrastruktur, mengalokasikan sumber daya, dan merancang kebijakan sosial yang tepat sasaran. Dalam konteks ekonomi, proyeksi ini memberikan gambaran tentang potensi pasar dan tenaga kerja masa depan, yang sangat berharga bagi perencanaan investasi dan pengembangan bisnis. Selain itu, informasi ini juga krusial untuk manajemen lingkungan, perencanaan energi, dan mitigasi risiko bencana.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi Kota Jayapura merupakan aspek krusial dalam perkembangan ibu kota Provinsi Papua ini. Sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi di wilayah timur Indonesia, Kota Jayapura memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di kawasan Papua. Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Jayapura telah menunjukkan dinamika ekonomi yang menarik. Kota ini terus berupaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi warganya melalui berbagai program pembangunan dan kebijakan ekonomi. Namun, sebagaimana kota-kota lain di Indonesia, Jayapura juga menghadapi tantangan unik dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya.

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Jayapura merupakan indikator ekonomi yang sangat penting dalam mengukur kinerja perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Jayapura. PDRB mencerminkan nilai tambah bruto dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di wilayah Kota Jayapura dalam periode waktu satu tahun. PDRB Kota Jayapura dihitung dengan dua pendekatan, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sementara PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga pada tahun dasar tertentu. Perbandingan kedua nilai ini dapat memberikan informasi tentang perkembangan ekonomi riil Kota Jayapura tanpa pengaruh inflasi.

Nilai PDRB Kota Jayapura atas dasar dasar harga berlaku pada tahun 2024 sebesar 39,81 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 5,13 persen dibandingkan dengan tahun 2023 yang nilainya sebesar 37,87 triliun rupiah. Peningkatan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi pada sebagian besar lapangan usaha serta adanya inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga BBM dan beberapa harga pangan pokok.

Tabel 2.47
PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kota Jayapura
Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.889,22	1.926,23	2.058,00	2.007,56	2.026,58
Pertambangan dan Penggalian	163,28	173,89	176,87	185,78	191,56
Industri Pengolahan	803,93	818,08	858,42	913,03	954,01
Pengadaan Listrik dan Gas	17,60	18,27	19,67	20,80	22,43

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	37,03	37,75	39,35	41,49	45,49
Konstruksi	8.058,68	8.520,39	8.861,72	9.220,01	9.435,17
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.283,79	5.524,43	6.185,89	6.792,06	7.482,98
Transportasi dan Pergudangan	1.273,66	1.483,13	1.807,02	2.178,68	2.377,09
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	526,20	566,10	607,50	647,76	711,68
Informasi dan Komunikasi	2.650,53	2.716,11	2.825,58	2.912,37	3.009,07
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.452,21	1.534,58	1.743,65	2.081,93	2.100,71
Real Estate	1.576,80	1.625,49	1.729,37	1.858,59	1.936,82
Jasa Perusahaan	1.064,85	1.096,25	1.205,88	1.382,34	1.435,30
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.192,96	4.066,66	4.056,57	4.107,93	4.433,46
Jasa Pendidikan	1.098,22	996,70	1.035,53	1.160,70	1.262,29
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.260,16	1.348,15	1.427,25	1.519,77	1.579,92
Jasa lainnya	669,99	685,68	726,62	766,24	810,42
PDRB	**32.019,13**	**33.137,90**	**35.364,89**	**37.797,07**	**39.814,97**

Sumber BPS Kota Jayapura, 2025

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami pertumbuhan, yaitu dari 24,78 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 25,66 triliun rupiah pada tahun 2024. Keadaan ini menunjukkan bahwa selama tahun 2023 Kota Jayapura mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,56 persen. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, disebabkan oleh pertumbuhan produksi pada sebagian besar lapangan usaha, sebagai dampak positif dari berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat.

Perkembangan PDRB ADHK menurut lapangan usaha Kota Jayapura tahun 2020-2024 dirinci pada tabel di bawah.

Tabel 2.48
PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kota Jayapura
Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan (Juta Miliar)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.251,53	1.298,36	1.351,73	1.388,61	1.396,79
Pertambangan dan Penggalian	90,42	91,48	91,92	96,33	101,26
Industri Pengolahan	544,53	549,73	565,71	574,82	589,19
Pengadaan Listrik dan Gas	12,27	12,83	13,67	14,42	15,47
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	30,73	30,71	31,93	33,28	34,88
Konstruksi	4.520,30	4.730,30	4.842,44	4.979,92	5.049,21
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.596,69	3.762,26	4.014,73	4.260,26	4.495,35
Transportasi dan Pergudangan	876,24	1.002,77	1.094,62	1.213,16	1.298,57
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	349,02	369,36	385,05	393,95	413,88
Informasi dan Komunikasi	2.346,38	2.395,22	2.477,06	2.564,76	2.653,05
Jasa Keuangan dan Asuransi	960,35	984,39	1.031,99	1.158,53	1.172,45
Real Estate	1.171,06	1.200,57	1.265,39	1.359,65	1.424,97
Jasa Perusahaan	747,20	786,79	828,05	893,50	908,62
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.133,28	3.125,12	3.178,32	3.212,68	3.432,24
Jasa Pendidikan	979,73	938,59	963,41	997,91	1.029,76
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	953,97	978,77	979,33	1.024,20	1.025,09
Jasa lainnya	554,06	561,32	586,85	609,41	616,08
PDRB	**22.117,78**	**22.818,57**	**23.702,20**	**24.775,40**	**25.656,87**

Sumber BPS Kota Jayapura, 2025

Analisis PDRB menurut lapangan usaha Kota Jayapura dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika ekonomi yang beragam dan menarik. Sektor konstruksi konsisten menjadi penyumbang terbesar, namun persentasenya menurun dari yang semula 25,17 persen pada tahun 2020 menjadi hanya 23,7 persen di tahun 2024. Sektor perdagangan besar dan eceran menempati posisi kedua dengan persentase pada tahun 2024 yaitu sebesar 18,79 persen atau meningkat dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2023 yang hanya 17,97 persen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ekonomi Kota Jayapura memiliki basis yang beragam dengan beberapa sektor menunjukkan pertumbuhan yang kuat, sementara yang lain memerlukan perhatian lebih. Pemerintah Kota Jayapura perlu memfokuskan strategi pada penguatan sektor-sektor yang menunjukkan pertumbuhan tinggi seperti jasa keuangan dan transportasi, sambil mendorong pemulihan dan pengembangan sektor-sektor yang tertinggal. Perhatian khusus juga perlu diberikan pada sektor-sektor dengan kontribusi relatif kecil namun potensial seperti industri pengolahan untuk diversifikasi ekonomi yang lebih lanjut. Strategi yang seimbang antara mendukung sektor-sektor unggulan dan mengembangkan sektor-sektor potensial akan krusial untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Kota Jayapura.

Tabel 2.49
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Jayapura Tahun 2020–2024

Lapangan Usaha	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,90	5,81	5,82	5,31	5,09
Pertambangan dan Penggalian	0,51	0,52	0,50	0,49	0.48
Industri Pengolahan	2,51	2,47	2,43	2,42	2,4
Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11
Konstruksi	25,17	25,71	25,06	24,39	23,7
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,50	16,67	17,49	17,97	18,79
Transportasi dan Pergudangan	3,98	4,48	5,11	5,76	5,97
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,64	1,71	1,72	1,71	1,79
Informasi dan Komunikasi	8,28	8,20	7,99	7,71	7,56
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,54	4,63	4,93	5,51	5,28
Real Estate	4,92	4,91	4,89	4,92	4,86
Jasa Perusahaan	3,33	3,31	3,41	3,66	3,60
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,10	12,27	11,47	10,87	11,14
Jasa Pendidikan	3,43	3,01	2,93	3,07	3,17
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,94	4,07	4,04	4,02	3,97

Lapangan Usaha	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jasa lainnya	2,09	2,07	2,05	2,03	2,04
PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

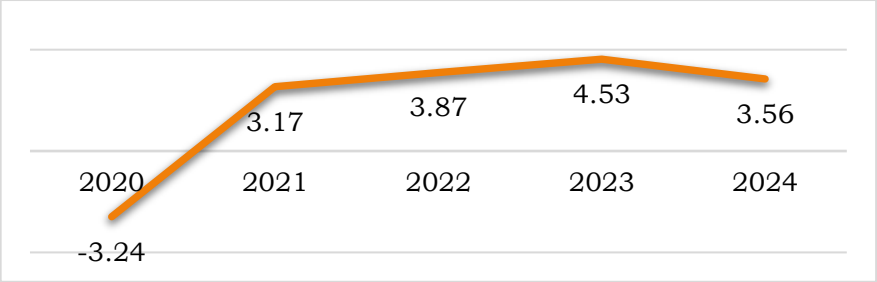
Sumber BPS Kota Jayapura, 2025

Data pertumbuhan ekonomi Kota Jayapura dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang menarik dan mencerminkan berbagai tantangan serta upaya pemulihan ekonomi kota ini. Pada tahun 2020 menjadi titik balik yang drastis dengan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar -3,24%. Penurunan tajam ini jelas merupakan dampak langsung dari pandemi COVID-19 yang mempengaruhi hampir seluruh sektor ekonomi. Pembatasan sosial, penutupan berbagai usaha, dan gangguan pada rantai pasokan menjadi faktor utama penyebab kontraksi ekonomi ini.

Memasuki tahun 2021, terlihat tanda-tanda pemulihan dengan pertumbuhan ekonomi kembali positif sebesar 3,17%. Meskipun belum kembali ke level pra-pandemi, angka ini menunjukkan resiliensi ekonomi Kota Jayapura dan efektivitas kebijakan pemulihan yang diterapkan. *Trend* pemulihan berlanjut pada tahun 2022 dengan pertumbuhan meningkat menjadi 3,87%. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa upaya pemulihan ekonomi mulai menunjukkan hasil yang lebih signifikan. Capaian untuk tahun 2023 menunjukkan optimisme dengan pertumbuhan mencapai 4,53%. Angka ini mendekati level pertumbuhan pra-pandemi dan menandakan bahwa ekonomi Kota Jayapura hampir sepenuhnya pulih dari dampak pandemi. Namun pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kota Jayapura kembali mengalami penurunan menjadi hanya 3,56 persen.

Gambar 2.14.

Pertumbuhan Ekonomi Kota Jayapura Tahun 2020-2024

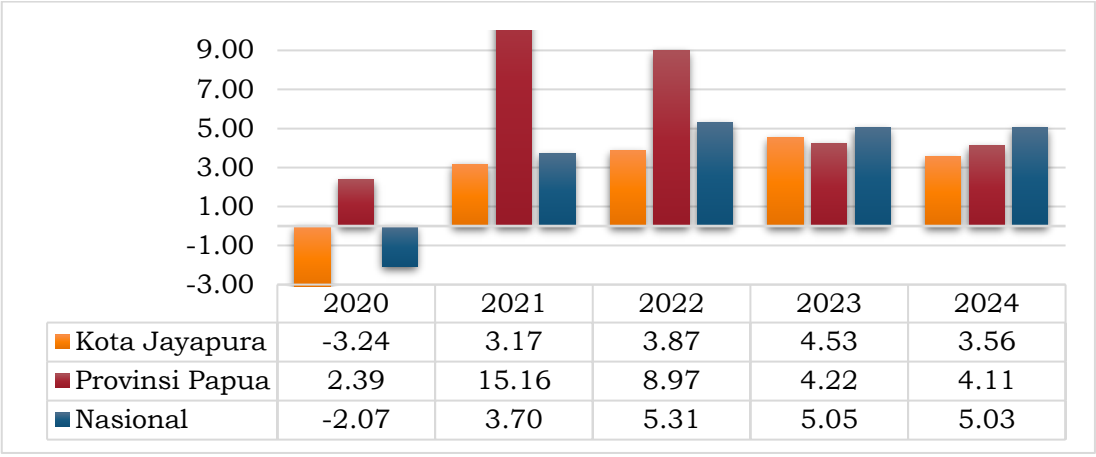


Sumber: BPS Kota Jayapura, 2025

Meskipun mengalami pukulan berat akibat pandemi pada tahun 2020, ekonomi Kota Jayapura menunjukkan kemampuan pemulihan yang kuat. Tren pertumbuhan positif yang konsisten sejak 2021 mengindikasikan efektivitas kebijakan ekonomi dan adaptasi masyarakat terhadap "normal baru". Namun, penting untuk terus mewaspadai potensi tantangan global dan lokal yang dapat mempengaruhi trajektori pertumbuhan ekonomi kota di masa mendatang.

Gambar 2.15.

Pertumbuhan Ekonomi Kota Jayapura, Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Jayapura	-3.24	3.17	3.87	4.53	3.56
Provinsi Papua	2.39	15.16	8.97	4.22	4.11
Nasional	-2.07	3.70	5.31	5.05	5.03

Sumber: BPS, 2025

B. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk dalam satu tahun.

Nilai PDRB per kapita Kota Jayapura atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 sempat terjadi penurunan karena pandemi covid-19. Pada tahun 2020 PDRB per kapita tercatat sebesar 80,64 juta rupiah per kapita per tahun yang sebelumnya bisa mencapai 81,12 juta rupiah per kapita per tahun. Seiring dengan adanya pemulihan ekonomi, nilai PDRB per kapita meningkat tiap tahun hingga pada tahun 2024 mencapai 94,67 juta rupiah per kapita per tahun.

Angka PDRB per kapita ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Dengan kata lain selama tahun 2024 setiap orang di Kota Jayapura secara rata-rata mampu menghasilkan nilai tambah sebesar 7,89 juta rupiah per kapita per bulan. Nilai ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 7,61 juta rupiah per kapita perbulannya.

Tabel 2.50
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Kota Jayapura menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita setahun	80,64	82,24	86,47	91,28	94,67
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita sebulan	6,72	6,85	7,21	7,61	7,89

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Jayapura Menurut Lapangan Usaha 2020-2024
Keterangan:
** Angka sementara*
*** Angka sangat sementara*

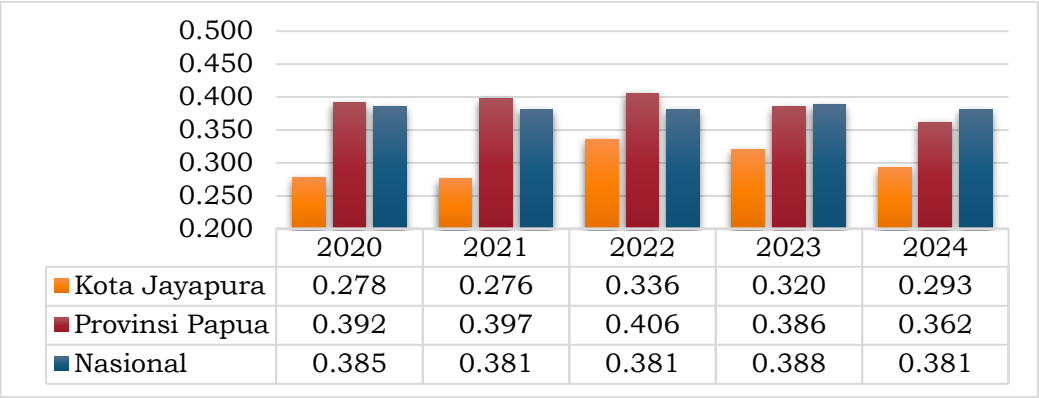
C. Indeks Gini

Gini Ratio atau Koefisien Gini adalah koefisien yang digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk yang ditampilkan dengan kurva Lorens. Rentang nilai Gini Ratio yaitu antara 0 sampai dengan 1.

Indeks Gini Kota Jayapura pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 yaitu 0,278 dan menurun pada tahun 2021 menjadi 0,276. Pada tahun 2022 indeks gini Kota Jayapura kembali meningkat menjadi 0,336, namun di tahun berikutnya kembali menurun menjadi 0,293 pada tahun 2024.

Nilai Indeks Gini Kota Jayapura sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 lebih rendah dibandingkan dengan nilai Indeks Gini Provinsi Papua dan Nasional. Hal tersebut sebagaimana disajikan pada gambar berikut:

Gambar 2.16.
Indeks Gini Kota Jayapura, Provinsi Papua, dan Nasional Tahun 2020–2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Jayapura	0.278	0.276	0.336	0.320	0.293
Provinsi Papua	0.392	0.397	0.406	0.386	0.362
Nasional	0.385	0.381	0.381	0.388	0.381

Sumber: BPS RI dan BPS Kota Jayapura, 2025

D. Kemiskinan

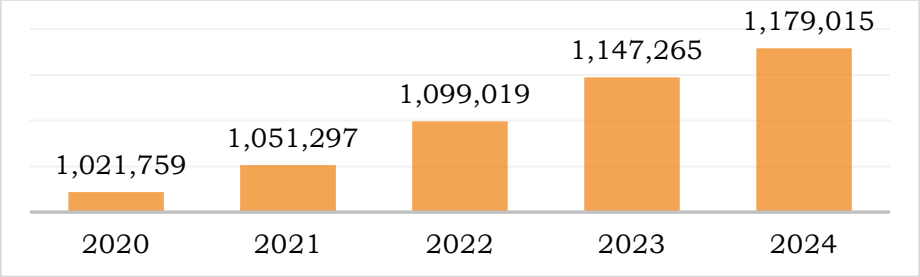
Kemiskinan merupakan salah satu indikator kunci dalam mengukur kesejahteraan masyarakat dan efektivitas pembangunan ekonomi suatu daerah. Kota Jayapura, sebagai ibu kota Provinsi Papua dan pusat ekonomi di wilayah timur Indonesia, memiliki peran strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Analisis kemiskinan di Kota Jayapura selama periode 2020-2024 menunjukkan

dinamika yang kompleks, tercermin dari fluktuasi jumlah penduduk miskin, persentase kemiskinan, dan peningkatan garis kemiskinan. Data ini memberikan gambaran tentang upaya pengentasan kemiskinan dan tantangan yang dihadapi kota ini.

Peningkatan garis kemiskinan yang konsisten menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan standar hidup, sementara penurunan persentase kemiskinan mengindikasikan keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengurangi kemiskinan lebih lanjut, terutama mengingat biaya hidup yang terus meningkat. Pemerintah Kota Jayapura perlu terus meningkatkan dan mengevaluasi efektivitas program-program pengentasan kemiskinan, serta fokus pada pemulihan ekonomi yang inklusif untuk memastikan penurunan kemiskinan yang berkelanjutan di masa depan

Gambar 2.17.

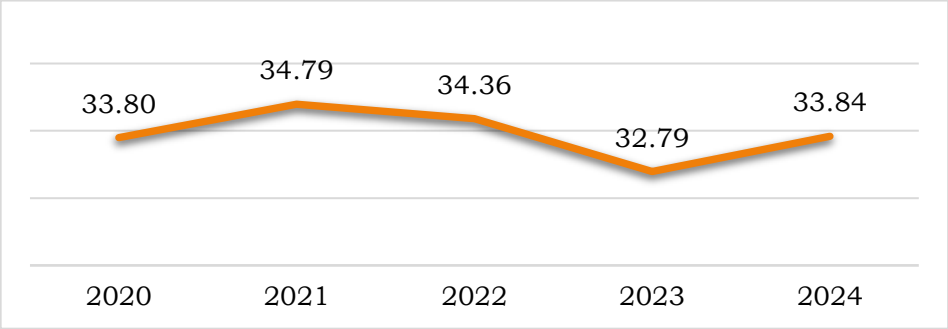
Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) Kota Jayapura Tahun 2020–2024



Sumber: BPS RI, 2025

Analisis terhadap data jumlah penduduk miskin di Kota Jayapura dari tahun 2020 hingga 2024 memberikan gambaran penting tentang dinamika sosial-ekonomi Kota Jayapura, serta efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2020 garis kemiskinan Kota Jayapura tercatat sebesar Rp. 1.021.759 per kapita per bulan, dengan persentase penduduk miskin 11,16%. Memasuki tahun 2021, jumlah penduduk miskin mencapai 34,79 ribu jiwa, persentase kemiskinan naik sedikit ke 11,39%, dan garis kemiskinan meningkat menjadi Rp. 1.051.297.

Gambar 2.18.
Jumlah Penduduk Miskin Kota Jayapura Tahun 2020-2024
(data dalam ribuan)

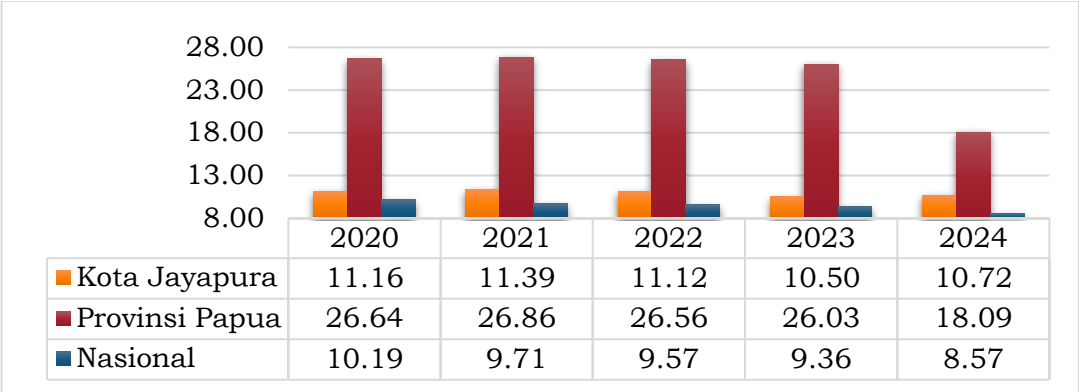


Sumber: BPS RI, 2025

Tahun 2023 menandai perubahan signifikan. Jumlah penduduk miskin turun drastis menjadi 32,79 ribu jiwa, persentase kemiskinan turun ke 10,50%, namun garis kemiskinan terus naik menjadi Rp. 1.147.265. Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin yang kontras dengan kenaikan garis kemiskinan ini, tentunya disebabkan oleh naiknya harga kebutuhan konsumsi sehingga mengakibatkan standar garis kemiskinan ikut terdampak. Selanjutnya pada tahun 2024, Jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 33,84 ribu jiwa, persentase kemiskinan juga meningkat ke 10,72% serta garis kemiskinan terus naik menjadi Rp. 1.179.015.

Persentase Penduduk Miskin Kota Jayapura sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berada dibawah Persentase Penduduk Miskin Provinsi Papua, namun pada periode tersebut Persentase Penduduk Miskin Kota Jayapura selalu berada diatas Persentase Penduduk Miskin Nasional.

Gambar 2.19.
Persentase Penduduk Miskin Kota Jayapura, Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2020 – 2024

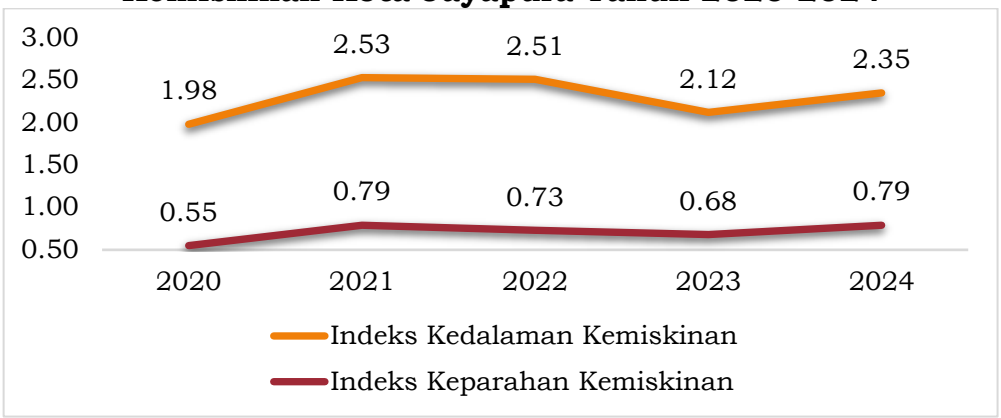


	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Jayapura	11.16	11.39	11.12	10.50	10.72
Provinsi Papua	26.64	26.86	26.56	26.03	18.09
Nasional	10.19	9.71	9.57	9.36	8.57

Sumber: BPS RI, 2025

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Jayapura sejak tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Jayapura yaitu sebesar 1,98 dan mengalami peningkatan serta penurunan pada tahun berikutnya menjadi 2,35 di tahun 2024. Sama hal nya dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Jayapura juga demikian, Dimana pada tahun 2020 yaitu hanya 0,55 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 0,79, pada tahun berikutnya kembali turun menjadi 0,68 di tahun 2023, namun meningkat kembali menjadi 0,79 di tahun 2024.

Gambar 2.20.
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Jayapura Tahun 2020-2024



Sumber: BPS RI, 2025

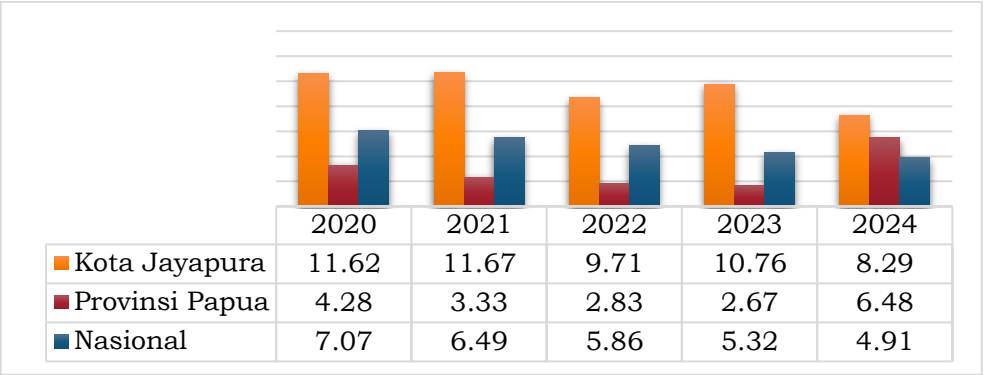
E. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Ketenagakerjaan dan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) memiliki hubungan yang erat dalam menggambarkan kondisi ekonomi suatu daerah. TPT merupakan indikator yang menunjukkan persentase penduduk dalam angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Semakin rendah TPT, semakin baik kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah, yang umumnya mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang positif dan kemampuan pasar tenaga kerja untuk menyerap angkatan kerja yang tersedia.

Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Jayapura selama periode 2020-2024 menggambarkan dinamika ketenagakerjaan yang kompleks. Selama lima tahun tersebut, TPT total Kota Jayapura mengalami fluktuasi, dengan angka tertinggi tercatat pada tahun 2020 sebesar 11,62% dan terendah pada tahun 2024 sebesar 8,29%. *Trend* umum menunjukkan penurunan dari 2020 ke 2022, sedikit kenaikan di 2023 dan penurunan signifikan di 2024.

Gambar 2.21.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Jayapura, Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2020 – 2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Jayapura	11.62	11.67	9.71	10.76	8.29
Provinsi Papua	4.28	3.33	2.83	2.67	6.48
Nasional	7.07	6.49	5.86	5.32	4.91

Sumber: BPS RI, 2025

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Jayapura sejak tahun 2020 hingga 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Papua dan Nasional, dimana Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Papua pada tahun 2024 hanya 6,48 persen, nasional 4,91

persen. Sedangkan Kota Jayapura pada tahun yang sama mencapai 8,29 persen.

F. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

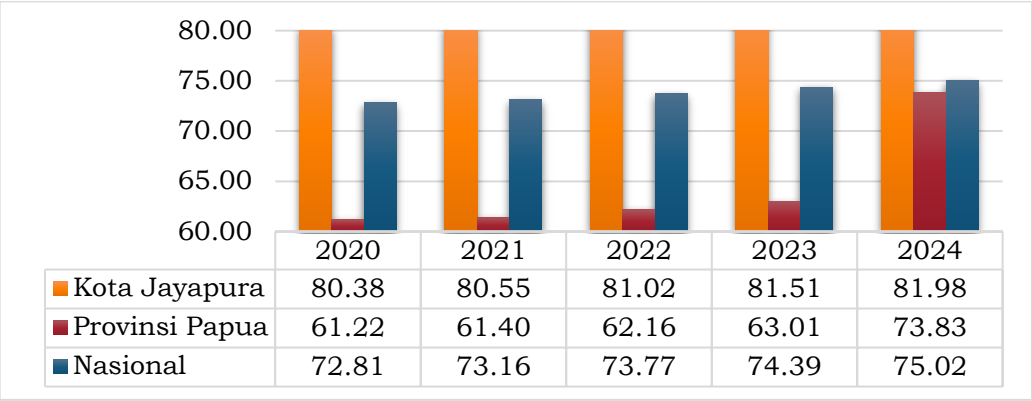
IPM (Indeks Pembangunan Manusia) adalah ukuran penting yang digunakan untuk menilai kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan suatu populasi. Dikembangkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), IPM mengintegrasikan tiga dimensi utama pembangunan manusia: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Indeks ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemajuan suatu wilayah dibandingkan dengan pengukuran yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi. IPM membantu pembuat kebijakan dalam mengevaluasi efektivitas program pembangunan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus. Metodologi perhitungan IPM melibatkan 3 (tiga) indikator utama: (1) Kesehatan, diukur melalui angka harapan hidup saat lahir; (2) Pendidikan, diukur melalui kombinasi rata-rata lama sekolah untuk penduduk berusia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah untuk anak-anak usia masuk sekolah; dan (3) Standar hidup, diukur melalui PNB (Produk Nasional Bruto) per kapita yang disesuaikan dengan Paritas Daya Beli. Setiap dimensi dinormalisasi ke dalam indeks dengan skala 0 hingga 1, kemudian IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari ketiga indeks dimensi tersebut. Metode baru yang diterapkan sejak 2010 menggunakan rata-rata geometrik ini untuk lebih mencerminkan ketimpangan antar dimensi dalam pembangunan manusia.

Indeks Pembangunan Manusia Kota Jayapura menunjukkan situasi yang sangat mengesankan selama periode 2020-2024. Sebagai ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura memperlihatkan tingkat pembangunan manusia yang jauh di atas rata-rata Provinsi Papua dan bahkan melebihi angka nasional. Pada tahun 2020, IPM Kota Jayapura tercatat sebesar 80,38%. Dalam empat tahun berikutnya, Kota Jayapura berhasil meningkatkan IPM-nya secara konsisten. Tahun 2021 menjadi

titik balik dengan IPM kembali naik menjadi 80,55%, menandai pemulihan dari dampak pandemi. Peningkatan berlanjut pada tahun 2022 dengan IPM mencapai 81,02%, dan pada tahun 2024, Kota Jayapura mencatatkan IPM tertingginya selama periode ini yaitu 81,98%. *Trend* positif ini mencerminkan keberhasilan kota dalam meningkatkan kualitas hidup penduduknya di tengah berbagai tantangan.

Capaian IPM Kota Jayapura yang konsisten di atas 80% menempatkannya dalam kategori "IPM sangat tinggi" menurut standar UNDP. Ini menggambarkan bahwa penduduk Kota Jayapura secara umum menikmati tingkat kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang sangat baik. Angka ini juga mengindikasikan bahwa kota ini telah berhasil dalam menyediakan akses yang baik terhadap layanan kesehatan, fasilitas pendidikan yang berkualitas, serta peluang ekonomi yang memadai bagi penduduknya.

Gambar 2.22.
Indeks Pembangunan Manusia Kota Jayapura, Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Jayapura	80.38	80.55	81.02	81.51	81.98
Provinsi Papua	61.22	61.40	62.16	63.01	73.83
Nasional	72.81	73.16	73.77	74.39	75.02

Sumber BPS RI, 2025

Keberhasilan Kota Jayapura dalam mempertahankan dan meningkatkan IPM-nya, terutama pasca pandemi, menunjukkan efektivitas kebijakan pembangunan dan resiliensi ekonomi kota. Ini juga mencerminkan kemampuan pemerintah Kota Jayapura dalam mengelola sumber daya dan mengimplementasikan program-program

pembangunan yang tepat sasaran. Namun, capaian tinggi Kota Jayapura juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam konteks kesenjangan dengan wilayah lain di Provinsi Papua. Dengan IPM yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Papua, Kota Jayapura memiliki tanggung jawab untuk menjadi motor penggerak pembangunan bagi wilayah sekitarnya. Kota Jayapura dapat menjadi model dan sumber pembelajaran bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kedepan, tantangan bagi Kota Jayapura adalah bagaimana mempertahankan *trend* positif ini sambil terus mencari inovasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusianya. Fokus pada pemerataan akses terhadap layanan publik, peningkatan kualitas pendidikan, dan penciptaan peluang ekonomi yang inklusif akan menjadi kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian IPM di masa mendatang. Pembahasan detail data IPM Kota Jayapura, Provinsi Papua, dan Nasional untuk periode 2020-2024 menunjukkan dinamika yang menarik. IPM Kota Jayapura menunjukkan *trend* positif dengan peningkatan dari 80,38 pada 2020 menjadi 81,98 pada 2024. IPM Provinsi Papua secara konsisten lebih rendah dibandingkan Kota Jayapura dan angka nasional. Namun, terdapat tren peningkatan dari 61,22 pada 2020 menjadi 73,83 pada 2024, menunjukkan adanya upaya pembangunan yang berkelanjutan di tingkat provinsi. Sementara itu, IPM Nasional Indonesia menunjukkan peningkatan yang stabil dari 72,81 pada 2020 menjadi 75,02 pada 2024, mencerminkan kemajuan pembangunan manusia secara keseluruhan di negara ini.

Perbandingan antara Kota Jayapura dan Provinsi Papua menunjukkan kesenjangan yang signifikan, dengan IPM Kota Jayapura secara konsisten lebih tinggi sekitar 20 poin. Ini mengindikasikan bahwa Kota Jayapura memiliki tingkat pembangunan manusia yang jauh lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi, karena statusnya sebagai ibu kota provinsi yang memiliki akses lebih baik ke fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dibandingkan dengan angka nasional, IPM

Kota Jayapura juga secara konsisten lebih tinggi, dengan selisih skala angka sekitar 8-9 point menunjukkan bahwa Kota Jayapura memiliki tingkat pembangunan manusia yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional.

Kontribusi Kota Jayapura terhadap IPM Provinsi Papua terbatas karena perbedaan yang besar antara Kota dan Provinsi. Namun, Kota Jayapura dapat berfungsi sebagai model dan pusat pertumbuhan yang dapat mendorong pembangunan di wilayah sekitarnya. Data ini juga menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan yang signifikan antara Kota Jayapura dan wilayah lain di Provinsi Papua, mencerminkan tantangan dalam pemerataan pembangunan di provinsi tersebut. Kemampuan Kota Jayapura untuk memulihkan dan meningkatkan IPM-nya pasca pandemi covid-19 di tahun 2019 menunjukkan resiliensi dan efektivitas kebijakan pembangunan daerahnya.

Kesimpulannya, IPM Kota Jayapura yang tinggi menunjukkan keberhasilan kota ini dalam aspek pembangunan manusia. Namun, kesenjangan yang besar dengan IPM Provinsi Papua menunjukkan perlunya strategi pembangunan yang lebih inklusif dan merata di seluruh provinsi. Kota Jayapura dapat berperan sebagai katalis pembangunan, berbagi praktik terbaik, dan mendukung upaya peningkatan kualitas hidup di wilayah sekitarnya. Tantangan ke depan adalah bagaimana mempertahankan dan meningkatkan IPM Kota Jayapura dengan mendorong peningkatan yang lebih cepat di tingkat Provinsi Papua untuk mengurangi kesenjangan pembangunan.

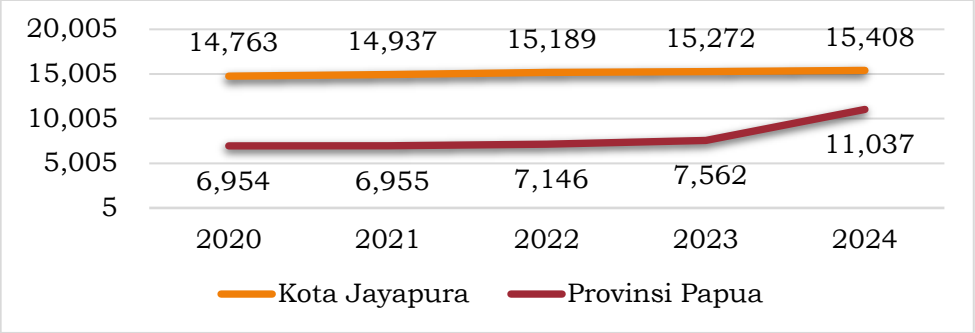
G. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Sebulan untuk Makanan dan Bukan Makanan merupakan indikator penting yang mencerminkan tingkat kesejahteraan dan pola konsumsi masyarakat di suatu daerah. Indikator ini juga dapat memberikan gambaran tentang daya beli dan standar hidup penduduk setempat. Data pengeluaran rata-rata per kapita sebulan di Kota Jayapura dari tahun 2020 hingga 2024

menunjukkan *trend* yang meningkat. Pada tahun 2020, angka pengeluaran tercatat sebesar Rp 14.763 ribu dan pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan dengan angka Rp. 14.937 ribu, diikuti kenaikan lebih lanjut menjadi Rp. 15.189 ribu pada tahun 2022, dan mencapai Rp. 15.408 ribu di tahun 2024.

Pengeluaran rata-rata per kapita Kota Jayapura sejak tahun 2020 hingga 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Provinsi Papua, dimana pengeluaran rata-rata per kapita untuk Provinsi Papua pada tahun 2024 hanya Rp. 11.037 ribu, sedangkan kota Jayapura pada tahun yang sama mencapai Rp. 15.408 ribu. Secara lengkap Pengeluaran rata-rata per kapita Kota Jayapura dan Provinsi Papua disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 2.23.
Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Kota Jayapura dan Provinsi Papua Tahun 2020-2024



Sumber: BPS RI, 2025

Analisis dari data ini menunjukkan secara keseluruhan terdapat *trend* peningkatan pengeluaran per kapita di Kota Jayapura. Peningkatan ini bisa mengindikasikan beberapa hal, seperti membaiknya kondisi ekonomi pasca pandemi, meningkatnya daya beli masyarakat, atau terjadinya inflasi yang mendorong kenaikan harga barang dan jasa. Dalam konteks daya saing, peningkatan pengeluaran per kapita ini dapat diinterpretasikan secara positif maupun negatif. Di satu sisi, menunjukkan peningkatan kesejahteraan dan daya beli

masyarakat Kota Jayapura, yang dapat menjadi daya tarik bagi investor dan pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis di Kota Jayapura. Peningkatan konsumsi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Sedangkan peningkatan pengeluaran juga bisa mengindikasikan naiknya biaya hidup di Kota Jayapura. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan yang setara, hal ini bisa berdampak negatif terhadap daya saing kota dalam menarik dan mempertahankan tenaga kerja atau investasi.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing Kota Jayapura, penting untuk memastikan bahwa peningkatan pengeluaran ini sejalan dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan pengembangan sektor-sektor produktif dapat membantu memastikan bahwa peningkatan pengeluaran ini mencerminkan perbaikan nyata dalam kesejahteraan masyarakat dan daya saing kota secara keseluruhan.

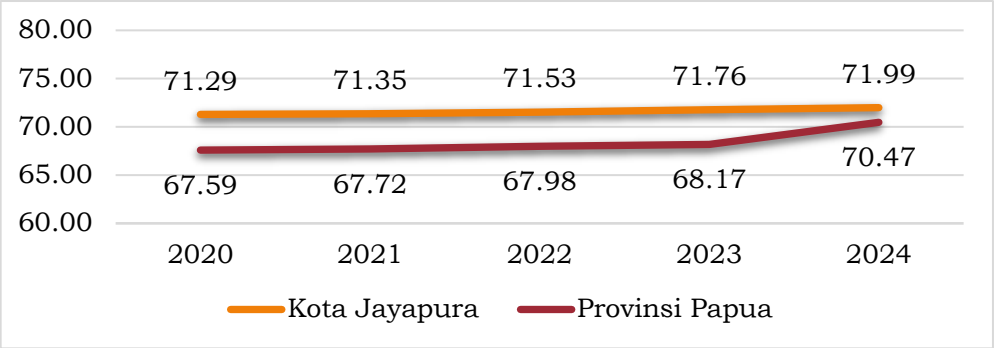
2.1.2.2. Kesehatan untuk Semua

A. Angka Usia Harapan Hidup

Tujuan utama penggunaan AHH adalah untuk mengukur tingkat kesehatan dan kesejahteraan suatu populasi, membandingkan kualitas hidup antar wilayah atau negara, mengevaluasi efektivitas kebijakan kesehatan dan pembangunan, membantu dalam perencanaan layanan kesehatan dan sosial, serta menjadi indikator dalam perhitungan IPM.

Data Angka Harapan Hidup Kota Jayapura untuk periode 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Dimulai dari 71,29 tahun pada 2020, AHH meningkat menjadi 71,35 tahun pada 2021, 71,53 tahun pada 2022, dan mencapai 71,99 tahun pada 2024. *Trend* ini mengindikasikan perbaikan berkelanjutan dalam kesehatan dan kualitas hidup penduduk kota. Dalam lima tahun, AHH Kota Jayapura meningkat sebesar 0,70 tahun, yang merupakan peningkatan yang cukup signifikan mengingat AHH biasanya berubah secara gradual.

Gambar 2.24.
Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Jayapura dan Provinsi Papua Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS RI, 2025

Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Jayapura sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan AHH Provinsi Papua, dimana AHH Provinsi Papua pada tahun 2024 hanya 70,47 tahun, sedangkan Kota Jayapura pada tahun yang sama mencapai 71,99 tahun.

AHH Kota Jayapura menunjukkan bahwa kondisi kesehatan dan kualitas hidup di Kota Jayapura relatif baik. Meskipun terjadi pandemi yang dimulai pada tahun 2020, AHH Kota Jayapura tetap menunjukkan peningkatan, yang mencerminkan efektivitas penanganan pandemi dan ketahanan sistem kesehatan Kota Jayapura. Peningkatan AHH ini didukung oleh berbagai faktor, seperti perbaikan layanan kesehatan, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi, perbaikan gizi masyarakat, serta peningkatan kesadaran akan gaya hidup sehat.

Peningkatan AHH ini memiliki implikasi penting bagi perencanaan kebijakan, terutama dalam hal penyediaan layanan kesehatan dan jaminan sosial untuk populasi yang semakin menua. Meskipun tren positif, masih ada ruang untuk peningkatan. Tantangan ke depan termasuk mengurangi kesenjangan kesehatan dalam masyarakat, menangani penyakit tidak menular, dan mempersiapkan sistem kesehatan untuk populasi yang sudah lansia.

B. Prevalensi Stunting

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik dan perkembangan anak mengalami hambatan yang disebabkan oleh malnutrisi, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Kondisi ini sering kali dimulai sejak 1.000 hari pertama kehidupan anak, yang merupakan periode kritis dalam menentukan perkembangan masa depan mereka. Stunting tidak hanya mempengaruhi tinggi badan anak, tetapi juga berdampak pada kemampuan kognitif dan produktivitas di masa dewasa. Oleh karena itu, stunting menjadi salah satu indikator penting dalam menilai status kesehatan dan kesejahteraan anak di suatu wilayah.

Sejarah stunting sebagai masalah kesehatan masyarakat telah diakui sejak beberapa dekade yang lalu. Pada pertengahan abad ke-20, penelitian mulai mengidentifikasi hubungan antara malnutrisi kronis pada anak-anak dan dampaknya terhadap pertumbuhan fisik serta perkembangan kognitif. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan lembaga-lembaga kesehatan global lainnya kemudian mengembangkan standar pertumbuhan anak yang digunakan untuk mengukur dan memantau prevalensi stunting. Selama bertahun-tahun, berbagai negara telah mengadopsi kebijakan dan program untuk mengatasi stunting, dengan fokus pada peningkatan gizi ibu dan anak, akses terhadap layanan kesehatan, serta edukasi tentang pentingnya gizi seimbang dan sanitasi yang baik.

Tabel 2.51
Prevalensi Stunting Kota Jayapura Tahun 2021-2024

URAIAN	TAHUN			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah Balita	6,316	9,614	5,841	6,087
Pendek	714	1,120	845	584
Sangat Pendek	190	382	286	176
Prevalensi (%)	**14.3**	**15.6**	**19.4**	**12.5**

Sumber: Website Ditjen Bangda Kemendagri (Diolah)

Prevalensi stunting dari tahun 2021 hingga 2024 di Kota Jayapura mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, jumlah balita adalah 6,316 anak, yang kemudian meningkat tajam menjadi 9,614 anak pada tahun 2022. Namun, jumlah ini menurun drastis menjadi 5,841 anak di tahun 2023, dan sedikit meningkat menjadi 6,087 anak pada tahun 2024.

Jumlah balita yang mengalami kondisi pendek juga memperlihatkan fluktuasi. Pada tahun 2021, terdapat 714 balita pendek, dan jumlah ini meningkat tajam menjadi 1,120 anak pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, jumlah balita pendek menurun menjadi 845 anak dan terus berkurang menjadi 584 anak pada tahun 2024. Kondisi sangat pendek juga menunjukkan tren yang bervariasi. Pada tahun 2021, terdapat 190 balita sangat pendek, yang meningkat menjadi 382 anak pada tahun 2022. Jumlah ini kemudian menurun secara bertahap menjadi 286 anak di tahun 2023, dan akhirnya mencapai 176 anak pada tahun 2024.

Prevalensi stunting di Kota Jayapura mengalami peningkatan dari tahun 2021 (14.3%) ke tahun 2023 (19.4%). Namun, pada tahun 2024, prevalensi ini turun menjadi 12.5%, menunjukkan adanya perbaikan dalam penanganan dan pencegahan stunting. Penurunan prevalensi stunting dari 19.4% di tahun 2023 menjadi 12.5% di tahun 2024 merupakan indikator positif dari intervensi kesehatan, nutrisi, dan program-program pengembangan anak yang telah diterapkan di Kota Jayapura.

Data di atas menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan jumlah balita dengan kondisi pendek dan sangat pendek pada tahun 2022, upaya yang dilakukan pada tahun-tahun berikutnya berhasil menurunkan prevalensi stunting secara signifikan pada tahun 2024. Upaya ini perlu terus diperkuat dan dikembangkan untuk memastikan setiap anak di Kota Jayapura dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

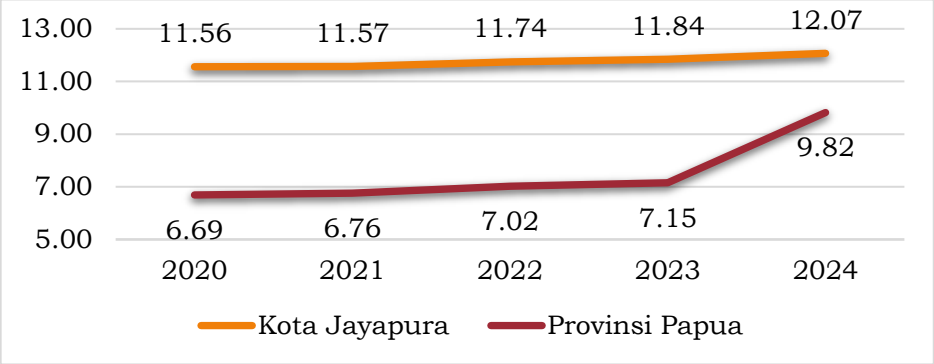
2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

A. Rata-Rata Lama Sekolah

RLS (Rata-rata Lama Sekolah) adalah indikator pendidikan yang menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Grafik di bawah menjelaskan tentang data Rata-rata Lama Sekolah Kota Jayapura untuk periode 2020-2024, dimana menunjukkan *trend* peningkatan yang konsisten dan cukup signifikan. Pada tahun 2020, RLS Kota Jayapura tercatat sebesar 11,56 tahun. Angka ini meningkat sedikit menjadi 11,57 tahun pada 2021. Namun, terjadi peningkatan yang lebih besar pada tahun 2022 menjadi 11,74 tahun, dan terus meningkat hingga mencapai 12,07 tahun pada 2024. Total peningkatan selama lima tahun periode ini adalah 0,51 tahun.

Rata-Rata Lama Sekolah Kota Jayapura sejak tahun 2020 hingga 2024 capaiannya lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Papua, dimana pada tahun 2024 capaian provinsi Papua hanya mencapai 9,82 tahun, sedangkan Kota Jayapura mencapai 12,07.

Gambar 2.25.
Rata-Rata Lama Sekolah Kota Jayapura dan Provinsi Papua Tahun 2020-2024



Sumber: BPS RI, 2025

Angka RLS Kota Jayapura yang berada di atas 11 tahun mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di kota ini telah menyelesaikan pendidikan setara dengan kelas 2 atau 3 SMA. Ini merupakan capaian yang cukup baik dan menunjukkan tingkat

pendidikan yang relatif tinggi di Kota Jayapura. Dalam konteks nasional, angka ini berada di atas rata-rata nasional Indonesia yang berkisar sekitar 8-9 tahun, menempatkan Kota Jayapura sebagai salah satu daerah dengan tingkat pendidikan yang baik di Indonesia. Capaian ini sejalan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024, yang menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penddikan.

Peningkatan RLS yang konsisten selama periode pandemi (2020-2022) menunjukkan ketahanan sistem pendidikan Kota Jayapura. Ini mencerminkan keberhasilan dalam mempertahankan partisipasi sekolah dan mendorong penyelesaian pendidikan di tengah tantangan pandemi, sesuai dengan arahan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19. Lonjakan peningkatan yang lebih besar pada tahun 2022 dan 2023 menandakan adanya kebijakan program Pendidikan yang berhasil mendorong peningkatan tingkat pendidikan penduduk, seperti program pendidikan untuk orang dewasa dan insentif dalam bentuk beasiswa untuk menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi.

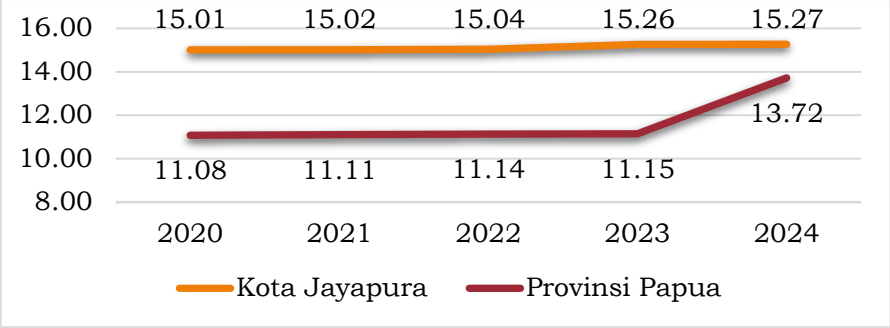
Meskipun capaian RLS Kota Jayapura sudah cukup baik, masih ada ruang untuk peningkatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Tantangan ke depan termasuk mendorong lebih banyak penduduk untuk menyelesaikan pendidikan menengah atas dan melanjutkan ke pendidikan tinggi, sesuai dengan program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah. Selain itu, fokus juga perlu diberikan pada pengurangan kesenjangan pendidikan antar kelompok masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan memastikan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

B. Harapan Lama Sekolah

Angka HLS (Harapan Lama Sekolah) adalah indikator pendidikan yang menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Data Angka Harapan Lama Sekolah Kota Jayapura untuk periode 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, HLS Kota Jayapura tercatat sebesar 15,01 tahun. Kemudian 15,02 tahun pada 2021, 15,04 tahun pada 2022, 15,26 tahun 2023 dan 15,27 pada tahun 2024. Peningkatan total selama lima tahun periode ini adalah 0,26 tahun. Meskipun peningkatannya terlihat kecil, konsistensi tren positif ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam sistem pendidikan Kota Jayapura.

Selanjutnya, Angka Harapan Lama Sekolah Kota Jayapura pada periode 2020 sampai 2024, apabila dibandingkan dengan Provinsi Papua maka capaiannya lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Provinsi Papua. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.26.
Angka Harapan Lama Sekolah Kota Jayapura dan Provinsi Papua Tahun 2020–2024



Sumber: BPS RI, 2025

Angka HLS Kota Jayapura yang berada di atas 15 tahun mengindikasikan bahwa rata-rata anak di kota ini diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi (setara dengan gelar Sarjana). Ini merupakan capaian yang sangat baik dan

menunjukkan komitmen kuat terhadap pendidikan di Kota Jayapura. Dalam konteks nasional, angka ini jauh di atas rata-rata nasional Indonesia yang berkisar sekitar 12-13 tahun, menempatkan Kota Jayapura sebagai salah satu daerah dengan capaian pendidikan tertinggi di Indonesia. Peningkatan HLS yang konsisten, meskipun kecil, selama periode pandemi COVID-19 dan pasca pandemi (2020-2022) menunjukkan ketahanan sistem pendidikan Kota Jayapura. Ini mencerminkan keberhasilan dalam menerapkan pembelajaran jarak jauh dan upaya untuk mempertahankan partisipasi sekolah di tengah tantangan pandemi. Faktor-faktor yang berkontribusi pada peningkatan HLS ini termasuk perbaikan infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas pengajaran, program beasiswa, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi.

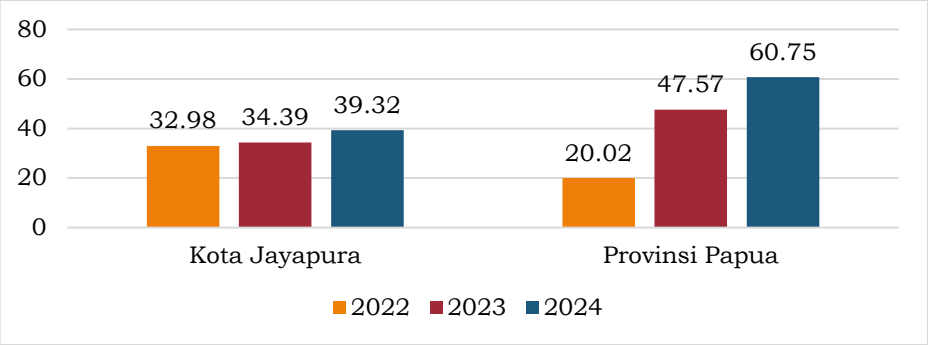
Meskipun capaian HLS Kota Jayapura sudah sangat baik, tantangan ke depan adalah mempertahankan dan meningkatkan kualitas pendidikan seiring dengan kuantitasnya. Fokus perlu diarahkan pada pengurangan kesenjangan akses pendidikan, peningkatan relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja, dan penguatan pendidikan vokasi sebagai alternatif pendidikan tinggi. Selain itu, menjaga konsistensi peningkatan HLS ini juga penting untuk memastikan bahwa Kota Jayapura terus menjadi contoh dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan.

C. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran tingkat literasi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah. IPLM mengukur usaha pemerintah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai sarana belajar. Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kota Jayapura selama 3 (tiga) tahun terakhir (2022-2024) menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2024 IPLM Kota Jayapura mencapai 39,32 kategori Rendah, sementara itu untuk Provinsi Papua pada tahun yang sama sebesar

60,75 kategori Sedang. Nilai ini menunjukkan nilai IPLM Kota Jayapura masih jauh tertinggal dari provinsi, sehingga membutuhkan upaya yang terpadu di tahun-tahun berikutnya.

Gambar 2.27.
Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Kota Jayapura dan Provinsi Papua Tahun 2022-2024



Sumber: Perpusnas RI, 2025

Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur penyusun IPLM Kota Jayapura tahun 2024, disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.52
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Unsur Penyusunnya Tahun 2024

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Unsur Penyusun Indeks						
	Rasio Pemetaan Layanan Perpustakaan	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari	Rasio Perpustakaan Ber-SNP	Rasio Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan	Rasio Anggota Perpustakaan
39,32	0,57237	0,05134	0,71108	0,02097	1,00000	0,27600	0,12052

Sumber: Perpusnas RI, 2025

2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

A. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial

Persentase rumah tangga yang memiliki atau menerima jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial masyarakat. Data pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan pada umumnya jenis

jaminan sosial meningkatan di tahun 2023 jika dibandingkan tahun sebelumnya, kecuali pada jenis jaminan sosial Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Tabel 2.53
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial dalam Setahun Terakhir dan Jenis Jaminan Sosial di Kota Jayapura Tahun 2022 dan 2023 (Persen)

Jenis Jaminan Sosial	Tahun	
	2022	2023
Jaminan Pensiun/Veteran	16,23	24,66
Jaminan Hari Tua	8,37	14,93
Jaminan/Asuransi Kecelakaan Kerja	11,12	13,77
Jaminan/Asuransi Kematian	8,07	12,33
aminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)	-	4,39
Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	3,33	1,96

Sumber: BPS Kota Jayapura, 2025

B. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial

Masyarakat Kota Jayapura memiliki atau menerima jaminan sosial. Adapun beberapa jeis jaminan sosial yang diterima, yaitu:

a. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-Warong. Pada tahun 2020 program BPNT dikembangkan menjadi program Sembako.
b. Program Sembako adalah pengembangan dari program BPNT. Kriteria pangan yang diperoleh adalah pangan bernutrisi dan bahan makanan yang sensitif dengan daya beli masyarakat. Jenis bahan pangan dalam program sembako yaitu sumber karbohidrat, seperti beras (dapat diganti jagung/sagu/ubi) dan sumber protein, seperti telur, daging/ayam/ikan, kacang-kacangan (misal tempe tahu). Komoditas bahan pangan sembako mengakomodir ketersediaan pangan lokal. KPM diberikan kebebasan untuk memilih bahan pangan tersebut.

Sejak Maret 2020, pemerintah menaikkan besaran manfaat program Sembako menjadi Rp200.000,-/KPM/bulan.

c. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan didistribusikan secara gradual pada tahun 2014-2016. KKS merekam data penerima dan berfungsi sebagai tabungan atau dompet elektronik (e-wallet) untuk memudahkan pemerintah menyalurkan bantuan sosial.
d. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial (bansos) bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin/rentan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. PKH menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki akses keluarga miskin dan rentan terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas hidup keluarga sasaran dan, dalam cakupan lebih luas, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Keluarga Miskin (KM) dan rentan berdasarkan Basis Data Terpadu serta memenuhi komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

Adapun persentase rumah tangga menurut jenis program perlindungan sosial yang diterima di Kota Jayapura pada tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.54
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima di Kota Jayapura Tahun 2024

Jenis Program Perlindungan Sosial	Persentase Rumah Tangga yang Menerima
Bantuan Pangan (BPNT/Program Sembako)	5,12
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	5,60
Program Keluarga Harapan (PKH)	8,93

Sumber: BPS Kota Jayapura, 2025

2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

A. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan nasional.

Pada indikator indeks Pembangunan Kebudayaan Pemerintah Kota Jayapura memperoleh nilai sebesar 48,52%. Hasil ini merupakan perolehan sementara akibat belum di rilisnya Indeks Pembangunan Kebudayaan untuk Tahun 2024. Pengukuran Persentase Kebudayaan Daerah Yang dilestarikan pada capaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Tahun 2024.

Tabel 2.55
Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Jayapura Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Kebudayaan	N/A	N/A	N/A	48,52	48,52

Sumber: LPPD Kota Jayapura Tahun 2024

2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

A. Indeks Perlindungan Anak

IPA (Indeks Perlindungan Anak) merupakan alat ukur yang penting untuk menilai seberapa baik suatu daerah dalam melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak-anak. Indeks ini mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan hak anak (Indeks Pemenuhan Hak Anak/IPHA), mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan khusus bagi anak-anak (Indeks Pemenuhan Khusus Anak/IPHK) yang membutuhkan perhatian lebih. Dengan memahami IPA, kita dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem perlindungan

anak dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk memperbaiki kondisi tersebut.

Indeks Perlindungan Anak di Kota Jayapura sejak tahun 2021 sampai 2023 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2021 yaitu sebesar 62,44 dan menurun pada tahun 2022 menjadi 60,91, namun pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 61,76. Adapun perkembangan Indeks Perlindungan Anak Kota Jayapura Tahun 2021-2023 secara lengkap disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.56
Indeks Perlindungan Anak Kota Jayapura Tahun 2021-2023

Uraian	2021	2022	2023
Indeks Perlindungan Anak	62,44	60,91	61,76

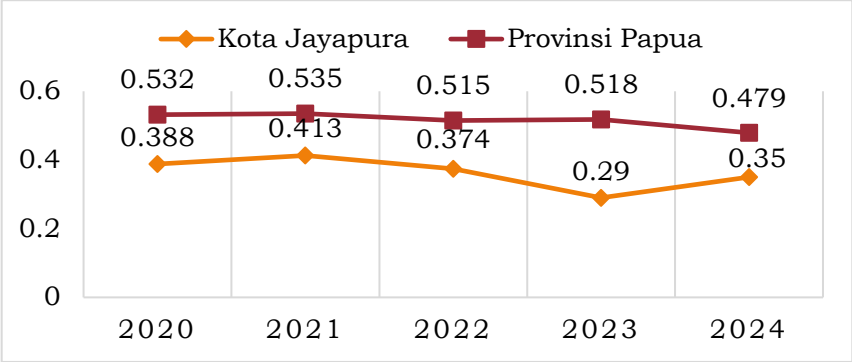
Sumber: Buku IPA Tahun 2021-2023

B. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi.

Indeks Ketimpangan Gender Kota Jayapura pada tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi. Nilai IKG pada tahun 2020 sebesar 0,532 dan tahun 2023 mencapai 0,518. Jika dibandingkan dengan IKG Provinsi Papua, maka nilai IKG Kota Jayapura selalu lebih tinggi. Masih tingginya nlai IKG mengindikasikan bahwa masih terdapat ketimpangan gender di kota ini.

Gambar 2.28.
Indeks Ketimpangan Gender Kota Jayapura dan Provinsi Papua
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS RI, 2025

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

A. Rasio Ketergantungan

Tingkat Ketergantungan penduduk usia non produktif dengan usia produktif, atau Rasio Ketergantungan, adalah indikator demografis yang menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun) dalam suatu populasi. Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah penduduk usia non produktif dengan jumlah penduduk usia produktif, kemudian dikalikan 100. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk usia non produktif. Rasio Ketergantungan memiliki implikasi penting dalam perencanaan kebijakan sosial dan ekonomi, sistem kesehatan dan pendidikan, serta kebijakan pensiun dan jaminan sosial.

Tabel 2.57
Tingkat Ketergantungan Di Kota Jayapura Tahun 2020 – 2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	112.095	114.727	95.694	99.839	84.289
2.	Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun	16.293	17.691	29.420	17.883	16.511
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak produktif	128.388	132.418	125.114	117.722	100.800
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	268.408	271.586	264.933	278.647	303.999

RASIO KETERGANTUNGAN	**47,83**	**48,76**	**47,22**	**42,25**	**33,16**

Sumber: Hasil Analisis Data Bappeda Kota Jayapura, 2024 dan LPPD Kota Jayapura Tahun 2024

Analisis data Tingkat Ketergantungan di Kota Jayapura tahun 2020-2024 menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung menurun. Pada tahun 2020, Tingkat Ketergantungan tercatat sebesar 47,83, meningkat menjadi 48,76 pada tahun 2021, dan terjadi penurunan signifikan pada tahun 2022 sampai 2024 di mana Tingkat Ketergantungan turun menjadi 33,16 pada tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan jumlah penduduk usia non produktif.

Tingkat Ketergantungan lebih rendah dapat mengindikasikan peluang untuk pertumbuhan ekonomi lebih baik, karena lebih banyak penduduk berada dalam usia produktif dan dapat berkontribusi pada perekonomian.

Namun, penting untuk dicatat bahwa penurunan Tingkat Ketergantungan ini juga membawa tantangan tersendiri. Kota Jayapura perlu memastikan tersedianya lapangan kerja yang cukup untuk menyerap peningkatan jumlah penduduk usia produktif. Selain itu, meskipun beban ketergantungan menurun, tetap diperlukan perencanaan yang baik untuk sistem pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial untuk mengakomodasi kebutuhan penduduk usia non produktif yang jumlahnya tetap meningkat. Dengan pengelolaan yang tepat, *trend* penurunan Tingkat Ketergantungan ini dapat menjadi momentum positif bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Jayapura.

B. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

1. Tingkat Kegemaran Membaca

Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat adalah Tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu.

Tingkat Kegemaran Membaca di Kota Jayapura pada tahun 2024 yaitu 58,21, lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Papua yang hanya 50,86.

Tabel 2.58
Tingkat Kegemaran Membaca Kota Jayapura Tahun 2024

Tingkat Kegemaran Membaca	2024	Unsur Penyusun				
		Frekuensi Kegemaran Membaca	Durasi Membaca (jam/hari)	Jumlah Buku yang di Baca	Frekuensi Akses Internet (kali/minggu	Durasi Akses Internet (jam/hari)
Kota Jayapura	58,21	3-4	01.00'-01.59'	1-2	3-4	01.00'-01.59'

Sumber: BPS Provinsi Papua 2025

2.1.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

A. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Distribusi Kontribusi PDRB ADHB Industri Pengolahan di Kota Jayapura pada tahun 2020 yaitu sebesar 2,51 persen dan terus mengalami penurunan menjadi hanya 2,40 persen pada tahun 2024. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.59
Distribusi Persentase PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan di Kota Jayapura Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Industri Pengolahan	2,51	2,47	2,43	2,41	2,40

Sumber BPS Kota Jayapura, 2025

B. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Distribusi Persentase PDRB ADHB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kota Jayapura pada tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, dimana pada

tahun 2020 yaitu hanya 1,64 persen dan fluktuasi serta mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 1,79 persen. Adapun Distribusi Persentase PDRB ADHB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kota Jayapura Tahun 2020–2024 secara lengkap disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.60
Distribusi Persentase PDRB ADHB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kota Jayapura Tahun 2020–2024

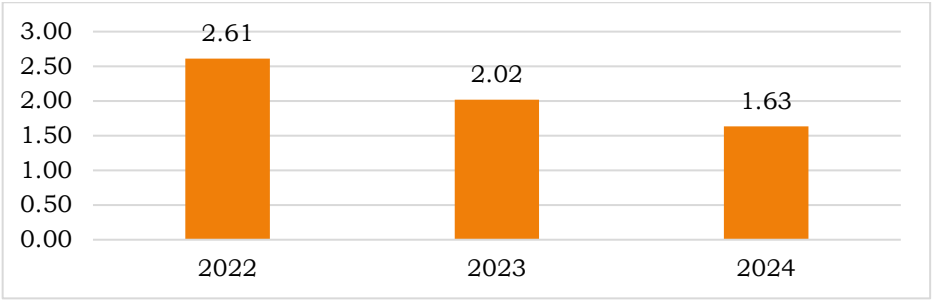
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,64	1,71	1,72	1,71	1,79

Sumber BPS Kota Jayapura, 2025

C. Rasio Kewirausahaan

Rasio Kewirausahaan adalah perbandingan populasi Wirausaha terhadap populasi angkatan kerja Indonesia. Populasi Wirausaha adalah populasi Wirausaha Pemula ditambah populasi Wirausaha Mapan. Pada tahun 2022 Rasio Kewirausahaan di Kota Jayapura yaitu sebesar 2,61 dan capaiannya terus menurun hingga tahun 2024 menjadi 1,63. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.29.
Rasio Kewirausahaan di Kota Jayapura Tahun 2022–2024



Sumber BPS Kota Jayapura, 2025

D. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). TPAK di Kota Jayapura selama 5 (lima) tahun terakhir

mengalami fluktuasi, sangat dipengaruhi oleh kondisi krisis pada saat pandemi COVID-19. Lalu berangsur membaik sampai dengan tahun 2024. Walau demikian, TPAK Kota Jayapura masih berada di bawah TPAK Provinsi Papua. Perkembangan TPAK selama 5 (lima) tahun terakhir dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 2.61
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Jayapura
Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Jayapura	63,09	63,75	60,61	67,37	67,81
Provinsi Papua	72, 16	78,29	77,75	77,20	68,40

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2025

E. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap inovasi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. IID merupakan kumpulan variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah.

Indeks Inovasi Daerah di Kota Jayapura sejak tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 yaitu sebesar 339 dengan kategori kurang inovatif. Pada tahun 2021 Indeks Inovasi Daerah di Kota Jayapura yaitu sebesar 46,89 dengan kategori inovatif dan mengalami fluktuasi serta cenderung menurun hingga tahun 2024 menjadi 35,66 dengan kategori inovatif. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.62
Indeks Inovasi Daerah Kota Jayapura Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Inovasi Daerah	33,9 (kurang inovatif)	46,89 (inovatif)	37,27 (inovatif)	48,08 (inovatif)	35,66 (inovatif)

Sumber: Kepmendagri tentang Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020-2024

2.1.3.3. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

A. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Produk Domestik Regional Bruto Kota Jayapura Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto sejak tahun 2019 sampai 2023 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2019 yaitu sebesar 13.759.136,41 juta rupiah dan pada tahun 2023 angkanya naik menjadi 17.364.221,74 juta rupiah. Adapun secara lengkap perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kota Jayapura Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (Juta Rupiah) Tahun 2019–2023 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.63
Produk Domestik Regional Bruto Kota Jayapura Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (Juta Rupiah) Tahun 2019–2023

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
Pembentukan Modal Tetap Bruto	13.759.136,41	13.992.563,20	15.124.818,47	16.355.509,13	17.364.221,74

Sumber: PDRB Kota Jayapura Menurut Pengeluaran 2019-2023

Sama hal nya dengan capaian PMTB ADHB, untuk PDRB ADHK PMTB juga terus mengalami peningkatan sejak tahun 2019 sampai 2023, dari 9.542.174,42 juta rupiah pada tahun 2019, meningkat menjadi 10.630.404,64 juta rupiah pada tahun 2023.

Tabel 2.64
Produk Domestik Regional Bruto Kota Jayapura Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (Juta Rupiah) Tahun 2019–2023

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
Pembentukan Modal Tetap Bruto	9.542.174,42	9.553.502,58	10.148.019,00	10.362.551,45	10.630.404,64

Sumber: PDRB Kota Jayapura Menurut Pengeluaran 2019-2023

B. Net Ekspor Barang dan Jasa

Produk Domestik Regional Bruto Kota Jayapura Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Net Ekspor Barang dan Jasa pada tahun 2019 yaitu sebesar -12.999.680,91 juta rupiah dan pada tahun 2023 yaitu sebesar -17.428.694,27 juta rupiah.

Tabel 2.65
Produk Domestik Regional Bruto Kota Jayapura Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Net Ekspor Barang dan Jasa (Juta Rupiah) Tahun 2019–2023

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
Net Ekspor Barang dan Jasa	-12.999.680,91	-12.213.573,07	-13.512.526,51	-15.189.170,69	-17.428.694,27

Sumber: PDRB Kota Jayapura Menurut Pengeluaran 2019-2023

Sedangkan untuk Produk Domestik Regional Bruto Kota Jayapura Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Net Ekspor Barang dan Jasa pada tahun 2019 yaitu sebesar -7.335.252,57 juta rupiah dan pada tahun 2023 yaitu sebesar -8.411.094,66 juta rupiah.

Tabel 2.66
Produk Domestik Regional Bruto Kota Jayapura Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Net Ekspor Barang dan Jasa (Juta Rupiah) Tahun 2019–2023

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
Net Ekspor Barang dan Jasa	-7.335.252,57	-7.167.813,11	-7.843.775,81	-7.738.306,90	-8.411.094,66

Sumber: PDRB Kota Jayapura Menurut Pengeluaran 2019-2023

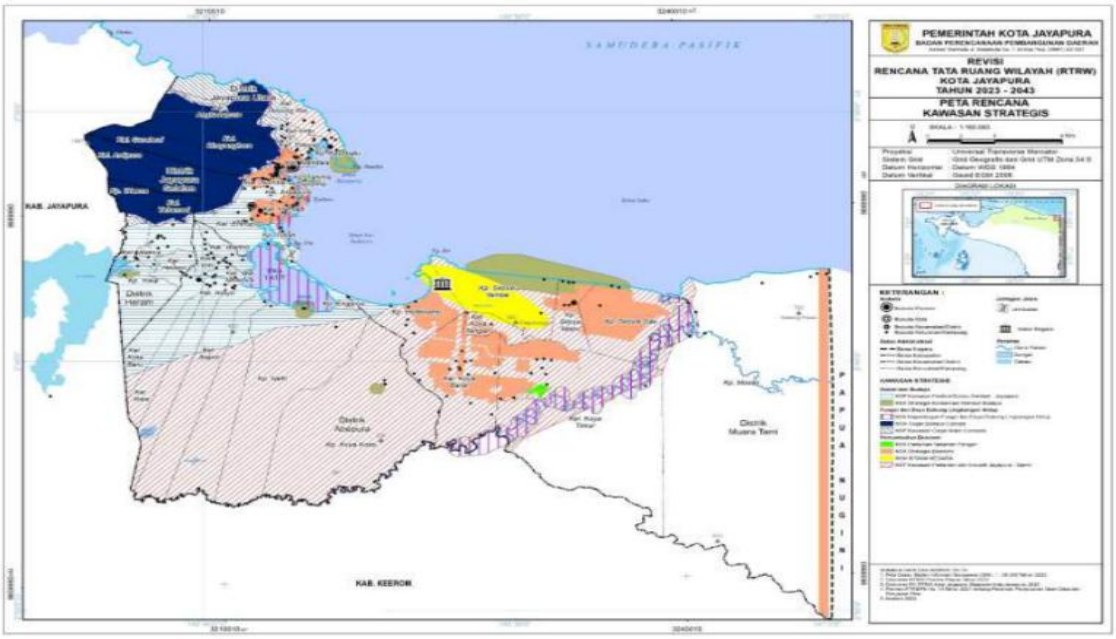
2.1.3.4. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

A. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Revisi RTRW Kota Jayapura 2013-2033, pengembangan wilayah di Kota Jayapura berfokus pada KSK (Kawasan Strategis Kota Jayapura). KSK adalah area yang mendapat prioritas dalam penataan ruang karena memiliki dampak signifikan terhadap aspek ekonomi, sosial-budaya, lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi di tingkat Kota Jayapura. Proses penentuan

KSK melibatkan beberapa faktor, antara lain analisis potensi dan tantangan masing-masing kawasan, kesesuaian dengan tujuan penataan ruang dan kebijakan pembangunan Kota Jayapura, pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan, tingkat konflik yang terjadi, skala pengaruh kawasan, kapasitas fiskal dan kemampuan pemerintah daerah, potensi penyerapan tenaga kerja, serta pola interaksi antar wilayah. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, dapat ditentukan kawasan-kawasan yang dianggap prioritas dan strategis bagi perkembangan Kota Jayapura.

Gambar 2.30.
Peta Kawasan Strategis Kota Jayapura



Sumber: Revisi RTRW Kota Jayapura, 2023

KSK memiliki beberapa fungsi penting dalam penataan ruang wilayah Kota Jayapura. KSK berperan dalam mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan mengkoordinasikan pembangunan yang terpadu di kawasan bernilai strategis. Selain itu, KSK berfungsi sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan yang dianggap memiliki pengaruh sangat penting terhadap wilayah kota. KSK juga mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak dapat terakomodasi dalam rencana struktur dan pola ruang,

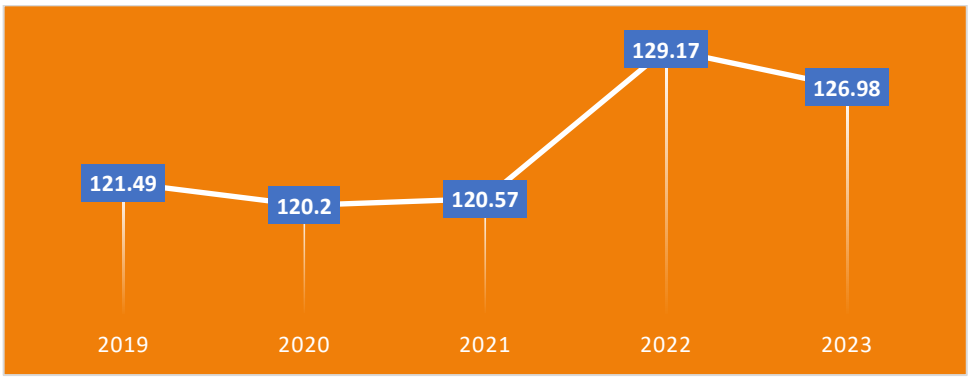
serta menjadi dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kota. Dalam implementasinya, KSK terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu Kawasan Strategis dari Kepentingan Ekonomi, Kawasan Strategis dari Kepentingan Sosial dan Budaya, serta Kawasan Strategis dari Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup. Pembagian ini mekan perencanaan dan pengembangan yang lebih terarah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing kawasan.

B. Indeks Infrastruktur Dasar Wilayah

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kebutuhan biaya untuk membangun suatu bangunan atau infrastruktur di suatu daerah dibandingkan dengan standar nasional atau daerah lain. IKK yang lebih tinggi menunjukkan biaya konstruksi yang lebih mahal di daerah tersebut.

Nilai IKK Kota Jayapura menunjukkan fluktuasi yang menarik dalam periode 2019-2023. Pada tahun 2019, IKK Kota Jayapura tercatat sebesar 121,49, yang kemudian mengalami penurunan menjadi 120,2 di Tahun 2020. Tahun berikutnya, 2021, terjadi sedikit kenaikan menjadi 120,57. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan IKK mencapai 129.17, namun kemudian mengalami penurunan kembali menjadi 126,98 di Tahun 2023.

Gambar 2.31.
Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Jayapura
Tahun 2019-2023



Sumber: Hasil Analisis Data Bappeda Kota Jayapura, dan BPS Kota Jayapura, 2024

Sementara itu, data perbandingan yang disajikan menunjukkan trend penurunan yang konsisten dari tahun ke tahun. Dimulai dari 218,59 pada tahun 2019, angka ini terus menurun menjadi 208,9 di tahun 2020, 207,11 di tahun 2021, dan 192,57 di tahun 2022. Penurunan paling drastis terlihat pada tahun 2023 dengan angka 135,56, meskipun perlu dicatat bahwa angka ini ditandai dengan tanda bintang (*) yang mengindikasikan data sementara atau perlu verifikasi lebih lanjut. Analisis dari data ini menunjukkan bahwa meskipun IKK Kota Jayapura cenderung fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, angka perbandingannya justru menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Hal ini bisa mengindikasikan bahwa meskipun biaya konstruksi di Kota Jayapura cenderung meningkat, namun relatif terhadap daerah lain atau standar nasional, tingkat kemahalannya sebenarnya menurun.

Dalam konteks daya saing, *trend* penurunan angka perbandingan IKK ini menunjukkan peningkatan kemampuan daya saing Kota Jayapura dalam sektor konstruksi. Penurunan biaya konstruksi relatif terhadap daerah lain dapat menjadi daya tarik bagi investor dan pengembang, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kota Jayapura. Meskipun IKK Kota Jayapura masih di atas 100 (yang menunjukkan biaya konstruksi masih lebih tinggi dari rata-rata nasional), tren penurunan ini mengindikasikan bahwa gap tersebut semakin mengecil, meningkatkan posisi kompetitif Kota Jayapura dalam menarik investasi dan proyek pembangunan.

C. Rasio Aksesbilitas dan Mobilitas Kota Jayapura

Rasio aksesibilitas dan mobilitas merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas sistem transportasi suatu kota. Aksesibilitas mengacu pada kemudahan masyarakat dalam mencapai tujuan atau layanan tertentu, sementara mobilitas berkaitan dengan kemampuan untuk bergerak secara efisien dalam sistem transportasi. Rasio antara panjang jalan dan jumlah kendaraan dapat memberikan gambaran

kasar tentang tingkat aksesibilitas dan mobilitas di suatu wilayah. Rasio yang lebih rendah umumnya menunjukkan potensi kepadatan lalu lintas yang lebih tinggi, yang dapat mengurangi aksesibilitas dan mobilitas, sementara rasio yang lebih tinggi dapat mengindikasikan sistem transportasi yang lebih lancar.

Tabel 2.67
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Jayapura
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Panjang Jalan a.Jalan Nasional b. Jalan Provinsi c.Jalan Kota	 508.494	 508.494	 508.494	 42.668 5.380 550.912	 42.668 5.380 550.912
	Total	508.494	508.494	508.494	598.960	598.960
2.	Jumlah Kendaraan	211.662	212.312	221.665	234.552	258.007
3.	**Rasio**	**1 : 41,62**	**1 : 41,75**	**1 : 43,59**	**1 : 39,16**	**1 : 43,07**

Sumber: Hasil Analisis Data Bappeda Kota Jayapura, 2024

Data yang disajikan pada Tabel di atas, menggambarkan perkembangan infrastruktur jalan dan jumlah kendaraan di Kota Jayapura dari tahun 2019 hingga 2023. Informasi ini mencakup panjang jalan berdasarkan klasifikasinya (Jalan Nasional, Jalan Provinsi, dan Jalan Kota), total panjang jalan, jumlah kendaraan, serta rasio antara panjang jalan dan jumlah kendaraan. Analisis data menunjukkan beberapa tren penting. Panjang jalan total di Kota Jayapura tetap konstan pada 508.494 meter dari tahun 2019 hingga 2021. Namun, terjadi peningkatan signifikan sebesar 17,8% pada tahun 2022, mencapai 598.960 meter, yang kemudian tetap stabil hingga 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan data Jalan Nasional sepanjang 42.668 meter dan Jalan Provinsi sepanjang 5.380 meter, serta pertambahan Jalan Kota menjadi 550.912 meter.

Sementara itu, jumlah kendaraan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Dari 211.662 kendaraan pada tahun 2019, jumlah ini meningkat menjadi 258.007 pada tahun 2023, menunjukkan

pertumbuhan sebesar 21,9% selama periode lima tahun. Peningkatan tahunan terbesar terjadi antara tahun 2022 dan 2023, dengan pertumbuhan 10% dari 234.552 menjadi 258.007 kendaraan. Rasio antara panjang jalan dan jumlah kendaraan menunjukkan fluktuasi menarik. Rasio ini meningkat dari 1:41,62 pada tahun 2019 menjadi 1:43,59 pada tahun 2021, menunjukkan peningkatan kepadatan lalu lintas. Namun, dengan penambahan panjang jalan pada tahun 2022, rasio membaik menjadi 1:39,16, menandakan penurunan kepadatan. Pada tahun 2023, rasio kembali meningkat menjadi 1:43,07 akibat pertumbuhan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan penambahan panjang jalan.

Dalam konteks daya saing, perkembangan ini memiliki beberapa implikasi penting. Peningkatan panjang jalan, terutama dengan penambahan Jalan Nasional dan Provinsi, dapat meningkatkan konektivitas Kota Jayapura dengan wilayah sekitarnya, yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing kota. Infrastruktur jalan yang lebih baik dapat menarik investasi, meningkatkan efisiensi logistik, dan mendukung perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya.

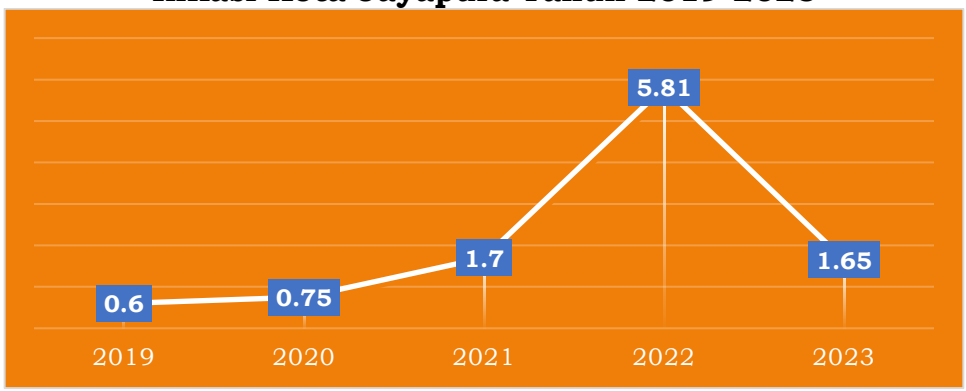
Namun, pertumbuhan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan penambahan panjang jalan menimbulkan tantangan tersendiri. Peningkatan kepadatan lalu lintas, seperti yang tercermin dalam rasio yang cenderung meningkat, dapat mengurangi efisiensi transportasi dan berpotensi menurunkan kualitas hidup penduduk. Hal ini bisa berdampak negatif pada daya saing jika tidak dikelola dengan baik. Dengan pengelolaan yang tepat, perkembangan infrastruktur jalan dan manajemen pertumbuhan jumlah kendaraan dapat menjadi faktor pendorong daya saing Kota Jayapura, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

2.1.3.5. Stabilitas Ekonomi Makro

A. Tingkat Inflasi

Analisis inflasi tahunan Kota Jayapura dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang menarik dan mencerminkan berbagai faktor ekonomi yang mempengaruhi kota ini selama periode tersebut. Pada tahun 2019, inflasi Kota Jayapura tercatat relatif rendah, yaitu 0,60%. Angka ini menunjukkan stabilitas harga yang baik dan menggambarkan kondisi ekonomi yang cukup terkendali. Memasuki tahun 2020, terjadi sedikit peningkatan inflasi menjadi 0,75%. Meskipun kenaikan ini tidak signifikan, perlu dicatat bahwa tahun 2020 adalah tahun dimulainya pandemi COVID-19 global. Kenaikan kecil ini mencerminkan awal dari dampak pandemi terhadap ekonomi lokal, namun juga menunjukkan ketahanan ekonomi Kota Jayapura dalam menghadapi guncangan awal pandemi.

Gambar 2.32.
Inflasi Kota Jayapura Tahun 2019-2023



Sumber: Hasil Analisis Data Bappeda Kota Jayapura, dan BPS Kota Jayapura, 2024

Pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan inflasi yang lebih jelas, mencapai 1,70%. Kenaikan ini besar terkait dengan pemulihan ekonomi *pasca-lockdown* dan peningkatan aktivitas ekonomi seiring dengan pelonggaran pembatasan sosial. Meskipun terjadi kenaikan, tingkat inflasi ini masih dapat dianggap moderat dan menunjukkan pemulihan ekonomi yang terkendali.

Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2022, dengan inflasi mencapai 5,81%. Ini merupakan tingkat inflasi tertinggi dalam periode lima tahun yang diamati. Kenaikan tajam ini disebabkan oleh kombinasi faktor, termasuk pemulihan ekonomi yang kuat pasca-pandemi, gangguan rantai pasokan global, dan kenaikan harga energi dan komoditas. Tingkat inflasi ini mencerminkan tekanan harga yang cukup besar dan telah berdampak signifikan pada daya beli masyarakat Kota Jayapura. Memasuki tahun 2023, terjadi penurunan inflasi yang cukup drastis menjadi 1,65%. Penurunan ini menunjukkan normalisasi tingkat inflasi setelah lonjakan tahun sebelumnya. Hal ini merupakan hasil dari kebijakan pengendalian inflasi yang efektif oleh pemerintah daerah dan Bank Indonesia, serta stabilisasi kondisi ekonomi global.

Secara keseluruhan, tren inflasi Kota Jayapura menunjukkan pola yang menarik. Dari tingkat yang rendah dan stabil pada 2019-2020, terjadi peningkatan bertahap pada 2021, diikuti lonjakan tajam pada 2022, dan kemudian normalisasi pada 2023. Pola ini mencerminkan respons ekonomi terhadap pandemi COVID-19, proses pemulihan ekonomi, dan efektivitas kebijakan ekonomi yang diterapkan. Penting untuk dicatat bahwa meskipun terjadi fluktuasi, terutama lonjakan pada 2022, ekonomi Kota Jayapura menunjukkan ketahanan dan kemampuan untuk kembali ke tingkat inflasi yang lebih normal. Hal ini menunjukkan fundamental ekonomi yang cukup kuat dan efektivitas manajemen ekonomi makro di Kota Jayapura.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

Layanan kepada masyarakat, yang juga dikenal sebagai pelayanan umum, mencakup berbagai jenis jasa yang disediakan, baik dalam bentuk barang maupun layanan untuk kepentingan publik. Penyediaan layanan ini merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan warganya.

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

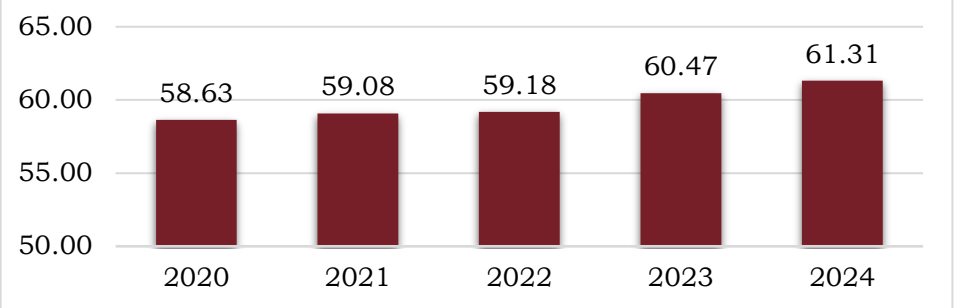
A. Nilai SAKIP

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instasi yang bersangkutan. Nilai Evaluasi AKIP Kota diukur sesuai dengan Permenpan No. 12/2015 tentang Pedoman Atas Implementasi SAKIP.

Sejalan dengan itu Pemerintah Kota Jayapura telah melakukan berbagai program dan kegiatan pendukung seperti peningkatan laporan akuntabilitas OPD dan Pemerintah Kota melalui Bimtek Sakip. Pencapain hasil AKIP Tahun 2024 yang dirilis oleh KEMENPANRB dengan kategori B terjadi peningkatan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Jayapura, maka berdasarkan program dan kegiatan pendukung yang telah dilakukan pencapaian nilai AKIP tahun 2024 belum mencapai target sebesar 65 atau kategori B.

Sebagai pembanding, pada indikator nilai evaluasi AKIP Kota Jayapura pada Tahun 2020 capaian kinerja sebesar 58,63 dan capaiannya tersebut terus mengalami tren meningkat setiap tahunnya hingga menjadi 61,31 pada tahun 2024. Nilai AKIP tahun 2024 masuk katerogi B.

Gambar 2.33.
Capaian Nilai AKIP Kota Jayapura Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Jayapura Tahun 2024

Dapat dijelaskan dari grafik tersebut diatas bahwa perkembangan capaian kinerja evaluasi AKIP kota Jayapura sejak tahun 2020 sampai tahun 2022 masih berada pada kategori penilaian CC namun terjadi peningkatan nilai pada tahun 2023 dan 2024 menjadi B. Sehingga diharapkan pada masa yang akan datang dapat terus meningkat dan mendapatkan hasil yang maksimal.

Data mengenai perkembangan nilai pada komponen AKIP Kota Jayapura dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.68
Hasil Evaluasi AKIP Kota Jayapura Tahun 2023-2024

No	Komponen yang Dinilai	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	19,28	19,61
2	Pengukuran Kinerja	17,35	17,73
3	Pelaporan Kinerja	9,09	9,22
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	14,75	14,75
Nilai hasil Evaluasi		**60,47**	**61,31**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**	**B**

Sumber: LPPD Kota Jayapura Tahun 2024

Hasil Evaluasi AKIP tahun 2024 mencapai nilai 61,31 atau berada pada kategori B. Capaian tersebut merupakan buah komitmen Pimpinan Daerah dan seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, sehingga hasil evaluasi AKIP Kota Jayapura tahun 2024 merupakan evaluasi bersama terhadap Pemerintah Kota Jayapura dan seluruh OPD.

B. Opini BPK terhadap LKPD

Capaian kinerja kebijakan Reformasi Birokrasi melalui strategi peningkatan pengawasan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang merupakan target kinerja yang harus dicapai berdasarkan amanat dari RPD Kota Jayapura. Sasaran Meningkatnya Kinerja Birokrsi pemerintah daerah dengan target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Tahun

2024 untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 sesuai dengan target Walikota Jayapura.

LKPD Kota Jayapura Tahun 2024 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian Murni, hal ini sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Jayapura. Pada Tahun 2024 terkait opini yang dikeluarkan oleh BPK-RI atas audit LKPD Tahun 2024 pada level WTP Murni akan terus dipertahankan.

Pada Tahun 2024, target yang ditetapkan opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah adalah WTP Murni atau nilai 4 (empat). Realisasi capaian target kinerja Pemerintah Kota Jayapura untuk opini BPK atas LKPD Tahun 2021 mendapatkan opini WTP Murni atau mendapatkan point (4) sehingga penghitungan pencapaian target untuk indikator dimaksud adalah: WTP Murni (4) / WTP Murni (4) X 100 % atau sama dengan 100 %, artinya capaian target indikator kinerja dimaksud dapat tercapai 100 %.

Perolehan WTP Tahun 2024 ini melanjutkan prestasi yang baik sejak Tahun 2020 yang terus memperoleh penghargaan WTP dari Pemerintah Pusat. Ini merupakan wujud keseriusan pemerintah Kota Jayapura dalam mengelola keuangan daerahnya dengan baik sehingga diharapkan akan terus mempertahankan tren positif ini pada penyelenggaraan pemerintahan di periode mendatang. Adapun pencapaian penghargaan WTP yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 2.69
Perolehan Opini BPK Kota Jayapura Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: LPPD Kota Jayapura Tahun 2024

C. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam hal memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. IKM ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kepuasan masyarakat

terhadap layanan atau produk tertentu yang disediakan oleh suatu lembaga atau pemerintah. Laporan IKM ini biasanya digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas layanan atau produk, serta untuk memahami kebutuhan dan harapan masyarakat yang dilayani.

Tabel 2.70
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Jayapura
Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,05	90	91,4

Sumber: LPPD Kota Jayapura Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat di Kota Jayapura pada tahun 2022 yaitu sebesar 89,05 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi 91,4.

D. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.

Pada tahun 2022, nilai IPP Kota Jayapura mencapai 3,98 dengan kategori B. Nilai ini mengalami penurunan berdasarkan hasil evaluasi KemenpanRP pada tahun 2024 menjadi 2,42. Berdasarkan kecenderungan nilai IPP yang menurun dari tahun 2022 ke 2024, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah kota perlu meningkatkan komitmen yang kuat dalam melakukan perbaikan pelayanan.

E. Indeks Reformasi Birokrasi

hasil evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura pada tahun 2023 dan 2024 menujukkan peningkatan. Indeks RB Pemerintah Kota Jayapura tahun 2024 adalah 54,98 dengan kategori "CC". Ini berarti meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 50,08. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.71
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kota Jayapura

Penilaian	Bobot	2023	2024
RB General	100	45.77	49.15
RB Tematik	20	4.31	49.15 5.83
Indeks RB	120	50.08	54.98
		CC	CC

Sumber: KemenpanRB, 2025

F. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kota Jayapura menjadi landasan penting dalam upaya modernisasi dan efisiensi administrasi pemerintahan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, indeks ini memungkinkan integrasi data dan layanan publik secara elektronik, meningkatkan aksesibilitas dan keterbukaan informasi bagi masyarakat. Melalui penerapan SPBE, pemerintah Kota Jayapura dapat mengoptimalkan proses administrasi, meningkatkan transparansi, dan memberikan pelayanan yang lebih responsif serta efisien kepada warganya. Dengan demikian, SPBE tidak hanya mempercepat akses terhadap layanan publik, tetapi juga membentuk dasar yang kokoh bagi kemajuan pemerintahan digital di. Adapun indeks SPBE yang telah dicapai sebagaimana berikut:

Tabel 2.72
Indeks SPBE Pemerintah Kota Jayapura Tahun 2023-2024

Nama Indeks	Nilai 2023	Nilai 2024
SPBE	**2,30**	**2,35**
Domain Kebijakan SPBE	**2,80**	**3,00**
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,80	3,00

Nama Indeks	Nilai 2023	Nilai 2024
Domain Tata Kelola SPBE	**1,30**	**1,40**
Perencanaan Strategis SPBE	1,50	1,25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,00	1,25
Penyelenggara SPBE	1,50	2,00
Domain Manajemen SPBE	**1,00**	**1,00**
Penerapan Manajemen SPBE	1,00	1,00
Audit TIK	1,00	1,00
Domain Layanan SPBE	**3,19**	**3,17**
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,20	3,50
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,17	2,67

Sumber: LPPD Kota Jayapura Tahun 2024

Persentase pencapaian indeks SPBE di Kota Jayapura tahun 2024 adalah sebesar 2,35, Meskipun demikian, upaya terus dilakukan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan nilai SPBE tersebut. Dengan fokus pada inovasi teknologi dan efisiensi layanan, Jayapura berharap dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publiknya, memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat, serta menjadikan kota ini sebagai contoh inspiratif bagi daerah-daerah lain di Indonesia dalam pemanfaatan teknologi untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama.

2.1.4.2. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

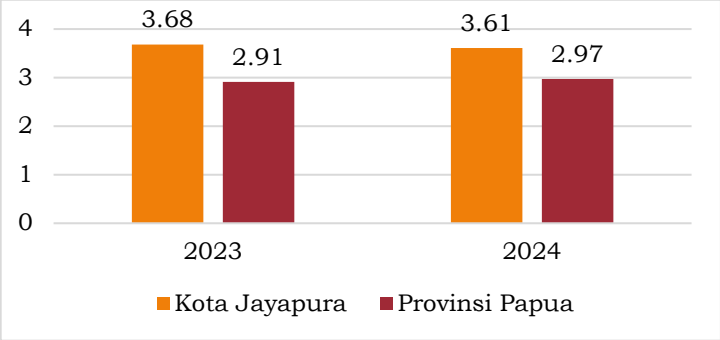
A. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Pengukuran IDSD sebelum tahun 2023 menggunakan metode berbeda sehingga tidak disajikan dalam dokumen sebab tidak dapat diperbandingkan dengan tahun 2023 dan 2024. Pengukuran IDSD 2023 dan 2024 mengadopsi kerangka konseptual yang sama dengan *Global Competitiveness Index* (GCI) dari *World Economic Forum* (WEF). Penyesuaian dilakukan pada level indikator dan metode pengukuran agar relevan dengan konteks daerah di Indonesia dan ketersediaan data.

Pada IDSD 2024 ini dilakukan penyesuaian terhadap beberapa indikator dan cara penghitungan skor sehingga lebih merepresentasikan kondisi nyata daya saing daerah. Sebagai informasi, skor nasional IDSD (berdasarkan rata-rata skor seluruh provinsi) adalah sebesar 3,43 dari skala 5.

Publikasi oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan bahwa skor IDSD Kota Jayapura pada tahun 2023 sebesar 3,68 dan sedikit menurun di tahun 2024 menjadi 3,61. Namun bila dibandingkan dengan skor IDSD Provinsi Papua (2,97), maka Kota Jayapura lebih tinggi pencapaiannya. Bahkan paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Papua. Gambar di bawah menyajikan pencapaian IDSD Kota Jayapura dan Provinsi Papua.

Gambar 2.34.
Indeks Daya Saing Kota Jayapura dan Provinsi Papua
Tahun 2023 dan 2024



Sumber: BRIN Tahun 2025

Lebih rinci mengenai capaian setiap pilar untuk IDSD tahun 2024, disajikan pada tabel di bawah. Data pada tabel menunjukkan poin tertinggu berasal dari Pilar 3. Adopsi TIK, Pilar 10. Ukuran Pasar, dan Pilar 4. Stabilitas Ekonomi Makro.

Tabel 2.73
Indeks Daya Saing Kota Jayapura Tahun 2024

Lingkungan Pendukung				SDM			PASAR			Ekosistem Inovasi		Skor IDSD
Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
3,87	3,70	4,34	4,07	3,84	3,74	1,56	3,51	4,38	4,51	2,95	2,80	**3,61**

Sumber: BRIN Tahun 2025

2.1.4.3. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

A. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

a) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator krusial dalam mengevaluasi akses pendidikan di suatu wilayah. Dikembangkan oleh UNESCO pada dekade 1970-an, APK telah menjadi tolok ukur global untuk menilai keberhasilan sistem pendidikan dalam menjangkau populasi usia sekolah. Di Indonesia, penggunaan APK dilandasi oleh kerangka hukum yang kokoh, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. APK juga menjadi komponen integral dalam RPJMN dan pelaporan *SDG's* sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Metodologi penghitungan APK melibatkan perbandingan jumlah siswa pada jenjang tertentu dengan populasi usia sekolah yang relevan, dinyatakan dalam persentase. Tujuannya adalah mengukur daya serap sistem pendidikan dan membandingkan partisipasi pendidikan antar daerah.

Data APK Kota Jayapura periode 2020-2023 menunjukkan dinamika yang menarik di tiga jenjang pendidikan. Untuk tingkat SD/MI, terjadi fluktuasi dengan tren positif, meningkat dari 100,88% (2020) menjadi 104,89% (2023). Angka di atas 100% mengindikasikan partisipasi yang sangat tinggi, termasuk siswa dari luar kelompok usia target atau daerah sekitar. Sementara untuk APK jenjang SMP/MTs, dimana pada tahun 2020 hanya 97,03% dan fluktuasi dengan

kecenderungan menurun hingga menjadi 94,01% pada tahun 2023. Begitu juga dengan APK jenjang SMA/MA, dimana sejak tahun 2020 sampai 2022 terus mengalami penurunan, dari 112,87% di tahun 2020, menurun menjadi hanya 108,01% pada tahun 2022, namun sedikit meningkat menjadi 109,58% di tahun 2023.

Tabel 2.74
Angka Partisipasi Kasar Kota Jayapura Tahun 2020-2023

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023
SD/MI/Sederajat	100,88	101,66	103,12	104,89
SMP/MTs/ Sederajat	97,03	95,02	92,05	94,01
SMA/SMK/MA/Sederajat	112,87	110,90	108,01	109,58

Sumber: Hasil Analisis Data Bappeda Kota Jayapura, dan BPS Kota Jayapura, 2025

b) Angka Partisipasi Murni

APM (Angka Partisipasi Murni) merupakan indikator kunci dalam menilai efektivitas sistem pendidikan suatu wilayah. Dikembangkan oleh UNESCO pada era 1970-an, APM memberikan gambaran lebih presisi tentang partisipasi anak dalam pendidikan sesuai usia mereka. Di Indonesia, penggunaan APM dilandasi oleh kerangka hukum yang kuat, mencakup Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

APM (Angka Partisipasi Murni) juga menjadi komponen integral dalam RPJMN dan pelaporan SDG's sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Metodologi penghitungan APM melibatkan perbandingan jumlah siswa pada usia spesifik di jenjang pendidikan tertentu dengan total populasi kelompok usia tersebut, dinyatakan dalam persentase. Tujuannya adalah mengukur ketepatan waktu partisipasi pendidikan dan efisiensi internal sistem pendidikan. Dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.75
Angka Partisipasi Murni Kota Jayapura, Tahun 2020-2023

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023
SD/MI/Sederajat	95,91	96,85	92,69	93,30
SMP/MTs/ Sederajat	78,60	78,63	74,23	66,83
SMA/SMK/MA/Sederajat	67,49	67,41	67,76	63,16

Sumber: Hasil Analisis Data Bappeda Kota Jayapura, dan BPS Kota Jayapura, 2025

Data APM Kota Jayapura periode 2020-2023 menunjukkan dinamika yang kompleks di tiga jenjang pendidikan. Untuk SD/MI, terjadi fluktuasi dengan pencapaian tertinggi yaitu 96,85% pada 2021, diikuti penurunan signifikan ke 92,69% pada 2022, namun sedikit meningkat di tahun 2023 menjadi 93,30%. Pola ini merupakan cerminan dampak pandemi COVID-19 terhadap partisipasi pendidikan dasar sama seperti yang terjadi pada indikator lainnya. Untuk APM SMP/MTs juga demikian, dimana pada tahun 2020 yaitu sebesar 78,60% dan mengalami penurunan pada tahun berikutnya menjadi hanya 66,83% di tahun 2023. Sementara itu, APM SMA/MA juga memperlihatkan *trend* penurunan, dari 67,49% pada 2020 menjadi 63,16% di 2024.

c) Layanan Pendidikan Dasar (SD/MI)

Kota Jayapura, sebagai ibukota Provinsi Papua, memiliki peran penting dalam menyediakan layanan pendidikan dasar yang berkualitas bagi warganya. Pendidikan dasar, yang mencakup SD (Sekolah Dasar) dan MI (Madrasah Ibtidaiyah), merupakan fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Pemerintah Kota Jayapura berkomitmen untuk terus meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, termasuk gedung sekolah yang tersebar di berbagai distrik.

Tabel 2.76
Jumlah Gedung Sekolah Dasar di Kota Jayapura Berdasarkan Distrik Tahun 2020- 2024

No.	Distrik	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	MuaraTami	10	10	10	10	11
2.	Abepura	25	27	27	27	28
3.	Heram	12	12	12	12	12
4.	Jayapura Selatan	23	23	23	23	23
5.	Jayapura Utara	24	24	24	24	24
Kota Jayapura		**94**	**96**	**96**	**96**	**98**

Sumber: Hasil Analisis Data Bappeda Kota Jayapura, 2024 dan Kota Jayapura Dalam Angka, 2025

Data di atas memuat jumlah gedung sekolah dasar di Kota Jayapura dari Tahun 2020 hingga 2024 yang menunjukkan perkembangan yang cukup stabil. Secara keseluruhan, terjadi peningkatan jumlah gedung sekolah dasar di Kota Jayapura dari 94 unit pada tahun 2020 menjadi 98 unit pada Tahun 2024. Peningkatan sidikit terjadi antara tahun 2020-2021 dan 2023-2024, dengan penambahan 8 unit gedung sekolah. Distribusi gedung sekolah per distrik menunjukkan bahwa Abepura memiliki jumlah terbanyak dengan 28 unit pada tahun 2024, diikuti oleh Jayapura Selatan dan Jayapura Utara yang memiliki jumlah relatif setara, masing-masing 23 dan 24 unit. Heram memiliki 12 unit, sementara Distrik Muara Tami memiliki jumlah paling sedikit dengan 11 unit.

Sejak tahun 2021 hingga 2023, jumlah total gedung sekolah dasar di Kota Jayapura tetap stabil pada angka 96 unit, menunjukkan fokus pada pemeliharaan dan peningkatan kualitas gedung yang ada. Perkembangan pada ke lima Distrik menunjukkan bahwa Distrik Muara Tami bertambah dengan 11 unit gedung sekolah sepanjang periode 2020-2024, Distrik Abepura mengalami sedikit peningkatan, Distrik Heram mengalami sedikit penurunan, sementara Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara menunjukkan stabilitas. Data ini menggambarkan upaya Pemerintah Kota Jayapura dalam menyediakan akses pendidikan dasar yang merata di seluruh distrik. Konsentrasi

gedung sekolah yang lebih tinggi di Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Jayapura Utara mencerminkan kepadatan penduduk yang lebih tinggi di area-area tersebut. Stabilitas jumlah gedung sekolah sejak 2021 menunjukkan bahwa fokus telah beralih dari pembangunan gedung baru ke peningkatan kualitas pendidikan dan fasilitas yang ada. Namun, perlu diperhatikan apakah jumlah ini sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dasar di setiap distrik, terutama di area dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Sementara itu, jumlah murid sekolah dasar di Kota Jayapura berdasarkan data dari tahun 2020 hingga 2024 (tabel di bawah) menunjukkan dinamika yang menarik di berbagai distrik. Secara keseluruhan, terjadi fluktuasi dalam jumlah total murid di Kota Jayapura, dengan kecenderungan sedikit menurun dari 30.783 murid pada tahun 2020 menjadi 30.580 murid pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan demografi, migrasi penduduk, atau dampak dari pandemi COVID-19.

Tabel 2.77
Jumlah Murid Sekolah Dasar di Kota Jayapura berdasarkan Distrik
Tahun 2020 – 2024

No.	Distrik	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Muara Tami	1.992	2.020	2.129	2.405	2.775
2.	Abepura	9.675	9.856	9.932	9.950	10.015
3.	Heram	3.835	3.690	3.657	3.576	3.581
4.	Jayapura Selatan	6.747	6.637	6.720	6.671	6.675
5.	Jayapura Utara	8.534	8.133	7.825	7.737	7.534
Kota Jayapura		**30.783**	**30.336**	**30.263**	**30.339**	**30.580**

Sumber: Hasil Analisis Data Bappeda Kota Jayapura, 2024

Analisis per Distrik menunjukkan trend yang beragam dimana pada Distrik Muara Tami mengalami peningkatan yang signifikan dan konsisten, dari 1.992 murid pada tahun 2020 menjadi 2.775 murid pada tahun 2024, menunjukkan pertumbuhan populasi atau peningkatan akses pendidikan di daerah tersebut. Abepura, sebagai distrik dengan jumlah murid terbanyak, menunjukkan fluktuasi kecil namun cenderung stabil, dengan sedikit peningkatan dari 9.675 murid pada

2020 menjadi 10.015 murid pada 2024. Hal ini mencerminkan kapasitas sekolah yang sudah mendekati maksimal di distrik ini.

Distrik Heram mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari 3.835 murid pada 2020 menjadi 3.581 murid pada 2024. Distrik Jayapura Selatan menunjukkan fluktuasi kecil dengan kecenderungan sedikit menurun, dari 6.747 murid pada 2020 menjadi 6.675 murid pada 2024. Distrik Jayapura Utara mengalami penurunan yang paling signifikan, dari 8.534 murid pada 2020 menjadi 7.534 murid pada 2024, yang disebabkan oleh perubahan demografi atau faktor sosial ekonomi lainnya. Pola ini menggambarkan dinamika populasi dan distribusi murid yang berbeda-beda di setiap Distrik Kota Jayapura. Peningkatan jumlah murid di Muara Tami kontras dengan penurunan di Distrik lain, terutama Distrik Jayapura Utara dan Distrik Heram. Hal ini mengindikasikan pergeseran populasi atau perubahan pola pemukiman di Kota Jayapura. Stabilitas relatif di Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan menunjukkan bahwa distrik-distrik ini telah mencapai tingkat kejenuhan dalam kapasitas sekolah atau populasi usia sekolah.

Penting bagi pemerintah Kota Jayapura untuk memperhatikan trend ini dalam perencanaan pendidikan ke depan. Peningkatan kapasitas diperlukan di Distrik Muara Tami, sementara di distrik lain perlu fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada.

Tabel 2.78
Jumlah Guru Sekolah Dasar di Kota Jayapura Berdasarkan Distrik
Tahun 2020 – 2024

No.	Distrik	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	MuaraTami	112	119	126	144	166
2.	Abepura	507	530	546	548	576
3.	Heram	224	217	218	212	217
4.	Jayapura Selatan	346	346	361	363	372
5.	Jayapura Utara	406	394	393	388	386
Kota Jayapura		**1.595**	**1.606**	**1.644**	**1.655**	**1.717**

Sumber: Hasil Analisis Data Bappeda Kota Jayapura, 2024

Data jumlah guru di Kota Jayapura dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan *trend* peningkatan yang konsisten di sebagian besar Distrik. Secara keseluruhan, jumlah guru di Kota Jayapura mengalami kenaikan yang signifikan, dari 1.595 guru pada tahun 2020 menjadi 1.717 guru pada Tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui penambahan tenaga pengajar.

Evaluasi per Distrik menunjukkan variasi dalam perkembangan jumlah guru di Kota Jayapura. Distrik Muara Tami mencatat pertumbuhan yang konsisten dan substansial, dengan jumlah guru meningkat dari 112 pada 2020 menjadi 166 pada 2024, mengikuti peningkatan jumlah siswa. Distrik Abepura, yang memiliki jumlah guru terbesar, juga menunjukkan peningkatan stabil dari 507 menjadi 576 guru dalam periode yang sama, menggambarkan upaya mempertahankan rasio guru-siswa yang ideal di area padat penduduk. Distrik Heram, terjadi fluktuasi dengan tren sedikit menurun, dari 224 guru pada 2020 menjadi 217 pada 2024, dengan puncak 224 guru di Tahun 2020. Jayapura Selatan menunjukkan peningkatan signifikan dan konsisten dari 346 menjadi 372 guru, mencerminkan upaya peningkatan kapasitas pendidikan. Sementara itu, Jayapura Utara mengalami fluktuasi namun cenderung menurun, dimulai dari 406 guru pada 2020, dan ke 386 pada Tahun 2024.

Pola ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Jayapura dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui penambahan tenaga pengajar mayoritas pada Distrik. Pertumbuhan konsisten di Distrik Muara Tami dan Distrik Abepura menunjukkan respon terhadap peningkatan jumlah siswa dan upaya menjaga rasio guru-siswa yang optimal. Kondisi relatif stabil di Jayapura Utara dan fluktuasi di Heram menggambarkan penyesuaian terhadap perubahan demografi siswa dan optimalisasi sumber daya pendidikan.

Pemerintah Kota Jayapura perlu terus melakukan pemantauan dan penyesuaian jumlah guru sesuai kebutuhan tiap distrik. Peningkatan kuantitas guru harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pengajaran dan distribusi guru berkualitas yang merata. Perhatian terhadap rasio guru-siswa di setiap distrik juga penting untuk menjamin efektivitas proses pembelajaran. Dengan *trend* positif ini, diharapkan kualitas pendidikan di Kota Jayapura akan terus meningkat, menyediakan dasar yang kokoh bagi generasi mendatang.

d) Layanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Data jumlah gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Jayapura dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan stabilitas yang tinggi dengan sedikit peningkatan di awal periode. Secara keseluruhan, jumlah gedung SMP di Kota Jayapura mengalami kenaikan kecil dari 37 unit pada tahun 2019 menjadi 38 unit pada tahun 2020, dan kemudian tetap stabil pada angka tersebut hingga tahun 2023.

Tabel 2.79
Jumlah Gedung Sekolah Menengah Pertama di Kota Jayapura Menurut Distrik Tahun 2019-2023

No	Distrik	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	MuaraTami	2	3	3	3	3
2.	Abepura	7	7	7	7	7
3.	Heram	9	9	9	9	9
4.	Jayapura Selatan	9	9	9	9	9
5.	Jayapura Utara	10	10	10	10	10
Kota Jayapura		**37**	**38**	**38**	**38**	**38**

Sumber: Hasil Analisis Data Bappeda Kota Jayapura, 2024

Analisis pada kelima Distrik menunjukkan bahwa pola yang beragam namun cenderung stabil. Distrik Muara Tami adalah satu-satunya Distrik yang mengalami peningkatan, dari 2 (dua) gedung SMP pada tahun 2019 menjadi 3 (tiga) gedung pada Tahun 2020, dan jumlah ini tetap konstan hingga 2023. Peningkatan ini merupakan respon terhadap pertumbuhan populusi atau upaya meningkatkan akses pendidikan di daerah tersebut.

Distrik-distrik lain di Kota Jayapura menunjukkan konsistensi dalam jumlah gedung SMP selama lima tahun terakhir. Distrik Abepura tetap dengan 7 gedung, Distrik Heram dan Distrik Jayapura Selatan masing-masing mempertahankan 9 gedung, sedangkan Distrik Jayapura Utara memimpin dengan 10 gedung SMP. Kestabilan ini mengindikasikan bahwa infrastruktur pendidikan menengah pertama di sebagian besar wilayah Kota Jayapura telah mencapai level yang dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan saat ini.

Pola ini merefleksikan beberapa aspek krusial dalam penyediaan sarana pendidikan di Kota Jayapura. Pertama, konsistensi jumlah gedung SMP mengindikasikan pergeseran fokus pemerintah dari pembangunan gedung baru ke peningkatan mutu pendidikan dan pembenahan fasilitas yang sudah ada. Kedua, penyebaran gedung SMP yang cenderung merata antar distrik (kecuali Muara Tami) menggambarkan usaha pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan yang setara di seluruh area Kota Jayapura. Meski demikian, perlu diperhatikan bahwa kestabilan ini juga memunculkan permasalahan mengenai kecukupan jumlah gedung SMP dalam mengantisipasi potensi pertambahan populasi usia sekolah, terutama di distrik-distrik yang mengalami pertumbuhan penduduk signifikan, seperti Distrik Muara Tami yang telah menambah satu gedung SMP.

Untuk masa mendatang, pemerintah Kota Jayapura perlu terus mengawasi keseimbangan antara jumlah gedung SMP dengan populasi usia sekolah di tiap distrik. Walaupun jumlah gedung tetap, peningkatan kapasitas atau kualitas fasilitas yang ada diperlukan untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Selain itu, aspek pemerataan kualitas pendidikan antar distrik juga harus dipertimbangkan, tidak hanya dari segi jumlah gedung, tetapi juga meliputi fasilitas, tenaga pengajar, dan sumber daya pendidikan lainnya. Dengan langkah-langkah ini, Kota Jayapura dapat terus meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan menengah pertama bagi seluruh warganya.

Tabel 2.80
Jumlah Murid Sekolah Menengah Pertama Menurut Distrik
Tahun 2019-2023

No	Distrik	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Muara Tami	705	625	665	746	806
2.	Abepura	3.630	3.120	3.229	3.318	3.523
3.	Heram	2.688	2.467	2.622	2.579	2.627
4.	Jayapura Selatan	3.904	3.376	3.857	3.412	3.501
5.	Jayapura Utara	3.414	3.359	3.452	3.471	3.477
Kota Jayapura		**14.341**	**12.947**	**13.825**	**13.526**	**13.934**

Sumber: Hasil Analisis Data Bappeda Kota Jayapura, 2024

Perkembangan jumlah pelajar tingkat menengah pertama di Kota Jayapura selama periode 2019 hingga 2023 menampilkan dinamika yang menarik di berbagai wilayah Kota Jayapura. Secara keseluruhan, terjadi fluktuasi dalam total siswa SMP di Kota Jayapura, dengan kecenderungan menurun dari 14.341 siswa pada tahun 2019 menjadi 13.934 siswa pada tahun 2023, meskipun sempat mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020. Analisis per Distrik menunjukkan variasi yang beragam. Distrik Muara Tami, meski sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, menunjukkan tren peningkatan yang konsisten hingga mencapai 806 siswa pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan pertumbuhan populasi atau peningkatan akses pendidikan di wilayah tersebut. Abepura, sebagai distrik dengan jumlah siswa terbanyak kedua, mengalami penurunan pada tahun 2020 namun kemudian menunjukkan pemulihan bertahap, mencapai 3.523 siswa pada tahun 2023.

Heram menampilkan fluktuasi dengan kecenderungan relatif stabil, berakhir dengan 2.627 siswa pada tahun 2023. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020, distrik ini berhasil mempertahankan jumlah siswanya di kisaran 2.600 dalam tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan stabilitas dalam populasi siswa SMP di wilayah tersebut. Jayapura Selatan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dengan penurunan tajam pada tahun 2020 dan 2022, namun menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada tahun 2023 dengan 3.501 siswa. Distrik ini mencatatkan jumlah siswa tertinggi pada tahun 2019

dengan 3.904 siswa, namun mengalami penurunan yang cukup drastis pada tahun berikutnya. Pemulihan yang terjadi pada tahun 2023 mengindikasikan upaya-upaya perbaikan dalam sistem pendidikan di wilayah ini.

Sementara itu, Jayapura Utara menunjukkan pola yang lebih stabil dengan sedikit peningkatan, mencapai 3.477 siswa pada tahun 2023. Distrik ini berhasil mempertahankan jumlah siswanya di atas 3.400 selama empat tahun terakhir, menunjukkan konsistensi dalam penyediaan layanan pendidikan menengah pertama. Pola ini menggambarkan dinamika populasi siswa SMP yang bervariasi di setiap distrik Kota Jayapura. Peningkatan jumlah siswa di Distrik Muara Tami kontras dengan fluktuasi di distrik lain, terutama Jayapura Selatan. Hal ini mengindikasikan pergeseran demografi, perubahan preferensi pendidikan, atau dampak dari faktor eksternal seperti pandemi COVID-19.

Penting bagi otoritas pendidikan Kota Jayapura untuk mencermati *trend* ini dalam perencanaan pendidikan ke depan. Penyesuaian kapasitas sekolah dan alokasi sumber daya diperlukan di beberapa distrik, sementara di distrik lain perlu fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan retensi siswa. Khususnya, perhatian lebih perlu diberikan pada Distrik Jayapura Selatan untuk memahami penyebab fluktuasi yang signifikan dan mengembangkan strategi untuk menstabilkan jumlah siswa.

Selain itu, analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi jumlah siswa di setiap distrik, serta untuk memastikan pemerataan akses pendidikan menengah pertama yang berkualitas di seluruh Kota Jayapura. Dengan memahami dinamika ini, pemerintah Kota Jayapura dapat mengembangkan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan menengah pertama di seluruh wilayah Kota Jayapura.

Tabel 2.81
Perkembangan Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama Menurut Distrik Tahun 2019-2023

No	Distrik	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	MuaraTami	36	38	60	63	68
2.	Abepura	184	205	194	192	187
3.	Heram	157	163	158	152	161
4.	Jayapura Selatan	213	212	215	220	215
5.	Jayapura Utara	214	216	214	224	224
Kota Jayapura		**804**	**834**	**841**	**851**	**855**

Sumber: Hasil Analisis Data Bappeda Kota Jayapura, 2024

Evaluasi terhadap perkembangan jumlah tenaga pendidik di jenjang sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Jayapura dari tahun 2019 hingga 2023 mengungkapkan beberapa pola yang menarik di berbagai Distrik. Secara keseluruhan, terdapat peningkatan yang stabil dalam jumlah guru SMP di kota ini, dengan pertambahan dari 804 orang pada 2019 menjadi 855 orang pada 2023. Analisis per distrik menunjukkan variasi yang signifikan. Distrik Muara Tami mencatatkan pertumbuhan yang paling mencolok, dengan peningkatan hampir dua kali lipat dari 36 guru pada 2019 menjadi 68 guru pada 2023. Lonjakan terbesar terjadi antara 2020 dan 2021, yang mencerminkan inisiatif khusus untuk memperkuat tenaga pengajar di wilayah tersebut.

Distrik Abepura, meskipun sempat mengalami kenaikan pada 2020, menunjukkan *trend* penurunan dalam tiga tahun terakhir, berakhir dengan 187 guru pada 2023. Fenomena ini mengindikasikan adanya penyesuaian atau redistribusi tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Distrik Heram, jumlah guru cenderung stabil dengan sedikit fluktuasi, mencapai 161 orang pada 2023. Kestabilan ini menggambarkan konsistensi dalam penyediaan tenaga pendidik di distrik tersebut. Jayapura Selatan memperlihatkan fluktuasi ringan namun relatif stabil, dengan jumlah guru berkisar antara 212 hingga 220 orang selama periode lima tahun. Sementara itu, Jayapura Utara menunjukkan tren peningkatan yang moderat dan konsisten, mencapai 224 guru pada 2023, sama dengan jumlah pada tahun sebelumnya.

Pola-pola ini mencerminkan dinamika yang kompleks dalam manajemen sumber daya manusia di sektor pendidikan Kota Jayapura. Peningkatan drastis di Muara Tami kontras dengan fluktuasi di distrik lain, terutama penurunan di Abepura. Hal ini menandakan adanya upaya pemerataan distribusi guru atau respons terhadap perubahan demografi siswa di masing-masing wilayah. Penting bagi pemangku kepentingan di bidang pendidikan Kota Jayapura untuk mengkaji lebih dalam tren-tren ini dalam perencanaan tenaga pengajar ke depan. Evaluasi terhadap rasio guru-murid, efektivitas pengajaran, dan kebutuhan spesifik setiap distrik perlu dilakukan untuk memastikan alokasi sumber daya manusia yang optimal.

e) Layanan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

Perkembangan infrastruktur pendidikan tingkat menengah atas di Kota Jayapura selama kurun waktu 2019 hingga 2023 menyajikan gambaran yang menarik tentang dinamika penyediaan fasilitas pendidikan di wilayah ini. Sebagai kota yang terus berkembang dan memiliki peran strategis di Provinsi Papua, Jayapura menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan kebutuhan pendidikan dengan ketersediaan sarana fisik yang memadai.

Tabel 2.82
Jumlah Gedung Sekolah Menengah Atas di Kota Jayapura Berdasarkan Distrik Tahun 2019 – 2023

No	Distrik	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	MuaraTami	1	1	1	1	1
2.	Abepura	3	3	3	4	4
3.	Heram	7	7	8	8	8
4.	Jayapura Selatan	8	8	8	8	7
5.	Jayapura Utara	6	6	6	8	6
Kota Jayapura		**25**	**25**	**25**	**27**	**26**

Sumber: BPS Kota Jayapura, 2024

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa Kota Jayapura memiliki total 25 gedung SMA (Sekolah Menengah Atas) pada tahun 2019, jumlah yang bertahan hingga 2021. Terjadi peningkatan menjadi 27

gedung pada tahun 2022, namun kemudian sedikit menurun menjadi 26 gedung pada tahun 2023. Fluktuasi ini mencerminkan adanya upaya penyesuaian terhadap kebutuhan pendidikan yang dinamis di Kota Jayapura.

Distribusi gedung SMA di berbagai Distrik Kota Jayapura menunjukkan pola yang beragam, mencerminkan karakteristik dan kebutuhan unik masing-masing wilayah. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, aksesibilitas, dan kebijakan pengembangan wilayah. Analisis perkembangan jumlah fasilitas pendidikan tingkat menengah atas di Kota Jayapura selama periode 2019 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang menarik di berbagai wilayah kota. Secara keseluruhan, terjadi sedikit fluktuasi dalam total gedung SMA di Kota Jayapura, dengan kecenderungan stabil yang diikuti oleh peningkatan kecil pada tahun 2022 dan sedikit penurunan pada 2023.

Tinjauan pada ke lima Distrik memperlihatkan pola yang beragam. Distrik Muara Tami menunjukkan konsistensi dengan mempertahankan satu gedung SMA sepanjang periode lima tahun, mencerminkan stabilitas dalam penyediaan fasilitas pendidikan di wilayah tersebut. Hal ini menandakan bahwa kapasitas yang ada sudah cukup memenuhi kebutuhan populasi siswa di Distrik Muara Tami, atau ada keterbatasan dalam pengembangan infrastruktur baru. Abepura mengalami peningkatan moderat, dari tiga gedung pada Tahun 2019-2021 menjadi empat gedung pada dua tahun terakhir, menandakan adanya upaya perluasan kapasitas pendidikan di distrik ini. Peningkatan ini merupakan respons terhadap pertumbuhan populasi atau peningkatan permintaan untuk pendidikan menengah atas di wilayah yang menjadi pusat pendidikan di Kota Jayapura.

Distrik Heram mencatatkan pertumbuhan yang positif, dengan penambahan satu gedung pada tahun 2021, meningkatkan total menjadi delapan gedung yang kemudian dipertahankan hingga 2023. Peningkatan ini merupakan respons terhadap kebutuhan pendidikan yang meningkat di wilayah tersebut, menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam

infrastruktur pendidikan di distrik ini. Jayapura Selatan menunjukkan stabilitas dengan delapan gedung dari 2019 hingga 2022, namun mengalami penurunan menjadi tujuh gedung pada tahun 2023. Perubahan ini mencerminkan penyesuaian terhadap dinamika populasi siswa atau reorganisasi fasilitas pendidikan di Distrik tersebut. Penurunan ini perlu dikaji lebih lanjut untuk memahami apakah hal ini disebabkan oleh konsolidasi sumber daya atau faktor lainnya.

Sementara itu, Jayapura Utara memperlihatkan fluktuasi yang menarik. Jumlah gedung tetap stabil pada angka enam dari 2019 hingga 2021, kemudian meningkat menjadi delapan pada tahun 2022, sebelum kembali ke enam pada tahun 2023. Pola ini menggambarkan upaya penyesuaian temporer terhadap kebutuhan pendidikan yang berubah-ubah, atau mencerminkan tantangan dalam mempertahankan infrastruktur yang baru dibangun. Dinamika ini mencerminkan kompleksitas dalam pengelolaan infrastruktur pendidikan di Kota Jayapura. Peningkatan di beberapa Distrik seperti: Distrik Abepura dan Distrik Heram kontras dengan stabilitas di Distrik Muara Tami dan fluktuasi di Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan dalam pertumbuhan populasi, perubahan kebijakan pendidikan, atau respons terhadap kebutuhan spesifik masing-masing wilayah.

Tabel 2.83
Jumlah Murid SMA Menurut Distrik Tahun 2019-2023

No	Distrik	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Muara Tami	246	235	256	283	292
2.	Abepura	2.503	2.515	2.431	2.333	2.465
3.	Heram	2.112	2.076	1.956	1.889	1.934
4.	Jayapura Selatan	2.328	2.138	2.086	2.094	2.119
5.	Jayapura Utara	2.787	2.832	2.622	2.500	2.614
Kota Jayapura		**9.976**	**9.796**	**9.351**	**9.099**	**9.424**

Sumber: Hasil Analisis Data Bappeda Kota Jayapura, 2024

Analisis perkembangan jumlah siswa SMA di Kota Jayapura periode 2019-2023 menunjukkan dinamika yang beragam di setiap distrik. Secara keseluruhan, terjadi fluktuasi dengan kecenderungan menurun dari 9.976 siswa pada 2019 menjadi 9.424 siswa pada 2023, meskipun ada sedikit peningkatan di tahun terakhir. Muara Tami mencatat pertumbuhan konsisten, meningkat dari 246 siswa (Tahun 2019) menjadi 292 siswa (Tahun 2023), menandakan potensi perkembangan pendidikan di wilayah ini. Abepura, dengan populasi siswa terbesar, mengalami fluktuasi moderat, berakhir di angka 2.465 siswa pada Tahun 2023, sedikit di bawah jumlah awal Tahun 2019.

Distrik Heram dan Distrik Jayapura Selatan menunjukkan tren penurunan, dengan Distrik Heram turun dari 2.112 siswa (Tahun 2019) menjadi 1.934 siswa (Tahun 2023), dan Distrik Jayapura Selatan dari 2.328 siswa menjadi 2.119 siswa. Distrik Jayapura Utara, meski mengalami penurunan, tetap mempertahankan posisi sebagai distrik dengan jumlah siswa terbanyak kedua, mencapai 2.614 siswa pada 2023. Pola ini mencerminkan berbagai faktor yang mempengaruhi distribusi siswa, seperti perubahan demografi, preferensi pendidikan, dan dampak kebijakan pendidikan.

Tabel 2.84
Perkembangan Jumlah Guru SMA Menurut Distrik Tahun 2019-2023

No	Distrik	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	MuaraTami	19	21	21	23	24
2.	Abepura	142	150	146	152	154
3.	Heram	148	162	156	160	169
4.	Jayapura Selatan	174	177	147	169	153
5.	Jayapura Utara	148	160	154	156	154
Kota Jayapura		**631**	**670**	**624**	**660**	**654**

Sumber: Hasil Analisis Data Bappeda Kota Jayapura, 2024

Data jumlah guru SMA di Kota Jayapura dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan *trend* fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Secara keseluruhan, jumlah guru SMA di Kota Jayapura mengalami

kenaikan dari 631 guru pada tahun 2019 menjadi 654 guru pada Tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui penambahan tenaga pengajar jenjang SMA.

Distrik Muara Tami menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dengan peningkatan 26,32 persen dari 19 guru pada tahun 2019 menjadi 24 guru pada tahun 2023. Distrik Heram menunjukkan *trend* fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, dimana peningkatannya mencapai 14,19 persen dari 148 guru di tahun 2019 menjadi 169 guru di tahun 2023, walupun sempat mengalami penurunan di tahun 2021 dengan jumlah 156 guru. Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Utara juga menunjukkan *trend* fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Distrik Abepura mengalami peningkatan 8,45 persen dari 142 guru menjadi 154 guru, dan Distrik Jayapura Utara dengan peningkatan 4,05 persen dari 148 guru menjadi 154 guru. Sedangkan Distrik Jayapura Selatan menunjukkan *trend* fluktuatif dengan kecenderungan menurun, dimana jumlah guru mengalami penurunan sebesar 12,07 persen dari 174 guru pada 2019 menjadi 153 guru pada 2023.

2. Kesehatan

a) Angka Morbiditas

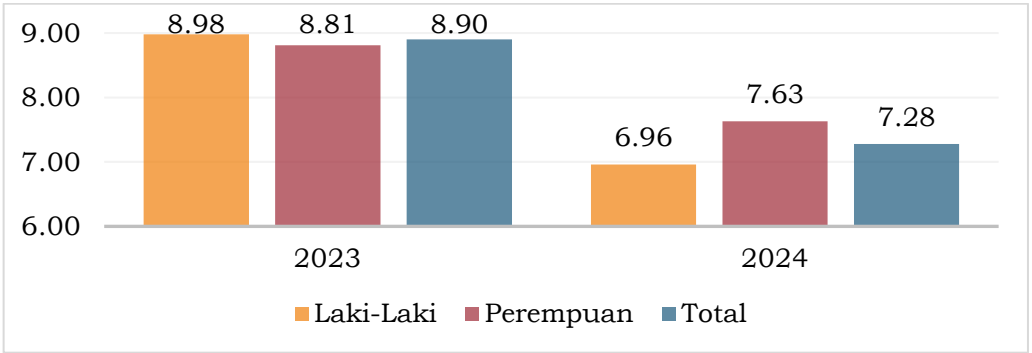
AM Angka Morbiditas (AM) (Angka Morbiditas)/Angka Kesakitan/Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan bermanfaat untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat yang bersangkutan. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah,

dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan hasil olahan data Susenas 2024, Angka Morbiditas Kota Jayapura adalah 7,28 persen yang artinya bahwa dari setiap 100 jiwa penduduk di Kota Jayapura, terdapat sekitar 7 sampai 8 jiwa yang memiliki keluhan kesehatan pada tahun 2024. Agar lebih tepat dan fokus dalam pengambilan kebijakan, pada Gambar di bawah tersaji data persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dirinci menurut jenis kelamin. Persentase penduduk yang mengalami kesakitan terbesar yaitu perempuan sebesar 7,63 persen.

Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya, keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, dan sakit gigi.

Gambar 2.35.
Angka Kesakitan Menurut Daerah Tempat Tinggal di Kota Jayapura Tahun 2023-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jayapura, 2024 dan BPS Kota Jayapura 2025

Strategi yang dapat diterapkan meliputi peningkatan akses ke layanan kesehatan *preventif,* kampanye kesadaran kesehatan yang ditargetkan, serta intervensi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik populasi laki-laki dan perempuan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terarah, Kota Jayapura dapat berupaya menurunkan

angka morbiditas secara keseluruhan, sekaligus mempersempit kesenjangan kesehatan antara populasi laki-laki dan perempuan.

b) Layanan Kesehatan

Evaluasi terhadap distribusi fasilitas kesehatan di Kota Jayapura pada tahun 2023 menggambarkan infrastruktur pelayanan kesehatan yang beragam dan tersebar di seluruh distrik. Total 252 fasilitas kesehatan yang tercatat menunjukkan upaya signifikan dalam menyediakan akses layanan kesehatan bagi penduduk.

Hasil analisis pada ke lima Distrik mengungkapkan pola yang menarik, yakni: Distrik Abepura memimpin dalam jumlah total fasilitas kesehatan dengan 68 unit, termasuk 2 rumah sakit umum dan 1 rumah sakit khusus. Keberadaan rumah sakit khusus di Distrik ini mengindikasikan adanya layanan kesehatan spesialis yang terpusat di area tersebut. Distrik Jayapura Selatan menempati posisi kedua dengan 62 fasilitas, didominasi oleh 53 Posyandu yang menunjukkan fokus kuat pada layanan kesehatan dasar dan preventif. Distrik Jayapura Utara, meskipun memiliki jumlah total fasilitas yang lebih sedikit (57), menonjol dengan 3 rumah sakit umum dan 7 Klinik Pratama, menandakan konsentrasi layanan kesehatan yang lebih kompleks di wilayah ini.

Tabel 2.85
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Jayapura Tahun 2023

No	Distrik	Fasilitas Kesehatan						
		Rumah Sakit Umum	Rumah Sakit Khusus	Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas	Klinik Pratama	Posyandu	Jumlah
1.	Muara Tami	1	0	1	2	1	25	29
2.	Abepura	2	1	0	3	4	60	68
3.	Heram	1	0	0	3	2	30	36
4.	Jayapura Selatan	1	0	0	3	4	53	62
5.	Jayapura Utara	3	0	0	3	7	44	57
Kota Jayapura		**8**	**1**	**1**	**14**	**18**	**212**	**252**

Sumber: BPS, Dinas Kesehatan Kota Jayapura, 2024

Distrik Heram, dengan 36 fasilitas, dan Distrik Muara Tami dengan 29 fasilitas, menunjukkan distribusi yang lebih terbatas namun tetap mencakup berbagai jenis layanan kesehatan. Distrik Muara Tami, meski memiliki jumlah fasilitas paling sedikit, adalah satu-satunya distrik selain Distrik Abepura yang memiliki Puskesmas Rawat Inap, menunjukkan upaya untuk menyediakan layanan kesehatan yang lebih komprehensif di wilayah yang lebih terpencil. Posyandu mendominasi jenis fasilitas kesehatan di seluruh distrik, dengan total 212 unit, menekankan pentingnya layanan kesehatan berbasis masyarakat, terutama untuk ibu dan anak. Keberadaan 14 Puskesmas yang tersebar merata di semua distrik menunjukkan upaya untuk menjamin akses dasar ke *Layanan Kesehatan Primer*.

Distribusi rumah sakit umum yang tidak merata, dengan konsentrasi di Distrik Jayapura Utara dan Distrik Abepura, mengindikasikan adanya pusat-pusat pelayanan kesehatan utama di wilayah-wilayah tersebut. Sementara itu, keberadaan 18 klinik pratama di seluruh Kota Jayapura menambah opsi layanan kesehatan bagi masyarakat. Pola distribusi ini mencerminkan strategi penyediaan layanan kesehatan yang berupaya menyeimbangkan antara konsentrasi fasilitas kesehatan kompleks di pusat-pusat urban dengan penyebaran layanan dasar di seluruh wilayah. Namun, ketimpangan dalam distribusi fasilitas tertentu, seperti: Rumah Sakit dan Klinik Pratama, menunjukkan adanya tantangan dalam menjamin akses yang setara ke layanan kesehatan spesialis bagi penduduk di semua Distrik.

Untuk meningkatkan pemerataan akses layanan kesehatan, pemerintah Kota Jayapura perlu mempertimbangkan penguatan fasilitas di distrik-distrik yang kurang terlayani, terutama dalam hal layanan kesehatan sekunder dan tersier. Selain itu, optimalisasi jaringan Posyandu dan Puskesmas yang sudah ada dapat menjadi kunci dalam meningkatkan cakupan layanan kesehatan dasar dan preventif di seluruh kota. Dengan pendekatan yang strategis dan berimbang, Kota Jayapura dapat terus meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan

kesehatan bagi seluruh penduduknya, mendukung tercapainya standar kesehatan yang lebih baik di semua distrik.

c) Sumber Daya Kesehatan

Sumber daya kesehatan merupakan komponen vital dalam sistem pelayanan kesehatan suatu daerah. Mencakup tenaga medis, fasilitas kesehatan, peralatan medis, dan infrastruktur pendukung, sumber daya kesehatan berperan krusial dalam menjamin akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu indikator penting dalam menilai kecukupan sumber daya kesehatan adalah jumlah dan rasio tenaga medis, khususnya dokter, terhadap populasi yang dilayani. Rasio dokter per penduduk menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi kemampuan sistem kesehatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan.

Tabel 2.86
Jumlah Dokter dan Rasio Dokter Per Penduduk Kota Jayapura Tahun 2019 – 2023

No	Distrik	2019		2020		2021		2022		2023	
		Jumlah Dokter	Rasio	Jumlah Dokter	Rasio	Jumlah Dokter	Rasio	Jumlah Dokter	Rasio	Jumlah Dokter	Rasio
1.	Muara Tami	5	0,7	21	3,9	21	3,9	21	3,7	21	2,7
2.	Heram	5	0,2	7	0,4	7	0,3	7	0,4	13	0,3
3.	Abepura	9	0,2	14	0,4	14	0,3	14	0,4	13	0,5
4.	Jayapura Utara	8	0,2	9	0,3	9	0,3	9	0,3	11	0,3
5.	Jayapura Selatan	9	0,2	11	0,3	11	0,3	11	0,3	15	0,4
Jumlah		**36**		**62**		**62**		**62**		**73**	

Sumber: Hasil Analisis Data Bappeda Kota Jayapura dan Dinas Kesehatan Kota Jayapura, 2024

Data Jumlah Dokter dan Rasio Dokter per Penduduk Kota Jayapura periode 2019-2023 menunjukkan perkembangan yang signifikan. Distrik Muara Tami mengalami peningkatan dramatis dari 5 dokter pada Tahun 2019 menjadi 21 dokter sejak 2020, dengan rasio tertinggi mencapai 3,9 pada 2020-2021, meskipun menurun menjadi 2,7

pada 2023. Distrik Heram menunjukkan peningkatan jumlah dokter dari 5 menjadi 13, namun rasionya tetap rendah berkisar 0,2 hingga 0,4. Distrik Abepura mengalami fluktuasi dengan peningkatan dari 9 menjadi 14 dokter, kemudian sedikit menurun menjadi 13 pada 2023, dengan rasio meningkat dari 0,2 menjadi 0,5. Distrik Jayapura Utara menunjukkan peningkatan moderat dari 8 menjadi 11 dokter dengan rasio stabil 0,3 sejak 2020. Distrik Jayapura Selatan mengalami peningkatan dari 9 menjadi 15 dokter, dengan rasio meningkat dari 0,2 menjadi 0,4.

Secara keseluruhan, Kota Jayapura menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah dokter, dari 36 pada 2019 menjadi 73 pada 2023, lebih dari dua kali lipat dalam lima tahun. Meskipun demikian, rasio dokter per penduduk di sebagian besar distrik masih relatif rendah, berkisar antara 0,3 hingga 0,5, kecuali Muara Tami yang memiliki rasio jauh lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan jumlah dokter yang signifikan, Kota Jayapura masih menghadapi tantangan dalam mencapai rasio dokter per penduduk yang ideal di sebagian besar distriknya. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan jumlah tenaga medis, terutama di distrik-distrik dengan rasio yang masih rendah, guna memastikan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Jayapura.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Infrastruktur jalan merupakan komponen vital dalam pembangunan perkotaan, berperan penting dalam mendukung mobilitas, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. Analisis terhadap perkembangan status dan kondisi jalan di Kota Jayapura periode 2019-2023 memberikan wawasan mendalam tentang upaya pemerintah dalam meningkatkan dan memelihara infrastruktur Kota Jayapura.

Data menunjukkan perubahan signifikan dalam pengelolaan jalan Kota Jayapura. Tahun 2022 menjadi titik balik dengan penambahan kategori jalan Nasional dan Provinsi, serta peningkatan total panjang jalan dari 508.494 meter menjadi 598.960 Meter. Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah mengoptimalkan jaringan jalan dan mengakui peran strategis Jayapura dalam konteks regional. Kondisi jalan mengalami perbaikan substansial. Jalan berkondisi baik meningkat lebih dari dua kali lipat, dari 111.875 meter menjadi 268.869 meter pada 2023. Secara bersamaan, terjadi penurunan drastis pada jalan rusak sedang dan ringan. Meskipun demikian, sedikit peningkatan jalan rusak berat menunjukkan adanya tantangan yang masih perlu diatasi.

Tabel 2.87
Perkembangan Status dan Kondisi Permukaan Jalan di Kota Jayapura Tahun 2019 – 2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	**Status Jalan**					
	Jalan Nasional	-	-	-	42.668	42.668
	Jalan Provinsi	-	-	-	5.380	5.380
	Jalan Kota	508.494	508.494	508.494	550.912	550.912
	Total	**508.494**	**508.494**	**508.494**	**598.960**	**598.960**
2	**Kondisi Jalan**					
	Baik	111.875	111.875	111.875	262.713	268.869
	Rusak Sedang	87.350	87.350	87.350	0.600	0.738
	Rusak Ringan	274.012	274.012	274.012	248.587	242.293
	Rusak Berat	35.257	35.257	35.257	39.012	39.012
	Total	**508.494**	**508.494**	**508.494**	**550.912**	**550.912**
3	**Permukaan Jalan**					
	Aspal	378.333	378.333	378.333	278.204	273.281
	Kerikil	70.637	70.637	70.637	130.168	135.035
	Rigid	59.524	59.524	59.524	134.353	134.470
	Tanah dan Lainnya	-	-	-	8.188	8.125
	Total	**508.494**	**508.494**	**508.494**	**550.912**	**550.912**

Sumber: Hasil Analisis Data Bappeda Kota Jayapura dan Dinas PUPR Kota Jayapura, Diolah Tahun 2024

Komposisi permukaan jalan juga mengalami pergeseran menarik. Terjadi penurunan jalan beraspal, namun diimbangi dengan peningkatan signifikan jalan berkerikil dan rigid (beton). Munculnya

kategori jalan tanah menambah variasi dalam pengelolaan infrastruktur jalan. Perubahan ini mencerminkan strategi adaptasi terhadap kondisi geografis dan iklim Kota Jayapura. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan dinamika pembangunan infrastruktur jalan di Kota Jayapura. Terlihat adanya upaya konsisten dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan, yang mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menangani jalan rusak berat dan mengoptimalkan jenis permukaan jalan sesuai kebutuhan lokal.

Perkembangan ini memberikan indikasi positif bagi masa depan Kota Jayapura. Peningkatan infrastruktur jalan tidak hanya mendukung mobilitas penduduk tetapi juga berpotensi memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing Kota Jayapura. Ke depan, fokus pada pemeliharaan berkelanjutan dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi infrastruktur akan menjadi kunci dalam memastikan efektivitas jangka panjang dari investasi yang telah dilakukan.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan hasil dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, luasan kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha di Kota Jayapura yang belum tertangani seluas 18,69 ha. Hasil ini belum memenuhi target RPD pada tahun 2024 yaitu seluas 17 ha. Capaian realisasi luasan kawasan pemukiman kumuh yang ditangani baru mencapai 90,95% dari target.

Tahun 2024 adalah tahun kedua Renstra 2023 - 2026 maka untuk Capaian Sasaran ke 7 tahun 2024 sebesar = 1.711 Unit bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas sebesar 3.798 maka capaian kinerjanya baru mencapai 45,05%. Adapun untuk Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022-2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.88
Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja	2022	2023	2024
1	Luasan Kawasan Kumuh tertangani (ha)	N/A	N/A	18,69
2	Jumlah Sarana dan Prasarana Permukiman Terbangun	N/A	946	1.711

Sumber: LPPD Kota Jayapura Tahun 2023-2024

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat merupakan aspek penting dalam mengukur kualitas hidup dan keamanan warga di suatu daerah. Indikator-indikator ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas, menegakkan peraturan, dan melindungi masyarakat dari berbagai ancaman. Melalui pengukuran dan evaluasi terhadap indikator-indikator tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan serta merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi warganya.

Tabel 2.89
Capaian Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio Linmas	.	0,31	0,32	-	0,68
2	Persentase Penegakkan Perda	15%	25%	60,3%	78,5%	79%
3	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	16%	56%	71%	82%	83%
4	Persentase Cakupan Pelayanan Penanganan Kebakaran	54%	61%	72%	89%	93%
5	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan WMK	17%	23%	42%	75%	79%

Sumber: Hasil Analisis Data Bappeda Kota Jayapura dan Satpol PP Kota Jayapura, 2024

Data Capaian Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kota Jayapura menunjukkan perkembangan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Rasio Linmas mengalami peningkatan dari 0,31 pada Tahun 2020 menjadi 0,68 pada Tahun 2023, menandakan penguatan kapasitas perlindungan masyarakat. Persentase Penegakkan Perda juga menunjukkan *trend* positif, meningkat secara signifikan dari 15% pada Tahun 2019 menjadi 79% pada tahun 2023, mencerminkan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) mengalami peningkatan drastis dari 16% pada tahun 2019 menjadi 83% pada tahun 2023, menunjukkan efektivitas penanganan pelanggaran. Persentase Cakupan Pelayanan Penanganan Kebakaran juga meningkat secara konsisten dari 54% pada tahun 2019 menjadi 93% pada tahun 2023, menandakan peningkatan kesiapsiagaan dalam menangani kebakaran. Terakhir, Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) mengalami peningkatan yang signifikan dari 17% pada tahun 2019 menjadi 79% pada tahun 2023, menunjukkan perbaikan dalam respon terhadap keadaan darurat. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan upaya yang konsisten dan efektif dari pemerintah Kota Jayapura dalam meningkatkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

B. Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Penduduk usia kerja (PUK) merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kota Jayapura. Penduduk usia kerja pada Agustus 2024 sebanyak 301,89 ribu orang, naik sebanyak 4,47 ribu orang dibandingkan Agustus 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu 204,70 ribu orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 97,19 ribu orang.

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 187,74 ribu orang penduduk yang bekerja dan 16,96 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2023, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 4,32 ribu orang, penduduk bekerja bertambah sebanyak 8,93 ribu orang, sementara pengangguran berkurang sebanyak 4,61 ribu orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami kenaikan dibanding Agustus 2023. TPAK pada Agustus 2024 sebesar 67,81 persen, naik 0,44 persen poin dibanding Agustus 2023. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2024, TPAK laki-laki sebesar 78,57 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 45,08 persen. Dibandingkan Agustus 2023, TPAK laki-laki mengalami penurunan sebesar 3,35 persen poin sedangkan TPAK perempuan mengalami penurunan sebesar 5,29 persen poin.

Tabel 2.90
Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan di Kota Jayapura
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angkatan Kerja (orang)	149.804	153.900	123.930	200.376	204.700
2.	Bukan Angkatan Kerja (orang)	87.640	87.522	96.590	97.040	97.190
3.	Pengangguran Terbuka (orang)	17.409	17.961	14.432	21.568	16.960
4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	73,16	78,29	60,61	67,37	67,81
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	11,62	11,67	9,71	10,76	8,29

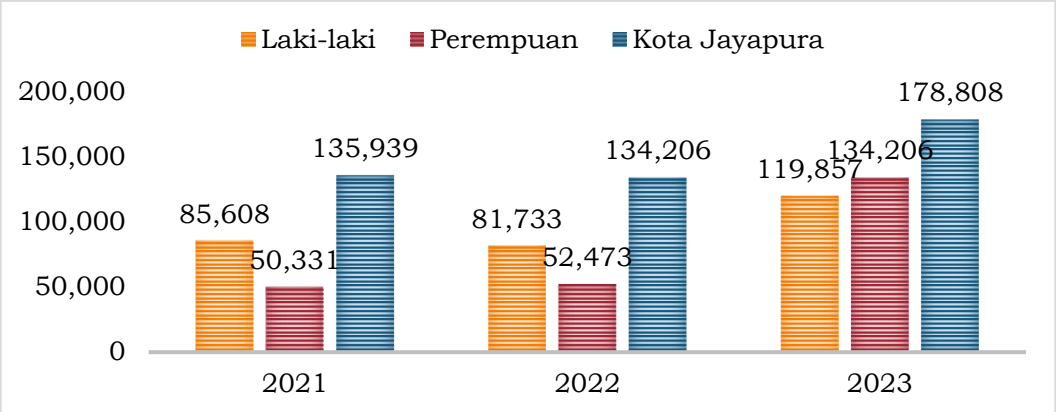
Sumber: BPS Kota Jayapura, 2025

Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin di Kota Jayapura Tahun 2021-2023 merupakan data penting yang menggambarkan dinamika ketenagakerjaan di kota tersebut. Data ini mencerminkan partisipasi angkatan kerja dan dapat menjadi indikator

perkembangan ekonomi serta kesetaraan gender dalam pasar tenaga kerja. Analisis data menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam jumlah penduduk bekerja di Kota Jayapura selama periode 2021-2023. Pada tahun 2021, total penduduk bekerja tercatat 135.939 jiwa, dengan komposisi 85.608 laki-laki (63%) dan 50.331 perempuan (37%). Tahun 2022 mengalami sedikit penurunan menjadi 134.206 jiwa, namun dengan perubahan komposisi dimana jumlah pekerja laki-laki menurun 4,5% menjadi 81.733 (60,9%), sementara pekerja perempuan meningkat 4,3% menjadi 52.473 (39,1%).

Perubahan drastis terjadi pada tahun 2023, dengan total penduduk bekerja melonjak 33,2% menjadi 178.808 jiwa. Peningkatan ini didominasi oleh pertumbuhan pekerja laki-laki sebesar 46,6% menjadi 119.857, sementara jumlah pekerja perempuan meningkat lebih dari dua kali lipat (155,8%) menjadi 134.206. Komposisi gender pun berubah signifikan dengan 47,2% pekerja laki-laki dan 52,8% pekerja perempuan.

Gambar 2.36.
Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin di Kota Jayapura Tahun 2021-2023 (jiwa)



Sumber: Hasil Analisis Data Bappeda Kota Jayapura, dan BPS Kota Jayapura, 2024

Fluktuasi ini menunjukkan dinamika pasar kerja yang kompleks di Kota Jayapura. Penurunan kecil pada tahun 2022 mencerminkan dampak lanjutan dari pandemi COVID-19. Namun, lonjakan besar pada 2023 dapat mengindikasikan pemulihan ekonomi yang kuat atau

perubahan struktural dalam pasar tenaga kerja. Peningkatan dramatis partisipasi perempuan dalam angkatan kerja pada 2023 adalah fenomena yang patut dicermati, menandakan pergeseran sosial-ekonomi yang signifikan atau implementasi kebijakan yang mendorong kesetaraan gender dalam pekerjaan. *Trend* umum menunjukkan peningkatan partisipasi angkatan kerja di Kota Jayapura, yang dapat menjadi indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Kota Jayapura ke depan.

Dalam konteks daya saing, peningkatan jumlah penduduk bekerja, terutama lonjakan signifikan pada tahun 2023, dapat berdampak positif terhadap daya saing Kota Jayapura. Pertama, peningkatan angkatan kerja menunjukkan ketersediaan sumber daya manusia yang lebih besar, yang dapat menjadi daya tarik bagi investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dapat meningkatkan produktivitas ekonomi secara keseluruhan dan mendorong inovasi melalui keragaman tenaga kerja.

Namun, untuk benar-benar meningkatkan daya saing, Pemerintah Kota Jayapura perlu memastikan bahwa peningkatan kuantitas tenaga kerja ini juga diimbangi dengan peningkatan kualitas. Ini melibatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja, serta pengembangan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan bisnis dan industri. Selain itu, pemerintah kota perlu memperhatikan aspek pemerataan kesempatan kerja dan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja secara optimal.

Peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja juga dapat menjadi keunggulan kompetitif jika dikelola dengan baik. Hal ini dapat mencakup kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja-kehidupan, perlindungan terhadap diskriminasi gender, dan promosi kesetaraan dalam kesempatan pengembangan karir. Dengan pendekatan yang komprehensif, Kota Jayapura dapat memanfaatkan

tren positif dalam angkatan kerjanya untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan sosialnya di tingkat regional maupun nasional.

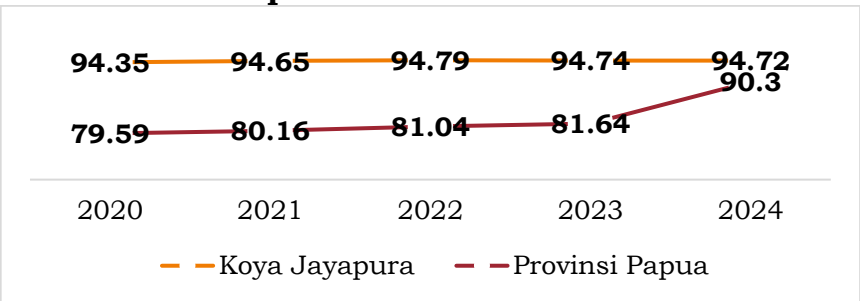
2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah sebuah ukuran yang dikembangkan untuk menilai kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG dihitung dengan membagi IPM perempuan dengan IPM laki-laki.

Data Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Jayapura untuk periode 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten walaupun pada tahun 2024 turun sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Dimulai dari 94,35 pada tahun 2020, IPG meningkat menjadi 94,72 pada 2024. *Trend* positif secara umum mengindikasikan bahwa kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kota Jayapura secara bertahap semakin mengecil. Meskipun peningkatannya relatif kecil dari tahun ketahun, konsistensi peningkatan ini menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam mengurangi ketimpangan *gender*.

Dengan nilai IPG di atas 94 selama periode tersebut, Kota Jayapura menunjukkan tingkat kesetaraan gender yang relatif tinggi dalam pembangunan manusia, yang berarti bahwa pencapaian pembangunan perempuan sudah mendekati pencapaian laki-laki. Jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Papua, maka nilai IPG Kota Jayapura selalu berada diatas provinsi.

Gambar 2.37.
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Jayapura dan Provinsi Papua Tahun 2020-2024

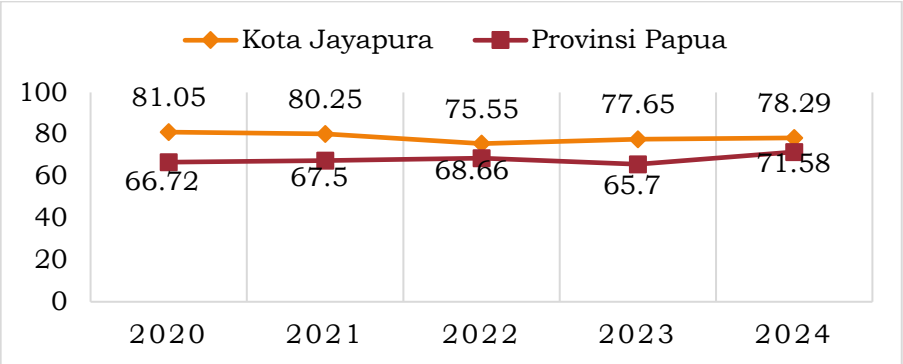


Sumber: BPS RI,2025

Peningkatan konsisten IPG Kota Jayapura didukung oleh berbagai faktor seperti kebijakan yang responsif gender, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi perempuan, serta peluang ekonomi yang lebih setara. Kesimpulannya, IPG Kota Jayapura menunjukkan pencapaian yang menggembirakan dalam konteks kesetaraan gender dalam pembangunan manusia. *Trend* positif yang konsisten mengindikasikan adanya komitmen dan efektivitas kebijakan dalam mengurangi kesenjangan gender. Kota Jayapura dapat menjadi model bagi daerah lain di Papua dan Indonesia dalam upaya mewujudkan pembangunan yang lebih setara gender.

Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Jayapura selama periode tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 IDG Kota sebesar 81,05 dan meningkat menjadi 80,25 di tahun berikutnya. Namun pada tahun 2022 sempat turun ke 75,55, walaupun pada tahun berikutnya kembali meningkat ke 77,65. Kondisi tahun 2024 meningkat menjadi 78,29 dan merupakan yang tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Papua. Bahkan capaian IDG Kota Japaura selama ini selalu berada di atas IDG Provinsi Papua. Kondisi IDG Kota Jayapura menunjukkan bahwa pemberdayaan/pelibatan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan.

Gambar 2.38.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Jayapura Tahun 2020-2023

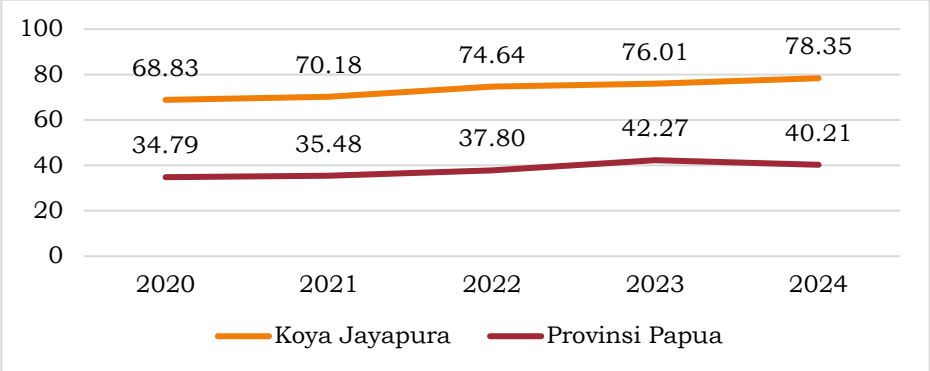


Sumber: BPS RI,2025

3. Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeka Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Delapan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP kota merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Gambar 2.39.
Indeks Ketahanan Pangan Kota Jayapura dan Provinsi Papua
Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Selama periode tahun 2020 sampai 2024, IKP Kota Jayapura konsisten meningkat. Peningkatan ini mengindikasikan semakin baiknya ketahanan pangan di Kota Jayapura. Nilai IKP pada tahun 2024 mencapai 78,35 dengan kateehori Sangat Tahan, berartti meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 76,01. Jika dibandingkan dengan Provinsi Papua, maka nilai IKP Kota Jayapura selalu jauh di atas

provinsi. Provinsi Papua menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki nilai IKP 2024 terendah (40,21). Rendahnya nilai IKP Provinsi Papua termasuk kategori rentan.

4. Lingkungan Hidup

Persentase penanganan sampah di Kota Jayapura pada tahun 2023 yaitu sebesar 83,81 persen dan mengalami peningkatan di tahun 2024 menjadi 85,00 persen atau terjadi peningkatan sebesar 1,19 persen. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.40.
Persentase Penanganan Sampah di Kota Jayapura Tahun 2023-2024



Sumber: LPPD Kota Jayapura Tahun 2023-2024

5. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Capaian Urusan Koperasi, UKM (Usaha Kecil dan Menengah) di Kota Jayapura selama periode 2019-2023 mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan sektor UKM dan koperasi. Data yang disajikan memberikan gambaran tentang perkembangan jumlah IKM (Industri Kecil dan Menengah), kondisi sarana dan prasarana pasar, jumlah koperasi aktif, serta kualitas koperasi di Kota Jayapura. Analisis terhadap data ini dapat membantu dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program yang telah diimplementasikan, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Tabel 2.91
Capaian Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah IKM	Unit	78	89	87	100	110
2	Jumlah Kondisi Sarana dan Prasarana dalam Keadaan Baik	Pasar	5	5	5	6	6
3	Persentase Jumlah Koperasi Aktif	Koperasi	96	103	108	89	75
4	Jumlah Koperasi yang Berkualitas	Koperasi	44	45	46	41	127

Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Kota Jayapura, 2024

Jumlah IKM di Kota Jayapura menunjukkan *trend* peningkatan yang konsisten dari 78 unit pada tahun 2019 menjadi 110 unit pada tahun 2023. Peningkatan ini mengindikasikan pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah yang positif, yang dapat berkontribusi pada peningkatan lapangan kerja dan ekonomi lokal. Kondisi sarana dan prasarana pasar dalam keadaan baik juga mengalami peningkatan, dari 5 pasar pada tahun 2019-2021 menjadi 6 pasar pada tahun 2022-2023.

Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi. Persentase jumlah koperasi aktif mengalami fluktuasi. Terjadi peningkatan dari 96 koperasi pada tahun 2019 menjadi 108 koperasi pada tahun 2021. Namun, terjadi penurunan signifikan menjadi 75 koperasi pada tahun 2023. Penurunan ini perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor penyebabnya dan merumuskan strategi untuk meningkatkan kembali jumlah koperasi aktif. Jumlah koperasi yang berkualitas menunjukkan perkembangan yang menarik. Terjadi sedikit peningkatan dari 44 koperasi pada tahun 2019 menjadi 46 koperasi pada tahun 2021. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi 41 koperasi. Pada tahun 2023 terjadi kenaikan signifikan menjadi 127 koperasi berkualitas. Peningkatan drastis ini menunjukkan adanya upaya yang kuat dalam meningkatkan kualitas koperasi di Kota Jayapura.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan dinamika perkembangan sektor UKM dan koperasi di Kota Jayapura. Meskipun terdapat beberapa tantangan, seperti penurunan jumlah koperasi aktif, namun terdapat juga indikator positif seperti peningkatan jumlah IKM dan lonjakan jumlah koperasi berkualitas. Hal ini menunjukkan potensi yang besar dalam pengembangan sektor ini, serta perlunya strategi yang berkelanjutan untuk memastikan pertumbuhan yang stabil dan berkualitas.

6. Penanaman Modal

Capaian Penanaman Modal di Kota Jayapura selama periode 2019-2023 menggambarkan dinamika investasi baik dari PMA (Penanaman Modal Asing) maupun PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Data yang disajikan mencakup jumlah investor dan nilai investasi untuk kedua jenis penanaman modal tersebut. Analisis terhadap data ini dapat memberikan wawasan tentang *trend* investasi, daya tarik Kota Jayapura bagi investor, serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam menarik dan memfasilitasi investasi.

Jumlah investor PMA di Kota Jayapura menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Dari 9 investor pada tahun 2019, meningkat menjadi 10 pada tahun 2020, namun menurun drastis menjadi 3 pada tahun 2021. Tahun 2022 menunjukkan lonjakan luar biasa menjadi 39 investor, tetapi kembali menurun menjadi 13 pada tahun 2023. Fluktuasi ini menggambarkan volatilitas minat investor asing terhadap Kota Jayapura, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal.

Tabel 2.92
Capaian Penanaman Modal Tahun 2019 – 2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Investor PMA	9	10	3	39	13
2	Jumlah Investor PMDN	1.751	2.605	2.913	14.315	12.898
3	Nilai Investasi PMA (milyar)	64.051.160.000	66.635.333.531	65.776.539.065	11.42.631.301.266	313.177.105.545
4	Nilai Investasi PMDN (milyar)	1.361.558.573.079	13.084.645.470.053	2.610.315.377.828	12.033.966.147.034	3.691.762.346.399

Sumber: DMPTSP Kota Jayapura, 2024

Sementara itu, jumlah investor PMDN menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan. Dari 1.751 investor pada tahun 2019, meningkat secara konsisten hingga mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan 14.315 investor. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 12.898 investor, angka ini tetap jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan drastis ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor domestik terhadap potensi ekonomi Kota Jayapura.

Nilai investasi PMA juga menunjukkan fluktuasi yang menarik. Dari Rp. 64 Miliar pada tahun 2019, meningkat sedikit pada tahun 2020, kemudian menurun pada tahun 2021. Tahun 2022 menunjukkan lonjakan luar biasa menjadi Rp 1,14 Triliun, namun kembali menurun menjadi Rp. 313 Miliar pada tahun 2023. Fluktuasi ini sejalan dengan perubahan jumlah investor PMA. Nilai investasi PMDN menunjukkan fluktuasi yang lebih ekstrem. Dari Rp. 1,36 Triliun pada tahun 2019, melonjak menjadi Rp. 13,08 triliun pada tahun 2020, kemudian menurun menjadi Rp. 2,61 Triliun pada tahun 2021. Tahun 2022 kembali menunjukkan peningkatan signifikan menjadi Rp. 12,03 Triliun, dan pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp. 3,69 Triliun. Fluktuasi yang ekstrem ini mencerminkan adanya proyek-proyek besar yang dilaksanakan pada tahun-tahun tertentu.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan lanskap investasi yang dinamis di Kota Jayapura. Meskipun terdapat fluktuasi, terutama dalam PMA, trend umum menunjukkan peningkatan minat investasi, khususnya dari investor domestik. Hal ini mengindikasikan potensi ekonomi yang besar di Kota Jayapura, namun juga menunjukkan perlunya strategi yang lebih stabil dan berkelanjutan untuk menarik dan mempertahankan investasi, terutama dari investor asing.

C. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Sektor Kelautan dan Perikanan memainkan peran vital dalam perekonomian dan ketahanan pangan Kota Jayapura. Data jumlah nelayan di lima distrik kota ini selama 2019-2023 memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika sektor perikanan, sebaran nelayan, serta peluang dan hambatan dalam pengembangannya.

Tabel 2.93
Jumlah Nelayan di Kota Jayapura Tahun 2019-2023

No	Distrik	Jumlah Nelayan				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jayapura Utara	975	1107	968	989	989
2.	Jayapura Selatan	1104	1219	1142	1204	1204
3.	Abepura	176	197	194	280	280
4.	Muara Tami	59	72	69	85	85
5.	Heram	26	28	26	31	31
Total		**2.340**	**2.623**	**2.399**	**2.589**	**2.589**

Sumber: Data Dinas Perikanan Kota Jayapura, 2024

Jayapura Selatan secara konsisten mendominasi jumlah nelayan, meningkat dari 1.104 orang pada 2019 menjadi 1.204 orang pada 2023, menegaskan posisinya sebagai sentra aktivitas perikanan kota. Jayapura Utara, meski mengalami fluktuasi, mempertahankan posisi kedua dengan jumlah nelayan yang relatif stabil, dari 975 pada 2019 menjadi 989 pada 2023. Abepura menunjukkan pertumbuhan signifikan, dengan jumlah nelayan melonjak dari 176 menjadi 280 orang selama periode tersebut, mengindikasikan perkembangan positif sektor perikanan di wilayah ini. Sementara itu, Muara Tami dan Heram, meskipun memiliki jumlah nelayan lebih sedikit, juga mencatat peningkatan.

Total nelayan di Kota Jayapura menunjukkan tren positif, meningkat dari 2.340 pada 2019 menjadi 2.589 pada 2023, meskipun terjadi fluktuasi. Menariknya, terjadi stagnasi pada 2022 dan 2023 di semua distrik, yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah atau kondisi lingkungan. Data ini mengungkapkan potensi

besar sektor perikanan di Kota Jayapura, namun juga menunjukkan ketidakmerataan distribusi nelayan antar distrik. Stagnasi pada dua tahun terakhir mengisyaratkan perlunya evaluasi dan intervensi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan di sektor ini. Selain jumlah nelayan, data produksi olahan perikanan di Kota Jayapura selama periode 2019-2023 juga memberikan wawasan penting tentang perkembangan sektor ini. Produksi olahan ikan menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama lima tahun terakhir. Ikan Asar, yang merupakan produk olahan tradisional, mengalami penurunan produksi yang drastis dari 1.863,13 ton pada 2019 menjadi 616,02 ton pada 2023. Penurunan ini mencerminkan perubahan preferensi konsumen atau tantangan dalam proses produksi. Produksi Ikan Asin menunjukkan *trend* yang menarik. Meskipun ada sedikit peningkatan dari 2019 hingga 2021, produksi ini terhenti sama sekali pada 2022 dan 2023. Hal ini disebabkan oleh perubahan permintaan pasar atau kendala produksi.

Tabel 2.94
Perkembangan Jumlah Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan
Tahun 2019-2023

No	Jenis Produk	Jumlah Produksi Olahan (Ton)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Ikan Asar	1.863,13	1.185,67	616,33	636,21	616,02
2.	Ikan Asin	0,25	0,38	0,48	0	0
3.	Olahan Bandeng	16,4	0,57	0	0,83	0
4.	Olahan Tenggiri	0	1,8	1,8	0,43	2,92
5.	Olahan Tuna	1.980,84	632,96	376,74	537,05	1.766,21
Total		**4.818,34**	**3.860,62**	**1.821,38**	**995,35**	**2.385,15**

Sumber: Hasil Analisis Data Bappeda Kota Jayapura dan Dinas Perikanan Kota Jayapura, 2024

Olahan Bandeng mengalami fluktuasi yang ekstrem, dengan produksi tertinggi pada 2019 sebesar 16,4 ton, namun mengalami penurunan signifikan pada tahun-tahun berikutnya, bahkan tidak ada produksi sama sekali pada 2021 dan 2023. Olahan Tenggiri menunjukkan tren positif, meskipun dengan angka yang relatif kecil.

Dari tidak ada produksi pada 2019, meningkat menjadi 2,92 ton pada 2023, menunjukkan potensi pengembangan produk ini di masa depan. Olahan Tuna, yang merupakan produk utama, mengalami fluktuasi yang dramatis. Dari produksi tertinggi 1.980,84 ton pada 2019, menurun tajam menjadi 376,74 ton pada 2021, namun kemudian meningkat kembali menjadi 1.766,21 ton pada 2023. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika pasar tuna global dan lokal.

Total produksi olahan perikanan menunjukkan tren penurunan dari 4.818,34 ton pada 2019 menjadi 2.385,15 ton pada 2023, meskipun ada sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2022. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan serius dalam industri pengolahan ikan di Kota Jayapura.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan volatilitas yang tinggi dalam industri pengolahan ikan di Kota Jayapura. Meskipun ada beberapa tanda-tanda pemulihan, seperti pada olahan tuna, penurunan umum dalam total produksi menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif untuk mengatasi tantangan dalam sektor ini. Hal ini termasuk diversifikasi produk, peningkatan teknologi pengolahan, atau pengembangan pasar baru untuk produk-produk olahan perikanan Kota Jayapura.

Tabel 2.95
Perkembangan Jumlah Unit Pengolahan Ikan di Kota Jayapura Tahun 2019-2023

No	Unit Pengolahan Ikan Berdasarkan Jenis Produk	Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) Unit/Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Ikan Asar	49	54	50	51	51
2.	Ikan Asin	1	1	1	0	0
3.	Olahan Bandeng	2	3	2	2	0
4.	Olahan Tenggiri	0	2	2	1	1
5.	Olahan Tuna	14	12	9	6	9
Total		**66**	**72**	**64**	**60**	**61**

Sumber: Hasil Analisis Data Bappeda Kota Jayapura dan Dinas Perikanan Kota Jayapura, 2024

Berdasarkan data unit pengolahan ikan di Kota Jayapura dari tahun 2019 hingga 2023, terlihat adanya fluktuasi dalam jumlah dan jenis UPI (Unit Pengolahan Ikan). Ikan asar merupakan produk olahan yang paling dominan dan konsisten, dengan jumlah UPI berkisar antara 49-54 unit per tahun. Sementara itu, produksi ikan asin mengalami penurunan, dari 1 unit pada tahun 2019-2021 menjadi tidak ada pada tahun 2022-2023. Olahan bandeng juga mengalami penurunan, dari 2-3 unit pada tahun 2019-2022 menjadi tidak ada di tahun 2023. Produksi olahan tenggiri mulai muncul pada tahun 2020 dengan 2 unit, namun menurun menjadi 1 unit pada tahun 2022-2023.

Olahan tuna mengalami penurunan signifikan dari 14 unit pada tahun 2019 menjadi hanya 9 unit pada tahun 2023. Secara keseluruhan, jumlah total UPI di Kota Jayapura mencapai puncaknya pada tahun 2020 dengan 72 unit, namun kemudian mengalami penurunan dan relatif stabil pada kisaran 60-61 unit pada tahun 2022-2023.

Tabel 2.96
Data Produksi Perikanan per Jenis Budidaya (ton)
Tahun 2019 – 2023

No	Jenis Budidaya	Produksi (Ton)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kolam	5.548,83	4.298,76	5.579,63	1.691	5.233,33
2.	Tambak	1.258,99	1.940,37	691,95	10.525	8.394,75
3.	Keramba Air Tawar	4,92	12,41	2.074,88	1,2	37,60
4.	Keramba Air Laut	2,66	3,79	2.812,54	3,00	15,90
Total		**6.815,40**	**6.255,33**	**11.159,00**	**12.491,00**	**13.681,58**

Sumber: Hasil Analisis Data Bappeda Kota Jayapura dan Dinas Perikanan Kota Jayapura, 2024

Analisis data luas areal budidaya perikanan di Kota Jayapura periode 2019-2023 mengungkapkan beberapa pola yang signifikan. Areal kolam menunjukkan variasi, dengan puncak perluasan di tahun 2021 sebesar 1.515 Ha, diikuti penurunan dan sedikit pemulihan di tahun-tahun berikutnya. Di sisi lain, luas tambak konsisten mengalami penyusutan, dari 489 Ha menjadi 481 Ha selama periode tersebut. Keramba air tawar dan air laut memperlihatkan dinamika yang menarik. Keduanya mencapai ekspansi tertinggi pada 2021, namun mengalami

fluktuasi signifikan setelahnya. Keramba air tawar stabil di 0,60 Ha pada 2022-2023, sementara keramba air laut menunjukkan *trend* peningkatan moderat di tahun terakhir. Secara agregat, luas areal budidaya perikanan Kota Jayapura mencapai titik tertinggi 2.001,30 Ha pada 2021, lalu mengalami kontraksi dan sedikit rebound di tahun-tahun berikutnya. Meski terjadi fluktuasi, perubahan total luas areal relatif minimal sepanjang 5 (lima) tahun, mengindikasikan stabilitas dalam pengembangan sektor budidaya perikanan.

Sementara itu, data distribusi dan penjualan ikan pada Tabel di bawah menunjukkan pola yang dinamis dalam rantai pasok perikanan lokal. TPI/PPI Hamadi konsisten menjadi pusat utama dengan jumlah distributor terbanyak, meskipun mengalami fluktuasi dari 46 orang pada 2019 menjadi 43 orang pada 2023. Secara keseluruhan, jumlah distributor menunjukkan pola yang tidak stabil, dengan penurunan 11.11% dari 2019 ke 2020 dan 8.33% dari 2020 ke 2021, diikuti pemulihan 13.64% dari 2021 ke 2022, lalu stabil di tahun 2023.

Tabel 2.97
Jumlah Distributor dan Pengecer Ikan di Kota Jayapura
Tahun 2019-2023

No	Lokasi	Distributor (orang)					Pengecer (orang)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.	TPI/PPI Hamadi	46	42	38	43	43	158	99	99	183	185
2.	Pasar Hamadi	-	-	-	-	-	7	7	7	22	22
3.	Pasar Mama Papua	-	-	-	-	-	8	8	8	4	0
4.	Pasar Penyangga Dok IX	-	-	-	-	-	29	29	29	25	25
5.	Pasar Youtefa	2	-			-	183	47	47	126	123
6.	Pasar Cigombong	-	-	-	-	-	4	3	3	3	3
7.	Pasar Kali Hanyaan	-	-	-	-	-	13	13	13	14	24
8.	Pasar Keliling	-	-	-	-	-	180	287	287	287	15
9.	Distrik Muara Tami (Koya Barat)	6	6	6	7	7	17	21	21	21	285
Jumlah		**54**	**48**	**44**	**50**	**50**	**599**	**658**	**658**	**685**	**703**

Sumber: Hasil Analisis Data Bappeda Kota Jayapura dan Data Dinas Perikanan Kota Jayapura, 2024

Sementara itu, jumlah pengecer menunjukkan tren pertumbuhan yang lebih konsisten, meningkat dari 599 orang pada 2019 menjadi 703 orang pada 2023. Peningkatan ini ditandai dengan

kenaikan signifikan 9.85% dari 2019 ke 2020, stabilitas di 2021, dan pertumbuhan berlanjut 4.10% dari 2021 ke 2022, serta 2.63% dari 2022 ke 2023. TPI/PPI Hamadi tetap menjadi lokasi utama dengan peningkatan jumlah pengecer dari 158 menjadi 185 orang.

Perubahan drastis terlihat pada beberapa lokasi. Pasar Keliling mengalami penurunan tajam jumlah pengecer sebesar 94.77% dari 287 pada 2022 menjadi hanya 15 pada 2023. Sebaliknya, Distrik Muara Tami (Koya Barat) menunjukkan lonjakan luar biasa sebesar 1257.14%, dari 21 pengecer pada Tahun 2022 menjadi 285 pengecer pada Tahun 2023. Beberapa pasar seperti; Pasar Hamadi dan Pasar Kali Hanyaan menunjukkan pertumbuhan, sementara Pasar Mama Papua mengalami penurunan hingga kurang adanya pengecer pada Tahun 2023. Data ini mencerminkan pergeseran signifikan dalam pola distribusi dan penjualan ikan di Kota Jayapura. Perubahan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti; kebijakan pemerintah, perubahan preferensi konsumen, atau dinamika ekonomi lokal yang mempengaruhi sektor perikanan di Kota Jayapura.

Data perkembangan jumlah dan jenis armada tangkap di Kota Jayapura periode 2019-2023 pada tabel di bawah menunjukkan *trend* yang menarik dalam sektor perikanan tangkap. Total armada mengalami peningkatan signifikan dari 664 unit pada 2019 menjadi 1062 unit pada 2023, menunjukkan pertumbuhan sebesar 59.94% selama lima tahun. Kapal tanpa motor menunjukkan stabilitas dengan 176 unit dari 2019 hingga 2022, namun mengalami penurunan 9.09% menjadi 160 unit pada 2023. Sementara itu, kapal motor < 5 GT mengalami pertumbuhan yang paling pesat, meningkat dari 324 unit pada 2019 menjadi 730 unit pada 2023, menunjukkan kenaikan luar biasa sebesar 125.31%. Pertumbuhan tahunan untuk kategori ini cukup konsisten, dengan peningkatan tertinggi sebesar 51.23% dari 2019 ke 2020.

Tabel 2.98
Perkembangan Jumlah Dan Jenis Armada Tangkap di Kota Jayapura Tahun 2019-2023

No	Jenis Armada	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kapal Tanpa Motor	176	176	176	176	160
2.	Kapal Motor < 5 GT	324	490	527	707	730
3.	Kapal Motor > 5 - 10 GT	142	140	140	140	140
4.	Kapal Motor > 10 - 30 GT	18	18	18	22	32
Total		**664**	**824**	**861**	**1045**	**1062**

Sumber: Data Dinas Perikanan Kota Jayapura, 2024

Kapal motor > 5 - 10 GT relatif stabil dengan sedikit penurunan dari 142 unit pada 2019 menjadi 140 unit pada 2020 dan tetap konstan hingga 2023. Kategori kapal motor > 10 - 30 GT menunjukkan peningkatan moderat namun signifikan, dari 18 unit pada 2019-2021 menjadi 22 unit pada 2022, dan melonjak menjadi 32 unit pada 2023, menunjukkan pertumbuhan total sebesar 77.78% selama periode lima tahun. Perubahan komposisi armada ini mencerminkan pergeseran dalam strategi penangkapan ikan di Kota Jayapura. Dominasi pertumbuhan kapal motor < 5 GT menunjukkan fokus pada penangkapan ikan skala kecil hingga menengah, karena efisiensi operasional atau kebijakan yang mendukung sektor ini. Peningkatan jumlah kapal motor > 10 - 30 GT juga mengindikasikan adanya ekspansi ke operasi penangkapan ikan yang lebih besar.

Perkembangan jumlah dan jenis alat tangkap di Kota Jayapura periode 2019-2023 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan dinamika menarik dalam sektor perikanan tangkap sebagaimana ditunjukan dalam tabel di bawah. Total alat tangkap meningkat drastis dari 1.083 unit pada 2019 menjadi 2.503 unit pada 2023, menunjukkan pertumbuhan luar biasa sebesar 131.12% selama lima tahun. Jaring Insang Lingkar menunjukkan stabilitas dengan 42 unit sepanjang periode 2019-2023. Jaring Insang Tetap mengalami peningkatan dari 102 unit pada 2019-2021 menjadi 157 unit pada 2022-2023, menunjukkan pertumbuhan 53.92%. Jaring Lingkar stabil pada 39 unit

dari 2019-2022, namun meningkat signifikan menjadi 69 unit pada 2023, menunjukkan pertumbuhan 76.92% dalam satu tahun terakhir.

Tabel 2.99
Perkembangan Jumlah dan Jenis Alat Tangkap di Kota Jayapura Tahun 2019-2023

No	Jenis Alat Tangkap	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jaring Insang Lingkar	42	42	42	42	42
2.	Jaring Insang tetap	102	102	102	157	157
3.	Jaring Lingkar	39	39	39	39	69
4.	Jaring Angkat	35	35	60	60	36
5.	Pancing Tonda	688	702	758	1328	1924
6.	Pancing Ulur	177	206	262	262	275
Total		**1.083**	**1.126**	**1.263**	**1.888**	**2.503**

Sumber: Data Dinas Perikanan Kota Jayapura, 2024

Jaring Angkat menunjukkan fluktuasi, meningkat dari 35 unit pada Tahun 2019-2020 menjadi 60 unit pada Tahun 2021-2022, namun menurun menjadi 36 unit pada 2023. Pancing Tonda mengalami pertumbuhan paling pesat, meningkat dari 688 unit pada TAhun 2019 menjadi 1.924 unit pada Tahun 2023, menunjukkan kenaikan luar biasa sebesar 179.65%. Pancing Ulur juga menunjukkan pertumbuhan konsisten, meningkat dari 177 unit pada Tahun 2019 menjadi 275 unit pada Tahun 2023, dengan pertumbuhan total 55.37%.

Perubahan komposisi alat tangkap ini mencerminkan pergeseran signifikan dalam strategi dan preferensi penangkapan ikan di Kota Jayapura. Dominasi pertumbuhan Pancing Tonda menunjukkan kean peningkatan fokus pada teknik penangkapan ikan tertentu, karena efektivitas, keberlanjutan, atau permintaan pasar untuk jenis ikan tertentu. Pertumbuhan yang konsisten dalam hampir semua jenis alat tangkap, terutama Pancing Tonda dan Pancing Ulur, mengindikasikan ekspansi yang signifikan dalam kapasitas penangkapan ikan. Ini didorong oleh berbagai faktor seperti kebijakan pemerintah yang

mendukung sektor perikanan, peningkatan investasi, perubahan teknologi, atau peningkatan permintaan pasar.

2. Pariwisata

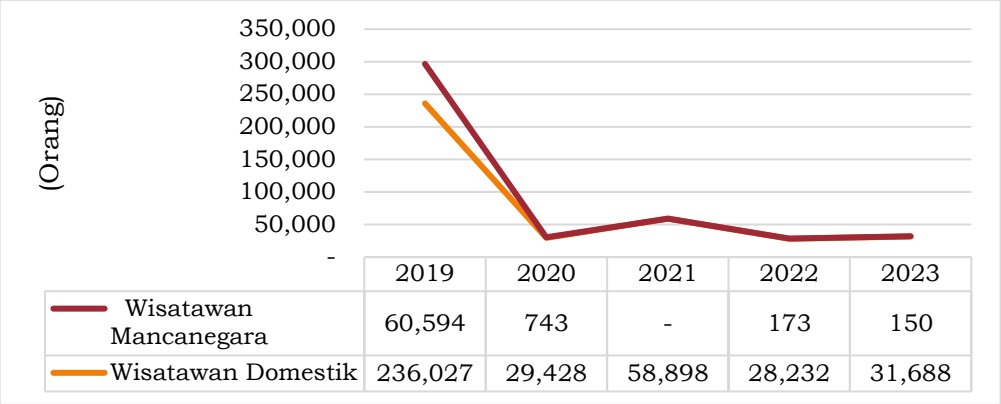
Jumlah wisatawan merupakan indikator penting dalam mengukur daya tarik dan perkembangan sektor pariwisata suatu daerah, mencerminkan potensi ekonomi industri pariwisata serta efektivitas strategi promosi dan pengembangan wisata. Data jumlah wisatawan di Kota Jayapura dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2019, total wisatawan mencapai 296.621 (236.027 domestik, 60.594 mancanegara). Namun, terjadi penurunan drastis sebesar 89,8% pada tahun 2020, dengan total wisatawan hanya 30.171 (29.428 domestik, 743 mancanegara). Tahun 2021 menunjukkan pemulihan dengan peningkatan 95,2%, mencapai 58.898 wisatawan, semuanya domestik. Tahun 2022 kembali mengalami penurunan 51,8% menjadi 28.405 wisatawan (28.232 domestik, 173 mancanegara). Data terbaru tahun 2023 menunjukkan peningkatan moderat sebesar 12,1%, dengan total 31.838 wisatawan (31.688 domestik, 150 mancanegara).

Analisis data ini menunjukkan bahwa sebenarnya sektor pariwisata Kota Jayapura sebelum mengalami dampak berat akibat pandemi COVID-19 memiliki potensi yang sangat besar sebagai salah satu sektor yang memiliki daya saing ekonomi. Wisatawan mancanegara mengalami penurunan paling signifikan, dengan penurunan 98,8% pada tahun 2020 dan belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang kuat.

Dalam konteks daya saing, penurunan jumlah wisatawan ini berdampak negatif terhadap sektor pariwisata dan ekonomi Kota Jayapura secara keseluruhan. Untuk meningkatkan daya saing, Maka Kota Jayapura perlu fokus pada strategi pemulihan sektor pariwisata pasca-pandemi. Langkah-langkah yang akan dilakukan meliputi peningkatan promosi wisata, terutama untuk pasar domestik yang menunjukkan pemulihan lebih cepat, pengembangan atraksi wisata

baru, peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata, serta implementasi protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, diversifikasi produk wisata dan pengembangan wisata berkelanjutan akan menjadi strategi jangka panjang untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing Kota Jayapura sebagai destinasi wisata. Bahkan pada tahun 2021, tidak ada catatan wisatawan mancanegara sama sekali.

Gambar 2.41.
Jumlah Wisatawan di Kota Jayapura, Tahun 2019-2023



	2019	2020	2021	2022	2023
Wisatawan Mancanegara	60,594	743	-	173	150
Wisatawan Domestik	236,027	29,428	58,898	28,232	31,688

Sumber: Hasil Analisis Data Bappeda Kota Jayapura, dan BPS Kota Jayapura, 2024

Ketersediaan hotel dan penginapan memainkan peran krusial dalam menentukan daya saing, terutama dalam konteks pariwisata dan bisnis. Infrastruktur akomodasi yang memadai dan berkualitas tidak hanya mendukung sektor pariwisata, tetapi juga menjadi indikator kesiapan dalam menerima pengunjung, baik untuk tujuan wisata maupun bisnis. Pilihan akomodasi yang sesuai dengan berbagai segmen pasar cenderung lebih menarik bagi wisatawan dan investor. Selain itu, sektor perhotelan juga berkontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, dan stimulasi sektor-sektor pendukung lainnya. Oleh karena itu, analisis terhadap ketersediaan dan perkembangan fasilitas akomodasi menjadi aspek penting dalam menilai dan meningkatkan daya saing Kota Jayapura secara keseluruhan.

Tabel 2.100
Hotel dan Pariwisata Di Kota Jayapura Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Hotel/Penginapan	87	87	87	87	89
2.	Kamar	2.492	2.289	2.797	3.176	3.138
3.	Tempat Tidur	3.601	3.360	3.679	4.477	4.537
4.	Wisatawan Wancanegara	60.594	743	0	173	150
5.	Wisatawan Nusantara	263.027	29.428	58.898	28.232	31.688

Sumber: Hasil Analisis Data Bappeda Kota Jayapura, 2024

Tabel di atas memberikan gambaran tentang perkembangan sektor pariwisata dan akomodasi di Kota Jayapura dari tahun 2019 hingga 2023, mencakup jumlah hotel/penginapan, jumlah kamar, jumlah tempat tidur, serta jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara. Analisis data menunjukkan bahwa jumlah hotel/penginapan relatif stabil dari 2019 hingga 2022 dengan 87 unit, sedikit meningkat menjadi 89 unit pada 2023, menunjukkan pertumbuhan 2,3%. Jumlah kamar mengalami fluktuasi, dengan penurunan 8,1% pada 2020 (dari 2.492 menjadi 2.289), kemudian meningkat signifikan sebesar 22,2% pada 2021 (menjadi 2.797), 13,5% pada 2022 (menjadi 3.176), dan sedikit menurun 1,2% pada 2023 (menjadi 3.138). Jumlah tempat tidur juga mengalami pola serupa, dengan penurunan 6,7% pada 2020, diikuti peningkatan 9,5% pada 2021, 21,7% pada 2022, dan 1,3% pada 2023.

Wisatawan mancanegara mengalami penurunan drastis 98,8% dari 60.594 pada 2019 menjadi 743 pada 2020, dan mencapai nol pada 2021. Terjadi sedikit pemulihan pada 2022 dengan 173 wisatawan, namun kembali menurun 13,3% menjadi 150 pada 2023. Wisatawan nusantara juga mengalami penurunan signifikan 88,8% dari 263.027 pada 2019 menjadi 29.428 pada 2020. Terjadi peningkatan 100,1% pada 2021 (menjadi 58.898), namun kembali menurun 52,1% pada 2022 (menjadi 28.232), dan sedikit meningkat 12,2% pada 2023 (menjadi 31.688).

Analisis hubungan antar data membuktikan ketidakseimbangan antara peningkatan kapasitas akomodasi dan penurunan jumlah wisatawan, menunjukkan potensi *overcapacity*. Meskipun demikian, sektor akomodasi menunjukkan resiliensi dengan mempertahankan dan meningkatkan kapasitasnya di tengah penurunan kunjungan wisatawan. Terdapat indikasi pergeseran pasar dengan pemulihan lebih cepat pada wisatawan nusantara, serta potensi *underutilization* fasilitas akomodasi. Stabilitas jumlah hotel namun dengan peningkatan jumlah kamar mengindikasikan *trend* ke arah akomodasi berkapasitas lebih besar.

Dalam konteks daya saing, perkembangan ini memiliki beberapa implikasi. Ketahanan sektor akomodasi di tengah pandemi, ditunjukkan dengan peningkatan kapasitas kamar sebesar 25,9% dari 2019 ke 2023, menunjukkan potensi positif untuk daya saing kota dalam jangka panjang. Namun, peningkatan kapasitas yang tidak diimbangi dengan pemulihan jumlah wisatawan (penurunan 87,9% untuk wisatawan nusantara dan 99,8% untuk mancanegara dari 2019 ke 2023) bisa mengindikasikan potensi *overcapacity,* menjadi tantangan bagi profitabilitas sektor perhotelan.Untuk meningkatkan daya saingnya, Kota Jayapura perlu mempertimbangkan beberapa strategi. Ini termasuk diversifikasi produk wisata untuk menarik baik wisatawan domestik maupun mancanegara, peningkatan kualitas layanan dan infrastruktur pariwisata, implementasi strategi pemasaran digital yang inovatif, pengembangan sektor *MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition)* untuk memanfaatkan kapasitas akomodasi yang ada, serta fokus pada pengembangan pariwisata berkelanjutan sebagai daya tarik unik kota. Dengan pengelolaan yang tepat dan strategi yang inovatif, Kota Jayapura dapat memanfaatkan potensi sektor pariwisata dan akomodasinya untuk meningkatkan daya saing kota, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

3. Pertanian

Analisis data produksi tanaman pangan di Kota Jayapura menunjukkan variasi yang signifikan antar distrik dan jenis tanaman. Padi sawah hanya diproduksi di Distrik Muara Tami dengan luas panen 59 hektar dan produksi 360 ton. Ubi kayu menjadi tanaman dengan produksi tertinggi, mencapai total 5.306 ton dari luas panen 42 hektar, dengan Abepura sebagai produsen terbesar (2.590 ton), diikuti Muara Tami (2.261 ton). Ubi jalar menghasilkan total 224 ton dari 32 hektar, dengan Abepura kembali memimpin (189 ton). Produksi jagung mencapai 1.127 ton dari 166,9 hektar, didominasi oleh Muara Tami (2.436,1 ton), meskipun terdapat ketidakkonsistenan data yang perlu diklarifikasi. Kacang tanah hanya diproduksi di Muara Tami dan Heram, total 120,4 ton dari 86 hektar.

Tabel 2.101
Produksi Tanaman Pangan Tahun 2023 (Ton)

No	Distrik	Padi Sawah		Ubi Kayu		Ubi Jalar		Jagung		Kacang Tanah	
		LP	P	LP	P	LP	P	LP	P	LP	P
1.	Muara Tami	59	360	32,3	2261	20,7	144,9	348,1	2436,1	86	120,4
2.	Abepura	0	0	37	2590	27	189	155	1085	0	
3.	Heram	0	0	1,5	105	1,1	7,7	5,9	41,3	0,5	0,7
4.	Jayapura Selatan	0	0	3	210	3	21	3	21	0	
5.	Jayapura Utara	0	0	2	140	2	14	3	21	0	
Total		**59**	**360**	**42**	**5.306**	**32**	**224**	**166,9**	**1.127**	**86**	**120,4**

Sumber: Hasil Analisis Data Bappeda Kota Jayapura dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura, 2024
Keterangan: LP= Luas Panen; P = Produksi

Sementara itu, Muara Tami menunjukkan diversifikasi tanaman terbesar, memproduksi semua jenis kecuali kedelai, mengindikasikan potensi agrikultur yang kuat. Abepura cenderung fokus pada ubi kayu dan ubi jalar, sementara distrik lain memiliki produksi lebih terbatas. Data ini mengungkapkan peluang untuk meningkatkan produksi di distrik-distrik yang saat ini kurang produktif, terutama untuk tanaman seperti ubi kayu yang menunjukkan produktivitas tinggi. Variasi

produksi antar distrik juga menekankan pentingnya koordinasi dalam distribusi pangan untuk menjamin ketahanan pangan di seluruh Kota Jayapura. Ketidakkonsistenan dalam data jagung menunjukkan perlunya perbaikan dalam pengumpulan dan pelaporan data untuk perencanaan yang lebih akurat. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan lanskap pertanian yang beragam di Kota Jayapura, dengan potensi signifikan untuk pengembangan lebih lanjut dalam hal diversifikasi tanaman dan peningkatan produktivitas di berbagai distrik.

Tabel 2.102
Tingkat Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2019-2023

No	Produktivitas	Jenis Tanaman Pangan (Ton/Hektar)					
		Padi Sawah	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Jagung	Kacang Tanah	Kacang Kedelai
1.	2019	5,2	46,4	31,9	7	1,4	1,3
2.	2020	5,2	30,96	24,9	7	1	1
3.	2021	5,2	31	25,5	7,3	1,4	0
4.	2022	634	72	37	709	77	0
5.	2023	5,19	70	55	7	1,4	0

Sumber: BPS, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura, 2024

Data tingkat produktivitas tanaman pangan di Kota Jayapura dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 menunjukkan pola yang bervariasi dan beberapa anomali yang signifikan. Produktivitas padi sawah relatif stabil pada kisaran 5,2 Ton/Hektar dari Tahun 2019-2021, namun mengalami lonjakan drastis menjadi 634 ton/hektar pada Tahun 2022, sebelum kembali ke level normal 5,19 ton/hektar pada 2023. Ubi kayu menunjukkan fluktuasi yang cukup besar, dari 46,4 ton/hektar pada Tahun 2019, menurun menjadi sekitar 31 ton/hektar pada Tahun 2020-2021, kemudian meningkat signifikan menjadi 72 ton/hektar pada Tahun 2022 dan 70 ton/hektar pada Tahun 2023.

Tabel 2.103
Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kota Jayapura (ha)
Tahun 2021–2024

No	Jenis Tanaman	2021	2022	2023	2024
1	Bawang Daun	32	17	20	20
2	Bawang Merah	-	-	4	10
3	Bayam	88	84	69	130
4	Buncis	24	16	17	39
5	Cabai Rawit	77	98	119	141
6	Kacang Panjang	50	31	36	60
7	Kangkung	150	97	123	183
8	Kembang Kol	8	6	14	12
9	Ketimun	15	20	18	43
10	Kubis	73	62	82	62
11	Labu Siam	13	13	15	20
12	Melon	10	10	13	23
13	Petsai/Sawi	111	118	102	129
14	Semangka	36	36	35	41
15	Terung	29	25	23	44
16	Tomat	60	44	43	74
17	Cabai Besar	64	53	65	111
18	Cabai Keriting	-	-	12	20

Sumber: Kota Jayapura Dalam Angka 2025

Produktivitas ubi jalar juga mengalami peningkatan bertahap, dari 31,9 ton/hektar pada Tahun 2019 menjadi 55 ton/hektar pada Tahun 2023, dengan lonjakan ke 37 ton/hektar pada Tahun 2022. Jagung menunjukkan pola yang serupa dengan padi sawah, stabil sekitar 7 ton/hektar dari Tahun 2019 hingga 2021, melonjak drastis menjadi 709 ton/hektar pada 2022, sebelum kembali ke 7 ton/hektar pada 2023. Kacang tanah mengalami fluktuasi antara 1 hingga 1,4 ton/hektar dari 2019 hingga 2021, namun mencatat peningkatan luar biasa menjadi 77 ton/hektar pada Tahun 2022, sebelum kembali ke 1,4 ton/hektar pada 2023. Produktivitas kacang kedelai menurun dari 1,3 ton/hektar pada 2019 menjadi 1 ton/hektar pada 2020, dan tidak ada produksi tercatat dari 2021 hingga Tahun 2023.

Tabel 2.104
Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kota Jayapura Tahun 2021–2024 (kuintal)

No	Jenis Tanaman	2021	2022	2023	2024
1	Bawang Daun	1.578	740	504	393
2	Bawang Merah	-	-	93	339
3	Bayam	9.148	7.681	9.277	14.148
4	Buncis	3.711	1.134	67	719
5	Cabai Rawit	10.816	10.290	2.784	3.025
6	Kacang Panjang	4.305	1.512	1.270	1.930
7	Kangkung	25.355	16.123	10.016	19.788
8	Kembang Kol	1.030	404	283	581
9	Ketimun	970	689	1.065	1.922
10	Kubis	10.507	7.923	10.973	8.203
11	Labu Siam	2.531	839	1.342	1.893
12	Melon	224	328	590	667
13	Petsai/Sawi	11.667	9.528	7.469	11.427
14	Semangka	2.330	2.102	2.079	2.389
15	Terung	6.412	2.687	2.120	3.493
16	Tomat	11.557	5.387	3.226	5.818
17	Cabai Besar	4.895	4.384	1.402	2.841
18	Cabai Keriting	-	-	562	268

Sumber: Kota Jayapura Dalam Angka 2025

Tabel 2.105
Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kota Tahun 2021–2024 Jayapura (m2)

No	Jenis Tanaman	2021	2022	2023	2024
1	Jahe	15.545	24.414	24.886	31.223
2	Kapulaga	130	-	-	-
3	Kencur	3.355	3.260	6.014	8.690
4	Kunyit	7.450	5.755	7.647	9.872
5	Laos/Lengkuas	10.345	8.015	13.023	19.615
6	Lempuyang	250	910	1.830	1.680
7	Lidah Buaya	710	330	336	580
8	Mahkota Dewa	997	2.300	3.371	3.370
9	Mengkudu	570	280	130	100
10	Sambiloto	1.300	2.185	2.748	2.860
11	Temuireng	1.520	2.570	3.070	2.700
12	Temulawak	2.211	3.335	6.663	4.285
13	Jeruk Nipis	-	-	100	-
14	Serai	-	-	203	-

Sumber: Kota Jayapura Dalam Angka 2025

Tabel 2.106
Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kota Jayapura Tahun 2021–2024 (kg)

No	Jenis Tanaman	2021	2022	2023	2024
1	Jahe	29.508	64.035	206.411	78.590
2	Kapulaga	230	-	-	-
3	Kencur	6.798	5.901	26.261	18.808
4	Kunyit	24.344	11.301	33.845	22.088

No	Jenis Tanaman	2021	2022	2023	2024
5	Laos/Lengkuas	71.489	30.115	35.169	60.075
6	Lempuyang	733	1.834	3.315	2.790
7	Lidah Buaya	8.990	330	356	655
8	Mahkota Dewa	44.860	56.400	106.824	93.800
9	Mengkudu	11.195	4.520	130	50
10	Sambiloto	1.213	3.690	5.224	3.260
11	Temuireng	3.290	5.670	5.269	5.270
12	Temulawak	5.818	8.145	11.544	9.425
13	Jeruk Nipis	-	-	500	-
14	Serai	-	-	1.354	-

Sumber: Kota Jayapura Dalam Angka 2025

Data luas panen tanaman sayuran dan buah-buahan semusim di Kota Jayapura dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang signifikan untuk berbagai jenis tanaman. Kangkung konsisten menjadi tanaman dengan luas panen terbesar, meskipun mengalami penurunan dari 208 hektar pada 2019 menjadi 97 hektar pada 2022, namun kembali meningkat menjadi 174 hektar pada 2023. Cabai rawit menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dari 118 hektar pada 2019 menjadi 178 hektar pada 2023, menjadikannya tanaman dengan luas panen terbesar di tahun terakhir.

Sayur Bayam, meskipun mengalami penurunan dari 128 hektar pada 2019 menjadi 84 hektar pada 2022, kembali meningkat menjadi 113 hektar pada 2023. Petsai/sawi menunjukkan *trend* penurunan konsisten dari 172 hektar pada 2019 menjadi 91 hektar pada 2023. Beberapa tanaman seperti buncis, kacang panjang, dan ketimun mengalami penurunan signifikan dari pada Tahun 2019 hingga 2022, namun menunjukkan pemulihan pada 2023. Tanaman seperti labu siam dan melon, meskipun memiliki luas panen yang lebih kecil, menunjukkan peningkatan di tahun 2023 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Produksi buah-buahan dan sayuran tahunan di Kota Jayapura menunjukkan fluktuasi yang signifikan dengan *trend* peningkatan yang mencolok untuk beberapa komoditas selama periode Tahun 2019-2023. Peningkatan drastis dalam produksi beberapa jenis buah mencerminkan perbaikan dalam teknik budidaya, pengenalan varietas unggul, atau

perubahan dalam kebijakan pertanian yang mendukung pengembangan sektor Pertanian.

Tabel 2.107
Produksi Buah-buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Kota Jayapura (Kuintal) Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun (Kuintal)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Alpokat	90	na	2807	1364	1.892
2.	Belimbing	77	na	519	266	512
3.	Duku	-	na	181	800	0
4.	Durian	-	na	66	100	0
5.	Jambu Air	49	na	688	326	381
6.	Jambu Biji	487	na	3320	4279	3.783
7.	Jeruk Besar	2	na	412	187	177
8.	Jeruk Siam	237	na	3005	3983	5.703
9.	Mangga	214	na	3822	3712	25.039
10.	Melinjo	-	na	8	-	0
11.	Nangka	314	na	7697	3494	16.827
12.	Nenas	43	na	374	342	1.274
13.	Pepaya	395	na	39889	19777	4.967
14.	Petai	38	na	249	213	291
15.	Pisang	5838	na	57936	42778	127.905
16.	Rambutan	37	na	828	2270	1.679
17.	Salak	39	na	366	894	2.781
18.	Sawo	57	na	409	35	0
19.	Sirsak	204	na	947	1003	830
20.	Sukun	163	na	2849	807	3.903

Sumber: BPS, Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian, 2024

Pisang konsisten menjadi komoditas dengan produksi tertinggi, mengalami peningkatan dramatis dari 5.838 kuintal pada Tahun 2019 menjadi 127.905 kuintal pada Tahun 2023, menunjukkan pertumbuhan luar biasa sebesar 2.090,7%. Mangga mencatatkan lonjakan produksi yang spektakuler, dari 214 kuintal pada Tahun 2019 menjadi 25.039 kuintal pada Tahun 2023, meningkat sebesar 11.600,5%. Nangka juga menunjukkan peningkatan signifikan, mencapai 16.827 kuintal pada 2023 dari 314 kuintal pada Tahun 2019, tumbuh sebesar 5.259,6%. Jeruk siam mengalami pertumbuhan yang stabil, meningkat dari 237 kuintal pada Tahun 2019 menjadi 5.703 kuintal pada Tahun 2023, menunjukkan kenaikan 2.306,3%. Alpokat dan jambu biji juga

menunjukkan *trend* positif dengan peningkatan produksi yang konsisten, masing-masing tumbuh sebesar 2.002,2% dan 676,8% dari Tahun 2019 ke Tahun 2023.

Pepaya mengalami fluktuasi yang menarik, dengan puncak produksi pada Tahun 2021 sebesar 39.889 kuintal, namun kemudian menurun menjadi 4.967 kuintal pada Tahun 2023, masih menunjukkan pertumbuhan 1.157,5% dibandingkan Tahun 2019. Salak menunjukkan peningkatan yang stabil dari 39 kuintal pada Tahun 2019 menjadi 2.781 kuintal pada Tahun 2023, tumbuh sebesar 7.028,2%. Beberapa buah seperti duku, durian, dan sawo menunjukkan pola produksi yang tidak konsisten, dengan tidak adanya produksi tercatat pada Tahun 2023, mengalami penurunan 100% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di mana ada produksi. Ketiadaan data pada tahun 2020 (ditandai dengan 'na') menimbulkan kesenjangan dalam analisis tren jangka panjang. Namun, secara keseluruhan, data menunjukkan potensi yang besar dalam produksi buah-buahan di Kota Jayapura, dengan beberapa komoditas menunjukkan pertumbuhan yang sangat menjanjikan, mencapai ribuan persen.

4. Peternakan

Populasi ternak di Kota Jayapura selama periode 2019-2023 menunjukkan dinamika yang beragam untuk berbagai jenis hewan. Sapi potong mengalami fluktuasi moderat, meningkat dari 5.737 ekor pada 2019 menjadi puncaknya 6.366 ekor pada tahun 2020 (kenaikan 10,9%), namun kemudian menurun menjadi 5.140 ekor pada tahun 2023, menunjukkan penurunan keseluruhan sebesar 10,4% dari tahun 2019 ke tahun 2023.

Tabel 2.108
Populasi Ternak Tahun 2019 – 2023

No.	Jenis Ternak	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Sapi Potong	5.737	6.366	6.154	6.205	5.140
2.	Kambing	261	375	2.637	2.685	2.693
3.	Babi	26.687	27.548	19.823	20.543	21.622
4.	Ayam Buras			55.765	57.476	58.632
5.	Ayam Petelur			71.300	73.453	76.854
6.	Ayam Ras Pedaging	96.746	99.123	226.192	598.657	986.476
7.	Itik			1.321	1.452	1.591
8.	Merpati			730	503	467
9.	Kelinci	-	-	1.980	876	521

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura, 2024

Kambing menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan, melonjak dari 261 ekor pada tahun 2019 menjadi 2.693 ekor pada tahun 2023, mencatatkan peningkatan luar biasa sebesar 931,8%. Lonjakan terbesar terjadi antara tahun 2020-2021, dengan kenaikan 603,2%. Populasi babi mengalami fluktuasi, meningkat dari 26.687 ekor pada tahun 2019 menjadi 27.548 ekor pada tahun 2020 (kenaikan 3,2%), namun kemudian menurun signifikan menjadi 19.823 ekor pada tahun 2021 (penurunan 28%), sebelum kembali meningkat menjadi 21.622 ekor pada tahun 2023. Secara keseluruhan, terjadi penurunan 19% dari tahun 2019-2023. Ayam buras mengalami penurunan drastis, dari 96.746 ekor pada tahun 2019 menjadi 58.632 ekor pada tahun 2023, menunjukkan penurunan sebesar 39,4%. Sementara itu, data untuk ayam petelur dan ayam ras pedaging baru tersedia mulai tahun 2021, dengan ayam ras pedaging menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa dari 226.192 ekor pada tahun 2021 menjadi 986.476 ekor pada tahun 2023, meningkat 336,1% dalam dua tahun. Itik dan merpati juga baru tercatat mulai tahun 2021, dengan itik menunjukkan pertumbuhan moderat sebesar 20,4% dari 2021 ke 2023, sementara populasi merpati menurun 36% dalam periode yang sama. Kelinci, yang baru tercatat mulai tahun 2021, mengalami penurunan signifikan dari 1.980 ekor menjadi 521 ekor pada tahun 2023, menunjukkan penurunan sebesar 73,7%.

Tabel 2.109
Produksi Daging Tahun 2019-2023

No.	Jenis Ternak	Tahun (Kg)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Sapi Potong	453.288	485.594	485.954	567.894	625.374
2.	Kambing	14.876	15.651	15.651	15.987	16.324
3.	Babi	324.839	350.521	350.521	467.234	546.237
4.	Ayam Buras	93.076	96.043	96.043	99.120	116.234
5.	Ayam Petelor	45.568	48.352	51.135	53.365	55.634
6.	Ayam Pedaging	2.033.028	2.040.910	2.040.910	2.224.179	2.416.687
7.	Itik	655	709	761	612	463

Sumber: Hasil Analisis Data Bappeda Kota Jayapura dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura, 2024

Produksi daging di Kota Jayapura selama periode 2019-2023 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan untuk sebagian besar jenis ternak. Sapi potong mencatatkan pertumbuhan yang konsisten, meningkat dari 453.288 kg pada tahun 2019 menjadi 625.374 kg pada tahun 2023, menunjukkan kenaikan sebesar 38% selama lima tahun. Produksi daging kambing mengalami peningkatan moderat, dari 14.876 kg pada tahun 2019 menjadi 16.324 kg pada tahun 2023, tumbuh sebesar 9,7%. Sementara itu, produksi daging babi menunjukkan pertumbuhan yang lebih signifikan, melonjak dari 324.839 kg pada tahun 2019 menjadi 546.237 kg pada tahun 2023, mencatatkan kenaikan sebesar 68,2%.

Ayam buras mengalami peningkatan produksi daging dari 93.076 Kg pada tahun 2019 menjadi 116.234 Kg pada tahun 2023, tumbuh sebesar 24,9%. Ayam petelur juga menunjukkan tren positif dengan peningkatan dari 45.568 Kg pada tahun 2019 menjadi 55.634 Kg pada tahun 2023, tumbuh sebesar 22,1%. Ayam pedaging tetap menjadi penyumbang terbesar produksi daging, dengan peningkatan dari 2.033.028 Kg pada tahun 2019 menjadi 2.416.687 Kg pada tahun 2023, menunjukkan pertumbuhan sebesar 18,9%. Meskipun persentase pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan jenis ternak lain, secara volume peningkatannya sangat signifikan. Satu-satunya jenis ternak yang mengalami penurunan produksi adalah itik, turun dari 655 Kg

pada tahun 2019 menjadi 463 kg pada tahun 2023, menunjukkan penurunan sebesar 29,3%.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan pertumbuhan yang kuat dalam produksi daging di Kota Jayapura, dengan peningkatan signifikan terutama pada daging sapi potong dan babi. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan permintaan pasar, perbaikan dalam praktik peternakan, atau kebijakan yang mendukung pengembangan sektor peternakan. Penurunan produksi daging itik menunjukkan pergeseran preferensi konsumen atau tantangan dalam pemeliharaan jenis unggas ini. *Trend* positif ini menunjukkan potensi besar untuk pengembangan lebih lanjut industri peternakan di Kota Jayapura, terutama dalam sektor sapi potong, babi, dan ayam pedaging.

5. Perdagangan

Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Kota Jayapura didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu: Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Informasi dan Komunikasi; dan Transportasi dan Pergudangan. Urutan struktur tersebut, dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Jayapura.

Selama 5 tahun terakhir, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang kontribusi lebih dari 15 (lima belas) persen terhadap PDRB Kota Jayapura. Pada tahun 2024, kontribusi Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB berada pada urutan kedua, dengan nilai persentase sebesar 18,79 persen.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Jayapura pada tahun 2024 disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan di beberapa lapangan usaha dan pertumbuhan tertinggi ada pada lapangan usaha pengadaan Listrik dan gas. Selanjutnya, lapangan usaha yang juga memiliki pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha

perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Hal ini terjadi karena semakin meningkatnya berbagai aktivitas perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya maupun perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor. Peningkatan pada sub kategori perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor selain dikarenakan hadirnya berbagai ritel modern baru di Kota Jayapura juga adanya perkembangan yang cukup besar dari ritel modern yang sudah ada sebelumnya.

Tabel 2.110
Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi Sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB (%)	16,50	16,67	17,49	18,13	18,79
LPR Sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (%)	-2,09	4,60	6,71	6,12	5,52

Sumber: BPS Kota Jayapura, 2025

6. Perindustrian

Kontribusi lapangan usaha Industri Pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku Kota Jayapura tahun 2024 sebesar 2,40 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan kontribusinya tahun 2023 yang sebesar 2,41 persen. Sementara Laju pertumbuhan lapangan usaha Industri Pengolahan pada tahun 2024 sebesar 2,50 persen, mengalami kontraksi dibanding pertumbuhan di tahun 2023. Beberapa industri mengalami kontraksi seperti Industri Kayu, Barang galian bukan logam dan industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan.

Tabel 2.111
Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	2,51	2,47	2,43	2,41	2,40
LPR Sektor Industri Pengolahan (%)	-5,14	0,95	2,90	1,61	2,50

Sumber: BPS Kota Jayapura, 2025

D. Fokus Layanan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kepegawaian

Hubungan antara profil pendidikan ASN dengan daya saing SDM di Kota Jayapura menunjukkan beberapa aspek penting. Peningkatan jumlah ASN berpendidikan S1 dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang pada gilirannya mendukung pengembangan SDM masyarakat secara umum. ASN dengan kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi memiliki potensi lebih besar untuk mengimplementasikan inovasi dalam pelayanan publik. Penurunan jumlah ASN berpendidikan rendah menunjukkan upaya meningkatkan standar minimal kompetensi ASN, sementara fluktuasi pada tingkat pendidikan menengah dan diploma menunjukkan perlunya strategi yang lebih komprehensif dalam mengelola komposisi kompetensi ASN.

Berdasarkan data tingkat pendidikan ASN di Kota Jayapura dari Tahun 2019 hingga 2023, terlihat beberapa tren penting. Terjadi peningkatan signifikan pada jumlah ASN dengan kualifikasi Strata Satu (S1), dari 1.904 pada 2019 menjadi 3.126 pada 2023, menunjukkan peningkatan sebesar 64,2%. Sementara itu, jumlah ASN dengan kualifikasi SD dan SMP mengalami penurunan konsisten, dengan ASN berpendidikan SD turun 50% dan SMP turun 48%. Terjadi pula fluktuasi pada tingkat pendidikan menengah dan diploma, dengan penurunan jumlah ASN berpendidikan SMA (21,2%) dan Diploma (23,4%) dari 2019 ke 2023, meskipun ada sedikit peningkatan pada tahun 2023 dibandingkan 2022. Data untuk ASN berpendidikan S2 dan S3 hanya tersedia untuk tahun 2019 dan 2020, membatasi analisis tren jangka

panjang untuk kualifikasi tinggi ini. Total jumlah ASN meningkat dari 4.116 pada 2019 menjadi 4.769 pada 2023, menunjukkan pertumbuhan 15,9%.

Tabel 2.112
Perkembangan Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2019 – 2023

No	Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Sekolah Dasar (SD)	44	33	29	22	22
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	125	91	67	64	65
3.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1.174	1.073	959	885	925
4.	Diploma (D-III)	692	658	431	421	530
5.	Strata Satu(S1)	1.904	1.882	2629	2589	3126
6.	Strata Dua (S2)	171	176			
7.	Strata Tiga (S3)	6	6			
Jumlah		**4.116**	**3.919**	**4.224**	**4.075**	**4.769**

Sumber: Hasil Analisis Data Bappeda Kota Jayapura, 2024

Secara umum data tersebut menunjukkan profil pendidikan ASN di Kota Jayapura menunjukkan tren positif dalam peningkatan kualifikasi, yang berpotensi meningkatkan daya saing SDM Kota Jayapura melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, masih ada ruang untuk pengembangan, terutama dalam meningkatkan jumlah ASN dengan kualifikasi tinggi dan memastikan keseimbangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kota Jayapura. Strategi pengembangan SDM ASN yang lebih terarah dan berkelanjutan diperlukan untuk memaksimalkan kontribusi pelayanan publik terhadap peningkatan daya saing SDM Kota Jayapura secara keseluruhan.

Capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Jayapura tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat diwakilkan dengan Indikator Kinerja unci (IKK). Berikut ini capaian IKK pada lima tahun terkahir:

Tabel 2.113
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kota Jayapura Tahun 2022-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI			PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	
	PENDIDIKAN					
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	35,281	80,61	81,04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	74,802	93,01	99,33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	68,851	94,37	96,42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	13,586	99,49	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	KESEHATAN					
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Persen	0,366	3,82	3,81	Dinas Kesehatan
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	88,889	88,88	100	Dinas Kesehatan
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	97,937	91,77	90,35	Dinas Kesehatan
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	85,244	90,43	91,94	Dinas Kesehatan
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	85,911	91,26	92,96	Dinas Kesehatan
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	98,196	100,93	99,37	Dinas Kesehatan
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	110,275	118,77	100	Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI			PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	76,344	58,01	67,75	Dinas Kesehatan
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	73,617	103,39	77,99	Dinas Kesehatan
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,780	83,93	100	Dinas Kesehatan
11	Persentase penderita DM yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	134,326	1.407,66	100	Dinas Kesehatan
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	168,421	90,18	100	Dinas Kesehatan
13	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	24,156	67,6	57,53	Dinas Kesehatan
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	39,931	67,61	85,42	Dinas Kesehatan
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota	Persen	4,440	4,58	4,65	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota	Persen	33,082	33,06	33,08	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	N/A	N/A	N/A	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI			PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum Melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	100	89,45	61,57	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	38,759	82,34	91,21	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	58,084	47,79	59,65	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	0,00	0,00	12,22	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100	N/A	N/A	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persen	100	N/A	N/A	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI			PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	
3	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di kab/kota yang ditangani	Persen	20,210	5,64	42,77	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	3,764	3,59	3,22	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	0,058	0,05	96,77	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	91,667	57,69	100	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	91,667	50	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	139,400	N/A	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	0,812	1,57	4,23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	64,821	85,72	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Presentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	86,36	72,50	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	12,60	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	SOSIAL					

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI			PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	
1	Presentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	21,091	98,83	52,38	Dinas Sosial
2	Presentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	Dinas Sosial
	TENAGA KERJA					
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	0,233	100,00	100	Dinas Tenaga Kerja
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	1,920	0,49	1,01	Dinas Tenaga Kerja
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		0,051	119.060,89	100	Dinas Tenaga Kerja
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS (Ketenagakerjaan)	Persen	58,621	7,69	0,325	Dinas Tenaga Kerja
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	100	30,50	61,91	Dinas Tenaga Kerja
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
1	Presentase ARG pada belanja Langsung APBD	Persen	2,528	2,47	1,49	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	Presentase anak korban kekerasan yang di tangani instansi terkait kabupaten	Persen	100	0,13	0,225	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI			PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	
3	Rasio Kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (Per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	99,258	197,44	111,327	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	PANGAN					
1	Persentase Ketersedian Pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Persen	84,994	N/A	N/A	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	PERTANAHAN					
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang di terbitkan	Persen	0,00	N/A	N/A	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	0,00	N/A	N/A	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Persen	0,00	N/A	N/A	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4	Tersedianya Tanah Obyek Landrefrom (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah Absentee	Persen	0,00	N/A	N/A	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Persen	0,00	N/A	N/A	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
6	Penanganan sengketa tanah garapan yang di lakukan melalui mediasi	Persen	0,00	100	68,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	LINGKUNGAN HIDUP					
1	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kab/Kota	Persen	73,880	N/A	75,50	Dinas Lingkungan Hidup
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persen	83,797	N/A	83,49	Dinas Lingkungan Hidup

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI			PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh pemerintah	Persen	15,385	N/A	64,36	Dinas Lingkungan Hidup
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL					
1	Perekaman KTP elektronik	Persen	79,066	78,74	75,74	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (hari) yang memiliki KIA	Persen	53,688	92,38	65,08	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	92,307	58,96	93,55	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Persen	100	N/A	8,57	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	600	N/A	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2	Persentase peningkatan status Desa Mandiri	Persen	16,667	N/A	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Persen	3,760	12,75	15,05	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	Presentase pemakaian kontrasepsi modern(Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR) Jumlah Pasangan Usia Subur	Persen	93,393	87,29	87,29	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI			PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	
3	Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	4,795	4,10	17,86	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	PERHUBUNGAN					
1	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Persen	1,066	1,00	2,00	Dinas Perhubungan
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	Persen	1,066	0,90	0,60	Dinas Perhubungan
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD)) yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	9,30	4,76	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan teritegrasi	Persen	100	100	20,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	100	95,19	1,27	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persen	573,171	100	24,62	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persen	0,267	100	13,13	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	PENANAMAN MODAL					
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / Kota	Persen	23,187	N/A	31,98	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI			PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	0,109	0,043	0,03	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	Tingkat partisaipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	0,550	0,28	1,09	Dinas Pemuda dan Olahraga
3	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	0	15	5	Dinas Pemuda dan Olahraga
	STATISTIK					
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	87,179	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	87,179	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	PERSANDIAN					
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	0,00	2,18	49,61	Dinas Komunikasi dan Informatika
	KEBUDAYAAN					
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kedbudayaan
	PERPUSTAKAAN					
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persen	852	50,43	43,61	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Persen	1,00	22,49	27,87	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI			PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	
	KEARSIPAN					
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persen	1,00	50,00	4,77	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	1,00	N/A	N/A	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	PERIKANAN					
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Persen	98,447	105,35	100	Dinas Perikanan
	PARIWISATA					
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	N /A	-13,29	100	Dinas Pariwisata
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Persen	-51,773	12,24	100	Dinas Pariwisata
3	Tingkat Hunian Akomodas	Persen	13,502	8.851,67	100	Dinas Pariwisata
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	45,939	41,84	100	Dinas Pariwisata
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	34,099	35,22	30,46	Dinas Pariwisata
	PERTANIAN					
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/ha	7,566	0,00	1.218,3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI			PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	
2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	0,00	-66,66	7,50	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	KEHUTANAN					
1						
	ENERGI SUMBER DAYA MINERAL					
1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Persen	N /A	N /A	N /A	Sekretariat Daerah
	PERDAGANGAN					
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	116,033	N /A	5,60	Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	0,00	N/A	N/A	Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM
3	Persentase alat-alat ukut, takar, timbang dan perlengkapannya (UTPP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	300	N /A	97,64	Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM
	PERINDUSTRIAN					
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Persen	-100	-12,50	N /A	Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM
2	Persentasa pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator Pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana induk pembangunan industri nasional) yang di tetapkan dalam RPIP	Persen	N /A	N /A	N /A	Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI			PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang di keluarkan oleh instansi terkait	Persen	N /A	100	N /A	Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dan jumlah izin perluasan industri (IPUI) Kecil dan menengah yang di keluarkan oleh instansi terkait	Persen	N /A	N /A	N /A	Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/kota	Persen	N /A	N /A	N /A	Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	N /A	N /A	N /A	Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM
	PERENCANAAN KEUANGAN					
1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persen	19,134	N /A	14,33	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2	Rasio PAD	Persen	84,325	100	16,61	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Level	2,800	2,81	2,8	Inspektorat Daerah
4	Peningkatan kapabilitas Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	Inspektorat Daerah
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	100	25,53	72,43	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6	Opini Laporan Keuangan	Level	1	WTP	10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI			PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	
	PENGADAAN					
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0,00	0,38	0	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
2	Persentase jumlah pengadaan yang di lakukan dengan metode kompetitif	Persen	3.100	2,89	14,24	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
3	Rasio nilai belanja yang di lakukan melalui pengadaan	Persen	55,093	100	13,18	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Persen	47,727	770,06	14,49	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	KEPEGAWAIAN					
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	51,353	79,50	70,22	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	2,061	1,79	2,84	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompentensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	1,889	0,97	100	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	MANAJEMEN KEUANGAN					
1	Budget execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	5,265	15,68	4,70	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	846,839	1,29	0,83	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI			PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	
3	Asset Management 1. Apakah ada daftar asset tetap ? (ya/tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap (Ya/tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan ? (Ya/tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran (Ya/tidak)	Ya/Tidak	1	0	3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	Persen	11,243	120,74	4,41	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK					
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Persen	97,115	0,00	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Persen	100	100	16,67	Dinas Komunikasi Dan Informatika

Sumber: LPPD Kota Jayapura Tahun 2020-2024

2.1.5. Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, maka Pemerintah Daerah wajib mencantumkan dan menganggarkan urusan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggarannya. Dalam RPJMD dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan langkah awal dalam tahapan pelaksanaan pembangunan dan dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Adapun capaian pelaksanaan SPM di Kota Jayapura tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

A. URUSAN PENDIDIKAN

Untuk menjamin tercapainya mutu pendidikan yang diselenggarakan daerah, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Adapun Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar; dan
3. Pendidikan Kesetaraan.

Capaian SPM urusan pendidikan disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.114
Capaian SPM Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					98.08 %
1 .	**Pendidikan Anak Usia Dini**					96.21 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4822	4822	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**16.21 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	81.04 %
	1 . Angka partisipasi sekolah	%	100	37.57	**62.43**	**37.57 %**
	2 . Angka partisipasi murni	%	80	79.24	**0.76000000000001**	**99.05 %**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	3 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	51.87	63.71	**-11.84**	**100.00 %**
	4 . Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	76.69	78.36	**-1.67**	**100.00 %**
	5 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	0	0	**0**	**100.00 %**
	6 . Kecukupan formasi guru ASN	%	26	25.89	**0.11**	**99.58 %**
	7 . Indeks distribusi guru	%	0.4	0.38	**0.02**	**95.00 %**
	8 . Proporsi PTK bersertifikat	%	34	33.39	**0.61**	**98.21 %**
	9 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	**0**	**0.00 %**
2 .	**Pendidikan Dasar**					99.25 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	44450	44450	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**19.25 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	96.27 %
	SD (2024)					96.25 %
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	86.65	**13.35**	**86.65 %**
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	97.11	**2.89**	**97.11 %**
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	52.9	53.82	**-0.92**	**100.00 %**
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	37.24	38.77	**-1.53**	**100.00 %**
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	5.5	5.45	**0.05**	**99.09 %**
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	3.4	3.33	**0.07**	**97.94 %**
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	70.86	67.1	**3.76**	**94.69 %**
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	72.22	72.17	**0.049999999999997**	**99.93 %**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	59.62	51.97	**7.65**	**87.17 %**
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	26	25.9	**0.1**	**99.62 %**
	11 . Indeks distribusi guru	%	0.4	0.36	**0.04**	**90.00 %**
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	29	28.72	**0.28**	**99.03 %**
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	**0**	**100.00 %**
	SMP (2024)					96.30 %
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	95.31	**4.69**	**95.31 %**
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	97.04	**2.96**	**97.04 %**
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	70.96	70.76	**0.19999999999999**	**99.72 %**
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	67.09	61.57	**5.52**	**91.77 %**
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	7.1	7.07	**0.029999999999999**	**99.58 %**
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	4.25	4.19	**0.06**	**98.59 %**
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	73.2	70.2	**3**	**95.90 %**
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	72.91	76.06	**-3.15**	**100.00 %**
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	61.65	59.25	**2.4**	**96.11 %**
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	27.5	27.23	**0.27**	**99.02 %**
	11 . Indeks distribusi guru	%	0.4	0.32	**0.08**	**80.00 %**
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	42	41.51	**0.49**	**98.83 %**
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	**0**	**100.00 %**
3 .	**Pendidikan Menengah**					99.25 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	13400	13400	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	SMA (2024)					93.76 %
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	75.63	**24.37**	**75.63 %**
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	86.9	**13.1**	**86.90 %**
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	67.19	68.4	**-1.21**	**100.00 %**
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	55.68	57.6	**-1.92**	**100.00 %**
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	3.2	3.08	**0.12**	**96.25 %**
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	3	2.5	**0.5**	**83.33 %**
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	74.68	72.14	**2.54**	**96.60 %**
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	80.1	76.68	**3.42**	**95.73 %**
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	63.36	61.79	**1.57**	**97.52 %**
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	7	6.97	**0.03**	**99.57 %**
	11 . Indeks distribusi guru	%	0.4	0.35	**0.05**	**87.50 %**
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	48.5	48.42	**0.079999999999998**	**99.84 %**
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	**0**	**100.00 %**
	SMK (2024)					94.02 %
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	75.63	**24.37**	**75.63 %**
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	86.9	**13.1**	**86.90 %**
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	60.68	61.89	**-1.21**	**100.00 %**
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	51.83	53.4	**-1.57**	**100.00 %**
	5 . Tingkat penyerapan lulusan SMK	%	81.57	88.87	**-7.3**	**100.00 %**
	6 . Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	50	37.89	**12.11**	**75.78 %**
	7 . Perbedaan skor literasi	Nilai	3.1	3.04	**0.06**	**98.06 %**
	8 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	1.25	1.21	**0.04**	**96.80 %**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	9 . Indeks iklim keamanan	Nilai	69.6	67.76	**1.84**	**97.36 %**
	10 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	77.68	73.85	**3.83**	**95.07 %**
	11 . Indeks distribusi guru	%	0.4	0.35	**0.05**	**87.50 %**
	12 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	57.24	56	**1.24**	**97.83 %**
	13 . Kecukupan formasi guru ASN	%	12.1	12.03	**0.07**	**99.42 %**
	14 . Proporsi PTK bersertifikat	%	39.4	39.37	**0.030000000000001**	**99.92 %**
	15 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	**0**	**100.00 %**
4 .	**Pendidikan Kesetaraan**					99.49 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2592	2592	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**19.49 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	97.43 %
	1 . Angka partisipasi kasar	%	0	0	**0**	**100.00 %**
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	30	20.33	**9.67**	**67.77 %**
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	49.1	49.06	**0.039999999999999**	**99.92 %**
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	39.4	39.34	**0.059999999999995**	**99.85 %**
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	16.2	16.17	**0.029999999999998**	**99.81 %**
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	10.7	10.64	**0.059999999999999**	**99.44 %**
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	64.1	64.05	**0.049999999999997**	**99.92 %**
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	67.5	67.44	**0.060000000000002**	**99.91 %**
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	55	54.95	**0.049999999999997**	**99.91 %**
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	**0**	**100.00 %**
	11 . Indeks distribusi guru	%	0	0	**0**	**100.00 %**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	**0**	**100.00 %**
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	**0**	**100.00 %**

Sumber: LPPD Kota Jayapura Tahun 2024

Untuk mendukung tercapainya SPM bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Jayapura, alokasi anggaran untuk urusan Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.115
Alokasi Anggaran SPM Urusan Pendidikan

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Anggaran		
			Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Pengelolaan Pendidikan	11.568.843.502	11.226.993.383	97,05
2	Pendidikan Sekolah Dasar		31.614.279.663	31.031.434.134	98,16
3	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		37.835.679.363	36.910.546.537	97,55
4	Pendidikan Sekolah Menengah Atas		35.923.151.984	33.274.000.935	92,63
5	Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		24.135.929.601	21.736.125.760	90,06
6	Pendidikan Kesetaraan		3.127.300.000	2.956.858.000	94,63
	JUMLAH		**144.205.184.113**	**137.135.958.749**	**95,10**

Sumber: LPPD Kota Jayapura Tahun 2024

B. URUSAN KESEHATAN

Untuk menjamin tercapainya mutu pelayanan dasar kesehatan yang diselenggarakan daerah, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

Capaian SPM urusan Kesehatan disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.116
Capaian SPM Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					90,27 %	
1 .	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**						90,76 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**72,28 %**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5.845	5.281	**564**	**90,35 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**18,48 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	92,41 %	
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	5.845	5.281	**564**	**90,35 %**	
	2 . Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	100.000	100.000	**0**	**100,00 %**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	800	800	**0**	**100,00 %**	
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	2.500	2.500	**0**	**100,00 %**	
	5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	2.000	2.000	**0**	**100,00 %**	
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	870	870	**0**	**100,00 %**	
	7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	0	0	**0**	**0,00 %**	
	8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	5.845	5.281	**564**	**90,35 %**	
	9 . Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	5.845	5.281	**564**	**90,35 %**	
	10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	5.845	5.845	**0**	**100,00 %**	
	11 . Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	100	100	**0**	**100,00 %**	
	12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"	Orang	14	14	**0**	**100,00 %**	
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	14	14	**0**	**100,00 %**	
	14 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	28	28	**0**	**100,00 %**	
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	61	61	**0**	**100,00 %**	
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	47	47	**0**	**100,00 %**	
	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	5.281	5.281	**0**	**100,00 %**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
2 .	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**						93.19 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**73,55 %**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5.571	5.122	**449**	**91,94 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**19,64 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	98.21 %	
	1 . Formulir partograf	Formulir	5.571	5.122	**449**	**91,94 %**	
	2 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	5.571	5.122	**449**	**91,94 %**	
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	Buku	2.000	2.000	**0**	**100,00 %**	
	4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	4.000	4.000	**0**	**100,00 %**	
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	14	14	**0**	**100,00 %**	
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Paket	14	14	**0**	**100,00 %**	
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	28	28	**0**	**100,00 %**	
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	28	30	**-2**	**100,00 %**	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	40	47	**-7**	**100,00 %**	
3 .	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**						93.71 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**74,37 %**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5.487	5.101	**386**	**92,97 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**19,34 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	96,71 %	
	1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	5.487	5.101	**386**	**92,97 %**	
	2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul	3.000	3.000	**0**	**100,00 %**	
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	3.000	3.000	**0**	**100,00 %**	
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	5.487	5.101	**386**	**92,97 %**	
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	5.487	5.101	**386**	**92,97 %**	
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	2.000	1.500	**500**	**75,00 %**	
	7 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	3.000	3.000	**0**	**100,00 %**	
	8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	14	14	**0**	**100,00 %**	
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	28	28	**0**	**100,00 %**	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	14	14	**0**	**100,00 %**	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	31	61	**-30**	**100,00 %**	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	14	14	**0**	**100,00 %**	
	13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	28	47	**-19**	**100,00 %**	
	14 . Kader Kesehatan	Orang	625	625	**0**	**100,00 %**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
4 .	**Pelayanan Kesehatan Balita**						99.29 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**79,50 %**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	25.149	24.991	**158**	**99,37 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**19,80 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	98,99 %	
	1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	25.149	24.991	**158**	**99,37 %**	
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	25.149	24.991	**158**	**99,37 %**	
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	1.500	1.500	**0**	**100,00 %**	
	4 . Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	10.000	10.000	**0**	**100,00 %**	
	5 . Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	25.000	25.000	**0**	**100,00 %**	
	6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	8.000	8.000	**0**	**100,00 %**	
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	20.000	20.000	**0**	**100,00 %**	
	8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	2.500	2.500	**0**	**100,00 %**	
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	2.500	2.500	**0**	**100,00 %**	
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	2.500	2.500	**0**	**100,00 %**	
	11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	2.500	2.500	**0**	**100,00 %**	
	12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	2.500	2.500	**0**	**100,00 %**	
	13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	16.800	16.800	**0**	**100,00 %**	
	14 . Peralatan Anafilaktik	Paket	1.000	800	**200**	**80,00 %**	
	15 . Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	3.000	3.000	**0**	**100,00 %**	
	16 . Tenaga medis : Dokter	Orang	14	14	**0**	**100,00 %**	
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	28	28	**0**	**100,00 %**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	18 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	14	14	**0**	**100,00 %**	
	19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	28	47	**-19**	**100,00 %**	
	20 . Guru PAUD	Orang	24	24	**0**	**100,00 %**	
	21 . Kader Kesehatan	Orang	625	625	**0**	**100,00 %**	
5 .	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar**						99.54 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00 %**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	34.667	35.603	**-936**	**100,00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**19,54 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	97,69 %	
	1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Buku	34.667	34.667	**0**	**100,00 %**	
	2 . Form pencatatan/buku pemantauan Kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Buku	34.667	34.667	**0**	**100,00 %**	
	3 . Kuesioner skrining Kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	34.667	34.667	**0**	**100,00 %**	
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah /madrasah/pesantren)	Formulir	34.667	34.667	**0**	**100,00 %**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	34.667	34.667	**0**	**100,00 %**	
	6 . Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 1217 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di Gudang farmasi kabupaten/kota)	Tablet	30.000	30.000	**0**	**100,00 %**	
	7 . Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)	Alat	24	24	**0**	**100,00 %**	
	8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)	Strip	5.000	5.000	**0**	**100,00 %**	
	9 . Media promosi Kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	12	12	**0**	**100,00 %**	
	10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	3.000	3.000	**0**	**100,00 %**	
	11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	28	28	**0**	**100,00 %**	
	12 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	28	28	**0**	**100,00 %**	
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	48	56	**-8**	**100,00 %**	
	14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	48	56	**-8**	**100,00 %**	
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	48	61	**-13**	**100,00 %**	
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	28	28	**0**	**100,00 %**	
	17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	24	14	**10**	**58,33 %**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	649	649	**0**	**100,00 %**	
6 .	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**						74.05 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**54,20 %**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	214.112	145.072	**69.040**	**67,76 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**19,85 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	99,25 %	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	12	12	**0**	**100,00 %**	
	2 . Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	35	30	**5**	**85,71 %**	
	3 . Alat : Tensimeter	Unit	40	40	**0**	**100,00 %**	
	4 . Alat : Glukometer	Unit	30	30	**0**	**100,00 %**	
	5 . Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	11.827	11.827	**0**	**100,00 %**	
	6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	3.500	3.500	**0**	**100,00 %**	
	7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	14	14	**0**	**100,00 %**	
	8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	25	25	**0**	**100,00 %**	
	9 . Kit Opthalmologi Komunitas	Unit	24	24	**0**	**100,00 %**	
	10 . Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen	50	50	**0**	**100,00 %**	
	11 . Alat Pelayanan KB	Unit	2.000	2.000	**0**	**100,00 %**	
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	159.620	159.620	**0**	**100,00 %**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	13 . Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	35	35	**0**	**100,00 %**	
	14 . Tenaga medis : Dokter	Orang	24	28	**-4**	**100,00 %**	
	15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	48	56	**-8**	**100,00 %**	
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	50	70	**-20**	**100,00 %**	
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	14	14	**0**	**100,00 %**	
	18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	14	14	**0**	**100,00 %**	
	19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	24	24	**0**	**100,00 %**	
7 .	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**						82.39 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**62,39 %**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	37.771	29.458	**8.313**	**77,99 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	100,00 %	
	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	50	50	**0**	**100,00 %**	
	2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	25	25	**0**	**100,00 %**	
	3 . Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	25	25	**0**	**100,00 %**	
	4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	25	25	**0**	**100,00 %**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	30.000	30.000	**0**	**100,00 %**	
	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	1.000	1.000	**0**	**100,00 %**	
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	5	5	**0**	**100,00 %**	
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	24	28	**-4**	**100,00 %**	
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	56	56	**0**	**100,00 %**	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	56	70	**-14**	**100,00 %**	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	24	24	**0**	**100,00 %**	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	28	28	**0**	**100,00 %**	
	13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	28	28	**0**	**100,00 %**	
8 .	**Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**						100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00 %**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	7.956	8.325	**-369**	**100,00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	100,00 %	
	1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	14	14	**0**	**100,00 %**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	2 . Obat Hipertensi	Paket	7.956	7.956	**0**	**100,00 %**	
	3 . Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	50	50	**0**	**100,00 %**	
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	1	1	**0**	**100,00 %**	
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	25	25	**0**	**100,00 %**	
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	14	14	**0**	**100,00 %**	
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	14	14	**0**	**100,00 %**	
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	28	28	**0**	**100,00 %**	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	28	28	**0**	**100,00 %**	
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	14	14	**0**	**100,00 %**	
	11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	14	14	**0**	**100,00 %**	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	14	14	**0**	**100,00 %**	
9 .	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**						100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00 %**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2.326	3.386	**-1.060**	**100,00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	100,00 %	
	1 . Obat Diabetes Melitus	Paket	2.326	2.326	**0**	**100,00 %**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	2 . Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit	12	12	**0**	**100,00 %**	
	3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	2.000	2.000	**0**	**100,00 %**	
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	159.620	159.620	**0**	**100,00 %**	
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Paket	10	10	**0**	**100,00 %**	
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	24	28	**-4**	**100,00 %**	
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	14	14	**0**	**100,00 %**	
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	24	24	**0**	**100,00 %**	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	24	24	**0**	**100,00 %**	
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	24	24	**0**	**100,00 %**	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	24	24	**0**	**100,00 %**	
	12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	28	28	**0**	**100,00 %**	
10 .	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**						97.78 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00 %**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	352	385	**-33**	**100,00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**17,78 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	88,89 %	
	1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) bentuk fisik atau elektronik)	Buku	14	14	**0**	**100,00 %**	
	2 . Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Jenus	0	0	**0**	**0,00 %**	
	3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	352	352	**0**	**100,00 %**	
	4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi Kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	352	352	**0**	**100,00 %**	
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	12	12	**0**	**100,00 %**	
	6 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	14	14	**0**	**100,00 %**	
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	14	14	**0**	**100,00 %**	
	8 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	14	14	**0**	**100,00 %**	
	9 . Tenaga profesional lainnya	Orang	14	14	**0**	**100,00 %**	
11 .	**Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**						64,13 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**46,03 %**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	26.897	15.476	**11.421**	**57,54 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**18,10 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	90,50 %	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	5	5	**0**	**100,00 %**	
	2 . Reagen Zn TB	Kit	60	60	**0**	**100,00 %**	
	3 . Masker bedah dan Masker N95	Paket	200	200	**0**	**100,00 %**	
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	26.897	26.897	**0**	**100,00 %**	
	5 . Katrid tes cepat molekuler	Test	4.250	4.250	**0**	**100,00 %**	
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	26.897	15.476	**11.421**	**57,54 %**	
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	1	1	**0**	**100,00 %**	
	8 . Tuberkulin	Vial	0	0	**0**	**0,00 %**	
	9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	14	14	**0**	**100,00 %**	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	15	15	**0**	**100,00 %**	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	14	14	**0**	**100,00 %**	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	18	18	**0**	**100,00 %**	
	13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	32	32	**0**	**100,00 %**	
	14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	2	2	**0**	**100,00 %**	
	15 . Kader Kesehatan	Orang	15	15	**0**	**100,00 %**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
12 .	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)**						88.34 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**68,34 %**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	25.226	21.550	**3.676**	**85,43 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	100,00 %	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	5	5	**0**	**100,00 %**	
	2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	14	14	**0**	**100,00 %**	
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	1.800	1.800	**0**	**100,00 %**	
	4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	2	2	**0**	**100,00 %**	
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	14	14	**0**	**100,00 %**	
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	15	15	**0**	**100,00 %**	
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	15	15	**0**	**100,00 %**	
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	15	15	**0**	**100,00 %**	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	15	15	**0**	**100,00 %**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	16	16	**0**	**100,00 %**	

Sumber: LPPD Kota Jayapura Tahun 2024

Untuk mendukung tercapainya SPM bidang Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Jayapura, alokasi anggaran untuk urusan Kesehatan adalah sebagai berikut

Tabel 2.117
Alokasi Anggaran SPM Urusan Kesehatan

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Anggaran		
			Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil;	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	966.614.000	966.614.000	**100,00**
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin;		918.537.000	803.937.000	**87,52**
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;		260.000.000	260.000.000	**100,00**
4.	Pelayanan kesehatan balita;		260.000.000	260.000.000	**100,00**
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;		923.200.000	923.200.000	**100,00**
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif;		260.000.000	260.000.000	**100,00**
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;		260.000.000	260.000.000	**100,00**
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;		260.000.000	260.000.000	**100,00**
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;		793.460.720	780.548.000	**98,37**
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;		450.000.000	434.301.000	**96,51**
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis;		1.122.375.000	1.122.375.000	**100,00**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Anggaran		
			Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV		1.675.840.000	1.675.840.000	**100,00**
	JUMLAH		**8,150,026,720**	**8.006.815.000**	**98,24**

Sumber: LPPD Kota Jayapura Tahun 2024

C. URUSAN PKERJAAN UMUM

Untuk menjamin tercapainya mutu pelayanan dasar pekerjaan umum yang diselenggarakan daerah, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat.

Adapun Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Capaian SPM urusan Pekerjaan Umum disajikan pada tabel di bawah

Tabel 2.118
Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100,00 %	
1 .	**Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari**					100,00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00 %**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	700	700	**0**	**100,00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Dilayani / Dipenuhi**	**Terlayani / Terpenuhi**	**/ Terpenuhi**	100,00 %	
	JARINGAN PERPIPAAN						
	1 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	20	20	**0**	**100,00 %**	
	2 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	20	20	**0**	**100,00 %**	
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN						
	3 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60	Rumah Tangga	50	50	**0**	**100,00 %**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM						
	4 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	50	50	**0**	**100,00 %**	
2 .	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik**					100,00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00 %**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	216	216	**0**	**100,00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	100,00 %	
	1 Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	36	36	**0**	**100,00 %**	
	2 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun	Rumah Tangga	36	36	**0**	**100,00 %**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T						
	3 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	0	0	**0**	**100,00 %**	

Sumber: LPPD Kota Jayapura Tahun 2024

D. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Untuk menjamin tercapainya mutu pelayanan dasar perumahan rakyat yang diselenggarakan daerah, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat.

Adapun Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota

Capaian SPM urusan Perumahan Rakyat disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.119
Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					53,85 %	
	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				**-100%**	53,85 %	
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)						9171
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**		
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	**0**		
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**10,77 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani/Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					53,85 %	
	1.PENDATAAN						
	FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA	DOWNLOAD		100			
	FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA	DOWNLOAD		100			
	FORM 4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA	DOWNLOAD		100			

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA						
	FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH	DOWNLOAD		100			
	FORM 4.A.11 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA			0			
	FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN/KOTA (<10 HA)	DOWNLOAD		100			
	FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA			0			
	2.PERHITUNGAN						
	FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA	DOWNLO AD		100			
	FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA :			0			
	FORM 4.B.7 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA :			0			

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	FORM 4.B.8 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA			0			
	3.PERENCANAAN						
	FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA :	DOWNLOAD		100			
	FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYA HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKA PROGRAM KABUPATEN/KOTA :			0			
	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				**-100%**	53,85 %	
	Ada Relokasi Program Pemerintah						9171
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**		
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	**0**	100,00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**10,77 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani/Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					53,85 %	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	1.PENDATAAN						
	FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA	DOWNLOAD		100			
	FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA	DOWNLOAD		100			
	FORM 4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA	DOWNLOAD		100			
	FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH	DOWNLOAD		100			
	FORM 4.A.11 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA			0			
	FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN/KOTA (<10 HA)	DOWNLOAD		100			
	FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA			0			
	2.PERHITUNGAN						
	FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA	DOWNLOAD		100			

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA						
	FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA :			0			
	FORM 4.B.7 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA :			0			
	FORM 4.B.8 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA			0			
	3.PERENCANAAN						
	FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA :	DOWNLOAD		100			
	FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYA HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKA PROGRAM KABUPATEN/KOTA :			0			

Sumber: LPPD Kota Jayapura Tahun 2024

E. URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Untuk menjamin tercapainya mutu pelayanan dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diselenggarakan daerah, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Adapun Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum terdiri atas:

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Capaian SPM urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat disajikan pada tabel di bawah

Tabel 2.120
Capaian SPM Urusan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					80,25 %	
1 .	**Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)**					80,25 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**68,53 %**	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	600	514	**86**	**85,67 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**11,71 %**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	HARUS DILAYANI/DIPENUHI					58,57 %	
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit	7	5	**2**	**71,43 %**	
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* **rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)**	Dokumen	13	5	**8**	**0,00 %**	
	Data Dukung : Data Dukung Belum Di Upload						

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus iklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/ Satlinmas)	Orang	10	10	**0**	**100,00 %**	
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi	Dokumen	4	1	**3**	**0,00 %**	
	Data Dukung : Data Dukung Belum Di Upload						
	5. Materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	15	12	**3**	**80,00 %**	
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	5	5	**0**	**100,00 %**	
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					41.67 %	
1 .	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)**					5,00 %	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**0,00 %**	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	150	0	**150**	**0,00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**5,00 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG					25,00 %	
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen	12	12	**0**	**100,00 %**	
	Data Dukung : 9171-20241211073431PETA RAWAN BENCANA.pdf Status : Approved						
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara dikawasan rawan bencana`	Orang	403.859	0	**403.859**	**0,00 %**	
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	150	0	**150**	**0,00 %**	
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	60	0	**60**	**0,00 %**	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
2 .	**Bencana (KEBENCANAAN)**					100,00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80,00 %**	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	103	103	**0**	**100,00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20,00 %**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100,00 %	
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, ... dll)	Unit	38	38	**0**	**100,00 %**	
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	40	40	**0**	**100,00 %**	
3 .	**(KEBENCANAAN)**					20,00 %	
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)						
Download SK Yang Telah Di Upload **9171-202412161035455K SIAGA DARURAT HIDROMETEOROLOGI 2024.pdf**							
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**0,00 %**	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	350	0	**350**	**0,00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20,00 %**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100,00 %	
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Posko	1	1	**0**	**100,00 %**	
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Orang	600	600	**0**	**100,00 %**	
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	12	12	**0**	**100,00 %**	
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layanan	12	12	**0**	**100,00 %**	
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	12	12	**0**	**100,00 %**	
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					82,67 %	
1 .	**(DAMKAR)**					82,67 %	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**66,67 %**	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	600	500	100	**83,33 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**16,00 %**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	HARUS DILAYANI/DIPENUHI					**80,00 %**	
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak iterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan iap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	12	12	**0**	**100,00 %**	
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, … dst.)	Dokumen	5	5	**0**	**0,00 %**	
	Data Dukung : Data Dukung Belum Di Upload						
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, … dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, … dll.)	Unit	10	8	**2**	**80,00 %**	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan / Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	25	25	**0**	**100,00 %**	
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	1	1	**0**	**100,00 %**	
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	1	1	**0**	**100,00 %**	

Sumber: LPPD Kota Jayapura Tahun 2024

F. URUSAN SOSIAL

Untuk menjamin tercapainya mutu pelayanan dasar sosial yang diselenggarakan daerah, pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal Sosial yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosial daerah terdiri atas:

1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan

5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah

Capaian SPM urusan Sosial disajikan pada tabel di bawah

Tabel 2.121
Capaian SPM Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					90,72 %	
1 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti**					92,31 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00 %**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	80	80	**0**	**100,00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**12,31 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	61,54 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	70	70	**0**	**100,00 %**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	2 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	10	10	**0**	**100,00 %**	
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	Orang	10	10	**0**	**100,00 %**	
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	10	10	**0**	**100,00 %**	
	5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	70	70	**0**	**100,00 %**	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0	0	**0**	**0,00 %**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	0	0	**0**	**0,00 %**	
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	80	80	**0**	**100,00 %**	
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	10	10	**0**	**100,00 %**	
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	0	0	**0**	**0,00 %**	
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	10	10	**0**	**100,00 %**	
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat	Orang	0	0	**0**	**0,00 %**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)						
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	0	0	**0**	**0,00 %**	
2 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti**					90,00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00 %**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	321	321	**0**	**100,00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**10,00 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	50,00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	125	125	**0**	**100,00 %**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	Orang	0	0	**0**	**0,00 %**	
	3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	125	125	**0**	**100,00 %**	
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	70	70	**0**	**100,00 %**	
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0	0	**0**	**0,00 %**	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	0	0	**0**	**0,00 %**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	125	125	**0**	**100,00 %**	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	0	0	**0**	**0,00 %**	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	126	126	**0**	**100,00 %**	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	0	0	**0**	**0,00 %**	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	0	0	**0**	**0,00 %**	
	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	70	70	**0**	**100,00 %**	
3 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti**					84,62 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00 %**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	15	15	**0**	**100,00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**4,62 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	23,08 %	
	1 Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	15	15	**0**	**100,00 %**	
	2 Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)	Orang	0	0	**0**	**0,00 %**	
	3 Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	15	15	**0**	**100,00 %**	
	4 Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa,	Orang	0	0	**0**	**0,00 %**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)						
	5 .Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	0	0	**0**	**0,00 %**	
	6 Penyediaan perbekalan Kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0	0	**0**	**0,00 %**	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	0	0	**0**	**0,00 %**	
	8 .Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	15	15	**0**	**100,00 %**	
	9 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan / Bukti kepemilikan NIK	Orang	0	0	**0**	**0,00 %**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	10Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	0	0	**0**	**0,00 %**	
	11Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga(pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	0	0	**0**	**0,00 %**	
	12Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga(pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	0	0	**0**	**0,00 %**	
	13Layanan rujukan(layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	0	0	**0**	**0,00 %**	
4 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti**					86,67 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00 %**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5	5	**0**	**100,00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**6,67 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	33,33 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	5	5	**0**	**100,00 %**	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan Tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan danpengemis	Orang	0	0	**0**	**0,00 %**	
	3 . Penyediaan permakanan(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	5	5	**0**	**100,00 %**	
	4 Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian , pembelianperlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	0	0	**0**	**0,00 %**	
	5 .Penyediaan perbekalan kesehatan(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0	0	**0**	**0,00 %**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	6 .Pemberian bimbingan fisik , mental , spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	0	0	**0**	**0,00 %**	
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	0	0	**0**	**0,00 %**	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	0	0	**0**	**0,00 %**	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	0	0	**0**	**0,00 %**	
	10 .Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian	Orang	5	5	**0**	**100,00 %**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)						
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga(pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan eluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	5	5	**0**	**100,00 %**	
	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	0	0	**0**	**0,00 %**	
5 .	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**					100,00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00 %**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	109	109	**0**	**100,00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**JumlahMutu Yang Harus Dilayani /Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	100,00 %	
	1. Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan	Orang	100	100	**0**	**100,00 %**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)						
	2. Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	100	100	**0**	**100,00 %**	
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit	6	6	**0**	**100,00 %**	
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	9	9	**0**	**100,00 %**	
	5. Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	100	100	**0**	**100,00 %**	

Sumber: LPPD Kota Jayapura Tahun 2024

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

2.2.1. Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah 5 (Lima) Tahun Terakhir

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek krusial dalam mewujudkan cita-cita negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks otonomi daerah yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah hadir sebagai penyempurnaan dari regulasi sebelumnya, yakni UU No. 33 Tahun 2004 dan UU No. 28 Tahun 2009. Regulasi ini bertujuan menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien, transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kerangka hukum tersebut, analisis kondisi keuangan Kota Jayapura menjadi penting untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan keuangan daerah. Analisis yang tertuang dalam gambaran keuangan daerah ini, akan berfokus pada aspek pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, seperti upaya meminimalisir ketimpangan, pengembangan sistem pajak daerah, peningkatan kualitas belanja, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah. Nantinya hasil analisis dalam paparan ini akan dijadikan dasar proyeksi keuangan Kota Jayapura untuk 5 (lima) tahun ke depan.

2.2.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Kota Jayapura dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan trend fluktuatif namun cenderung meningkat dengan rata- rata pertumbuhan sebesar 6,9 persen. Total pendapatan mencapai

Rp 1.273.345.949.560 pada tahun 2020, mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi Rp 1.277.234.638.791 atau naik sebesar 0,31 persen. Pendapatan Asi Daerah (PAD) mengalami peningkatan signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,8 persen. Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada periode Tahun Anggaran 2020 sebsar Rp173.767767.502 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi sebesar Rp276.104.886.563.

Selajutnya, Pendapatan transfer terjadi kenaikan dengan Rata-rata pertumbuhan sebesar 8,8 persen yaitu tahun 2020 sebesar Rp966.424.624.058 dan meningkat menjadi sebesar Rp1.371.422.302.177 pada tahun 2024. Peningkatan pendapatan transfer tersebut merupakan peningkatan dari komponen pendapatan dana perimbangan dengan rata- rata pertumbuhan sebesar 7,0 Persen. Pendapatan Transfer tetap menjadi sumber utama pendapatan. Kontribusinya pada tahun 2020 sebesar 75,9 persen dan pada tahun 2024 meningkat menjadi sebesar 82,4 persen dari total pendapatan,

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terjadi penurunan dengan rata-rata pertumbuhan minus sebesar 25,4 persen, atau pada tahun 2020 dan 2024 masing-masing sebesar Rp133.153.555.000 dan Rp.16.968.644.185 penurunan tersebut terjadi pada komponen pendapatan hibah pada periode tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar 98,9 persen, yaitu terjadi penurunan sebesar Rp131.653.555.000, dan pada tahun 2022 pendapatan hibah tidak ada realisasi. Secara rinci pendapatan daerah tahun 2020-2024 Kota Jayapura disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.122
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kota Jayapura 2020-2024

Kode Rekening	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.273.345.946.560**	**1.277.234.638.791**	**1.445.941.893.449**	**1.544.451.174.301**	**1.664.495.832.924**	**6,9%**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**173.767.767.502**	**250.668.268.690**	**300.964.349.410**	**267.964.031.803**	**276.104.886.563**	**13,8%**
4.1.01	Pajak Daerah	124.057.937.634	191.676.794.666	220.473.610.022	219.580.726.624	226.166.876.762	18,0%
4.1.02	Retribusi Daerah	16.022.750.616	22.818.875.013	23.485.697.325	30.175.397.105	30.576.010.294	17,2%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	28.846.222.825	29.962.269.231	50.382.776.830	11.501.791.398	11.317.038.177	-66,9%
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**966.424.624.058**	**994.643.102.701**	**1.084.374.867.236**	**1.238.624.155.796**	**1.371.422.302.177**	**8,8%**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**908.513.657.055**	**892.698.789.849**	**997.999.010.899**	**1.149.999.234.857**	**1.284.699.658.986**	**8,7%**
4.2.01.01	Dana Perimbangan	826.337.732.884	856.539.478.199	849.786.080.899	969.134.030.449	1.091.558.819.986	7,0%
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	23.941.890.000	8.681.775.000	13.517.202.000	-	-	
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	31.867.021.099	-	121.843.324.000	169.383.243.000	181.334.139.000	-
4.2.01.05	Dana Desa	26.367.013.072	27.477.536.650	12.852.404.000	11.481.961.408	11.806.700.000	-14,5%
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**57.910.967.003**	**101.944.312.852**	**86.375.856.337**	**88.624.920.939**	**86.722.643.191**	**15,3%**
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	57.910.967.003	69.077.291.753	86.375.856.337	88.624.920.939	86.722.643.191	11,2%
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	32.867.021.099	-	-	-	-
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**133.153.555.000**	**31.923.267.400**	**60.602.676.803**	**37.862.986.702**	**16.968.644.185**	**-25,4%**
4.3.01	Pendapatan Hibah	133.153.555.000	1.500.000.000	-	23.096.281.399	-	-49,7%
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	-	-	-	23.096.281.399	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	30.423.267.400	60.602.676.803	14.766.705.303	16.968.644.185	-

Kode Rekening	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-	-	-	14.766.705.303	16.968.644.185	-

Sumber: LRA, Tahun 2020-2024

B. Belanja Daerah

Belanja Kota Jayapura dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,1 persen. Total belanja Rp 1.149.853.769.818 triliun pada 2020, terjadi kenaikan di 2020 menjadi Rp 1.324.953.787.984 hingga Rp 1.715.843.316.928 pada tahun 2024.

Belanja Operasi, yang merupakan komponen terbesar dari total belanja, menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,2 persen. Dari Rp900.920.884.810 pada tahun 2020, meningkat menjadi Rp1.377.400.200.675 pada tahun 2024. Kontribusinya terhadap total belanja pada tahun 2020 dan 2024 masing-masing sebesar 78,4 persen dan 80,3 persen. Selanjutnya, Belanja modal pad athaun 2020-20204 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dengan rata- rata pertumbuhan sebesar 29,1 persen, namun terdapat beberapa komponen yang pertumbuhannya minus yaitu pada komponen belanja modal dengan rata-rata pertumbuhan minus 11,3 persen dan belanja aset tetap lainnya sebesar minus 1,7 persen.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022, batasan maksimal Belanja Pegawai ditetapkan sebesar 30% dari total belanja APBD. Berdasarkan pengolahan data belanaj tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa Kota Jayapura secara konsisten melampaui batasan tersebut selama periode 2020-2024. Secara rinci belanja daerah tahun 2020-2024 Kota Jayapura disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.123
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Jayapura Tahun 2020-2024

Kode Rekening	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi
5	**BELANJA DAERAH**	**1.149.853.769.818**	**1.324.953.787.984**	**1.369.622.350.786**	**1.599.224.840.510**	**1.715.843.316.928**	**10,1%**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**900.920.884.810**	**937.975.455.450**	**1.058.962.536.473**	**1.349.101.340.262**	**1.377.400.200.675**	**10,2%**
5.1.01	Belanja Pegawai	460.779.404.323	487.118.824.642	486.519.726.584	610.993.394.351	632.051.619.584	7,4%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	401.895.837.562	415.382.403.857	498.668.615.668	621.282.356.910	603.839.372.906	10,1%
5.1.05	Belanja Hibah	35.017.642.925	31.476.879.250	64.247.814.158	111.456.539.001	134.354.311.063	39,2%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.228.000.000	3.997.347.701	9.526.380.063	5.369.050.000	7.154.897.122	29,5%
5.2	**BELANJA MODAL**	**100.825.438.599**	**248.749.671.471**	**199.996.815.613**	**134.766.385.868**	**185.746.577.036**	**29,1%**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.500.000.000	7.500.000.000	10.426.180.000	3.647.920.000	3.190.000.000	-11,3%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.769.946.703	37.680.133.717	36.904.326.375	45.201.338.973	30.721.364.760	9,1%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.454.052.472	94.449.054.117	85.461.992.901	48.084.346.641	85.766.741.896	18,7%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.664.732.137	106.569.573.257	64.040.700.789	35.130.598.467	63.846.305.038	107,6%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.436.707.287	1.065.155.380	1.924.541.298	2.295.101.787	1.206.695.382	-1,7%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	1.485.755.000	1.239.074.250	407.080.000	1.015.469.960	-
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**30.399.952.564**	**26.407.694.113**	**10.142.444.622**	**6.984.601.000**	**2.680.044.000**	**-45,4%**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.399.952.564	26.407.694.113	10.142.444.622	6.984.601.000	2.680.044.000	-45,4%
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**117.707.493.845**	**111.820.966.950**	**100.520.554.078**	**108.372.513.381**	**150.016.495.217**	**7,6%**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	43.157.419.795	-	-	108.372.513.381	150.016.495.217	-
	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	74.550.074.050	-	-	-	-	-

Kode Rekening	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi
5.4.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	-	20.459.861.000	22.847.676.426	-	35.297.723.138	-
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	-	-	-	108.372.513.381	114.718.772.079	-
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	91.361.105.950	77.672.877.652	-	-	-

Sumber: LRA Tahun 2020-2024, diolah

Selanjutnya, berdasarkan data penerimaan dan realisasi Otonomi Khusus Kota Jayapura pada perangkat daerah tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan alokasi anggaran yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, total penerimaan tercatat sebesar Rp31,867 miliar dengan realisasi Rp30,220 miliar, sedangkan pada tahun 2024 penerimaan mencapai Rp181,334 miliar dengan realisasi sebesar Rp176,133 miliar. Meskipun pada setiap tahun terdapat selisih antara penerimaan dan realisasi, tingkat realisasi anggaran secara umum berada pada kisaran yang tinggi, yaitu di atas 90 persen.

Secara lebih terperinci, realisasi anggaran pada urusan wajib pelayanan dasar seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Rumah Sakit Daerah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten seiring dengan tingginya kebutuhan layanan publik. Pada sisi lain, perangkat daerah penunjang seperti Bappeda, BKD, dan Inspektorat juga mengalami peningkatan penerimaan dan realisasi, meskipun dengan capaian yang berbeda di setiap tahunnya.

Tabel 2.124
Penerimaan dan Realisasi Otonomi Khusus Kota Jayapura Tahun 2020-2024

NO	PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		PENERIMAAN	REALISASI	PENERIMAAN	REALISASI	PENERIMAAN	REALISASI	PENERIMAAN	REALISASI	PENERIMAAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
A	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.160.106.330	10.100.106.330	9.560.106.330	8.786.965.600	33.157.581.172	31.800.268.676	67.800.456.897	61.083.547.379	63.894.438.434	61.267.037.484
2	Dinas Kesehatan	4.780.053.000	4.340.968.415	4.780.053.000	4.383.682.500	14.745.636.750	14.187.360.668	21.199.468.643	18.589.714.099	23.128.859.000	22.782.772.976
3	Rumah Sakit Ramela					11.623.680.122	11.124.587.469	8.700.000.000	8.619.855.038	2.100.000.000	2.084.754.434
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman	6.373.404.219	6.294.674.600	6.936.889.485	6.228.039.000	19.063.005.173	17.801.811.548	17.024.462.720	16.933.879.300	36.357.326.283	35.621.060.989
5	Satuan Polisi Pamong Praja									250.000.000	37.886.400
6	Badan Penanggulangan Bencana									1.250.000.000	1.249.174.723
7	Dinas Sosial	300.000.000	299.250.000	900.000.000	846.826.000	2.094.096.800	2.094.096.800	1.900.000.000	1.829.696.000	1.200.000.000	1.199.748.000
B	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
8	Dinas Tenaga Kerja	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	3.778.952.000	3.771.327.000	3.900.000.000	3.899.000.000	3.500.000.000	3.497.090.000
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	448.536.000	448.536.000	448.536.000	448.536.000	547.048.400	547.048.400	650.000.000	650.000.000	705.000.000	705.000.000
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan					328.229.000	327.709.000	900.000.000	900.000.000	700.000.000	699.139.555
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	487.340.422	463.290.200	487.340.400	487.100.400	547.048.410	547.048.410	500.000.000	499.649.000	500.000.000	500.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		PENERIMAAN	REALISASI	PENERIMAAN	REALISASI	PENERIMAAN	REALISASI	PENERIMAAN	REALISASI	PENERIMAAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	563.485.266	563.485.266			2.188.193.100	2.188.193.100	4.426.960.000	4.425.460.000	4.750.000.000	4.750.000.000
13	Dinas Komunikasi dan Informatika					604.161.188	495.386.910				
14	Dinas Pemuda dan Olahraga							1.150.000.000	1.150.000.000	1.600.000.000	1.599.961.000
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					200.000.000	199.854.000	300.000.000	300.000.000	650.000.000	648.802.000
16	Dinas Perhubungan									2.750.000.000	2.729.129.000
C	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**										
17	Dinas Perikanan	2.366.755.275	2.021.915.575	2.366.755.100	2.358.712.400	3.149.127.350	3.146.948.023	5.000.000.000	4.996.237.808	5.818.662.500	5.801.946.809
18	Dinas Pariwisata	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.498.604.000	4.433.971.275	4.419.201.400	4.100.000.000	4.098.029.799	6.409.615.283	5.935.474.158
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.200.000.000	2.177.890.600	2.200.000.000	2.183.992.000	5.038.603.700	5.018.170.240	5.250.000.000	5.204.233.116	3.400.237.500	3.367.627.100
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	1.900.000.000	1.591.070.000	1.900.000.000	1.794.237.311	7.557.905.640	7.451.675.175	9.607.905.640	8.688.198.185	9.600.000.000	9.557.424.800
D	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**										
21	Sekretariat DPRD					1.367.621.000	1.367.621.000	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	900.000.000
E	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**										
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	637.340.000	269.770.900	637.340.000	553.439.000	3.873.102.400	2.402.898.244	4.001.225.000	3.667.234.800	4.525.000.000	4.354.812.138
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah					1.060.673.660	300.000.000	5.800.000.000	4.854.000.000		
24	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan					5.937.638.560	5.899.533.937	5.394.764.100	5.174.554.100	5.400.000.000	5.400.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		PENERIMAAN	REALISASI	PENERIMAAN	REALISASI	PENERIMAAN	REALISASI	PENERIMAAN	REALISASI	PENERIMAAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
F	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**										
25	Inspektorat					547.048.300	546.298.300	378.000.000	354.350.000	945.000.000	945.000.000
g	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**										
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									500.000.000	500.000.000
	TOTAL	**31.867.020.512**	**30.220.957.886**	**31.867.020.315**	**29.720.134.211**	**121.843.324.000**	**115.637.038.300**	**169.383.243.000**	**157.317.638.624**	**181.334.139.000**	**176.133.841.566**

Sumber: BPKAD Kota Jayapura dan Bappeda Kota Jayapura, 2025

Kemampuan keuangan daerah dihitung dari besaran pendapatan umum daerah dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Peraturan Hal ini sebagaimana diatur dalam Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditentukan kelompok keuangan berdasarkan pada pada tabel di bawah. Pemerintah Kota Jayapura pada tahun 2020 memiliki kemampuan keuangan sebesar Rp597.237.063.066 nilai tersebut masuk ke dalam kelompok kemampuan keuangan tinggi. Selanjutnya, pada tahun 2024 jumlah kemampuan keuangan daerahnya sebesar Rp822.334.730.156 dan masih tetap dengan kategori kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi.

Tabel 2.125

Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran Daerah Pemerintah Kota Jayapura Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	**Pendapatan Umum Daerah**					
1	Pendapatan Asli Daerah	173.767.767.502	250.668.268.690	300.964.349.410	267.964.031.803	276.104.886.563
2	Dana Bagi Hasil	57.910.967.003	69.077.291.753	86.375.856.337	88.624.920.939	86.722.643.191
3	Dana Alokasi Umum	826.337.732.884	856.539.478.199	849.786.080.899	969.134.030.449	1.091.558.819.986
	Jumlah A	**1.058.016.467.389**	**1.176.285.038.642**	**1.237.126.286.646**	**1.325.722.983.191**	**1.454.386.349.740**
B	**Belanja Pegawai**					
1	Belanja Gaji Dan Tunjangan					
2	Tambahan Pengjhasilan PNS					
	Jumlah B					
	Kemampuan Keuangan Daerah					

Sumber: LRA Tahun 2020-2024, diolah

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Kota Jayapura dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 55,5 persen. Total pembiayaan daerah mencapai Rp 46.982.425.183 pada tahun 2020, meningkat menjadi Rp118.986.259.275 pada tahun 2024, peningkatan tersebut terjadi pada komponen penerimaan pembiayaan yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, pada kompnen pembiayan tersebut terjadi peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 36,2 persen. Selanjutnya, pada Pengeluaran pembiayaan terjadi penurunan dengan rata-rata perumbuhan minus 11,8 persen, penurunan tersbut terjadi pada komponen Penyertaan modal yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp12.000.000.000 dan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dengan realiasi penyertgaan modal memeiliki realisasi yang sama yaitu sebesar Rp 6.335.000.000. Secara rinci pembiayaan Kota Jayapura daerah tahun 2020-2024 Kota Jayapura disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.126
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Jayapura Tahun 2020-2024

Kode Rekening	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**46.982.425.183**	**164.139.592.215**	**110.085.443.023**	**156.998.644.086**	**118.986.259.275**	**55,5%**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**58.982.425.183**	**170.474.592.215**	**116.420.443.023**	**186.429.925.485**	**125.321.259.275**	**40,5%**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	59.992.425.183	170.474.601.927	116.420.443.023	186.429.925.485	102.224.977.876	36,2%
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	-	-	-	28.696.018.815	25.203.616.317	-
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	-	-	-	54.188.486.648	2.226.339.050	-
6.1.01.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah				24.939.799	-	
6.1.01.05	Penghematan Belanja				103.520.480.223	74.795.022.509	
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan				-	23.096.281.399	
6.1.02.01	Pencairan Dana Cadangan				-	23.096.281.399	
	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(10.000.000)	(9.712)	-			
	Lian-lain	(1.000.000.000)					
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**12.000.000.000**	**6.335.000.000**	**6.335.000.000**	**29.431.281.399**	**6.335.000.000**	**-11,8%**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan				23.096.281.399	-	
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan				23.096.281.399	-	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	12.000.000.000	6.335.000.000	6.335.000.000	6.335.000.000	6.335.000.000	-11,8%
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)				6.335.000.000	6.335.000.000	

Sumber: LRA Tahun 2020-2024, diolah

2.2.1.2. Neraca Daerah

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Analisis terhadap neraca daerah dilakukan untuk menilai kapasitas keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan berbagai rasio keuangan, seperti rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, sedangkan rasio solvabilitas menunjukkan kapasitasnya dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Melalui analisis ini, pemerintah daerah dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi keuangan mereka serta menentukan langkah strategis guna menjaga kestabilan fiskal daerah.

a) Aset

Aset Pemerintah Kota Jayapura selama periode Tahun 2020-2023 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,39 persen. Rata-rata pertumbuhan untuk masing-masing jenis aset antara lain aset lancar sebesar minus 0,77 persen, Investasi Jangka Panjang sebesar 3,66 persen, dan Aset Tetap sebesar 2,88 persen.

b) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Kota Jayapura selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dengan rata-rata turun sebesar minus 4,30 persen. Kewajiban ini berasal dari kewajiban jangka pendek dan tidak ada kewajiban jangka panjang.

c) Ekuitas Dana

Ekuitas Pemerintah Kota Jayapura selama Tahun 2020-2023 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan dari neraca daerah periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, jumlah ekuitas rata-rata tumbuh sebesar 6,39 persen.

Gambaran neraca Pemerintah Kota Jayapura dalam periode Tahun 2020–2023 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.127
Neraca Daerah Kota Jayapura Tahun 2020–2023

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	**ASET**					
2	**ASET LANCAR**	**232.006.562.407**	**211.636.850.553**	**273.218.161.974**	**211.431.723.901**	**-0,77**
3	**Kas**	**170.541.228.775**	**116.436.959.999**	**186.404.985.686**	**102.228.909.419**	**-5,60**
4	Kas di Kas Daerah	169.027.062.209	114.009.608.576	185.380.347.455	97.835.487.655	-5,72
5	Kas di Bendahara Penerimaan	6.812.226	31.566.500	27.647.500	3.741.766.510	4594,93
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	118.010.626	1.530.435.278	100	0	332,29
7	Kas di Bendahara FKTP			882.545.825	235.552.812	
8	Kas Dana BOK Puskesmas/JKN	76.384.960	154.753.646	0	99.743.646	
9	Kas di Bendahara BOS	1.261.176.732	693.772.213	104.090.739	268.046.445	9,18
10	Kas Lainnya	51.782.022	16.823.786	10.354.067	48.312.351	86,88
11	**Investasi Jangka Pendek**	**-**	**-**	**-**	**-**	
12	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	
13	**Piutang**	**49.316.892.655**	**76.661.638.973**	**72.469.355.591**	**79.517.405.216**	**19,90**
14	Piutang Pajak	73.356.081.857	92.190.259.045	98.935.643.534	117.479.857.833	17,25
15	Piutang Retribusi	3.061.990.837	3.518.673.096	4.675.349.470	4.534.239.101	14,92
16	Piutang Lain - Lain PAD yang Sah	867.161.307	765.358.459	1.063.423.507	1.250.288.028	14,93
17	Piutang Transfer Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
18	Piutang Dana Bagi Hasil	-	13.088.499.476	-	-	-
19	Piutang Dana Alokasi Umum	-	-	-	-	-
20	Piutang Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-	-
21	Piutang Transfer antar Daerah	-	-	7.538.939.076	11.437.756.735	-
22	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	270.630.716	270.630.716	270.630.716	270.630.716	0,00
23	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	8.364.041.949	8.328.041.949	8.296.301.449	8.288.901.449	-0,30
24	Piutang Lain - Lain	-	-	-	-	-
25	Penyisihan Piutang	-36.603.014.011	-41.499.823.769	-48.310.932.161	-63.744.268.647	20,58
26	**Beban dibayar dimuka**	**-**	**-**	**-**	**12.495.000.000**	**-**
27	**Persediaan**	**12.148.440.977**	**18.538.251.582**	**14.343.820.697**	**17.190.409.266**	**16,61**
28	Persediaan Alat tulis Kantor dan cetakan	2.053.560.051	2.659.974.332	2.970.240.942	2.516.056.823	8,63
29	Persediaan Obat-obatan/Alat Kesehatan Habis Pakai	8.628.439.926	15.878.277.250	11.038.538.363	14.674.352.443	28,83

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
30	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	1.466.441.000	-	-	-	-
31	Persediaan Bahan	-	-	335.041.392	-	-
32	**INVESTASI JANGKA PANJANG**			**118.853.706.887**	**125.188.706.887**	-
33	**Investasi NonPermanen**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
34	Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-	-
35	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-	-
36	Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-
37	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-	-	-	-
38	Investasi Dana Bergulir	-	-	-	-	-
39	Investasi NonPermanen Lainnya	-	-	-	-	-
40	**Investasi Permanen**	**112.497.235.880**	**118.832.235.880**	**118.853.706.887**	**125.188.706.887**	**3,66**
41	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	112.497.235.880	118.832.235.880	118.853.706.887	125.188.706.887	3,66
42	Penyertaan Modal Dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-	-
43	Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	-	-	-	-	-
44	Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-
45	**ASET TETAP**	**2.344.024.681.145**	**2.185.930.338.887**	**2.272.006.120.768,67**	**2.532.157.438.742,64**	**2,88**
46	Tanah	821.490.992.531	822.210.992.530	839.345.092.530	832.932.367.680	0,47
47	Peralatan dan Mesin	402.887.894.619	245.528.641.908	281.759.682.642	327.212.284.171	-2,72
48	Gedung dan Bangunan	1.124.156.801.139	849.536.275.536	1.015.900.424.249,83	1.241.565.825.088,61	5,79
49	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	961.171.539.018	857.615.204.833	945.153.400.272	980.063.248.740	1,04
50	Aset Tetap Lainnya	13.367.965.928	10.512.105.163	10.833.388.961	12.409.131.048	-1,25
51	Konstruksi Dalam Pengerjaan	201.184.933.397	130.754.288.998	21.927.608.142	31.248.662.559	-25,24
52	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-1.180.235.445.487	-730.227.170.081	-842.913.476.028	-893.274.080.544	-5,57
53	**DANA CADANGAN**	-	-	-	**23.096.281.399**	-
54	Dana Cadangan	-	-	-	23.096.281.399	-
55	**ASET LAINNYA**	**91.484.554.366**	**429.384.520.272**	**455.372.744.452**	**455.453.430.022**	125,14
56	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	
57	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah			0	0	
58	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	27.123.567.645	27.123.567.645	27.123.567.645	22.359.208.645	-5,86
59	Aset Tak Berwujud	7.150.615.367	8.540.170.367	9.539.941.367	10.180.437.367	12,62

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
60	Amortisasi Aset Tak Berwujud	-4.690.600.024	-5.842.695.057	-7.740.496.194	-8.284.840.161	21,36
61	Aset Lain - lain	63.516.271.378	942.162.162.762	941.522.215.762	929.618.436.490	460,67
62	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-1.615.300.000	-542.598.685.445	-541.816.756.214	-529.667.677.319	11162,94
63	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	-	26.744.272.087	31.247.865.000	
64	**JUMLAH ASET**	**2.780.013.033.798**	**2.945.783.945.592**	**3.119.450.734.081**	**3.347.327.580.950**	**6,39**
65	**KEWAJIBAN**					
66	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**7.514.844.826**	**11.516.964.753**	**6.707.920.000**	**5.070.778.454**	**-4,30**
67	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	14.844.826	16.516.976	0	3.931.543	
68	Utang Bunga			0	0	
69	Utang Pajak			0	0	
70	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			0	0	
71	Pendapatan Diterima Dimuka			0	1.571.580.881	
72	Utang Belanja			0	435.266.030	
73	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.500.000.000	8.918.549.578	6.707.920.000	3.060.000.000	-20,09
74	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**			**0**	**0**	
75	Utang Dalam Negeri			0	0	
76	Utang Luar Negeri			0	0	
77	Utang Jangka Panjang Lainnya			0	0	
78	**JUMLAH KEWAJIBAN**	**7.514.844.826**	**11.516.964.753**	**6.707.920.000**	**5.070.778.454**	**-4,30**
79	**EKUITAS**					
80	**JUMLAH EKUITAS**	**2.772.498.188.971**	**2.934.266.980.838**	**3.112.742.814.081**	**3.342.256.802.496**	**6,43**
81	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS**	**2.780.013.033.797**	**2.945.783.945.591**	**3.119.450.734.081**	**3.347.327.580.950**	**6,39**

Sumber: Neraca Kota Jayapura Tahun 2020–2023

Mengacu pada data yang telah diuraikan sebelumnya, dilakukan perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas dan rasio solvabilitas dari tahun ke tahun dalam periode 2020 hingga 2023, sebagai barikut:

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar pada tahun 2020 adalah sebesar 30,87 dan terjadi kenaikan signifikan pada tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2024 mencapai 41,70. Rasio Lancar mengukur kemampuan aktiva lancar dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar kapasitas suatu entitas untuk menutupi kewajiban lancarnya.

Tabel 2.128
Analisis Rasio Lancar Pemerintah Kota Jayapura Tahun 2020–2024

No	Uraian	Aset Lancar	Kewajiban Jangka Pendek	Rasio Lancar
		(a)	(b)	(a) / (b)
1	2020	232.006.562.407	7.514.844.826	30,87
2	2021	211.636.850.553	11.516.964.753	18,38
3	2022	273.218.161.974	6.707.920.000	40,73
4	2023	211.431.723.901	5.070.778.454	41,70
5	2024			

Sumber: Hasil perhitungan, Tahun 2024

2. Rasio Cepat *(Quick Ratio)*

Quick ratio pada tahun 2020 sebesar 29,3 dan tahun 2023 quick ratio sebesar 38,3. Hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Jayapura memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kewajiban tersebut dibayar menggunakan aktiva yang lebih likuid.

Tabel 2.129
Analisis Rasio Cepat Pemerintah Kota Jayapura Tahun 2020–2024

No	Uraian	Aset Lancar	Persediaan	Kewajiban Jangka Pendek	Rasio Kas
		(a)	(b)	(c)	(a+b) / (c)
1	2020	232.006.562.407	12.148.440.977	7.514.844.826	29,3
2	2021	211.636.850.553	18.538.251.582	11.516.964.753	16,8
3	2022	273.218.161.974	14.343.820.697	6.707.920.000	38,6
4	2023	211.431.723.901	17.190.409.266	5.070.778.454	38,3
5	2024	0		0	

Sumber: Hasil perhitungan, Tahun 2024

3. Rasio Total Utang Terhadap Total Aset

Besar rasio total utang terhadap total aset pada tahun 2020 sebesar 0,0027 dan pada tahun 2023 sebesar 0,0015 Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh utang terhadap aktiva sangat kecil. Rasio Total Utang terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh utang terhadap aktiva.

Tabel 2.130
Analisis Rasio Cepat Pemerintah Kota Jayapura
Tahun 2020–2024

Uraian	Total Utang	Total Aset	Rasio Solvabilitas
	(a)	(b)	(a) / (b)
2020	7.514.844.826	2.780.013.033.798	0,0027
2021	11.516.964.753	2.945.783.945.592	0,0039
2022	6.707.920.000	3.119.450.734.081	0,0022
2023	5.070.778.454	3.347.327.580.950	0,0015
2024			

Sumber: Hasil perhitungan, Tahun 2024

2.2.1.3. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis perbandingan antara realisasi dan anggaran merupakan aspek penting dalam menilai efektivitas pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam hal belanja dan pengeluaran pembiayaan. Analisis ini memberikan wawasan mengenai sejauh mana anggaran yang dialokasikan telah terealisasi serta menilai efisiensi dan efektivitas penggunaannya.

a. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis perbandingan antara realisasi belanja daerah dan anggaran dalam periode 2020 hingga 2024 menggambarkan tingkat pencapaian realisasi belanja daerah Kota Jayapura. Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja terhadap anggaran belanja selama periode tersebut mengalami penurunan sebesar 2,2 persen.

Dalam periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 rata-rata penyerapan anggaran Belanja dan Transfer sebesar 92,1 persen. Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.149.853.769.818 atau 87,6 persen dari anggarannya sebesar Rp1.312.249.680.922. Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.324.953.787.984. atau 93,1 persen dari anggarannya sebesar Rp1.422.480.809.684. Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.715.843.316.928 atau 95,3 persen dari anggarannya sebesar Rp1.800.442.439.641. Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2024 tersebut naik sebesar Rp116.618.476.417 atau 7,3 persen dari realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2023.

Tabel 2.131

Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Jayapura Tahun 2020–2024

Kode Rekening	URAIAN	2020		(%)	2021		(%)	2022		(%)
		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
5	**BELANJA DAERAH**	**1.312.249.680.922**	**1.149.853.769.818**	**87,6 %**	**1.422.480.809.684**	**1.324.953.787.984**	**93,1%**	**1.510.085.386.209**	**1.369.622.350.786**	**90,7 %**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**964.326.314.660**	**900.920.884.810**	**93,4 %**	**1.006.389.759.970**	**937.975.455.450**	**93,2%**	**1.143.841.108.624**	**1.058.962.536.473**	**92,6 %**
5.1.01	Belanja Pegawai	490.752.906.672	460.779.404.323	93,9%	525.734.081.131	487.118.824.642	92,7%	541.233.626.311	486.519.726.584	89,9%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	428.031.922.988	401.895.837.562	93,9%	443.125.278.839	415.382.403.857	93,7%	524.832.487.772	498.668.615.668	95,0%
5.1.05	Belanja Hibah	42.291.485.000	35.017.642.925	82,8%	33.530.400.000	31.476.879.250	93,9%	67.604.605.087	64.247.814.158	95,0%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.250.000.000	3.228.000.000	99,3%	4.000.000.000	3.997.347.701	99,9%	10.170.389.454	9.526.380.063	93,7%
5.2	**BELANJA MODAL**	**195.664.199.845**	**100.825.438.599**	**51,5 %**	**277.535.981.729**	**248.749.671.471**	**89,6%**	**234.593.312.247**	**199.996.815.613**	**85,3 %**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.537.314.662	3.500.000.000	98,9%	8.000.000.000	7.500.000.000	93,8%	27.551.669.025	10.426.180.000	37,8%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.376.734.130	24.769.946.703	93,9%	40.638.714.751	37.680.133.717	92,7%	40.096.237.192	36.904.326.375	92,0%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.852.519.934	51.454.052.472	75,8%	118.681.239.047	94.449.054.117	79,6%	97.740.366.102	85.461.992.901	87,4%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	95.399.159.983	18.664.732.137	19,6%	107.643.850.751	106.569.573.257	99,0%	65.950.745.130	64.040.700.789	97,1%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.498.471.136	2.436.707.287	97,5%	2.572.177.180	2.550.910.380	99,2%	1.926.058.798	1.924.541.298	99,9%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-		-	1.328.236.000	1.239.074.250	-
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**32.048.271.075**	**30.399.952.564**	**94,9 %**	**26.434.463.647**	**26.407.694.113**	**99,9%**	**28.000.000.000**	**10.142.444.622**	**36,2 %**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	32.048.271.075	30.399.952.564	94,9%	26.434.463.647	26.407.694.113	99,9%	28.000.000.000	10.142.444.622	36,2%

Kode Rekening	URAIAN	2020		(%)	2021		(%)	2022		(%)
		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**120.210.895.342**	**117.707.493.845**	**97,9 %**	**112.120.604.338**	**111.820.966.950**	**99,7%**	**103.650.965.338**	**100.520.554.078**	**97,0%**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	44.584.665.830	43.157.419.795	96,8%	-	-	-	-	-	-
	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	75.626.229.512	74.550.074.050	98,6%	20.459.861.038	20.459.861.000	100,0 %	23.708.823.604	22.847.676.426	96,4%
5.4.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	-	-	-	91.660.743.300	91.361.105.950	99,7%	79.942.141.734	77.672.877.652	97,2%
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: LRA Kota Jayapura Tahun 2020–2024, diolah

Lanjutan Tabel 2.131

Kode Rekening	URAIAN	2023		(%)	2024		(%)	Rata-Rata Pertumbuhan	Rata-Rata penyerapan
		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi			
5	**BELANJA DAERAH**	**1.702.190.574.998**	**1.599.224.840.510,89**	**94,0%**	**1.800.442.439.641**	**1.715.843.316.928**	**95,3%**	**2,2%**	**92,1%**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.421.665.831.181**	**1.349.101.340.262**	**94,9%**	**1.440.724.377.020**	**1.377.400.200.675**	**95,6%**	**0,6%**	**93,9%**
5.1.01	Belanja Pegawai	655.852.169.516	610.993.394.351	93,2%	666.580.256.182	632.051.619.584	94,8%	0,3%	92,9%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	648.180.185.665	621.282.356.910	95,9%	627.131.539.088	603.839.372.906	96,3%	0,6%	95,0%
5.1.05	Belanja Hibah	112.202.026.000	111.456.539.001	99,3%	139.857.581.750	134.354.311.063	96,1%	4,0%	93,4%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.431.450.000	5.369.050.000	98,9%	7.155.000.000	7.154.897.122	100,0%	0,3%	98,4%
5.2	**BELANJA MODAL**	**147.704.080.628**	**134.766.385.868**	**91,2%**	**197.886.703.003**	**185.746.577.036**	**93,9%**	**19,7%**	**82,3%**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.000.000.000	3.647.920.000	52,1%	4.060.000.000	3.190.000.000	78,6%	5,9%	72,2%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.747.696.430	45.201.338.973	96,7%	33.066.086.089	30.721.364.760	92,9%	-0,2%	93,7%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.837.184.827	48.084.346.641	86,1%	91.223.136.521	85.766.741.896	94,0%	5,6%	84,6%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.410.443.844	35.130.598.467	99,2%	67.267.005.303	63.846.305.038	94,9%	100,5%	82,0%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.704.537.527	2.295.101.787	134,6%	1.235.235.090	1.206.695.382	97,7%	22,8%	94,2%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.004.218.000	407.080.000	40,5%	1.035.240.000	1.015.469.960	98,1%	-	0,0%
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**15.000.000.000**	**6.984.601.000**	**46,6%**	**10.000.000.000**	**2.680.044.000**	**26,8%**	**-18,1%**	**60,9%**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000	6.984.601.000	46,6%	10.000.000.000	2.680.044.000	26,8%	-18,1%	60,9%

Kode Rekening	URAIAN	2023		(%)	2024		(%)	Rata-Rata Pertumbuhan	Rata-Rata penyerapan
		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi			
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**117.820.663.189**	**108.372.513.381**	**92,0%**	**151.831.359.618**	**150.016.495.217**	**98,8%**	**0,3%**	**97,1%**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	117.820.663.189	108.372.513.381	92,0%	151.831.359.618	150.016.495.217	98,8%	#DIV/0!	#DIV/0!
	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	-	-	-	36.742.087.089	35.297.723.138	96,1%	-	-
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	117.820.663.189	108.372.513.381	92,0%	115.089.272.529	114.718.772.079	99,7%	-	39,4%
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: LRA Kota Jayapura Tahun 2020–2024, diolah

2.2.1.4. Proporsi Pembiayaan Daerah

Sisa Lebih Pembiayaan anggaran dari periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terjadi penurunan, pada tahun 2020 sebesar Rp170.474.601.925 dan pada tahun 2024 sebesar Rp67.638.775.271 penurunan tersebut terjadi pada tahun 2024. Pada Tahun Anggaran 2024 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp102.224.977.876. Apabila dibandingkan dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp186.429.925.485, berarti realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurun sebesar Rp84.204.947.609atau 45,2% dibandingkan Tahun Anggaran 2023.

Tabel 2.132

Penutup Defisit Rill Anggaran Pemerintah Kota Jayapura Tahun 2020–2024

No	Uraian	Relisasi Tahun (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan Daerah	1.273.345.946.560	1.277.234.638.791	1.445.941.893.449	1.544.451.174.301	1.664.495.832.924
2	Belanja Daerah	1.149.853.769.818	1.324.953.787.984	1.369.622.350.786	1.599.224.840.510	1.715.843.316.928
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	12.000.000.000	6.335.000.000	6.335.000.000	29.431.281.399	6.335.000.000
A.	Defisit Riil	111.492.176.742	-54.054.149.192	69.984.542.663	-84.204.947.608	-57.682.484.004
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:						
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	59.992.425.183	170.474.601.927	116.420.443.023	186.429.925.485	102.224.977.876
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	23.096.281.399
3	Penerimaan Kembali Pinjaman Dana Talangan	-	-	-	-	-
4	Pemberian Pinjaman Dana Talangan	-	-	-	-	-
5	Koreksi	(10.000.000,00)	-9712	-	-	-
6	Lain-lain	(1.000.000.000,00)				
B.	Total Realisasi Penerimaan	58.982.425.183	170.474.592.215	116.420.443.023	186.429.925.485	125.321.259.275
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		**170.474.601.925**	**116.420.443.023**	**186.404.985.686**	**102.224.977.877**	**67.638.775.271**

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Pemkot Jayapura Tahun 2020–2024

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Selama lima tahun terakhir menunjukkan nilai yang berfluktuasi. Pada tahun 2020, saldo ini tercatat sebesar Rp59.992.425.183 dan meningkat signifikan menjadi Rp102.224.977.876pada tahun 2024. Analisis realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dalam periode tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah. Jika dikaji lebih lanjut, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berasal dari kelebihan pendapatan serta efisiensi dalam pengeluaran belanja.

Tabel 2.133
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Pemerintah Kota Jayapura Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata–Rata Pertumbuhan (%)
1	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	59.992.425.183	170.474.601.927	116.420.443.023	186.429.925.485	102.224.977.876	41,9%
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan						
3	Kegiatan lanjutan						
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya		59.992.425.183	170.474.601.927	116.420.443.023	186.429.925.485	102.224.977.876	41,9%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jyapura Tahun 2020–2024, diolah

2.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan

Proyeksi keuangan daerah Kota Jayapura untuk 5 (lima) tahun ke depan (2025-2030) disusun berdasarkan analisis trend historis dan pertimbangan faktor-faktor ekonomi makro, dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Metode proyeksi yang digunakan adalah teknik trend analysis dengan mempertimbangkan rata-rata pertumbuhan tahunan (*Compound Annual*

Growth Rate - CAGR) dari masing-masing komponen APBD selama periode sebelumnya.

Dalam menyusun proyeksi ini, beberapa aspek penting dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dipertimbangkan:

1. Penguatan sumber-sumber perpajakan daerah: Proyeksi PAD (Pendapatan Asli Daerah) mempertimbangkan potensi peningkatan dari implementasi PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) yang menggabungkan beberapa jenis pajak konsumsi.
2. Perubahan formula DAU (Dana Alokasi Umum): Proyeksi DAU mempertimbangkan formula baru yang memperhitungkan kebutuhan fiskal berdasarkan unit *cost* dan target layanan, serta kapasitas fiskal daerah.
3. Optimalisasi DAK (Dana Alokasi Khusus): Proyeksi DAK mempertimbangkan fokus pada pencapaian prioritas nasional dan pemerataan layanan antar-daerah.
4. DBH (Dana Bagi Hasil): Proyeksi DBH mempertimbangkan pengalokasian berdasarkan realisasi penerimaan dua tahun sebelumnya dan kinerja daerah.
5. Dana Insentif Daerah (DID): Proyeksi DID mempertimbangkan pemberian insentif fiskal berdasarkan kinerja daerah.

Untuk beberapa komponen seperti belanja modal, digunakan asumsi konservatif dengan mempertahankan nilai konstan, dan juga memasukan pertimbangan potensi pemanfaatan instrumen Pembiayaan Utang Daerah seperti Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, dan Sukuk Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Proyeksi ini juga mempertimbangkan kebijakan fiskal pemerintah pusat dan daerah, serta potensi pertumbuhan dan inflasi ekonomi regional. Proyeksi juga mempertimbangkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan DTI (Dana Tambahan Infrastruktur) sesuai dengan ketentuan khusus Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terkait daerah otonomi khusus. Dalam menyusun proyeksi belanja, dipertimbangkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang batas

maksimal defisit APBD sebesar 3% dari total pendapatan, serta prinsip kehati-hatian fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah. Proyeksi ini juga mempertimbangkan potensi pembentukan Dana Abadi Daerah bagi daerah dengan kinerja layanan tinggi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

2.2.2.1. Proyeksi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah

A. Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan Kota Jayapura untuk tahun 2025-2030 disusun berdasarkan analisis tren historis, pertimbangan faktor ekonomi makro, dan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Proyeksi ini mencerminkan upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan sesuai dengan arah kebijakan nasional.

Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan meningkat dari Rp295.000.000.000 pada 2025 menjadi Rp376.503.069.000 pada 2030, dengan pertumbuhan rata-rata 2,8 pesen per tahun. Peningkatan ini didasarkan pada implementasi PBJT sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 7 ayat (2), optimalisasi sumber-sumber PAD, dan tren pertumbuhan ekonomi yang positif. Pajak Daerah tetap menjadi kontributor utama, mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi dan efektivitas pemungutan pajak.

Pendapatan Transfer menunjukkan peningkatan dari Rp1.341.918.213.456 pada 2025 menjadi Rp1.634.616.770.093 triliun pada 2030, dengan pertumbuhan rata-rata 2,6 % per tahun.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada thaun 2027 sampai tahun 2030 tidak di lakukan proyeksi, namun pada tahun 2025 berdasarkan data APBD lain-lain pendapatan Daeah yang syah ditargetkan sebesar Rp19.342.629.921 dan pada tahun 2026 di proyeksikan sebesar Rpo20.309.761.921.

Tabel 2.134
Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Jayapura Tahun 2025-2030

Kode Rekening	Uraian	APBD	Proyeksi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.656.260.843.377**	**1.805.513.209.314**	**1.790.780.766.093**	**1.860.674.207.093**	**1.934.062.321.093**	**2.011.119.839.093**	**2,8%**
4,1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**295.000.000.000**	**309.750.002.000**	**325.237.503.000**	**341.499.379.000**	**358.574.350.000**	**376.503.069.000**	**5,0%**
4.1.01	Pajak Daerah	251.847.618.741	264.439.999.741	277.661.999.741	291.545.099.741	306.122.354.741	321.428.472.741	5,0%
4.1.02	Retribusi Daerah	30.359.213.669	31.877.174.669	33.471.033.669	35.144.585.669	36.901.815.669	38.746.906.669	5,0%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.044.961.330	8.447.210.330	8.869.571.330	9.313.050.330	9.778.703.330	10.267.639.330	5,0%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.748.206.260	4.985.617.260	5.234.898.260	5.496.643.260	5.771.476.260	6.060.050.260	5,0%
4,2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.341.918.213.456**	**1.475.453.445.393**	**1.465.543.263.093**	**1.519.174.828.093**	**1.575.487.971.093**	**1.634.616.770.093**	**2,6%**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.284.912.397.044	1.425.206.501.000	1.412.783.970.700	1.463.777.569.700	1.517.320.847.700	1.573.541.289.700	2,5%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	57.005.816.412	50.246.944.393	52.759.292.393	55.397.258.393	58.167.123.393	61.075.480.393	5,0%
4,3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**19.342.629.921**	**20.309.761.921**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	19.342.629.921	20.309.761.921	-	-	-	-	-

Sumber: Hasil Proyeksi, 2025

B. Proyeksi Belanja Daerah

Proyeksi belanja Kota Jayapura untuk tahun 2025-2030 disusun berdasarkan analisis trend historis, pertimbangan faktor ekonomi makro, dan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Proyeksi ini mencerminkan upaya optimalisasi belanja daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan arah kebijakan nasional dan mempertimbangkan faktor makro ekonomi Kota Jayapura. Dimana, dalam lima tahun terakhir.

Belanja Kota Jayapura 2025-2030 diproyeksikan menunjukkan trend peningkatan, dimulai dari Rp1.686.428.501.777 pada tahun 2025 hingga mencapai Rp2.004.784.839.093 triliun pada tahun 2030. Proyeksi ini mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sambil berusaha memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 146 ayat (1) terkait batas maksimal belanja pegawai.

Belanja Pegawai saat ini, untuk tahun 2024 sebesar Rp770.005.984.163 miliar atau sekitar 45,7 persen dari total belanja, masih di atas batas 30% yang diamanatkan undang-undang. Ini membutuhkan komitmen pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi dan rasionalisasi belanja pegawai, dengan upaya-upaya strategis yang bisa dilakukan yaitu:

1. Moratorium Rekrutmen, yaitu memberlakukan penghentian sementara penerimaan pegawai baru, kecuali untuk posisi yang sangat kritis dan tidak dapat diisi oleh pegawai yang ada.
2. Program Pensiun Dini sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Menawarkan insentif untuk pensiun dini bagi pegawai yang sudah mendekati usia pensiun, membantu mengurangi beban belanja pegawai jangka panjang.

3. Rasionalisasi Struktur Organisasi dengan melakukan audit organisasi untuk mengidentifikasi dan menghilangkan tumpang tindih fungsi, serta menyederhanakan struktur birokrasi.
4. Optimalisasi Teknologi guna meningkatkan penggunaan teknologi informasi untuk mengotomatisasi proses-proses administratif, mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual.
5. *Outsourcing* Layanan Non-Inti, dengan cara mengalihkan beberapa layanan non-inti ke pihak ketiga untuk mengurangi jumlah pegawai tetap.
6. Peningkatan Kompetensi dengan melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai untuk meningkatkan produktivitas, sehingga dapat mengurangi kebutuhan penambahan pegawai baru.
7. Penerapan Sistem Remunerasi Berbasis Kinerja dengan mengimplementasikan sistem penggajian yang lebih menekankan pada kinerja daripada senioritas, mendorong efisiensi dan produktivitas.
8. Evaluasi dan Redistribusi Pegawai, yaitu melakukan evaluasi berkala terhadap kebutuhan pegawai di setiap unit kerja dan melakukan redistribusi untuk optimalisasi sumber daya manusia.
9. Peningkatan Pendapatan Daerah, atau lebih berfokus pada peningkatan PAD untuk meningkatkan total APBD, sehingga secara proporsional menurunkan persentase belanja pegawai.
10. Alokasi Anggaran untuk produktivitas dengan cara mengalihkan sebagian anggaran dari belanja pegawai ke belanja modal dan barang/jasa yang lebih produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Implementasi strategi-strategi sebaiknya ditempuh agar Pemerintah Kota Jayapura mencapai target belanja pegawai 30% pada tahun 2027 dan mempertahankannya di tahun-tahun berikutnya, sambil tetap menjaga kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 2.135
Proyeksi Belanja Daerah Kota Jayapura Tahun 2025-2030

Kode Rekening	Uraian	APBD	Proyeksi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	**BELANJA DAERAH**	**1.686.428.501.777**	**1.799.178.209.314**	**1.784.445.766.093**	**1.854.339.207.093**	**1.927.727.321.093**	**2.004.784.839.093**	**2,8%**
5,1	**BELANJA OPERASI**	**1.421.996.174.035**	**1.513.134.260.972**	**1.538.128.379.092**	**1.596.230.946.592**	**1.657.576.882.392**	**1.721.535.343.892**	**3,3%**
5.1.01	Belanja Pegawai	770.005.984.163	904.011.778.697	926.612.073.197	949.777.375.197	973.521.809.697	997.859.855.197	2,5%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	568.635.913.872	525.768.206.275	528.162.029.895	563.099.295.395	600.700.796.695	640.321.212.695	5,1%
5.1.05	Belanja Hibah	77.664.276.000	77.664.276.000	77.664.276.000	77.664.276.000	77.664.276.000	77.664.276.000	0,0%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.690.000.000	5.690.000.000	5.690.000.000	5.690.000.000	5.690.000.000	5.690.000.000	0,0%
5,2	**BELANJA MODAL**	**114.341.575.101**	**120.058.657.101**	**126.061.592.101**	**132.364.675.101**	**138.982.912.101**	**145.932.060.101**	**5,0%**
5,3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**0,0%**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	0,0%
5,4	**BELANJA TRANSFER**	**145.090.752.641**	**155.985.291.241**	**110.255.794.900**	**115.743.585.400**	**121.167.526.600**	**127.317.435.100**	**-3,6%**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	145.090.752.641	155.985.291.241	110.255.794.900	115.743.585.400	121.167.526.600	127.317.435.100	-3,6%

Sumber: Hasil Proyeksi, 2025

C. Proyeksi Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan tahun 2026 sampai tahun 2030 tidak dilakukan proyeksi, namun pada tahun 2025 berdasarkan data APBD penerimaan pembuayaan ditargetkan sebesar Rp36.502.658.400, penerimaan pembiayan tersebut dari komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan SiLPA, berikut beberapa strategi dan upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura antara lain:

1. Implementasi sistem penganggaran berbasis kinerja yang lebih ketat untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
2. Peningkatan akurasi dalam perencanaan anggaran untuk mengurangi overestimasi belanja.
3. Optimalisasi pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD.
4. Penerapan sistem monitoring dan evaluasi anggaran secara *real-time* untuk memantau realisasi anggaran dan mengidentifikasi potensi penghematan.
5. Implementasi kebijakan efisiensi belanja operasional pemerintah daerah.
6. Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan daerah melalui pelatihan dan sertifikasi.
7. Penerapan sistem *reward* and *punishment* untuk mendorong efisiensi anggaran di setiap SKPD.

Di sisi pengeluaran pembiayaan, proyeksi menunjukkan angka Rp6.335.000.000 per tahun sepanjang periode 2025-2030. Komposisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari penyertaan modal daerah.

Tabel 2.136
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Jayapura
Tahun 2025-2030

Kode Rekening	Uraian	APBD	Proyeksi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**30.167.658.400**	**(6.335.000.000)**	**(6.335.000.000)**	**(6.335.000.000)**	**(6.335.000.000)**	**(6.335.000.000)**	**0,0%**
6,1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**36.502.658.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	36.502.658.400	-	-	-	-	-	-
6,2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**6.335.000.000**	**6.335.000.000**	**6.335.000.000**	**6.335.000.000**	**6.335.000.000**	**6.335.000.000**	**0,0%**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.335.000.000	6.335.000.000	6.335.000.000	6.335.000.000	6.335.000.000	6.335.000.000	0,0%

Sumber: Hasil Proyeksi, 2025

2.2.2.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Proyeksi belanja untuk periode 2025 hingga 2030 disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta pembaruannya.

Berdasarkan perhitungan proyeksi pendapatan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) serta Belanja dapat diproyeksikan kapasitas kemampuan keuangan daerah Tahun 2026-2030 untuk mendanai pembangunan Kota Jayapura. Total Penerimaan diproyeksikan meningkat dari Rp1.805.513.209.314 pada tahun 2026 menjadi sebesar Rp2.011.119.839.093 pada tahun 2030. Sementara pada sisi Pengeluaran diproyeksikan pada tahun 2026 sebesar Rp1.805.513.209.314 dan tahun 2030 mencapai Rp2.011.119.839.093 Adapun proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah Kota Jayapura tahun 2026 sampai 2030 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.137

Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Kota Jayapura Tahun 2025–2030

Kode Rekening	Uraian	APBD	Proyeksi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.656.260.843.377**	**1.805.513.209.314**	**1.790.780.766.093**	**1.860.674.207.093**	**1.934.062.321.093**	**2.011.119.839.093**	**2,8%**
4,1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**295.000.000.000**	**309.750.002.000**	**325.237.503.000**	**341.499.379.000**	**358.574.350.000**	**376.503.069.000**	**5,0%**
4.1.01	Pajak Daerah	251.847.618.741	264.439.999.741	277.661.999.741	291.545.099.741	306.122.354.741	321.428.472.741	5,0%
4.1.02	Retribusi Daerah	30.359.213.669	31.877.174.669	33.471.033.669	35.144.585.669	36.901.815.669	38.746.906.669	5,0%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.044.961.330	8.447.210.330	8.869.571.330	9.313.050.330	9.778.703.330	10.267.639.330	5,0%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.748.206.260	4.985.617.260	5.234.898.260	5.496.643.260	5.771.476.260	6.060.050.260	5,0%
4,2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.341.918.213.456**	**1.475.453.445.393**	**1.465.543.263.093**	**1.519.174.828.093**	**1.575.487.971.093**	**1.634.616.770.093**	**2,6%**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.284.912.397.044	1.425.206.501.000	1.412.783.970.700	1.463.777.569.700	1.517.320.847.700	1.573.541.289.700	2,5%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	57.005.816.412	50.246.944.393	52.759.292.393	55.397.258.393	58.167.123.393	61.075.480.393	5,0%
4,3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**19.342.629.921**	**20.309.761.921**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	19.342.629.921	20.309.761.921	-	-	-	-	-
6,1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**36.502.658.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	36.502.658.400	-	-	-	-	-	-
	TOTAL PENERIMAAN	**1.692.763.501.777**	**1.805.513.209.314**	**1.790.780.766.093**	**1.860.674.207.093**	**1.934.062.321.093**	**2.011.119.839.093**	**2,8%**
		-	-	-	-	-	-	

Kode Rekening	Uraian	APBD	Proyeksi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	**BELANJA DAERAH**	**1.686.428.501.777**	**1.799.178.209.314**	**1.784.445.766.093**	**1.854.339.207.093**	**1.927.727.321.093**	**2.004.784.839.093**	**2,8%**
5,1	**BELANJA OPERASI**	**1.421.996.174.035**	**1.513.134.260.972**	**1.538.128.379.092**	**1.596.230.946.592**	**1.657.576.882.392**	**1.721.535.343.892**	**3,3%**
5.1.01	Belanja Pegawai	770.005.984.163	904.011.778.697	926.612.073.197	949.777.375.197	973.521.809.697	997.859.855.197	2,5%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	568.635.913.872	525.768.206.275	528.162.029.895	563.099.295.395	600.700.796.695	640.321.212.695	5,1%
5.1.05	Belanja Hibah	77.664.276.000	77.664.276.000	77.664.276.000	77.664.276.000	77.664.276.000	77.664.276.000	0,0%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.690.000.000	5.690.000.000	5.690.000.000	5.690.000.000	5.690.000.000	5.690.000.000	0,0%
5,2	**BELANJA MODAL**	**114.341.575.101**	**120.058.657.101**	**126.061.592.101**	**132.364.675.101**	**138.982.912.101**	**145.932.060.101**	**5,0%**
5,3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**0,0%**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	0,0%
5,4	**BELANJA TRANSFER**	**145.090.752.641**	**155.985.291.241**	**110.255.794.900**	**115.743.585.400**	**121.167.526.600**	**127.317.435.100**	**-3,6%**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	145.090.752.641	155.985.291.241	110.255.794.900	115.743.585.400	121.167.526.600	127.317.435.100	-3,6%
	Total Surplus/(Defisit)	**(30.167.658.400)**	**6.335.000.000**	**6.335.000.000**	**6.335.000.000**	**6.335.000.000**	**6.335.000.000**	**0,0%**
		-	-	-	-	-	-	
6,2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**6.335.000.000**	**6.335.000.000**	**6.335.000.000**	**6.335.000.000**	**6.335.000.000**	**6.335.000.000**	**0,0%**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.335.000.000	6.335.000.000	6.335.000.000	6.335.000.000	6.335.000.000	6.335.000.000	0,0%
	TOTAL PENGELUARAN	**1.692.763.501.777**	**1.805.513.209.314**	**1.790.780.766.093**	**1.860.674.207.093**	**1.934.062.321.093**	**2.011.119.839.093**	**2,8%**

Sumber: Hasil Proyeksi, 2025

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1. Permasalahan Pembangunan

Dalam kurun waktu 2020-2024, Kota Jayapura telah mengalami berbagai dinamika pembangunan yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Data historikal selama periode ini menunjukkan adanya fluktuasi signifikan dalam berbagai indikator pembangunan. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 telah memberikan dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk perekonomian, kesehatan, pendidikan, dan sektor-sektor lainnya. Meskipun telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan, berbagai tantangan masih perlu dihadapi untuk mencapai visi pembangunan yang diharapkan.

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap kinerja pembangunan yang didukung data historikal Kota Jayapura dari tahun 2020 hingga 2024, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama. Penyajian permasalahan pembangunan dimuat dalam aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing dan aspek pelayanan umum.

Secara umum, permasalahan Kota Jayapura dapat disimpulkan sebagaimana dimuat pada tabel di bawah. Untuk melengkapi permasalahan umum ini, telah diuraikan berbagai permasalahan yang dikelompokkan dalam beberapa aspek.

Tabel 2.138
Permasalahan Utama Kota Jayapura

No.	Permasalahan Utama	Masalah	Dampak Lintas Sektor
1	Tekanan lingkungan akibat pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang tidak seimbang dengan kapasitas ekologis wilayah.	Daya dukung dan daya tampung lingkungan mengalami penurunan, khususnya ketersediaan air bersih yang mengalami defisit jika tidak diintervensi.	Penurunan kualitas lingkungan ini berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, pariwisata, ketahanan air, dan kualitas permukiman, serta menurunkan daya tarik investasi.
		Alih fungsi kawasan lindung dan daerah resapan air di perbukitan Jayapura Utara, Abepura, dan Heram menyebabkan peningkatan erosi, banjir, dan longsor.	

No.	Permasalahan Utama	Masalah	Dampak Lintas Sektor
		Kawasan pesisir dan mangrove (Teluk Youtefa, Holtekamp) mengalami abrasi dan pencemaran akibat aktivitas perkotaan.	
		Sampah padat dan limbah domestik meningkat tajam, dengan volume >120 ton/hari di Jayapura Selatan dan Abepura, namun sistem pengelolaan masih terbatas.	
2	Keterbatasan ruang layak bangun karena topografi bergunung, sehingga distribusi kegiatan ekonomi dan permukiman tidak seimbang antar distrik.	Hanya 15,13% dari luas wilayah kota yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya, sementara 84,87% merupakan kawasan lindung dan konservasi.	Menimbulkan ketimpangan spasial, urbanisasi tanpa kendali, masalah sosial permukiman, serta mempersulit pemerataan pembangunan infrastruktur dan layanan publik.
		Kepadatan penduduk yang tinggi di Jayapura Selatan dan Abepura menimbulkan tekanan permukiman dan pelayanan publik, sementara Muara Tami yang luas masih memiliki infrastruktur dasar yang belum optimal.	
		Masih terdapat RTLH dan kawasan kumuh terutama di pesisir, lereng, dan bantaran sungai yang rawan bencana.	
3	Struktur ekonomi Kota Jayapura didominasi sektor jasa dan perdagangan, sementara sektor produktif seperti pertanian, perikanan, industri kecil, dan pariwisata belum berkembang optimal.	Ketergantungan tinggi pada aktivitas jasa dan perdagangan yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi regional.	Menurunkan daya saing ekonomi lokal, memperlebar kesenjangan pendapatan, dan memperlemah kemandirian fiskal daerah.
		Produktivitas sektor perikanan dan pertanian masih rendah meskipun potensi besar terutama di Muara Tami dan pesisir Holtekamp.	
		Industri kreatif dan pariwisata belum menjadi penggerak utama ekonomi daerah.	
		Tingkat pengangguran terbuka meningkat, mayoritas pada usia produktif.	
		Akses modal, teknologi, dan pelatihan bagi pelaku UMKM terutama OAP masih terbatas.	
		Distribusi pangan dan harga kebutuhan pokok fluktuatif, terutama di Muara Tami dan Heram.	
4	Peningkatan kualitas sumber daya manusia belum sejalan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi dan pelayanan publik.	Distribusi sekolah menengah dan kejuruan tidak merata, terutama di Muara Tami dan Jayapura Utara.	Menurunkan kualitas SDM, produktivitas tenaga kerja, dan kemampuan masyarakat beradaptasi
		Rasio guru terhadap murid tinggi (1:25–30), menyebabkan mutu pendidikan belum optimal.	

No.	Permasalahan Utama	Masalah	Dampak Lintas Sektor
		Partisipasi pendidikan menengah dan tinggi rendah, terutama di kalangan OAP.	terhadap perubahan ekonomi dan iklim.
		Layanan kesehatan dasar belum merata, dengan kekurangan tenaga medis di wilayah perbatasan.	
		Kasus stunting dan gizi buruk masih terjadi di permukiman padat dan pesisir.	
		Terdapat peningkatan jumlah penduduk miskin baru akibat fluktuasi ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.	
5	Masih menghadapi kesenjangan infrastruktur antarwilayah dan keterbatasan pelayanan dasar	Akses jalan dan jembatan antar distrik (terutama Muara Tami dan Jayapura Utara) belum memadai.	Menghambat konektivitas ekonomi, pemerataan pelayanan publik, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
		Cakupan air bersih PDAM baru sekitar 60–70%, belum menjangkau daerah perbukitan dan perbatasan.	
		Drainase perkotaan tidak memadai, menyebabkan genangan dan banjir lokal.	
		Ketersediaan perumahan layak dan sanitasi sehat masih terbatas di kawasan kumuh.	
		Infrastruktur digital dan telekomunikasi belum merata di kampung-kampung.	
		Pemanfaatan energi baru terbarukan masih rendah, sementara konsumsi energi meningkat.	
6	Belum optimalnya penerapan birokrasi yang efisien dan adaptif	Kapasitas aparatur daerah belum merata, terutama di distrik dan kelurahan.	Menghambat kualitas pelayanan publik, efektivitas pelaksanaan RPJMD, keterpaduan program lintas urusan, dan penyerapan anggaran pembangunan.
		Koordinasi antarperangkat daerah dan integrasi data perencanaan masih lemah.	
		Implementasi e-government dan digitalisasi pelayanan publik belum optimal.	
		Pengawasan dan akuntabilitas keuangan daerah masih perlu ditingkatkan.	
		Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum merata di tingkat kelurahan/kampung.	
7	Sebagai kota multikultural, Kota Jayapura menghadapi tantangan menjaga identitas budaya lokal di tengah arus	Budaya Port Numbay dan bahasa lokal mulai tergerus oleh pengaruh global dan dominasi budaya luar.	Mengancam keberlanjutan identitas lokal, harmoni sosial, dan potensi budaya sebagai sumber ekonomi kreatif.
		Peran lembaga adat dan tokoh masyarakat dalam pembangunan belum optimal.	

No.	Permasalahan Utama	Masalah	Dampak Lintas Sektor
	modernisasi dan migrasi.	Warisan budaya tak benda seperti tarian, musik, dan ritual adat belum terintegrasi dalam pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata.	
8	Kerentanan tinggi terhadap bencana alam dan perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi pembangunan berkelanjutan kota.	Banjir, longsor, dan abrasi pesisir terjadi hampir setiap tahun di beberapa wilayah.	Mengganggu aktivitas ekonomi, kesehatan masyarakat, dan infrastruktur kota, serta berpotensi meningkatkan kemiskinan dan kerentanan sosial.
		Infrastruktur masih minim yang adaptif terhadap iklim ekstrem.	
		Kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana masih rendah, terutama di kawasan perbukitan dan pesisir.	

Sumber: hasil analisis, 2025

2.3.1.1. Permasalahan Aspek Geografi dan Demografi

A. Geografi

Kompleksitas geografis dan dinamika demografis menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan di ibukota Provinsi Papua. Lanskap yang beragam, mencakup area pesisir hingga pegunungan, menciptakan hambatan signifikan dalam perencanaan spasial dan pengembangan infrastruktur. Bersamaan dengan itu, perubahan populasi yang cepat, variasi struktur usia, dan keberagaman etnis menimbulkan tekanan pada penyediaan layanan publik dan upaya pemerataan pembangunan. Kajian mendalam terhadap kondisi geografi dan demografi wilayah ini mengungkap sejumlah isu kritis yang memerlukan strategi khusus untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Identifikasi permasalahan utama dalam aspek geografi dan demografi berikut ini menyoroti kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam upaya transformasi menuju kota yang lebih maju dan sejahtera.

Kota Jayapura menghadapi beberapa tantangan dan permasalahan terkait aspek geografis dan administratifnya. Salah satu masalah utama adalah perubahan signifikan dalam luas wilayah administratif kota. Sejak pembentukan resminya pada tahun 1993, luas Kota Jayapura telah mengalami penyusutan dari 940 km² menjadi sekitar 835,94 km². Perubahan ini disebabkan oleh berbagai

penyesuaian regulasi dan batas wilayah, termasuk penetapan batas dengan kabupaten tetangga dan penyesuaian garis batas negara. Perbedaan data luas wilayah antara sumber BPS dan hasil pemetaan tapal batas terbaru menimbulkan ketidakpastian dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah. Misalnya, Distrik Muara Tami mengalami perbedaan luas yang signifikan, dari 626,7 km² menurut BPS menjadi 431,99 km² berdasarkan tapal batas 2020. Sebaliknya, Distrik Abepura justru mengalami peningkatan luas dari 155,7 km² menjadi 252,21 km². Inkonsistensi data ini dapat menyulitkan proses perencanaan pembangunan dan alokasi sumber daya.

Tantangan geografis lainnya adalah keterbatasan lahan yang cocok untuk pemukiman dan pembangunan. Sekitar 30% wilayah Kota Jayapura dianggap tidak cocok untuk pemukiman karena terdiri dari perbukitan curam, daerah rawa, dan hutan lindung. Hal ini membatasi opsi pengembangan kota dan dapat meningkatkan tekanan pada area yang dapat dibangun. Komposisi wilayah Kota Jayapura yang didominasi oleh kawasan lindung atau non-budidaya (84,87% dari total luas) menimbulkan tantangan dalam menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan upaya konservasi lingkungan. Hanya 15,13% wilayah yang dapat dibudidayakan, yang dapat membatasi peluang ekspansi ekonomi dan pemenuhan kebutuhan pemukiman penduduk yang terus bertambah.

Posisi geografis Kota Jayapura yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Papua New Guinea, serta akses langsung ke Samudera Pasifik, memberikan potensi strategis namun juga tantangan dalam pengelolaan perbatasan dan keamanan wilayah. Konfigurasi geografis yang unik ini memerlukan pendekatan khusus dalam perencanaan tata ruang dan pengembangan infrastruktur. Keberagaman bentang alam Kota Jayapura, yang mencakup wilayah pesisir, daratan, dan pulau-pulau kecil, menambah kompleksitas dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan infrastruktur. Perlindungan ekosistem pesisir dan laut,

serta pengelolaan daerah aliran sungai dan laguna, menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan berkelanjutan Kota Jayapura.

B. Belum Optimalnya Pengelolaan Pangan Daerah

Indeks Ketahanan Pangan di Kota Jayapura sejatinya memang mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir, namun capaian pada tahun 2023 yang hanya sebesar 76,01 dirasa masih perlu untuk dapat ditingkatkan kembali.

Permasalahan ketahanan pangan di Kota Jayapura, meliputi Ketersediaan pangan yang tidak merata sepanjang tahun, Rentan akan akses pangan, Konversi lahan pertanian ke nonpertanian, Kerusakan lingkungan yang menurunkan kesuburan lahan dan Terbatasnya penyediaan air untuk produksi akibat kerusakan hutan.

C. Demografi

Ketidakseimbangan gender menjadi salah satu masalah, dimana jumlah penduduk untuk jenis kelamin Laki-Laki pada tahun 2024 yaitu sebesar 214.026 orang atau lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kelamin Perempuan yakni 190.773 orang, dengan rasio jenis kelamin sebesar 112.58. Konsistensi jumlah penduduk laki-laki yang lebih tinggi di semua kecamatan dapat mempengaruhi dinamika sosial dan ekonomi kota secara signifikan. Selain itu, distribusi populasi yang tidak merata antar kecamatan, dengan Abepura sebagai wilayah terpadat dan Muara Tami sebagai yang terendah, menimbulkan tantangan dalam penyediaan layanan dan infrastruktur yang adil dan merata.

Variasi pertumbuhan antar kecamatan juga menjadi sorotan, dengan beberapa wilayah mengalami pertumbuhan positif sementara yang lain mengalami penurunan neto dari tahun 2020 ke tahun 2024. Perbedaan ini mengindikasikan adanya variasi dalam daya tarik dan kapasitas masing-masing kecamatan, yang memerlukan strategi pengembangan yang berbeda-beda.

Proyeksi pertumbuhan penduduk yang stabil, dengan rata-rata 1,59% per tahun dari 2025 hingga 2030, membawa tantangan tersendiri dalam perencanaan jangka panjang. Pemerintah Kota Jayapura perlu mempersiapkan strategi komprehensif untuk mengantisipasi kebutuhan infrastruktur, layanan publik, dan pengembangan ekonomi di masa depan.

Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk kota, menyebabkan kepadatan yang cukup tinggi. Kepadatan ini menciptakan tantangan signifikan dalam hal penyediaan infrastruktur, layanan publik, dan pengelolaan lingkungan. Tekanan pada sumber daya kota menjadi lebih intens, mengingat setiap kilometer persegi harus mendukung hampir seribu penduduk. Situasi ini diperumit oleh distribusi penduduk yang tidak merata antar kecamatan, yang berarti beberapa area akan mengalami tekanan populasi jauh lebih besar dari rata-rata Kota Jayapura. Kondisi ini menekankan pentingnya pendekatan perencanaan kota yang sangat cermat dan strategis, dengan fokus pada pengembangan infrastruktur yang efisien, manajemen lingkungan yang berkelanjutan, dan pemerataan layanan publik.

2.3.1.2. Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Kesejahteraan Ekonomi

1. Perekonomian yang Belum Stabil

Pertumbuhan ekonomi di Kota Jayapura sejak tahun 2020 sampai 2023 terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi di Kota Jayapura mengalami penurunan menjadi 3,56 persen. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi Kota Jayapura sejak tahun 2020 hingga 2024 masih berada dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua dan Nasional, hanya pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Jayapura berada diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua.

Penurunan laju pertumbuhan ekonomi Kota Jayapura memberikan gambaran bahwa:

a. Ekonomi kota belum sepenuhnya kembali ke level pra-pandemi. Hal ini menunjukkan adanya tantangan berkelanjutan dalam upaya pemulihan ekonomi secara menyeluruh. Kesenjangan antara pertumbuhan saat ini dan level pra-pandemi mengindikasikan potensi kerugian jangka panjang atau "*scarring effect*" pada ekonomi kota. Fenomena ini dapat berdampak pada produktivitas, investasi, dan penciptaan lapangan kerja dalam jangka panjang, yang memerlukan strategi khusus untuk mengatasinya;
b. ketidakstabilan yang dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan perencanaan ekonomi jangka panjang. Volatilitas ini juga dapat menyulitkan pemerintah dalam merencanakan anggaran dan kebijakan ekonomi yang efektif, serta menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dalam mengambil keputusan investasi;
c. Lambatnya pemulihan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan fiskal pemerintah, lambatnya adaptasi sektor usaha terhadap perubahan pola konsumsi, serta masih rendahnya tingkat investasi baru pasca-pandemi. Hal ini menuntut evaluasi mendalam terhadap kebijakan ekonomi yang ada dan memerlukan pendekatan baru yang lebih inovatif untuk mempercepat pemulihan;
d. Data pertumbuhan ekonomi juga mengindikasikan potensi kesenjangan sektoral dalam pemulihan ekonomi. Beberapa sektor bisa pulih lebih cepat sementara yang lain tertinggal, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam struktur ekonomi kota. Hal ini memerlukan perhatian khusus dalam strategi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan merata di seluruh sektor. Kesenjangan ini dapat memperlebar disparitas pendapatan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah dalam kota, yang pada gilirannya dapat menimbulkan masalah sosial dan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya

berfokus pada pertumbuhan agregat, tetapi juga memperhatikan pemerataan pertumbuhan antar sektor dan kelompok masyarakat.

2. Masih Tingginya Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kota Jayapura baik dari sisi jumlah maupun dari sisi persentase sejak tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat pada tahun terakhir (2024). Jumlah penduduk miskin pada tahun 2024 yaitu sebanyak 33.840 jiwa atau mengalami peningkatan sebanyak 1.050 jiwa dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 32.790 jiwa pada tahun 2023. Untuk Persentase Penduduk Miskin juga demikian, dimana pada tahun 2024 mencapai 10,72 persen atau meningkat sebesar 0,22 persen dibandingkan dengan kondisi pada tahun sebelumnya yang hanya mencapai 10,50 persen. Disamping itu, persentase penduduk miskin Kota Jayapura sejak tahun 2020 sampai 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian nasional. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jayapura dalam menekan angka kemiskinan antara lain:

a. Pentingnya kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pengurangan jumlah penduduk miskin, tetapi juga pada peningkatan daya beli dan kualitas hidup secara keseluruhan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat upaya pengentasan kemiskinan harus berjalan lebih cepat dari kenaikan biaya hidup;
b. Laju penurunan yang relatif lambat mengindikasikan perlunya strategi pengentasan kemiskinan yang lebih agresif dan inovatif untuk mencapai pengurangan kemiskinan yang lebih signifikan;
c. Perlunya sistem perlindungan sosial yang lebih kuat dan responsif untuk menghadapi krisis di masa depan.

3. Masih Tingginya Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Jayapura sejak tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun pada tahun 2024 menjadi hanya 8,29 persen. Meskipun terjadi

penurunan, namun Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Jayapura pada periode tersebut masih berada diatas Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Papua dan Nasional. Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Jayapura pada tahun 2024 yang sebesar 8,29 persen menempatkan Kota Jayapura dengan Tingkat Pengangguran Terbuka paling tinggi atau urutan ke-9 diantara daerah lainnya diwilayah Provinsi Papua, adapun tingkat pengangguran terbuka paling rendah di Provinsi Papua yaitu Kabupaten Mamberamo Raya (1,05 persen), Kabupaten Keerom (2,91 persen) dan Kabupaten Waropen (3,21 persen).

Tingginya angka pengangguran ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketersediaan lapangan kerja dengan keterampilan angkatan kerja, atau kurangnya penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan pertumbuhan angkatan kerja. Hal ini memerlukan strategi komprehensif yang melibatkan peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, dan kebijakan yang mendorong penciptaan lapangan kerja. Selain itu, dalam situasi ini menekankan pentingnya kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pemulihan ekonomi jangka pendek, tetapi juga pada peningkatan ketahanan ekonomi jangka panjang dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

B. Kesehatan untuk Semua

1. Laju Peningkatan Angka Usia Harapan Hidup (AHH) Relatif Lambat

Masalah *Pertama*; yang bisa diidentifikasi dari data AHH Kota Jayapura periode 2020-2024 yaitu, meskipun terdapat *trend* peningkatan yang konsisten dari 71,29 tahun pada 2020 menjadi 71,99 tahun pada 2024, laju peningkatan yang relatif lambat (rata-rata sekitar 0,14 tahun per tahun) menunjukkan adanya tantangan dalam mempercepat perbaikan kesehatan dan kualitas hidup penduduk. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kemajuan, upaya untuk meningkatkan AHH masih menghadapi hambatan signifikan yang

memerlukan pendekatan lebih komprehensif dan inovatif dalam kebijakan kesehatan dan pembangunan sosial.

Kedua; peningkatan AHH yang konsisten menimbulkan tantangan baru terkait dengan penuaan populasi. Hal ini menciptakan tekanan pada sistem kesehatan dan jaminan sosial untuk beradaptasi dengan kebutuhan populasi yang semakin menua. Tantangan ini meliputi peningkatan prevalensi penyakit kronis, kebutuhan akan perawatan jangka panjang, dan perlunya kebijakan yang mendukung penuaan aktif dan sehat.

Ketiga; meskipun AHH memberikan gambaran umum tentang kesehatan populasi, indikator ini tidak sepenuhnya menangkap aspek-aspek penting dari kualitas hidup. Misalnya, peningkatan AHH tidak selalu diikuti dengan peningkatan setara dalam tahun-tahun hidup yang sehat (*healthy life years*). Hal ini menuntut perhatian tidak hanya pada perpanjangan umur, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup sepanjang tahun-tahun tersebut, termasuk pencegahan dan manajemen penyakit kronis, serta promosi gaya hidup sehat di semua kelompok usia.

2. Prevalensi Balita Stunting Masih Cukup Tinggi

Data stunting di Kota Jayapura dari tahun 2021 hingga 2024, menunjukkan beberapa permasalahan yang perlu dianalisis lebih lanjut. Jumlah balita yang mengalami kondisi pendek dan sangat pendek mengalami fluktuasi yang signifikan, terutama pada tahun 2022 di mana jumlah balita pendek mencapai 1,120 anak dan balita sangat pendek mencapai 382 anak.

Peningkatan ini menunjukkan adanya faktor-faktor yang memperburuk kondisi kesehatan dan gizi anak-anak pada tahun tersebut. Salah satu penyebab adalah adanya masalah dalam distribusi atau ketersediaan pangan yang bergizi, peningkatan angka infeksi atau penyakit, serta kurangnya akses ke layanan kesehatan dan gizi yang memadai. Selain itu, prevalensi stunting yang mencapai puncaknya pada

tahun 2023 dengan 19.4% juga mengindikasikan bahwa intervensi yang dilakukan sebelumnya belum efektif dan juga belum merata.

Meskipun terjadi penurunan prevalensi stunting menjadi 12.5% pada tahun 2024, hal ini menunjukkan adanya perbaikan, namun juga menekankan perlunya evaluasi dan penyesuaian terus-menerus pada program-program yang telah diterapkan. Faktor sosial ekonomi, edukasi orang tua mengenai pentingnya nutrisi, serta kondisi sanitasi dan air bersih juga perlu diperhatikan sebagai bagian dari pendekatan holistik untuk mengatasi stunting. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat untuk memastikan intervensi yang berkelanjutan dan komprehensif guna mengurangi angka stunting secara signifikan dan berkelanjutan di masa mendatang.

C. Pendidikan Berkualitas yang Merata

1. Lambatnya Laju Pertumbuhan Rata-Rata Lama Sekolah

Analisis identifikasi masalah pada data RLS Kota Jayapura periode 2020-2024 mengungkap permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

Pertama; walaupun terdapat tren peningkatan yang konsisten, laju pertumbuhan RLS yang relatif lambat (rata-rata hanya 0,102 tahun per tahun) menunjukkan adanya hambatan signifikan dalam upaya meningkatkan tingkat pendidikan penduduk. Peningkatan yang lambat ini mengindikasikan bahwa masih ada kelompok masyarakat yang menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan atau melanjutkan pendidikan mereka.

Kedua; peningkatan RLS yang lebih besar pada tahun 2023 dan 2024 mencerminkan keberhasilan kebijakan pendidikan jangka pendek, namun juga menimbulkan permasalahan tentang keberlanjutan peningkatan ini. Lonjakan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor temporer seperti program pendidikan khusus atau insentif jangka

pendek, yang sulit dipertahankan dalam jangka panjang tanpa strategi yang lebih komprehensif.

Ketiga; meskipun RLS Kota Jayapura berada di atas rata-rata provinsi papua dan nasional, kesenjangan antara RLS dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yang mencapai lebih dari 15 tahun menunjukkan adanya disparitas yang signifikan antara harapan dan realitas pendidikan di kota ini. Hal ini mengindikasikan adanya hambatan struktural yang mencegah banyak penduduk untuk mencapai tingkat pendidikan yang diharapkan.

Keempat, fokus pada peningkatan RLS bisa mengalihkan perhatian dari masalah kualitas pendidikan. Peningkatan jumlah tahun sekolah tidak selalu berkorelasi langsung dengan peningkatan keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk pasar kerja. Ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan formal dan kebutuhan pasar kerja dapat mengakibatkan masalah pengangguran atau *underemployment* di kalangan lulusan, yang pada gilirannya dapat mengurangi motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

2. Lambatnya Laju Pertumbuhan Angka Harapan Lama Sekolah

Analisis terhadap Angka HLS Kota Jayapura periode 2020-2024 mengidentifikasi beberapa masalah kritis.

Pertama; meskipun terdapat tren peningkatan yang konsisten, laju pertumbuhan HLS yang sangat lambat (rata-rata hanya 0,0520 tahun per tahun) menunjukkan adanya hambatan signifikan dalam upaya meningkatkan partisipasi pendidikan jangka panjang. Peningkatan yang lambat ini mengindikasikan bahwa sistem pendidikan Kota Jayapura telah mencapai titik jenuh, di mana peningkatan lebih lanjut menjadi semakin sulit dicapai.

Kedua; meskipun HLS Kota Jayapura yang berada di atas15 tahun menunjukkan capaian yang sangat baik, angka ini menunjukan disparitas yang signifikan dalam akses dan kualitas pendidikan di antara

berbagai kelompok masyarakat. Tingginya HLS secara keseluruhan tidak mencerminkan realitas bagi kelompok-kelompok marginal atau daerah-daerah terpencil di dalam wilayah kota, yang masih menghadapi hambatan serius dalam akses pendidikan berkualitas.

Ketiga; HLS yang tinggi tidak selalu berkorelasi langsung dengan kualitas pendidikan atau kesesuaian dengan kebutuhan pasar kerja. Meskipun rata-rata anak diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi, hal ini tidak menjamin bahwa mereka memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk sukses di dunia kerja. Kesenjangan antara HLS yang tinggi dan tingkat pengangguran atau *underemployment* di kalangan lulusan dapat menjadi masalah serius.

Keempat, fokus pada peningkatan HLS mengalihkan perhatian dari kebutuhan untuk diversifikasi jalur pendidikan. Dengan HLS yang sudah tinggi, tantangan bukan lagi pada menambah tahun pendidikan, tetapi pada memastikan bahwa sistem pendidikan menawarkan berbagai pilihan yang sesuai dengan beragam bakat dan aspirasi siswa, termasuk pendidikan vokasi dan keterampilan praktis. Ketidakmampuan untuk menyediakan jalur pendidikan yang beragam dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara output sistem pendidikan dan kebutuhan ekonomi lokal.

3. Rendahnya Indeks Pembangunan Literasi

Indeks Pembangunan Literasi Kota Jayapura sejak tahun 2022 sampai 2024 terus meningkat, namun capaian Indeks Pembangunan Literasi pada tahun 2024 yang hanya mencapai 39,32 masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian Indeks Pembangunan Literasi Provinsi Papua pada tahun yang sama yang mencapai 60,75.

Salah satu permasalahan terkait literasi di Kota Jayapura adalah ketimpangan pengentasan buta aksara, di mana Kota Jayapura memiliki angka buta aksara (ABA) 0%. Namun, di daerah-daerah sulit akses, tingkat buta aksara masih tinggi.

D. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

1. Belum optimalnya Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kota Jayapura pada tahun 2023 dan 2024 masih diangka 48,52. Salah satu permasalahan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Kota Jayapura belum optimal antara lain penurunan nilai IPK akibat pandemi COVID-19.

E. Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

1. Cenderung menurunnya Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun demikian capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai 62,44. Beberapa penyebab belum optimalnya Indeks Perlindungan Anak di Kota Jayapura salah satunya yaitu masih terjadinya kekerasan terhadap anak dan kurangnya perhatian orang tua.

2. Menurunnya Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender di Kota Jayapura pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami peningkatan, namun pada tahun berikutnya menurun menjadi 94,72 di tahun 2024. Beberapa faktor penyebab menurunnya Indeks Pembangunan Gender di Kota Jayapura antara lain terkait dengan Infrastruktur, Akses terhadap sumber daya alam, Pemberdayaan dan Pasar Tenaga Kerja.

Permasalahan berdasarkan hasil analisa indikator-indikator gender di Kota Jayapura dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Pertama; laju peningkatan yang relatif lambat menunjukkan adanya hambatan struktural dalam mencapai kesetaraan gender yang lebih cepat. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kemajuan, upaya untuk mengatasi ketimpangan gender masih menghadapi

tantangan signifikan yang memerlukan pendekatan lebih agresif dan inovatif.

Kedua; meskipun IPG Kota Jayapura berada di atas 94 selama periode tersebut, yang menunjukkan tingkat kesetaraan gender yang relatif tinggi, masih terdapat kesenjangan sekitar 5 poin untuk mencapai kesetaraan penuh. Kesenjangan ini, meskipun tampak kecil tetapi mencerminkan disparitas yang lebih dalam pada aspek-aspek tertentu dari pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, seperti partisipasi dalam angkatan kerja, representasi politik, bahkan akses ke pendidikan tinggi dan posisi kepemimpinan.

Ketiga; resiliensi IPG Kota Jayapura terhadap dampak pandemi COVID-19, yang ditunjukkan oleh peningkatan konsisten bahkan selama krisis global, menyembunyikan disparitas yang lebih kompleks. Misalnya, meskipun IPG secara keseluruhan meningkat, tedapat kelompok-kelompok perempuan tertentu yang mengalami dampak negatif yang lebih besar dari pandemi, seperti pekerja informal atau ibu tunggal (Kepala Keluarga Perempuan), yang tidak sepenuhnya tercermin dalam indeks agregat.

Keempat; meskipun IPG memberikan gambaran umum tentang kesetaraan gender dalam pembangunan manusia, indikator ini tidak sepenuhnya menangkap nuansa ketimpangan gender dalam konteks budaya dan sosial yang spesifik di Kota Jayapura dan Papua secara umum. Masalah-masalah seperti kekerasan berbasis gender, praktik-praktik budaya yang diskriminatif, atau hambatan tidak terlihat dalam akses perempuan ke sumber daya dan pengambilan keputusan belum tercermin dalam IPG, sehingga masih dibutuhkan data lain seperti data kekerasan berbasis gender, maupun data hasil laporan tindak praktik budaya yang diskriminatif, serta laporan hambatan akses perempuan ke sumber daya atau fasilitas/sarana pra sarana umum.

Kelima, pencapaian IPG yang tinggi di Kota Jayapura, sementara positif, juga menimbulkan tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan kemajuan ini di masa depan. Seiring dengan semakin

dekatnya IPG ke nilai 100, upaya untuk mengatasi kesenjangan yang tersisa menjadi semakin sulit dan memerlukan intervensi yang lebih spesifik dan terukur. Hal ini menuntut inovasi berkelanjutan dalam kebijakan dan program untuk mengatasi akar penyebab ketimpangan gender yang lebih mendalam dan tersembunyi.

3. Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Jayapura pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 81,05.

Beberapa permasalahan yang terkait dengan IDG antara lain rendahnya partisipasi perempuan di parlemen, terbatasnya akses terhadap sumber daya ekonomi, dan ketimpangan dalam pendapatan antara laki-laki dan perempuan.

2.3.1.3. Permasalahan Aspek Daya Saing Daerah

A. Daya Saing Sumber Daya Manusia

1. Belum Stabilnya Tingkat Ketergantungan

Analisis identifikasi masalah terkait Tingkat Ketergantungan di Kota Jayapura mengungkapkan beberapa hal yang kritis dan memerlukan perhatian khusus.

Pertama; fluktuasi signifikan dalam Tingkat Ketergantungan, dari 47,83 pada 2020 meningkat ke 48,76 pada 2021, kemudian turun drastis menjadi 33,16 pada 2024, menunjukkan ketidakstabilan dalam struktur demografis kota. Perubahan cepat ini dapat menimbulkan tantangan dalam perencanaan jangka panjang untuk layanan publik dan kebijakan sosial-ekonomi.

Kedua; meskipun penurunan Tingkat Ketergantungan pada 2022-2024 terlihat positif, hal ini menimbulkan permasalahan tentang kesiapan pasar tenaga kerja Kota Jayapura dalam menyerap peningkatan jumlah penduduk usia produktif. Tanpa penciptaan lapangan kerja yang memadai, penurunan rasio ini bisa berujung pada

peningkatan tingkat pengangguran atau *underemployment*, yang justru dapat membebani ekonomi kota.

Ketiga; peningkatan signifikan jumlah penduduk usia produktif dari 268.408 pada 2020 menjadi 303.999 pada 2024 menciptakan tantangan dalam penyediaan lapangan kerja yang berkualitas. Tanpa strategi pengembangan ekonomi yang tepat, situasi ini bisa mengarah pada peningkatan ketimpangan ekonomi atau migrasi keluar tenaga kerja terampil.

Keempat; perubahan cepat dalam struktur demografis ini dapat menciptakan ketegangan sosial-ekonomi antara generasi. Misalnya, beban yang semakin besar pada penduduk usia produktif untuk mendukung sistem pensiun dan kesehatan bagi populasi yang menua dapat menimbulkan konflik antar generasi jika tidak dikelola dengan baik.

Menghadapi permasalahan-permasalahan ini, Kota Jayapura perlu mengembangkan strategi komprehensif yang mencakup perencanaan ekonomi jangka panjang untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas, peningkatan kapasitas dan kualitas sistem pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan kebijakan jaminan sosial yang berkelanjutan. Tanpa pendekatan holistik, perubahan demografis yang cepat ini berpotensi menimbulkan ketegangan sosial-ekonomi dan menghambat pembangunan berkelanjutan Kota Jayapura.

B. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

1. Menurunnya Distribusi Persentase PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan. Distribusi Persentase PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan sejak tahun 2020 sampai 2024 terus mengalami penurunan hingga menjadi 2,40 persen pada tahun 2024.

2. Menurunnya Rasio Kewirausahaan

Rasio Kewirausahaan di Kota Jayapura pada tahun 2022 sampai 2024 mengalami penurunan hingga menjadi 1,63 pada tahun 2024.

Beberapa penyebab menurunnya Rasio Kewirausahaan di Kota Jayapura antara lain: Perubahan ekonomi, Pola Pikir Masyarakat, Keterampilan SDM, Kurangnya pembelajaran kewirausahaan, Kendala Regulasi, Promosi dan distribusi, Produk Impor dan Pelaku UMKM didominasi oleh reseller.

3. Belum Optimalnya Tingkat Pastisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Evaluasi terhadap TPAK Kota Jayapura mengungkap beberapa permasalahan serius yang membutuhkan penanganan segera. Masalah utama terlihat dari belum optimalnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Jayapura, meskipun terjadi peningkatan dari tahun 2022 sampai 2024. Keadaan ini mengindikasikan adanya hambatan struktural dalam pasar tenaga kerja kota, yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Absennya data untuk tahun 2020 dan 2021, akibat pandemi COVID-19 dan perubahan metode survei, menciptakan celah informasi yang signifikan. Hal ini menyulitkan analisis tren jangka panjang dan pemahaman menyeluruh tentang dinamika ketenagakerjaan selama masa kritis tersebut. Situasi ini menyoroti urgensi pengembangan sistem pengumpulan data yang lebih resilient dan adaptif terhadap kondisi krisis.

Kompleksitas faktor penyebab belum optimalnya TPAK, meliputi pergeseran demografi, peningkatan minat melanjutkan pendidikan, dan transformasi struktur ekonomi lokal, menciptakan tantangan dalam perumusan kebijakan yang tepat sasaran. Diperlukan analisis mendalam untuk memahami kontribusi relatif dari setiap faktor terhadap rendahnya TPAK.

4. Belum optimalnya pengembangan dan penerapan inovasi daerah

Salah satu indikasi belum optimalnya pengembangan dan penerapan inovasi daerah adalah Indeks Inovasi Daerah di Kota Jayapura yang mengalami fluktuasi dan menurun pada tahun 2024

menjadi hanya 35,66. Permasalahan yang menyebabkan menurunnya Indeks Inovasi Daerah antara lain:

a. Belum adanya dasar hukum mengenai inovasi daerah, infonya draf perwali sudah disiapkan dan akan dibahas dengan bagian hukum.
b. Belum adanya roadmad Sistem Inovasi Daerah (SIDa).
c. Belum disusunya Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJ-PID).
d. Belum adanya rekomendasi dari pemerintah kota mengenai kebijakan untuk mendukung inovasi baik dalam bentuk *policy brief, policy paper*, makalah kebijakan dan artikel kebijakan.
e. Pengembangan riset masih sangat minim.

C. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1. Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi Pengembangan Wilayah

Permasalahan potensi pengembangan wilayah Kota Jayapura, antara lain:

Pertama; yaitu meskipun Kawasan Strategis Kota (KSK) ditetapkan sebagai area prioritas dalam penataan ruang, implementasi yang efektif akan terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan kapasitas pemerintah daerah. Penentuan KSK yang melibatkan berbagai faktor kompleks dapat menciptakan tantangan dalam koordinasi dan alokasi sumber daya yang tepat, terutama mengingat keragaman kepentingan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan yang harus diseimbangkan.

Kedua; fokus pada KSK, meskipun strategis, berpotensi menciptakan ketimpangan pembangunan antara kawasan yang ditetapkan sebagai KSK dan wilayah lain di Kota Jayapura. Hal ini dapat mengakibatkan konsentrasi pembangunan yang tidak merata dan potensial menimbulkan kesenjangan sosial-ekonomi antar wilayah. Perlu ada strategi yang memastikan bahwa pengembangan KSK tidak mengabaikan kebutuhan dan potensi wilayah lain di Kota Jayapura.

Ketiga; pembagian KSK menjadi tiga kategori (ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan) akan menciptakan tantangan dalam mengintegrasikan pembangunan secara holistik. Pendekatan sektoral ini berisiko menghasilkan perencanaan yang terfragmentasi, di mana aspek-aspek penting dari pembangunan berkelanjutan berpotensi tidak sepenuhnya terintegrasi antar kategori KSK.

Keempat, penentuan KSK yang didasarkan pada berbagai faktor kompleks tidak cukup fleksibel untuk mengakomodasi perubahan cepat dalam dinamika perkotaan, terutama dalam konteks perkembangan teknologi dan perubahan pola sosial-ekonomi. Rigiditas dalam perencanaan jangka panjang (Berdasarkan Data Revisi RTRW 2013-2033 Kota Jayapura) dapat menghalangi adaptasi terhadap kebutuhan dan peluang baru yang muncul seiring waktu.

Kelima, meskipun KSK berfungsi sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan dan pelestarian lingkungan, implementasinya menghadapi konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya untuk pembangunan dan perlindungan ekosistem kritis menjadi tantangan besar, terutama di kawasan dengan nilai ekonomi tinggi namun juga memiliki fungsi ekologis penting.

2. Masih cukup tingginya biaya konstruksi

Analisis Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Jayapura periode 2019-2023 mengidentifikasikan dinamika yang kompleks dalam sektor konstruksi kota ini. Meskipun IKK Kota Jayapura menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, data perbandingan justru memperlihatkan tren penurunan yang konsisten. Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun biaya konstruksi di Kota Jayapura cenderung naik, namun relatif terhadap daerah lain atau standar nasional, tingkat kemahalannya sebenarnya menurun. Hal ini mencerminkan peningkatan efisiensi relative dalam industri konstruksi Kota Jayapura dibandingkan dengan wilayah lain.

Lonjakan signifikan IKK pada tahun 2022 yang mencapai 129,17, diikuti penurunan menjadi 126,98 di tahun 2023, menunjukkan adanya faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi biaya konstruksi, seperti fluktuasi harga bahan baku dan perubahan kebijakan. Sementara itu, penurunan drastis angka perbandingan dari 218,59 pada 2019 menjadi 135,56 pada 2023 (meskipun data 2023 masih bersifat sementara) mengindikasikan peningkatan substansial dalam daya saing sektor konstruksi Kota Jayapura. Penurunan ini dapat menjadi daya tarik bagi investor dan pengembang, berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kota Jayapura.

Meskipun IKK Kota Jayapura masih di atas 100, menunjukkan biaya konstruksi yang masih lebih tinggi dari rata-rata nasional, tren penurunan angka perbandingan mengisyaratkan bahwa kesenjangan tersebut semakin mengecil. Hal ini dapat meningkatkan posisi kompetitif Kota Jayapura dalam menarik investasi dan proyek pembangunan. Namun, fluktuasi IKK juga menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam biaya konstruksi, yang dapat menciptakan tantangan dalam perencanaan jangka panjang dan penganggaran proyek-proyek pembangunan.

3. Belum optimalnya pengembangan dan kualitas layanan transportasi

Analisa untuk identifikasi masalah untuk data rasio aksesibilitas dan mobilitas Kota Jayapura periode 2019-2023 mengungkapkan dinamika yang kompleks dalam perkembangan infrastruktur transportasi dan pertumbuhan jumlah kendaraan. Panjang jalan total mengalami peningkatan signifikan sebesar 17,8% dari 508.494 Meter pada 2021 menjadi 598.960 meter pada 2022, yang kemudian tetap stabil hingga 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan data Jalan Nasional sepanjang 42.668 meter dan Jalan Provinsi sepanjang 5.380 meter, serta pertambahan Jalan Kota menjadi 550.912 meter. Sementara itu, jumlah kendaraan menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dan lebih cepat, meningkat sebesar 21,9% dari 211.662 pada 2019

menjadi 258.007 pada 2023, dengan pertumbuhan tahunan terbesar terjadi antara 2022 dan 2023, mencapai 10%.

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan menunjukkan fluktuasi yang menarik. Rasio ini memburuk dari 1:41,62 pada 2019 menjadi 1:43,59 pada 2021, mengindikasikan peningkatan kepadatan lalu lintas. Penambahan panjang jalan pada 2022 memperbaiki rasio menjadi 1:39,16, namun kembali memburuk menjadi 1:43,07 pada 2023 akibat pertumbuhan jumlah kendaraan yang lebih cepat. Dalam konteks daya saing, peningkatan panjang jalan sebesar 17,8% berpotensi meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik Kota Jayapura. Jika diasumsikan peningkatan efisiensi transportasi sebesar 5% akibat penambahan jalan ini, maka potensi penghematan biaya logistik bisa mencapai miliaran rupiah per tahun, meningkatkan daya saing ekonomi kota.

Namun, pertumbuhan jumlah kendaraan yang lebih cepat (21,9% selama lima tahun) dibandingkan penambahan panjang jalan (17,8%) menimbulkan tantangan serius. Jika tren ini berlanjut, dalam 5 tahun ke depan, rasio panjang jalan per kendaraan bisa memburuk hingga 1:50, yang berpotensi meningkatkan kemacetan dan menurunkan efisiensi transportasi sebesar 10-15%. Untuk mengatasi hal ini, investasi dalam transportasi publik menjadi krusial. Misalnya, pengembangan sistem Bus Rapid Transit (BRT) dengan investasi Rp 500 miliar bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi hingga 15-20%, potensial memperbaiki rasio menjadi 1:35 dalam jangka menengah.

Selain itu, implementasi bisa juga dilakukan kebijakan manajemen permintaan transportasi, seperti *electronic road pricing* atau pembatasan kendaraan berdasarkan nomor plat, untuk mengurangi pertumbuhan jumlah kendaraan hingga 5-7% per tahun. Ini bisa menghemat biaya pembangunan jalan sebesar Rp 100-150 miliar per tahun, yang dapat dialihkan untuk pengembangan infrastruktur lain yang mendukung daya saing kota. Pengembangan infrastruktur pintar (smart infrastructure) dengan investasi Rp 200 miliar dalam sistem manajemen

lalu lintas cerdas bisa meningkatkan efisiensi penggunaan jalan yang ada sebesar 20-25%, secara efektif memperbaiki rasio aksesibilitas dan mobilitas tanpa perlu menambah panjang jalan secara fisik.

Dengan kombinasi strategi ini, Kota Jayapura berpotensi meningkatkan rasio aksesibilitas dan mobilitasnya menjadi 1:30 dalam 5-10 tahun ke depan, signifikan meningkatkan daya saing kota dalam hal efisiensi transportasi dan kualitas hidup penduduk. Implementasi strategi komprehensif ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi transportasi, tetapi juga berpotensi menarik investasi baru, meningkatkan produktivitas ekonomi, dan memperbaiki kualitas udara kota, yang secara keseluruhan akan meningkatkan daya saing Kota Jayapura sebagai destinasi investasi dan tempat tinggal yang menarik.

D. Stabilitas Ekonomi Makro

1. Inflasi

Identifikasi masalah dari data inflasi Kota Jayapura tahun 2019-2023 mengungkapkan beberapa permasalahan serius yang perlu diperhatikan.

Pertama; fluktuasi tingkat inflasi yang signifikan selama periode tersebut menunjukkan ketidakstabilan harga yang mempengaruhi daya beli masyarakat dan perencanaan ekonomi jangka panjang. Pergerakan dari inflasi yang rendah (0,60% pada 2019) ke lonjakan tajam (5,81% pada 2022) dan kemudian penurunan drastis (1,65% pada 2023) mencerminkan volatilitas ekonomi yang perlu diwaspadai. Ketidakstabilan ini menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan konsumen, serta mempersulit perencanaan keuangan baik di tingkat rumah tangga maupun perusahaan.

Kedua; lonjakan inflasi yang signifikan pada tahun 2022 (5,81%) menunjukkan kerentanan ekonomi Kota Jayapura terhadap guncangan eksternal. Kenaikan tajam ini disebabkan oleh kombinasi faktor seperti pemulihan ekonomi pasca-pandemi, gangguan rantai pasokan global, dan kenaikan harga energi dan komoditas, mengindikasikan ketergantungan

ekonomi kota pada faktor-faktor yang berada di luar kendali langsung pemerintah daerah. Situasi ini menekankan pentingnya strategi diversifikasi ekonomi dan peningkatan ketahanan terhadap guncangan eksternal.

Ketiga; meskipun terjadi normalisasi inflasi pada tahun 2023 (1,65%), penurunan drastis dari tahun sebelumnya menimbulkan permasalahan tentang stabilitas harga jangka panjang. Perubahan yang cepat dalam tingkat inflasi menciptakan tantangan bagi kebijakan moneter dan fiskal, serta mempengaruhi ekspektasi inflasi masyarakat. Hal ini berdampak pada keputusan konsumsi dan investasi, yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Keempat; pola inflasi yang berfluktuasi juga mencerminkan adanya ketidakseimbangan struktural dalam ekonomi Kota Jayapura. Inflasi yang rendah pada tahun 2019-2020 menunjukkan permintaan yang lemah atau kelebihan kapasitas dalam ekonomi, sementara lonjakan pada 2022 mengindikasikan bottleneck dalam rantai pasokan atau ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran di sektor-sektor tertentu. Identifikasi dan penanganan ketidakseimbangan ini penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kelima; meskipun data menunjukkan kemampuan ekonomi Kota Jayapura untuk kembali ke tingkat inflasi yang lebih normal setelah guncangan, kecepatan dan efektivitas respons kebijakan terhadap fluktuasi inflasi perlu dievaluasi. Kemampuan untuk mengelola inflasi dengan efektif dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global dan lokal menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Jayapura di masa depan. Pengelolaan inflasi yang tepat akan mempengaruhi tidak hanya stabilitas harga, tetapi juga kepercayaan investor, daya saing ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

2.3.1.4. Permasalahan Aspek Pelayanan Umum

A. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

1. Belum Optimalnya Nilai AKIP Kota Jayapura

Nilai AKIP Kota Jayapura sejatinya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun demikian capaian pada tahun 2024 yang sebesar 61,31 masih dirasa belum optimal, sehingga pemerintah Kota Jayapura dapat meningkatkan nilai AKIP dimaksud.

2. Belum optimalnya pengembangan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Berdasarkan analisis SPBE Kota Jayapura tahun 2024 diidentifikasi beberapa masalah utama:

Pertama; Tata Kelola SPBE yang Lemah: Meskipun Kota Jayapura telah memiliki beberapa kebijakan internal terkait SPBE, implementasi tata kelola masih lemah. Hal ini tercermin dari nilai Domain Tata Kelola SPBE yang rendah (1,40) dan masuk kategori "Kurang". Kota Jayapura belum memiliki Tim Koordinasi SPBE dan perencanaan strategis yang komprehensif untuk Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Rencana dan Anggaran, serta Proses Bisnis SPBE.

Kedua; Kelemahan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi: Domain Teknologi Informasi dan Komunikasi mendapat nilai terendah (1,25), menunjukkan tidak adanya pemenuhan aspek TIK yang memadai. Kota Jayapura belum memiliki kematangan dalam pembangunan aplikasi SPBE, layanan pusat data, layanan jaringan intra instansi, dan penggunaan sistem penghubung layanan.

Ketiga; Manajemen SPBE yang Belum Optimal: Domain Manajemen SPBE juga mendapat nilai terendah (1,00), mengindikasikan tidak adanya pemenuhan aspek manajemen SPBE. Kota Jayapura belum memiliki manajemen risiko, keamanan informasi, data, aset TIK, SDM, pengetahuan, perubahan, dan layanan SPBE yang memadai.

Keempat; Ketiadaan Audit TIK: Tidak ada pemenuhan aspek Audit TIK, yang mencakup audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE. Ini menunjukkan kurangnya evaluasi dan pengawasan terhadap implementasi SPBE.

Kelima; Layanan Publik Berbasis Elektronik yang Belum Optimal: Meskipun Domain Layanan SPBE menunjukkan performa terbaik (3,17), masih ada kelemahan dalam beberapa layanan publik. Kota Jayapura belum menggunakan SP4N LAPOR untuk pengaduan pelayanan publik dan belum memiliki layanan informasi terbuka yang komprehensif untuk penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu.

Permasalahan-permasalahan ini menjelaskan mengapa nilai indeks SPBE Kota Jayapura secara keseluruhan hanya mencapai 2,35 (kategori "Cukup"). Untuk meningkatkan implementasi SPBE, Kota Jayapura perlu fokus pada penguatan tata kelola, pengembangan infrastruktur TIK, peningkatan manajemen SPBE, implementasi audit TIK, dan optimalisasi layanan publik berbasis elektronik. Langkah-langkah ini penting untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan kualitas layanan publik di era digital.

B. Permasalahan Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Secara rinci mengenai permasalahan di masing-masing sektor, disajikan sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan

Identifikasi permasalahan untuk urusan Pendidikan di Kota Jayapura, mempertimbangkan kompleksitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat kota, dengan memperhatikan keseimbangan antara standar nasional dan kebutuhan spesifik daerah. Analisis identifkasi masalah akan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah pertama dan menengah atas. Melalui identifikasi permasalahan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif tentang tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat kota, yang pada gilirannya dapat

menjadi dasar untuk pengembangan solusi dan strategi perbaikan yang efektif.

a. Cenderung Menurunnya Angka Partisipasi Kasar Untuk Jenjang SMP/MTs/ Sederajat dan SMA/SMK/MA/Sederajat

Angka Partisipasi Kasar Untuk Jenjang SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 97,03. Begitu pula dengan jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat, dimana pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 112,87.

b. Cenderung Menurunnya Angka Partisipasi Murni Untuk Semua Jenjang Pendidikan.

Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SD/MI/Sederajat pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai 96,85. Selain itu, terjadi penurunan Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SMP/MTs/ Sederajat dan SMA/SMK/MA/Sederajat sejak tahun 2020 sampai 2023.

c. Belum Optimalnya Kualitas Layanan Pendidikan SD/MI

Kota Jayapura, sebagai pusat administratif dan ekonomi Provinsi Papua, menghadapi tantangan kompleks dalam menyediakan pendidikan dasar berkualitas bagi warganya. Periode 2019-2023 sebagaimana dipaparkan di Bab II, menunjukkan dinamika yang menarik dalam perkembangan infrastruktur pendidikan, jumlah murid, dan tenaga pengajar. Meskipun terdapat upaya peningkatan, data mengungkapkan beberapa permasalahan mendasar yang perlu ditangani untuk memastikan pemerataan akses dan kualitas pendidikan

di seluruh distrik kota. Berikut adalah identifikasi permasalahan utama berdasarkan analisis data tersebut:

Pertama; Ketidakseimbangan Distribusi Infrastruktur, dimana meskipun terjadi peningkatan total gedung sekolah dari 86 ke 96 unit, distribusinya tidak merata. Abepura memiliki 27 gedung, sementara Muara Tami hanya 10. Hal ini dapat mengakibatkan ketimpangan akses pendidikan antar distrik.

Kedua; Stagnasi Pembangunan Infrastruktur: Jumlah gedung sekolah tetap 96 unit dari 2021 hingga 2023, menunjukkan potensi ketidakmampuan untuk mengakomodasi pertumbuhan populasi usia sekolah, terutama di distrik dengan peningkatan jumlah murid seperti Muara Tami.

Ketiga; Penurunan Jumlah Murid, terjadi penurunan total murid dari 31.026 pada 2019 menjadi 30.339 pada 2023 (2,2%) menimbulkan kekhawatiran tentang faktor-faktor yang menyebabkan penurunan ini, seperti migrasi atau penurunan minat terhadap pendidikan formal.

Keempat; Disparitas Pertumbuhan Murid Antar Distrik, Peningkatan signifikan jumlah murid di Muara Tami (21,3%) kontras dengan penurunan di distrik lain, terutama Jayapura Utara (9,3%) dan Heram (9,1%), menunjukkan pergeseran demografis yang memerlukan penyesuaian alokasi sumber daya.

Kelima; Ketidaksesuaian Antara Jumlah Guru dan Murid, meskipun jumlah guru meningkat 8,9% (dari 1.520 ke 1.655), jumlah murid menurun 2,2%. Ini menimbulkan permasalahan tentang efisiensi alokasi sumber daya manusia dan potensi kelebihan kapasitas di beberapa distrik.

Keenam; Fluktuasi Jumlah Guru di Beberapa Distrik Heram dan Jayapura Utara mengalami fluktuasi jumlah guru, menunjukkan potensi ketidakstabilan dalam pengelolaan sumber daya manusia pendidikan.

Ketujuh; Rasio Guru-Murid yang Tidak Optimal, dengan peningkatan jumlah guru dan penurunan jumlah murid, rasio guru-murid menurun dari 1:20,4 pada 2019 menjadi 1:18,3 pada 2023.

Meskipun ini bisa meningkatkan kualitas pengajaran, juga bisa mengindikasikan inefisiensi dalam alokasi sumber daya.

Kedelapan; Potensi *Under Utilization* Infrastruktur, penurunan jumlah murid di beberapa distrik, seperti Jayapura Utara dan Heram, sementara jumlah gedung sekolah tetap, menunjukkan potensi pemanfaatan infrastruktur yang tidak optimal.

Kesembilan; Ketidakjelasan Strategi Adaptasi Terhadap Perubahan Demografis, tidak ada indikasi jelas tentang strategi pemerintah dalam menghadapi pergeseran demografis, seperti peningkatan murid di Muara Tami dan penurunan di distrik lain.

Untuk mengatasi segala betuk permasalahan diatas Kota Jayapura perlu mengembangkan strategi komprehensif yang mencakup redistribusi sumber daya pendidikan sesuai kebutuhan demografis, peningkatan kualitas pendidikan melalui pelatihan guru dan pengembangan kurikulum, serta evaluasi dan penyesuaian kebijakan pendidikan berdasarkan data kinerja dan kebutuhan masyarakat. Diperlukan juga analisis mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah murid di beberapa distrik untuk mengembangkan strategi mitigasi yang efektif. Tanpa pendekatan yang holistik dan responsif terhadap perubahan demografis, Kota Jayapura berisiko menghadapi in-efisiensi dalam sistem pendidikan dan penurunan kualitas pendidikan dasar di beberapa wilayah.

d. Belum Optimalnya Kualitas Layanan Pendidikan SMP/MTs

Analisis data layanan pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) di Kota Jayapura periode 2019-2023 mengungkapkan beberapa dinamika penting dalam penyediaan dan pengelolaan pendidikan menengah pertama. Sebagai Kota Jayapura yang berperan strategis pada bidang pendidikan di Provinsi Papua, Jayapura menghadapi tantangan unik dalam menyeimbangkan kebutuhan pendidikan dengan perkembangan demografis dan sosial-ekonomi yang beragam di tiap distriknya. Data yang disajikan mencakup jumlah

gedung sekolah, jumlah murid, dan jumlah guru SMP, memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi pendidikan menengah pertama di Kota Jayapura. Berikut adalah identifikasi permasalahan utama berdasarkan analisis data tersebut:

Pertama; Stagnasi Infrastruktur Pendidikan: Jumlah gedung SMP hanya meningkat dari 37 ke 38 unit antara 2019-2020, dan tetap stabil hingga 2023. Ini menunjukkan potensi keterbatasan dalam mengakomodasi pertumbuhan populasi usia sekolah, terutama di distrik dengan peningkatan jumlah murid seperti Muara Tami.

Kedua; Ketidakseimbangan Distribusi Gedung Sekolah: Variasi jumlah gedung SMP antar distrik (3 unit di Muara Tami sedangkan 10 unit di Jayapura Utara) menimbulkan permasalahan pemerataan akses pendidikan.

Ketiga; Fluktuasi Jumlah Murid: Penurunan total murid dari 14.341 pada 2019 menjadi 13.934 pada 2023 (2,8%) menimbulkan kekhawatiran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi sekolah.

Keempat; Disparitas Pertumbuhan Murid Antar Distrik, peningkatan signifikan jumlah murid di Muara Tami (14,3%) kontras dengan fluktuasi di distrik lain, menunjukkan pergeseran demografis yang memerlukan penyesuaian alokasi sumber daya.

Kelima; Ketidaksesuaian Antara Pertumbuhan Guru dan Murid, peningkatan jumlah guru sebesar 6,3% (dari 804 ke 855) tidak sejalan dengan penurunan jumlah murid, menimbulkan persoalan tentang efisiensi alokasi sumber daya manusia.

Keenam; Variasi Signifikan dalam Pertumbuhan Jumlah Guru Antar Distrik: Peningkatan drastis jumlah guru di Muara Tami (88,9%) kontras dengan penurunan di Abepura (1,6%), menunjukkan potensi ketidakseimbangan dalam distribusi tenaga pengajar.

Ketujuh; Fluktuasi Jumlah Murid di Beberapa Distrik: Jayapura Selatan mengalami fluktuasi signifikan dalam jumlah murid,

menunjukkan ketidakstabilan yang dapat mempengaruhi kualitas dan kontinuitas pendidikan.

Kedelapan; Potensi Underutilization Infrastruktur: Penurunan jumlah murid di beberapa distrik, sementara jumlah gedung sekolah tetap, menunjukkan potensi pemanfaatan infrastruktur yang tidak optimal.

Kesembilan; Kurangnya Data Kualitas Pendidikan: Absennya informasi tentang kualitas pendidikan membatasi kemampuan untuk menilai efektivitas peningkatan jumlah guru terhadap hasil belajar siswa.

Kesepuluh; Ketidakjelasan Strategi Adaptasi Terhadap Perubahan Demografis, Tidak ada indikasi jelas tentang strategi pemerintah dalam menghadapi pergeseran demografis, seperti peningkatan murid dan guru di Muara Tami dan fluktuasi di distrik lain.

Untuk mengatasi permasalahan diatas, Kota Jayapura perlu mengembangkan strategi komprehensif yang mencakup pemerataan akses pendidikan, optimalisasi penggunaan infrastruktur, peningkatan kualitas pengajaran, serta evaluasi dan penyesuaian kebijakan pendidikan berdasarkan data kinerja dan kebutuhan masyarakat. Diperlukan juga analisis mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi jumlah murid dan distribusi guru untuk mengembangkan strategi yang efektif dan responsif terhadap dinamika demografis kota.

e. Belum Optimalnya Kualitas Layanan Pendidikan SMA/SMK/MA

Analisis mendalam terhadap data penyediaan layanan pendidikan SMA selama periode 2019-2023 pada pembahsan di Bab II, mengungkap berbagai dinamika dan ketidakseimbangan dalam sistem pendidikan menengah atas di kota ini. Perkembangan jumlah gedung sekolah, fluktuasi populasi siswa, dan perubahan dalam jumlah tenaga pengajar di berbagai distrik mencerminkan adanya pergeseran demografis dan sosial-ekonomi yang signifikan. Identifikasi

permasalahan berikut ini menyoroti area-area kritis yang memerlukan perhatian dan intervensi strategis dari pemangku kepentingan pendidikan di Kota Jayapura, yaitu:

Pertama; Ketidakstabilan Jumlah Gedung Sekolah: Jumlah gedung SMA di Kota Jayapura mengalami fluktuasi, dari 25 unit pada 2019-2021, meningkat menjadi 27 pada 2022, lalu turun menjadi 26 pada 2023. Ini menunjukkan ketidakstabilan dalam penyediaan infrastruktur pendidikan dan potensi ketidaksesuaian dengan kebutuhan aktual.

Kedua; Kesenjangan Distribusi Gedung Sekolah: Terdapat kesenjangan signifikan dalam distribusi gedung SMA antar distrik, dengan Muara Tami hanya memiliki 1 gedung, sementara Heram memiliki 8 gedung. Hal ini mengindikasikan ketidakmerataan akses pendidikan menengah atas.

Ketiga; *Trend* Penurunan Jumlah Murid: Terjadi penurunan total murid SMA dari 9.976 pada 2019 menjadi 9.424 pada 2023 (5,5%), menimbulkan kekhawatiran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi sekolah menengah atas.

Keempat; Ketimpangan Pertumbuhan Murid Antar Distrik: Peningkatan jumlah murid di Muara Tami (18,7%) kontras dengan penurunan di distrik lain, terutama Heram (8,4%) dan Jayapura Selatan (9%), menunjukkan pergeseran demografis yang memerlukan penyesuaian alokasi sumber daya.

Kelima; Ketidakselarasan Antara Jumlah Guru dan Murid: Meskipun jumlah murid menurun 5,5%, jumlah guru meningkat 3,6% (dari 631 ke 654), menimbulkan permasalahan efisiensi alokasi sumber daya manusia dan potensi kelebihan kapasitas di beberapa distrik.

Keenam; Ketidakstabilan Jumlah Guru di Beberapa Distrik: Jayapura Selatan mengalami fluktuasi besar dalam jumlah guru, dari 174 pada 2019 menjadi 153 pada 2023, dengan penurunan drastis ke 147 pada 2021. Ini menunjukkan ketidakstabilan dalam pengelolaan tenaga pengajar.

Ketujuh; Indikasi *Under Utilization* Infrastruktur: Penurunan jumlah murid di beberapa distrik, sementara jumlah gedung sekolah cenderung stabil atau meningkat, menunjukkan potensi pemanfaatan infrastruktur yang tidak optimal.

Kedelapan; Keterbatasan Data Kualitas Pendidikan: Absennya informasi tentang kualitas pendidikan, seperti hasil ujian atau tingkat kelulusan, membatasi kemampuan untuk menilai efektivitas layanan pendidikan SMA/SMK/MA.

Kesembilan; Ketidakjelasan Strategi Adaptasi Demografis: Tidak ada indikasi jelas tentang strategi pemerintah dalam menghadapi pergeseran demografis, seperti peningkatan murid di Muara Tami dan penurunan di distrik lain.

Kesepuluh; Potensi Ketidaksesuaian Kurikulum dengan Kebutuhan Pasar Kerja: Tanpa data tentang relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja lokal, ada risiko ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan SMA/SMK/MA dengan kebutuhan ekonomi Kota Jayapura.

Menghadapi kompleksitas permasalahan ini, Kota Jayapura dituntut untuk merancang dan mengimplementasikan pendekatan holistik dalam pengelolaan pendidikan menengah atas. Strategi yang dikembangkan harus mampu menjembatani kesenjangan akses, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, dan memastikan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah kota, institusi pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang adaptif dan berdaya saing.

2. Urusan Kesehatan

a. Angka Morbiditas

Analisis terhadap Angka Morbiditas dapat memberikan wawasan tentang permasalahan status kesehatan penduduk dan efektivitas sistem pelayanan kesehatan di Kota Jayapura. Dengan angka morbiditas total sebesar 7,28% pada tahun 2024, Kota Jayapura mengindikasikan

bahwa masih ada proporsi signifikan penduduk yang mengalami masalah kesehatan. Hal ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk peningkatan layanan kesehatan preventif dan kuratif. Disparitas gender dalam angka morbiditas, dengan laki-laki (6,96%) lebih rendah dibandingkan perempuan (7,63%), menggarisbawahi perlunya pendekatan yang responsif gender dalam penanganan kesehatan masyarakat.

Perbedaan angka morbiditas antara laki-laki dan perempuan ini juga mengindikasikan adanya faktor risiko spesifik yang perlu diidentifikasi dan ditangani, seperti pola hidup, jenis pekerjaan, atau perilaku kesehatan yang berbeda antara kedua kelompok. Namun, keterbatasan data spesifik tentang jenis penyakit atau gangguan kesehatan yang dominan membatasi kemampuan untuk merancang intervensi yang tepat sasaran. Selain itu, potensi *under reporting* dan ketidakjelasan distribusi geografis morbiditas di berbagai wilayah Kota Jayapura menambah kompleksitas dalam memahami dan menangani masalah kesehatan secara komprehensif.

Angka morbiditas yang cukup tinggi ini berpotensi mempengaruhi produktivitas ekonomi kota dan memberikan beban yang signifikan pada sistem kesehatan. Namun, tanpa data spesifik tentang dampak ekonomi dan kapasitas sistem kesehatan dalam menangani beban tersebut, sulit untuk mengukur sejauh mana pengaruhnya terhadap perkembangan kota secara keseluruhan. Permasalahan juga muncul mengenai efektivitas program kesehatan preventif yang ada, mengingat tingginya angka morbiditas. Sayangnya, informasi tentang jenis dan cakupan program kesehatan preventif yang telah diimplementasikan tidak tersedia, membatasi evaluasi dan perbaikan program-program tersebut.

Untuk mengatasi kompleksitas permasalahan kesehatan ini, Kota Jayapura perlu mengembangkan strategi komprehensif yang melibatkan berbagai sektor. Pendekatan yang diambil harus mencakup penguatan sistem surveilans kesehatan untuk mendapatkan data yang

lebih akurat dan terperinci. Peningkatan program kesehatan preventif yang responsif gender juga diperlukan, dengan intervensi yang ditargetkan pada faktor-faktor risiko spesifik yang telah diidentifikasi.

b. Layanan Kesehatan

Evaluasi terhadap distribusi fasilitas kesehatan di Kota Jayapura pada tahun 2023 menggambarkan suatu lanskap infrastruktur pelayanan kesehatan yang beragam dan tersebar di seluruh distrik. Dengan total 252 fasilitas kesehatan yang tercatat, Kota Jayapura menunjukkan upaya signifikan dalam menyediakan akses layanan kesehatan bagi penduduknya. Namun, di balik angka total yang cukup impresif ini, terdapat pola distribusi yang tidak merata antar distrik, yang mencerminkan tantangan dalam pemerataan akses layanan kesehatan di seluruh wilayah Kota Jayapura.

Analisis per distrik mengungkapkan disparitas yang cukup mencolok. Abepura, dengan 68 fasilitas kesehatan, termasuk 2 rumah sakit umum dan 1 rumah sakit khusus, memimpin dalam hal ketersediaan layanan kesehatan. Keberadaan rumah sakit khusus di distrik ini mengindikasikan konsentrasi layanan kesehatan spesialis di area tersebut. Di sisi lain, Muara Tami, dengan hanya 29 fasilitas, menunjukkan keterbatasan dalam variasi dan jumlah layanan kesehatan yang tersedia. Meskipun demikian, keberadaan Puskesmas Rawat Inap di Muara Tami menunjukkan upaya untuk menyediakan layanan kesehatan yang lebih komprehensif di wilayah yang lebih terpencil.

Posyandu mendominasi jenis fasilitas kesehatan di seluruh distrik, dengan total 212 unit, menekankan pentingnya layanan kesehatan berbasis masyarakat, terutama untuk ibu dan anak. Keberadaan 14 Puskesmas yang tersebar merata di semua distrik menunjukkan upaya untuk menjamin akses dasar ke layanan kesehatan primer. Namun, distribusi rumah sakit umum dan klinik pratama yang tidak merata, dengan konsentrasi di Jayapura Utara dan Abepura,

mengindikasikan adanya ketimpangan dalam akses ke layanan kesehatan yang lebih kompleks dan spesialistik.

Pola distribusi ini mencerminkan strategi penyediaan layanan kesehatan yang berupaya menyeimbangkan antara konsentrasi fasilitas kesehatan kompleks di pusat-pusat urban dengan penyebaran layanan dasar di seluruh wilayah. Namun, ketimpangan dalam distribusi fasilitas tertentu menunjukkan adanya tantangan dalam menjamin akses yang setara ke layanan kesehatan spesialis bagi penduduk di semua distrik. Hal ini dapat berdampak pada kualitas dan kecepatan penanganan kasus-kasus kesehatan yang memerlukan perawatan lanjutan atau spesialistik di distrik-distrik yang kurang terlayani.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Kota Jayapura perlu mempertimbangkan strategi yang lebih komprehensif dalam pengembangan infrastruktur kesehatan. Penguatan fasilitas di distrik-distrik yang kurang terlayani, terutama dalam hal layanan kesehatan sekunder dan tersier, menjadi prioritas. Optimalisasi jaringan Posyandu dan Puskesmas yang sudah ada dapat menjadi kunci dalam meningkatkan cakupan layanan kesehatan dasar dan preventif di seluruh kota. Selain itu, pengembangan sistem rujukan yang efektif dan efisien antar fasilitas kesehatan dapat membantu mengatasi ketimpangan akses ke layanan spesialistik.

c. Sumber Daya Kesehatan

Analisis data Jumlah Dokter dan Rasio Dokter Per Penduduk Kota Jayapura periode 2019-2023 mengungkapkan perkembangan yang signifikan dalam penyediaan tenaga medis, namun juga menunjukkan adanya ketimpangan dan tantangan yang masih dihadapi. Secara keseluruhan, Kota Jayapura berhasil meningkatkan jumlah dokter dari 36 pada tahun 2019 menjadi 73 pada tahun 2023, menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperkuat sumber daya kesehatan. Peningkatan lebih dari dua kali lipat ini mencerminkan upaya serius

pemerintah kota dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.

Meskipun demikian, analisis lebih mendalam per distrik mengungkapkan disparitas yang cukup mencolok. Distrik Muara Tami, misalnya, mengalami peningkatan dramatis dari 5 dokter pada 2019 menjadi 21 dokter sejak 2020, dengan rasio tertinggi mencapai 3,9 pada 2020-2021. Namun, penurunan rasio menjadi 2,7 pada 2023 menunjukkan adanya dinamika populasi atau redistribusi sumber daya yang perlu dikaji lebih lanjut. Di sisi lain, distrik-distrik lain seperti Heram, Abepura, Jayapura Utara, dan Jayapura Selatan, meskipun mengalami peningkatan jumlah dokter, masih memiliki rasio yang relatif rendah berkisar antara 0,3 hingga 0,5.

Ketimpangan dalam distribusi dokter antar distrik ini menimbulkan permasalahan tentang pemerataan akses layanan kesehatan di Kota Jayapura. Sementara Muara Tami memiliki rasio dokter per penduduk yang jauh lebih tinggi, distrik-distrik lain masih berjuang untuk meningkatkan rasio mereka. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam alokasi sumber daya manusia kesehatan yang merata dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing distrik.

Perkembangan yang tidak merata ini juga mencerminkan kompleksitas dalam perencanaan dan manajemen sumber daya kesehatan di tingkat kota. Faktor-faktor seperti demografi, geografi, dan infrastruktur pendukung sangat mempengaruhi distribusi tenaga medis. Misalnya, konsentrasi fasilitas kesehatan tertentu di distrik-distrik tertentu dapat menarik lebih banyak dokter, sementara daerah yang lebih terpencil atau kurang berkembang mengalami kesulitan dalam menarik dan mempertahankan tenaga medis.

Meskipun terjadi peningkatan jumlah dokter yang signifikan, fakta bahwa rasio dokter per penduduk di sebagian besar distrik masih relatif rendah menunjukkan bahwa Kota Jayapura masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai standar pelayanan kesehatan yang optimal. Situasi ini menekankan perlunya strategi yang lebih

komprehensif dan terarah dalam pengembangan sumber daya kesehatan. Upaya tidak hanya perlu difokuskan pada peningkatan jumlah dokter secara keseluruhan, tetapi juga pada distribusi yang lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing distrik.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Analisis perkembangan status dan kondisi jalan di Kota Jayapura periode 2019-2023 mengungkapkan transformasi signifikan dalam infrastruktur transportasi kota ini. Data menunjukkan perubahan substansial dalam pengelolaan dan pengembangan jaringan jalan, mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Jayapura.

Tahun 2022 menjadi titik balik penting dengan dimasukkannya kategori jalan nasional dan provinsi ke dalam data, serta peningkatan total panjang jalan dari 508.494 meter menjadi 598.960 meter. Penambahan ini tidak hanya menunjukkan ekspansi fisik jaringan jalan, tetapi juga mengindikasikan pengakuan terhadap peran strategis Jayapura dalam konteks regional yang lebih luas. Perubahan klasifikasi ini mencerminkan pendekatan yang lebih terintegrasi dalam perencanaan infrastruktur, menyelaraskan pembangunan kota dengan prioritas nasional dan provinsi.

Perbaikan kondisi jalan menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Peningkatan lebih dari dua kali lipat dalam panjang jalan berkondisi baik, dari 111.875 meter menjadi 268.869 meter pada 2023, menggambarkan investasi substansial dalam pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan. Secara bersamaan, penurunan drastis pada jalan rusak sedang dan ringan menunjukkan efektivitas program perbaikan jalan. Namun, sedikit peningkatan dalam kategori jalan rusak berat mengingatkan bahwa masih ada tantangan yang perlu diatasi, terkait dengan faktor geografis atau beban lalu lintas yang meningkat.

Pergeseran dalam komposisi permukaan jalan juga menarik untuk dicermati. Penurunan jalan beraspal diimbangi dengan

peningkatan signifikan jalan berkerikil dan *rigid* (beton). Perubahan ini mencerminkan adaptasi terhadap kondisi geografis dan iklim Kota Jayapura, serta pertimbangan terhadap daya tahan dan efisiensi pemeliharaan jangka panjang. Munculnya kategori jalan tanah, meskipun dalam jumlah kecil, menambah kompleksitas dalam pengelolaan infrastruktur jalan dan mengindikasikan ekspansi ke area-area baru yang sedang berkembang.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan dinamika positif dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kota Jayapura. Terlihat adanya upaya konsisten dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan, yang mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menangani jalan rusak berat dan mengoptimalkan jenis permukaan jalan sesuai kebutuhan lokal. Perkembangan ini memberikan indikasi positif bagi masa depan Kota Jayapura, dengan potensi untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing kota melalui konektivitas yang lebih baik.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu masih rendahnya Luasan Kawasan Kumuh tertangani, dimana pada tahun 2024 hanya sebesar 18,69 ha.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Beberapa permasalahan pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, antara lain:

b. Belum optimalnya Persentase Penegakkan Perda, dimana pada tahun 2023 hanya mencapai 79 persen.
c. Belum optimalnya Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan WMK.

6. Tenaga Kerja

Analisis data ketenagakerjaan Kota Jayapura periode 2020-2024 mengungkapkan serangkaian tantangan yang memerlukan perhatian serius dari pemangku kebijakan. Meskipun terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah angkatan kerja dari 149.804 orang pada 2020 menjadi 204.700 orang pada 2024, pasar tenaga kerja menunjukkan ketidakstabilan yang mengkhawatirkan. Hal ini tercermin dari fluktuasi jumlah pengangguran terbuka yang mencapai 16.960 orang pada 2024, lebih tinggi dari tahun 2022 yang hanya 14.432 orang. Situasi ini mengindikasikan ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap pertumbuhan angkatan kerja yang pesat.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 78,29%. Hal ini justru menambah kompleksitas permasalahan, menunjukkan berkurangnya partisipasi ekonomi penduduk secara signifikan. Pertumbuhan jumlah bukan angkatan kerja dari 87.640 orang pada 2020 menjadi 97.190 orang pada 2024 juga menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor yang mendorong peningkatan populasi non-aktif secara ekonomi.

7. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Analisis data Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Jayapura periode 2019-2023 mengungkapkan perkembangan yang positif namun juga menunjukkan beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. IPG Kota Jayapura menunjukkan tren peningkatan secara umum, mencapai 94,74 poin pada tahun 2023. Meskipun terjadi sedikit penurunan sebesar 0,05 poin dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini tetap mengindikasikan keseimbangan yang semakin baik dalam kontribusi dan partisipasi perempuan di berbagai sektor. Namun, penurunan kecil ini perlu diwaspadai agar tidak menjadi tren yang berkelanjutan.

Di sisi lain, IDG Kota Jayapura menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan, mencapai 77,65 pada tahun 2023, naik 2,10 poin dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam pemberdayaan perempuan di bidang politik dan ekonomi. Namun, meskipun terjadi peningkatan, angka IDG yang masih di bawah 80 menunjukkan bahwa masih ada ruang yang cukup besar untuk perbaikan dalam hal representasi perempuan di parlemen, keterlibatan sebagai tenaga profesional, dan kontribusi dalam pendapatan kerja.

Perbandingan antara IPG dan IDG menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan. Sementara IPG mendekati nilai ideal 100, IDG masih jauh di bawahnya. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kesetaraan gender dalam aspek pembangunan manusia (seperti pendidikan dan kesehatan) sudah cukup baik, pemberdayaan perempuan dalam aspek politik dan ekonomi masih tertinggal. Tantangan utama yang teridentifikasi adalah:

Pertama; Mempertahankan dan meningkatkan IPG yang sudah tinggi.

Kedua; Mempercepat peningkatan IDG untuk mengejar ketertinggalan dalam pemberdayaan perempuan di bidang politik dan ekonomi.

Ketiga; Mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan antara IPG dan IDG.

Keempat; Memastikan bahwa peningkatan indeks-indeks ini tercermin dalam perbaikan kualitas hidup perempuan secara nyata di masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Ini meliputi peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan tinggi dan pelatihan profesional, implementasi kebijakan yang mendorong partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, serta program-program yang mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program-program yang

ada untuk memastikan bahwa peningkatan indeks-indeks ini benar-benar berdampak positif pada kehidupan perempuan di Kota Jayapura.

Berdasarkan data Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Jayapura tahun 2022 pada pemaparan Bab II, terlihat bahwa terdapat beberapa permasalahan yang perlu segera diatasi untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak di kota ini. Pada Klaster I yang mencakup hak sipil dan kebebasan anak-anak, skor yang rendah yakni 40,86 menunjukkan bahwa masih terdapat banyak anak yang belum sepenuhnya menikmati hak-hak dasar mereka. Hal ini bisa mencakup rendahnya akses terhadap identitas hukum seperti akta kelahiran atau kurangnya perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pada Klaster II yang berfokus pada lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, skor 62,74 menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat dukungan bagi keluarga dan sistem pengasuhan alternatif, memastikan setiap anak mendapatkan lingkungan yang aman dan mendukung.

Dalam Klaster III yang menilai kesehatan dan kesejahteraan dasar, skor 73,98 mengindikasikan bahwa meskipun sudah ada upaya signifikan dalam menjaga kesehatan anak-anak, masih ada ruang untuk perbaikan, khususnya dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Skor rendah pada Klaster IV, yakni 40,97, menunjukkan adanya masalah serius dalam akses pendidikan dan kegiatan yang mendukung perkembangan anak. Ini bisa mencakup kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai, rendahnya kualitas pendidikan, dan minimnya akses anak-anak terhadap kegiatan rekreasi dan budaya yang bermanfaat.

Skor tinggi pada Klaster V, yaitu 82,91, menunjukkan bahwa Kota Jayapura telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang berada dalam situasi rentan. Namun, keberhasilan ini harus diimbangi dengan peningkatan dalam klaster-klaster lainnya untuk memastikan perlindungan yang komprehensif bagi semua anak. Secara keseluruhan, IPA Kota Jayapura

tahun 2022 berada pada angka 60,91, yang menandakan adanya kebutuhan mendesak untuk perbaikan di berbagai sektor. Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA) yang berada di angka 54,63 menunjukkan bahwa masih banyak hak anak yang belum terpenuhi secara maksimal. Sementara itu, Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) dengan skor 84,58 menunjukkan bahwa perlindungan bagi anak-anak dalam kondisi khusus sudah lebih terfokus, namun keseimbangan perlindungan untuk semua anak masih perlu diperhatikan. Analisis ini mengindikasikan bahwa untuk mencapai perlindungan anak yang optimal, diperlukan upaya terpadu dan berkelanjutan dari berbagai pihak terkait, mulai dari pemerintah hingga masyarakat.

8. Lingkungan Hidup

Permasalahan pada urusan lingkungan hidup adalah masih belum optimalnya Persentase Penanganan Sampah, dimana pada tahun 2024 hanya mencapai 85,00 persen. Permasalahan utamanya meliputi tingginya jumlah sampah yang dihasilkan, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, dan keterbatasan infrastruktur serta sumber daya untuk pengelolaan sampah.

9. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Analisis data Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kota Jayapura periode 2019-2023 mengungkapkan beberapa perkembangan positif namun juga menunjukkan tantangan yang perlu diperhatikan. Jumlah IKM menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari 78 unit pada 2019 menjadi 110 unit pada 2023, mengindikasikan pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah yang positif. Kondisi sarana dan prasarana pasar dalam keadaan baik juga meningkat dari 5 pasar (2019-2021) menjadi 6 pasar (2022-2023), menunjukkan perbaikan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi.

Namun, persentase jumlah koperasi aktif mengalami fluktuasi yang mengkhawatirkan. Meskipun terjadi peningkatan dari 96 koperasi (2019) menjadi 108 koperasi (2021), terjadi penurunan signifikan menjadi 75 koperasi pada 2023. Penurunan drastis ini menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan dan kesehatan sektor koperasi di Kota Jayapura.

Di sisi lain, jumlah koperasi yang berkualitas menunjukkan perkembangan yang kontradiktif. Terjadi penurunan dari 46 koperasi (2021) menjadi 41 koperasi (2022), namun diikuti oleh lonjakan signifikan menjadi 127 koperasi berkualitas pada 2023. Peningkatan drastis ini, meskipun positif, perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan kualitas dan keberlanjutannya. Tantangan utama yang teridentifikasi adalah: *Pertama*; Penurunan jumlah koperasi aktif yang signifikan; *Kedua*; Fluktuasi jumlah koperasi berkualitas yang ekstrem; *Ketiga*; Kebutuhan untuk memastikan pertumbuhan IKM yang berkelanjutan; dan *Keempat*; Perlunya evaluasi terhadap efektivitas program peningkatan kualitas koperasi.

10. Penanaman Modal

Analisis data Penanaman Modal di Kota Jayapura periode 2019-2023 mengungkapkan dinamika investasi yang kompleks dan beberapa permasalahan signifikan, yaitu:

Pertama; Volatilitas Investasi Asing: Jumlah investor PMA berfluktuasi drastis, dari 9 (2019) ke puncak 39 (2022), lalu turun ke 13 (2023). Nilai investasi PMA juga menunjukkan ketidakstabilan, dengan lonjakan luar biasa ke Rp 1,14 Triliun pada 2022 dari Rp 65,7 Miliar tahun sebelumnya, namun turun ke Rp 313 miliar pada 2023. Fluktuasi ekstrem ini menunjukkan ketidakpastian dan potensi risiko dalam iklim investasi asing.

Kedua; Pertumbuhan Pesat Investasi Domestik: Jumlah investor PMDN meningkat signifikan dari 1.751 (2019) ke 14.315 (2022), meski sedikit menurun ke 12.898 (2023). Namun, nilai investasi PMDN berfluktuasi ekstrem, dari Rp 1,36 Triliun (2019) ke puncak Rp 13,08 Triliun (2020), lalu turun ke Rp 3,69 triliun (2023). Meskipun tren jumlah

investor positif, fluktuasi nilai investasi menimbulkan pertanyaan tentang stabilitas dan keberlanjutan proyek-proyek besar.

Ketiga; Kesenjangan antara PMA dan PMDN: Perbedaan signifikan antara jumlah dan nilai investasi PMA dan PMDN, dengan PMDN jauh mendominasi. Hal ini menunjukkan potensi ketergantungan berlebih pada investasi domestik dan kurangnya daya tarik bagi investor asing.

Keempat; Ketidakstabilan Nilai Investasi: Fluktuasi ekstrem dalam nilai investasi, baik PMA maupun PMDN, menunjukkan ketidakstabilan dalam skala dan jenis proyek yang diinvestasikan, yang dapat mempengaruhi perencanaan pembangunan jangka panjang.

Kelima; Potensi *Overheating* Ekonomi: Lonjakan investasi yang sangat tinggi pada tahun-tahun tertentu (seperti 2020 dan 2022 untuk PMDN) dapat menimbulkan risiko overheating ekonomi jika tidak dikelola dengan baik.

11. Kelautan dan Perikanan

Analisis data sektor Kelautan dan Perikanan Kota Jayapura periode 2019-2023 mengungkapkan beberapa tantangan dan peluang signifikan:

Pertama; Ketidakstabilan Jumlah Nelayan: Meskipun terjadi peningkatan total nelayan dari 2.340 (2019) menjadi 2.589 (2023), terdapat fluktuasi dan stagnasi pada 2022-2023. Ini menunjukkan potensi ketidakpastian dalam sektor ini dan mencerminkan tantangan dalam mempertahankan atau menarik tenaga kerja ke sektor perikanan.

Kedua; Penurunan Produksi Olahan Perikanan: Total produksi olahan menurun drastis dari 4.818,34 ton (2019) menjadi 2.385,15 ton (2023). Penurunan signifikan terutama pada ikan asar dan olahan tuna menunjukkan adanya tantangan serius dalam industri pengolahan ikan.

Ketiga; Fluktuasi Unit Pengolahan Ikan (UPI): Jumlah UPI mencapai puncak 72 unit pada 2020 namun menurun menjadi 61 unit pada 2023. Penurunan ini, terutama pada olahan tuna, mengindikasikan kesulitan dalam mempertahankan operasi pengolahan ikan.

Keempat; Ketidakseimbangan Produksi Budidaya: Meskipun total produksi budidaya meningkat, terdapat fluktuasi ekstrem antar jenis budidaya. Misalnya, produksi tambak melonjak dari 1.258,99 ton (2019) menjadi 8.394,75 ton (2023), sementara produksi kolam berfluktuasi signifikan.

Kelima; Pergeseran Pola Distribusi: Perubahan drastis dalam jumlah pengecer di berbagai lokasi, seperti penurunan 94,77% di Pasar Keliling dan peningkatan 1257,14% di Distrik Muara Tami, menunjukkan pergeseran signifikan dalam pola distribusi yang perlu diantisipasi.

Keenam; Peningkatan Armada Tangkap Tidak Seimbang: Pertumbuhan signifikan pada kapal motor < 5 GT (125,31% selama lima tahun) kontras dengan stagnasi atau penurunan jenis armada lainnya, menunjukkan potensi ketidakseimbangan dalam kapasitas penangkapan.

Ketujuh; Dominasi Alat Tangkap Tertentu: Pertumbuhan luar biasa pada Pancing Tonda (179,65% selama lima tahun) menunjukkan ketergantungan berlebih pada satu jenis alat tangkap, yang dapat berdampak pada keberlanjutan sumber daya ikan.

12. Pariwisata

Permasalahan pada urusan Pariwisata yaitu menurunnya Jumlah Wisatawan, baik mancanegara maupun domestik, Dimana untuk wisatatawan mancanegara pada tahun 2019 yaitu mencapai 60.594 orang dan pada tahun 2023 menurun drastis menjadi hanya 150 orang. Begitu pula dengan jumlah wisatawan domestik, dimana pada tahun 2019 jumlahnya mencapai 236.027 orang dan flutuasi serta cenderung menurun hingga tahun 2023 menjadi hanya 31.688.

13. Pertanian

Analisis data pertanian Kota Jayapura periode 2019-2024 mengungkapkan beberapa permasalahan seperti:

Pertama; Ketimpangan Produksi Antar Distrik: Produksi tanaman pangan terkonsentrasi di beberapa distrik, terutama Muara Tami dan

Abepura. Misalnya, padi sawah hanya diproduksi di Muara Tami, sementara ubi kayu didominasi oleh Abepura dan Muara Tami. Ini menunjukkan potensi pengembangan pertanian yang belum dimanfaatkan di distrik lain.

Kedua; Fluktuasi Ekstrem Produktivitas: Terjadi lonjakan produktivitas yang tidak wajar pada tahun 2022 untuk beberapa tanaman. Misalnya, padi sawah melonjak dari 5,2 ton/hektar menjadi 634 ton/hektar, dan jagung dari 7 ton/hektar menjadi 709 ton/hektar. Fluktuasi ekstrem ini menimbulkan permasalahan tentang akurasi data dan konsistensi metode pengukuran.

Ketiga; Penurunan Luas Panen Sayuran untuk jenis Kubis, dimana turun dari 73 hektar (2021) menjadi 62 hektar (2024). Hal ini menunjukkan tantangan dalam mempertahankan produksi sayuran.

Keempat; Pertumbuhan Dramatis Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan pada tahun 2024: Beberapa jenis buah menunjukkan peningkatan produksi yang luar biasa. Bayam meningkat menjadi 14.148 kuintal, Ketimun meningkat menjadi 1.922 kuintal, Melon meningkat menjadi 667 kuintal, Semangka meningkat menjadi 2.389 kuintal. Pertumbuhan ekstrem ini perlu dievaluasi untuk memastikan keberlanjutannya.

Kelima; Diversifikasi Tanaman Terbatas: Beberapa distrik menunjukkan ketergantungan pada jenis tanaman tertentu, menunjukkan kurangnya diversifikasi yang dapat meningkatkan risiko terhadap fluktuasi pasar atau perubahan iklim.

14. Peternakan

Analisis data peternakan Kota Jayapura periode 2019-2023 mengungkapkan beberapa tantangan dan peluang signifikan:

Pertama; Fluktuasi Populasi Ternak: Populasi sapi potong dan babi mengalami fluktuasi, dengan tren penurunan dari 2019 ke 2023 (sapi potong turun 10,4%, babi turun 19%). Ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan stabilitas populasi ternak besar.

Kedua; Pertumbuhan Dramatis Kambing: Populasi kambing meningkat 931,8% dari 2019 ke 2023, menunjukkan potensi besar untuk pengembangan peternakan kambing, disertai potensi fluktuatif harga permintaan jika tidak diseimbangkan dengan pasokan.

Ketiga; Penurunan Signifikan Ayam Buras: Populasi ayam buras turun 39,4% dari 2019 ke 2023, mengindikasikan tantangan dalam mempertahankan peternakan ayam tradisional.

Keempat; Pertumbuhan Pesat Ayam Ras Pedaging mengancam stabilitas permintaan peningkatan 336,1% dalam dua tahun (2021-2023) menunjukkan potensi besar dan permintaan tinggi untuk ayam pedaging. Potensi ini juga sekaligus merupakan ancaman, jika tejadi ketidakmampuan pemenuhan permintaan akan memicu kenaikan harga pasar, sehingga akan mengancam stabilitas permintaan.

Kelima; Inkonsistensi Data: Ketiadaan data untuk beberapa jenis ternak pada tahun-tahun tertentu (seperti ayam petelur dan pedaging sebelum 2021) menimbulkan kesulitan dalam analisis *trend* jangka panjang.

Keenam; Penurunan Produksi Daging Itik: Penurunan 29,3% dalam produksi daging itik menunjukkan tantangan spesifik untuk jenis unggas ini.

15. Perindustrian

Permasalahan pada urusan Perindustrian yaitu terjadi penurunan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB, dari yang semula 2,51 persen pada tahun 2020 menjadi 2,40 persen di tahun 2024.

2.3.1.5. Permasalahan Berdasarkan Distrik

Penyajian permasalahan Kota Jayapura selain disajikan berdasarkan sektor atau tema sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat disajikan juga berdasarkan wilayah. Penyajian permasalahan berdasartkan distrik di Kota Jayapura dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 2.139
Permasalahan Berdasarkan Distrik

No.	Distrik	Permasalahan
1.	Abepura	• Komposisi usia menunjukkan dominasi penduduk usia produktif (30–39 tahun), yang menandakan potensi tenaga kerja besar namun juga tantangan penciptaan lapangan kerja baru. • Ketimpangan distribusi penduduk antar-kelurahan menyebabkan beban pelayanan publik menumpuk di wilayah padat seperti Wai Mhorock dan Awiyo, sementara daerah seperti Engros dan Nafri masih tertinggal dalam akses infrastruktur dan layanan dasar. • Pertumbuhan penduduk yang tidak merata menimbulkan tantangan tata ruang, kemacetan, serta tekanan pada lahan permukiman dan fasilitas sosial.
		• Permasalahan utama: Rendahnya pemerataan mutu pendidikan dan keterbatasan akses ke pendidikan vokasi yang relevan dengan pasar kerja lokal. • Masih terdapat ketimpangan mutu antar sekolah, khususnya antara sekolah negeri dan swasta, serta keterbatasan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
		Kecamatan Abepura memiliki fasilitas kesehatan yang relatif memadai, termasuk rumah sakit umum, beberapa puskesmas, dan poliklinik. Namun: • Distribusi fasilitas belum merata, di mana wilayah pesisir (Engros, Nafri) masih kesulitan mengakses layanan medis permanen. • Isu stunting, gizi buruk, dan sanitasi lingkungan masih menjadi persoalan di beberapa kelurahan padat penduduk. • Selain itu, risiko banjir dan bencana alam masih cukup tinggi, khususnya di kawasan perbukitan dan pesisir, akibat drainase yang buruk dan pembangunan permukiman tidak teratur. Implikasinya, peningkatan pelayanan kesehatan preventif dan perbaikan infrastruktur sanitasi menjadi prioritas strategis.
		• Permasalahan utama: dominasi sektor informal, rendahnya daya saing usaha mikro, dan belum optimalnya potensi ekonomi lokal yang berbasis jasa dan perdagangan modern • Sebagian besar penduduk Abepura bekerja di sektor jasa dan perdagangan, dengan dukungan dari aktivitas pendidikan, transportasi, dan jasa publik. Wilayah Awiyo, Kota Baru, dan Asano menjadi pusat kegiatan ekonomi mikro dan perdagangan tradisional. • Namun, masih terjadi ketimpangan ekonomi antarwilayah, serta tingginya ketergantungan pada sektor informal yang belum produktif. • Kegiatan pertanian masih dilakukan di kawasan pinggiran seperti Nafri dan Koya Koso, dengan hasil

No.	Distrik	Permasalahan
		utama berupa sayuran dan buah musiman; namun kontribusinya terhadap PDRB relatif kecil karena keterbatasan akses pasar dan irigasi.
		• Abepura merupakan koridor penghubung utama Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, sehingga menghadapi beban lalu lintas tinggi dan kemacetan di kawasan padat seperti Awiyo dan Asano. • Meskipun sebagian besar jalan sudah beraspal, kondisi drainase dan pengelolaan sampah masih lemah, terutama di permukiman padat. • Fasilitas penerangan jalan dan bahan bakar rumah tangga masih bergantung pada sumber konvensional, belum seluruhnya ramah lingkungan.
		• Permasalahan utama: kapasitas birokrasi belum sebanding dengan dinamika pertumbuhan penduduk dan kompleksitas wilayah. • Keterbatasan pegawai dan sarana pelayanan administrasi, serta belum optimalnya penerapan sistem pemerintahan digital di tingkat kelurahan. • Wilayah ini juga menjadi pusat mobilitas sosial dan ekonomi, sehingga menuntut pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan berbasis teknologi informasi.
2.	Jayapura Utara	Kecamatan Jayapura Utara menghadapi tantangan utama berupa kepadatan penduduk tinggi, keterbatasan sarana pendidikan dan kesehatan, kesenjangan sosial ekonomi, serta tekanan terhadap lingkungan dan infrastruktur dasar. Isu-isu ini menuntut pendekatan pembangunan yang lebih inklusif, terutama dalam pemerataan layanan dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, serta penataan ruang berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan kebutuhan Orang Asli Papua (OAP).
		Kecamatan Jayapura Utara memiliki jumlah penduduk 93.994 jiwa (49.734 laki-laki dan 44.260 perempuan) dengan kepadatan rata-rata 115,73 jiwa per hektar, tertinggi di antara distrik lain di Kota Jayapura. Kepadatan tinggi di kelurahan seperti Mandala (120,76 jiwa/ha) dan Tanjung Ria (122,67 jiwa/ha) menimbulkan tekanan terhadap lahan, perumahan, dan infrastruktur dasar. Keterbatasan ruang menyebabkan munculnya kawasan permukiman padat dan tidak teratur di wilayah pesisir dan perbukitan.
		Tingkat ketersediaan sarana pendidikan masih belum seimbang dengan jumlah penduduk usia sekolah. Terdapat 14 TK, 24 SD, 10 SMP, 6 SMA, dan 5 SMK, dengan total guru sebanyak 950 orang dan murid sekitar 21.000 siswa. Meskipun jumlah sekolah meningkat dari tahun sebelumnya, rasio murid terhadap guru masih tinggi, terutama di jenjang SD (sekitar 21 siswa per guru), menunjukkan perlunya peningkatan tenaga pendidik dan pemerataan sarana pendidikan di tiap kelurahan.

No.	Distrik	Permasalahan
		Ketersediaan fasilitas kesehatan di Jayapura Utara masih terbatas. Hanya sebagian kelurahan yang memiliki puskesmas, posyandu, dan klinik swasta aktif. Permasalahan utama adalah keterbatasan tenaga medis, kesenjangan akses bagi masyarakat pesisir dan perbukitan, serta masih ditemukannya kasus gizi buruk dan stunting pada anak-anak. Selain itu, kepadatan penduduk meningkatkan risiko sanitasi buruk dan penyakit berbasis lingkungan.
		Struktur ekonomi masyarakat Jayapura Utara didominasi oleh sektor jasa, perdagangan kecil, dan transportasi. Meskipun sektor ini tumbuh, ketergantungan terhadap aktivitas ekonomi informal masih tinggi. Rendahnya partisipasi kerja produktif di kalangan usia muda, terutama perempuan dan Orang Asli Papua (OAP), menunjukkan perlunya peningkatan keterampilan kerja dan akses terhadap modal usaha mikro.
		Wilayah Jayapura Utara menghadapi tekanan terhadap kapasitas infrastruktur dasar. Permasalahan umum meliputi kondisi jalan lingkungan yang belum memadai di daerah berbukit, sistem drainase yang kurang baik, serta risiko banjir di kawasan pesisir Teluk Youtefa. Di sisi lain, pertumbuhan bangunan tanpa perencanaan ruang yang baik berpotensi mengganggu daya dukung lingkungan dan kualitas tata kota
3.	Jayapura Selatan	• Permasalahan utama meliputi keterbatasan ruang pemukiman, kemacetan lalu lintas, serta tekanan terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi. • Pertumbuhan penduduk yang cepat tidak seimbang dengan ketersediaan lahan, menyebabkan munculnya permukiman padat dan informal di tepi pantai serta kawasan perbukitan.
		• Pendidikan di Jayapura Selatan cukup berkembang, namun masih terjadi ketimpangan antarwilayah. • Meskipun tingkat partisipasi sekolah meningkat, akses pendidikan kejuruan dan vokasi masih rendah, terutama bagi Orang Asli Papua (OAP).
		• Permasalahan: kesenjangan akses layanan kesehatan di kawasan pesisir dan permukiman padat, serta terbatasnya tenaga medis dan fasilitas rawat inap. • Kasus stunting dan gizi kurang masih ditemukan, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi seperti Hamadi. • Permasalahan sampah dan sanitasi lingkungan berdampak terhadap kesehatan masyarakat di kawasan pesisir Teluk Youtefa.
		• Meski aktivitas ekonomi tinggi, ketimpangan pendapatan antarwilayah masih terjadi, dan sebagian besar usaha berskala mikro dengan produktivitas rendah. • Orang Asli Papua (OAP) masih minim peran dalam

No.	Distrik	Permasalahan
		sektor formal, sehingga dibutuhkan program afirmasi dan peningkatan kapasitas kewirausahaan lokal.
		• Infrastruktur jalan di kawasan utama (Hamadi–Entrop–Dok V) sudah beraspal, tetapi akses ke wilayah padat masih mengalami kerusakan dan kemacetan rutin. • Drainase yang tidak memadai menyebabkan banjir genangan musiman, terutama di kawasan Hamadi dan Dok IX. • Permasalahan sampah menjadi serius — volume sampah mencapai ±120 ton per hari, sementara pengangkutan hanya mampu melayani sekitar 80% wilayah . • Penurunan kualitas lingkungan pesisir akibat sedimentasi dan aktivitas ekonomi informal mengancam keberlanjutan kawasan wisata bahari.
		Pelayanan publik sudah berbasis digital sebagian, namun masih terbatas di bidang administrasi kependudukan.
4.	Heram	• Kelurahan Yabansai dan Waena menjadi wilayah dengan kepadatan tertinggi (>1.000 jiwa/km²), menunjukkan tekanan terhadap ruang hunian dan kebutuhan fasilitas umum. • Kelurahan Hedam merupakan kawasan terluas (44,47% dari total luas Heram) tetapi dengan kepadatan lebih rendah, menandakan ketimpangan pemanfaatan lahan antar wilayah. • Urbanisasi cepat dan pertumbuhan perumahan tidak terencana menimbulkan persoalan tata ruang, khususnya di sekitar kawasan kampus dan area Waena–Yoka.
		Sarana pendidikan sudah relatif lengkap tetapi belum seimbang antara jumlah murid dan tenaga pendidik. Permasalahan utama mencakup rasio murid terhadap guru yang masih tinggi, keterbatasan fasilitas laboratorium, dan minimnya sekolah negeri di jenjang PAUD serta kejuruan. Meskipun terdapat tiga perguruan tinggi, akses pendidikan tinggi bagi Orang Asli Papua (OAP) masih rendah.
		Layanan kesehatan di Heram masih terbatas dibanding jumlah penduduknya. Hanya terdapat 1 rumah sakit, 3 puskesmas tanpa rawat inap, dan 4 apotek aktif. Ketiadaan puskesmas dengan fasilitas rawat inap mengakibatkan sebagian besar masyarakat harus berobat ke rumah sakit di distrik lain. Permasalahan umum meliputi akses layanan kesehatan bagi wilayah perbukitan, keterbatasan tenaga medis, serta belum optimalnya program promotif-preventif seperti posyandu aktif dan gizi balita.

No.	Distrik	Permasalahan
		• Tingginya jumlah penduduk usia produktif (usia 20–39 tahun mencapai 33% dari total penduduk) menuntut penciptaan lapangan kerja baru. • Ketergantungan pada aktivitas ekonomi informal dan usaha kecil masih tinggi, serta sebagian besar pelaku usaha belum terdaftar resmi dalam sistem koperasi atau perizinan perdagangan. • Terdapat potensi pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis komunitas kampus, namun belum didukung ekosistem kewirausahaan yang kuat.
		• Masih ditemukan akses jalan lingkungan yang rusak terutama di daerah pinggiran seperti Yoka dan Kampung Waena. • Keterbatasan sistem drainase menyebabkan genangan musiman dan kerusakan jalan pada musim hujan. • Pertumbuhan permukiman tanpa pengendalian tata ruang mengancam kawasan resapan air dan potensi ekowisata Danau Sentani. • Persoalan sampah dan sanitasi lingkungan masih menjadi isu utama akibat kepadatan dan perilaku masyarakat urban yang belum tertib.
		Tantangan utama adalah efisiensi koordinasi antar-kelurahan dan keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah di tingkat RT/RW.
5.	Muara Tami	• Kepadatan penduduk hanya 33,96 jiwa/km², jauh di bawah kecamatan lain, menunjukkan tantangan dalam akses layanan publik dan distribusi penduduk yang tidak merata. • Konsentrasi penduduk tertinggi berada di Koya Barat (43,3% dari total penduduk), sedangkan Kampung Mosso dan Skow Yambe berpenduduk sangat sedikit (masing-masing <3%). • Rasio jenis kelamin sebesar 110,65, menandakan dominasi laki-laki akibat tingginya aktivitas ekonomi berbasis pertanian, perdagangan, dan perbatasan. Implikasi: ketimpangan demografis dan rendahnya kepadatan menyebabkan biaya pelayanan publik tinggi serta keterbatasan infrastruktur sosial di wilayah kampung perbatasan.
		• Jumlah aparatur sipil negara (ASN) di tingkat kecamatan hanya 28 orang, sedangkan beberapa kampung seperti Mosso, Skow Sae, dan Skow Yambe belum memiliki pegawai pemerintah kampung yang tetap. • Hal ini menunjukkan rendahnya kapasitas kelembagaan dan dukungan administrasi pemerintahan kampung di wilayah perbatasan. Implikasi: lemahnya tata kelola, koordinasi antar kampung, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan publik dasar.
		• Permasalahan utama: akses pendidikan rendah di daerah perbatasan, keterbatasan fasilitas pendidikan menengah atas, dan rendahnya partisipasi OAP dalam pendidikan tinggi dan vokasi.

No.	Distrik	Permasalahan
		• Fasilitas pendidikan di Muara Tami masih terbatas dibanding luas wilayahnya. • Rasio guru terhadap murid masih tinggi (1:30 di tingkat SD) dan belum ada sekolah negeri di beberapa kampung terpencil.
		• Fasilitas kesehatan di Muara Tami sangat terbatas; hanya terdapat beberapa puskesmas dan belum semua kampung memiliki layanan medis tetap. • Sebagian besar masyarakat harus menempuh jarak jauh ke pusat layanan di Koya Barat atau Kota Jayapura. • Tantangan kesehatan meliputi akses layanan maternal dan anak, penyakit endemik daerah tropis, serta minimnya tenaga medis tetap di kampung perbatasan. Implikasi: masih terdapat kesenjangan besar dalam pemenuhan hak dasar kesehatan bagi warga kampung dan OAP, terutama di wilayah pesisir dan perbatasan.
		• Produksi pertanian terbesar berasal dari tanaman sayur, buah-buahan, dan biofarmaka seperti jahe dan kunyit, yang meningkat pada periode 2021–2024. • Namun, produktivitas masih rendah karena keterbatasan irigasi, akses jalan usaha tani, dan fasilitas pascapanen. • Ketergantungan ekonomi terhadap pertanian primer membuat rentan terhadap fluktuasi harga dan iklim. Permasalahan utama: belum berkembangnya diversifikasi ekonomi lokal, minimnya pelatihan kewirausahaan, serta rendahnya kontribusi OAP dalam sektor jasa dan industri kecil.
		• Meskipun berada di jalur strategis perbatasan RI–PNG, kondisi jalan antar kampung banyak yang belum diaspal, terutama di Mosso dan Skow Yambe. • Akses transportasi publik terbatas, dan jaringan listrik serta telekomunikasi belum menjangkau seluruh wilayah. • Permasalahan drainase dan sanitasi dasar di permukiman juga masih signifikan. Implikasi: keterisolasian fisik menyebabkan lambatnya pemerataan pembangunan, rendahnya akses pasar, serta tingginya biaya logistik antarwilayah.

Sumber: hasil analisis, 2025

2.3.2. Isu Strategis

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap kondisi baik potensi maupun permasalahan Kota Jayapura, isu global dan nasional yang berkaitan Kota Jayapura, isu di tingkat regional Papua, RPJPD Kota Jayapura Tahun 2025-2045, dan dokumen KLHS RPJMD Kota Jayapura 2025-2029, serta dokumen perencanaan terkait lainnya, telah teridentifikasi sejumlah isu yang memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan ke depan. Isu Strategis merupakan kondisi

atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Kota Jayapura karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

2.3.2.1. Isu Global

Kondisi global mempengaruhi Indonesia dalam berbagai aspek. Adapun beberapa isu strategis yang saat ini sedang dihadapi oleh penduduk global, yaitu:

A. Perubahan Iklim:
   1. Peningkatan suhu global 1,1°C sejak era pra-industri;
   2. Proyeksi kenaikan suhu 1,5°C dalam dua dekade mendatang;
   3. Potensi kenaikan suhu hingga 4,4°C pada akhir abad ini;
   4. Konsekuensi: kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem, hilangnya keanekaragaman hayati

B. Ketimpangan Ekonomi Global:
   1. 1% populasi terkaya menguasai 45% kekayaan global;
   2. 50% populasi termiskin memiliki kurang dari 1% kekayaan global;
   3. Ratusan juta orang jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem akibat pandemic

C. Keamanan Siber dan Privasi Data:
   1. Peningkatan serangan siber 600% selama pandemik;
   2. Ancaman terhadap keamanan infrastruktur kritis, privasi data, dan integritas sistem demokrasi

D. Ancaman dan Krisis Air Global;
   1. Proyeksi 52% populasi dunia akan menghadapi kelangkaan air pada 2050;
   2. 2,2 miliar orang tidak memiliki akses ke air minum yang aman;
   3. 4,2 miliar orang tidak memiliki akses ke sanitasi yang memadai;
   4. Potensi konflik atas sumber daya air di berbagai wilayah

E. Degradasi Lingkungan dan Hilangnya Keanekaragaman Hayati:
   1. 1 juta spesies terancam punah dalam beberapa dekade mendatang;
   2. Laju kepunahan 100-1000 kali lebih cepat dari laju alami;
   3. Faktor pendorong: deforestasi, polusi, dan perubahan iklim

F. Urbanisasi dan Pertumbuhan Kota:
   1. Proyeksi 68% populasi dunia akan tinggal di daerah perkotaan pada 2050;
   2. Peningkatan dari 55% populasi perkotaan saat ini;
   3. Tantangan, infrastruktur, layanan dasar, dan keberlanjutan lingkungan

G. Transformasi Digital dan Masa Depan Pekerjaan:
   1. Proyeksi 85 juta pekerjaan mungkin tergantikan oleh mesin pada 2025;
   2. Potensi munculnya 97 juta pekerjaan baru;
   3. Risiko memperburuk ketimpangan jika tidak dikelola dengan baik

H. Kebutuhan Respons Global:
   1. Kerjasama internasional yang erat;
   2. Inovasi teknologi;
   3. Reformasi kebijakan;
   4. Perubahan perilaku individual dan kolektif;
   5. Pendekatan holistik dan kolaboratif untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil

2.3.2.2. Isu Nasional

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

Isu Nasional terkait Wilayah Papua sebagaimana tertera dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025), sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi wilayah Papua melambat, dari 7,03 persen di tahun 2022 rnenjadi 4,87 persen di tahun 2023.
b. Sebagian besar IPM di Wilayah Papua tergolong dalam kategori sedang di Indonesia.
c. Wilayah Papua memiliki persentase penduduk miskin (PPM) dan ketertinggalan daerah yang masih tinggi.
d. Wilayah Papua memiliki indeks risiko bencana kategori tinggi terutama dari banjir, longsor, tsunami, dan gempa bumi yang bersumber dari sesar-sesar normal.
e. Banyaknya kawasan konservasi yang berlokasi di sekitar kawasan pertumbuhan sehingga berpotensi terdampak oleh pengembangan kawasan pertumbuhan.

Pendekatan Pembangunan Kewilayahan dalam RPJMN untuk Papua berupa Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Wilayah Papua, yang terdiri atas:

a. Papua Sehat, melalui peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta pembudayaan hidup sehat dan bersih di masyarakat;
b. Papua Cerdas, melalui peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama; dan
c. Papua Produktif, melalui peningkatan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing.

Pemerintah pusat dalam RPJMN tahun 2025-2029 menetapkan sasaran pembangunan untuk Provinsi Papua seperti hanya untuk provinsi lainnya. Adapun sasaran dan target 2025 dan 2029 untuks etiap indikator disajikan pada gambar di bawah. Selanjutnya ditetapkan juga *Highlight* Indikasi Intervensi Provinsi Papua Tahun 2025-2029 yang dimuat pada tabel di bawah.

Gambar 2.42.

Sasaran Pembangunan Provinsi Papua



Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Tabel 2.140
***Highlight* Indikasi Intervensi Provinsi Papua Tahun 2025-2029**

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi	
A1	Kawasan Pertumbuhan A1: Kawasan Pariwisata Biak-Teluk Cenderawasih (Kab. Biak Numfor)	Penyiapan kawasan pariwisata Biak-Teluk Cenderawasih di Kab. Biak Numfor, melalui:	
		-	Peningkatan aksesibilitas pariwisata, dengan output pembangunan jalan daerah
		-	Pengembangan atraksi, dengan output: pendukungan event daerah dan pengembangan desa wisata
		-	Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata, dengai output pembangunan SPAM dan sistem pengelolaan air limbah domestik
		-	Pengembangan usaha masyarakat, dan peningkatan akses pembiayaan pariwisata, dengan output pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan bumkam
A2	Kawasan Pertumbuhan A2: Kawasan perkotaan sedang jayapura (Kota Jayapura)	Pengembangan Kawasan Perkotaan Sedang Jayapura, melalui:	
		-	Penyusunan rencana induk (masterplan) pengembangan dan penataan kawasan perkotaan, dengan output: rencana induk (masterplan)
		-	Penataan kawasan dan peningkatan citra kota dengan output penguatan branding kawasan dan penguatan promosi daya tarik kota
		-	Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual
		-	Peningkatan sarana prasarana pelayanan dasar perkotaan, dengan output pembangunan jalan strategis, SPAM, SPAL, infrastruktur listrik dan TIK, PSU bidang perumahan, pengelolaan sampah berbasis 3R, perluasan jaringan telekomunikasi dan ekses internet cepat, perluasan layanan penyiaran digital, serta pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya
B1 B2 B3	Kawasan Komoditas Unggulan: (Komoditas tuna-	Penyiapan pengembangan ekosistem sentra industri berbasis komoditas tuna-cakalang-tongkol, melalui:	

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi	
B4 B5 B6 B7	cakalang-tongkol) Sentra Industri B1 : Kota Jayapura B2 : Kab. Biak Numfor Sentra Produksi B3 : Kota Jayapura B4 : Kab. Biak Numfor B5 : Kab. Jayapura B6 : Kab. Kepulauan Yapen B7 : Kab. Waropen	-	Penguatan sentra produksi perikanan, dengan output: penyaluran bantuan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan serta penyaluran benih ikan air laut ke masyarakat
		-	Pengembangan industri, tata niaga/pemasaran, promosi, dan peningkatan ekspor produk perikanan, dengan output peningkatan fasilitas tempat pelelangan ikan (TPl), pengembangan rantai dingin termasuk gudang beku dan kelengkapannya, penyediaan sarana penyimpanan dan distribusi logistik produk, pengembangan gerakan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan IKM/UMKM, fasilitasi dan pembinaan peningkatan digitalisasi bagi usaha kecil, koperasi berbasis komoditas, dan BUMDes, penumbuhan eksportir, industrialisasi koperasi melalui rantai pasok produksi, pembentukan dan penguatan koperasi, pelaku usaha, UMKM dalam rantai pasok, serta revitalisasi pasar rakyat
		-	Peningkatan kualitas SDM dan pendampingan pengembangan industri, dengan output: pendidikan vokasi perikanan dan kelautan, serta penerapan kurikulum link and match dengan dunia kerja
		-	Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan output pengembangan kampung nelayan dan desa perikanan cerdas (smart fisheries village), serta penguatan kelembagaan ekonomi nelayan
		-	Peningkatan Sarana prasarana pendukung, dengan output pembangunan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan, serta perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat
		-	Pengembangan riset dan inovasi teknologi perikanan, dengan output hilirisasi produk akuakultur dan produk hilirisasi pangan hasil laut, pemberian bantuan pendanaan matching fund (BOPTN Penelitian) terkait produk hilirisasi kelautan perikanan, serta penerapan Teknologi ekonomi digtal
	Provinsi Papua	Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah, melalui:	
		-	Pembangunan dan peningkatan jalan strategis, jalan trans, dan jalan 3TP, dengan output: pembangunan jembatan strategis, penanganan jalan daerah, serta pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong ruas jalan Jayapura & Sarmi
		-	Pengembangan pelabuhan dan penyediaan jaringan pelayaran, dengan output: replacement fasilitas pelabuhan sarmi di Kab. Sarmi, rehabilitasi fasilitas Pelabuhan Padaido dan Pelabuhan Pulau Owi di Kab. Biak Numfor, rehabilitasi fasilitas Pelabuhan Serui di Kab. Kepulauan Yapen, pembangunan fasilitas Pelabuhan Marsram di Kab. Supiori, serta peningkatan layanan angkutan laut perintis dan layanan angkutan penyebrangan perintis
		-	Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan output: pengembangan Bandar Udara Numfor di Kab. Biak Numfor dan Bandar Udara Sentani di Kabupaten Jayapura
		-	Pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi dan konektivitas perkotaan
		-	Peningkatan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran, dengan output: pengendalian pembangunan pembangkit

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi	
			listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi
		-	Peningkatan infrastruktur digital dan TIK, dengan output pembangunan BTS 4G/Lastmile dan peningkatan akses internet, perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, serta perluasan layanan penyiaran digital.
	Kab. Jayapura (perikanan) Kab. Biak Numfor (perikanan, dan pariwisata) Kota Jayapura (perikanan) Kab. Kepulauan Yapen (perikanan) Kab. Waropen (perikanan)	Penguatan pendidikan tinggi STEAM, serta pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK dan BLK) yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah (Perikanan dan pariwisata) sesuai kebutuhan DUDI, melalui:	
		-	Penguatan dan penyediaan sarana prasarana pendidikan, serta pelatihan berkualitas, dengan output: jalan Menuju fasilitas pendidikan, revitalisasi sarana dan prasarana perguruan tinggi, serta revitalisasi fasilitas pendidikan dan balai latihan kerja (BLK)
		-	Pengembangan program studi, kurikulum, dan inovasi model pembelajaran perguruan tinggi, serta pendidikan dan pelatihan vokasi yang mengacu pada kebutuhan industri
		-	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengajar/tenaga pendidik, dengan output: peningkatan mutu dan kompetensi SDM pendidikan tinggi dan tenaga kependidikan vokasi, serta peningkatan tenaga kependidikan vokasi yang mengikuti upskilling dan reskilling berstandar industri
		-	Peningkatan kualitas tata kelola serta pengembangan kemitraan penyelenggara pendidikan dengan dunia kerja, dengan output: akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan pada pendidikan tinggi dan vokasi, serta peningkatan kemitraan satuan pendidikan vokasi dengan dunia kerja
C1	Kawasan Potensial Swasembada Pangan C1 : Kab. Keerom	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kab. Keerom yang didukung dengan kawasan Transmigrasi Senggi, melalui:	
		-	Penyiapan pengembangan kawasan, dengan output: optimasi lahan menjadi produktif, pembangunan embung pertanian dan non pertanian, penyiapan jaringan drainase dan irigasi, konektivitas transportasi desa, serta penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju KSPP
		-	Peningkatan produksi, dengan output: penyaluran benih jagung berkualitas, areal pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pangan, dan unit pengolah pupuk organik (UPPO)
		-	Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana produksi, dengan output: peningkatan jalan usaha tani, serta alat dan mesin pertanian
		-	Penguatan pascapanen dan tata kelola, dengan output: penyediaan sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan, pengembangan kelembagaan ekonomi petani, pengembangan usaha koperasi dan peningkatan akses pembiayaan modal
		-	Pengembangan riset dan inovasi teknologi, dengan output: pengembangan model percontohan pertanian modern, peningkatan mekanisasi pertanian, serta percontohan penerapan teknologi pertanian, termasuk digital farming.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		- Pencetakan sawah
		- Pembangunan Bandara Senggi (Kab. Keerom) dalam rangka mendukung KSPP Keerom
C2 C3 C4 C6 C7	Kawasan Potensial Swasembada Pangan: C2 : Kab. Jayapura (padi dan pangan akuatik) C3 : Kab. Biak Numfor* (Pangan akuatik) C4 : Kota Jayapura* (Padi dan pangan akuatik) C6 : Kab. Kepulauan Yapen* (Pangan akuatik) C7 : Kab. Sarmi* (Pangan akuatik) Kawasan Rentan Pangan: Kab. Mamberamo Raya** (padi) Kab. Supiori** (padi) Keterangan *) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki	Penguatan kawasan swasembada pangan padi dan pangan akuatik/bluefood berbasis perikanan tangkap, melalui:
		- Penguatan produksi, dengan output: optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, pengembangan kawasan padi, pemberian pupuk bersubsidi, alat dan mesin pertanian pra panen, serta pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan
		- Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan output: penyediaan sarana pasca panen dan sarana pengolahan hasil tanaman pangan, peningkatan jalan usaha tani, penyediaan alat dan mesin pertanian pra panen, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju sentra pangan lokal, serta pembangunan fasilitas logistik (gudang lumbung pangan) mendukung distribusi bahan pangan bergizi, serta peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan.
		- Penguatan kapasitas SDM (petani dan nelayan), dengan output: fasilitasi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani serta pelatihan kelompok tani untuk GAP (Good Agriculture Practices), GHP (Good Handling Practices), dan PHT (Pengendalian Hama Terpadu), penyuluhan perikanan dan kelautan untuk kelompok pelaku utama, serta mendorong ownership petani dan nelayan pada aset dan lembaga yang telah dibentuk
		- Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan petani dan nelayan yang mendukung pengembangan pangan lokal, dengan output: pelatihan kelompok tani, penyediaan inkubator usaha koperasi, pembentukan/pengembangan koperasi berbasis komoditas, serta penyusunan tata kelola dan strategi distribusi logistik
		Penguatan kawasan rentan pangan dilakukan melalui penguatan diversifikasi pangan, dengan output: pengembangan kawasan padi, pembentukan koperasi berbasis bahan pangan, penguatan kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan, pemberian bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan, serta peningkatan jalan usaha tani, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, serta penyediaan sarana pra, pasca dan pengolahan hasil tanaman pangan
C2 C5	Kawasan Potensial Swasembada Energi: C2 : Kota Jayapura	Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi melalui:

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	C5 : Kab. Mamberamo Raya* Kawasan Rendah Elektrifikasi: Kab. Supiori** Kab. Kepulauan Yapen** Keterangan *) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga yang tinggi dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik	- Percepatan pengembangan dan optimalisasi pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik beban dasar dan variabel serta pemanfaatan potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) sesuai dengan potensi daerah dan dedieselisasi, dengan output: pembangunan pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), pembangkit listrik Tenaga Surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga mini hidro (PLTM), pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG), penyiapan pembangunan pabrik ethanol dalam rangka industrialisasi energi, pemetaan potensi EBT lainnya, pembangunan sistem transmisi dan interkoneksi tenaga listrik, serta pembangunan infrastruktur gardu induk. - Penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan output penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit - Penguatan kawasan rendah elektrifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan, dengan output: pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T
C5 C2	Kawasan Potensial Swasembada Air: C2 : Kab. Jayapura* C5 : Kab. Mamberamo Raya* Kawasan Raman Air: Kab. Keerom** Kab. Biak Numfor** Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki kapasitas air tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki IRBI kekeringan tinggi dan merupakan lokasi prioritas atau super prioritas ketahanan iklim bidang air	Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan pada kawasan potensial swasembada air, terutama di pulau-pulau kecil, melalui: - Peningkatan kapasitas tampungan/sumber daya, dengan output: pembangunan embung dan tampungan air lainnya Penguatan kawasan rawan air dilakukan melalui penyediaan sumber air baku alternatif, dengan output pembangunan embung, pembangunan sarana dan prasarana air baku, penyediaan infrastruktur desalinasi di pulau-pulau kecil, serta pengeboran sumber air di daerah terpencil rawan air
D1 D2 D3	Kawasan Afirmasi Daerah Tertinggal* D1 : Kab. Mamberamo Raya (sagu dan kakao) D2 : Kab. Waropen (Kakao dan Kelapa) D3 : Kab. Supiori (Kelapa) Keterangan: *) Daerah tertinggal juga sudah termasuk	Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang, melalui: - Pemenuhan dan peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang sesuai standar dan berbasis kondisi geografis wilayah, dengan output afirmasi bantuan biaya pendidikan program studi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan wajib penempatan pada DTPK, SD yang mendapat pembinaan program afirmasi, aktivasi balai desa dengan pelibatan masyarakat desa, serta pelaksanaan bantuan sosial adaptif

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi	
	daerah sangat tertinggal	-	Penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal dan inovasi melalui pengembangan sentra pertanian terintegrasi, dengan output optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan, peningkatan akses pembiayaan modal, pengembangan UMKM lokal, peningkatan daya saing masyarakat, serta fasilitasi sosialisasi pembentukan koperasi dari kelompok strategis
		-	Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar permukiman sesuai standar, serta peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan output fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU, perluasan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, perluasan layanan penyiaran digital, pembangunan jalan akses simpul ekonomi, pengembangan sarana angkutan perintis laut, darat, dan udara, pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir, serta penyediaan dan pengawasan infrastruktur sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS
		-	Pengelolaan dan pengurangan risiko bencana yang efisien dari tepat guna, dengan output; masyarakat di daerah tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penguatan mitigasi bencana
D4 D5 D6 D7 D8 D9	Kawasan afirmasi kawasan perbatasan PKSN dan wilayah pendukung D4 : PKSN Jayapura (Kota Jayapura) D5 : PKSN Biak, Kec. Aimando Padaido, Kec. Padaido, Kec. Oridek, Kec. Biak Utara, Kec. Yawosi, Kec. Warsa, Kec. Bondifuar (Kab. Biak Numfor) Kecamatan perbatasan prioritas D6 : Kec. Sawai (Kab. Mamberamo Raya) D7 : Kec. Pantai Timur, Kec. Sarmi Timur, Kec. Sarmi Selatan, Kec. Sarmi, Kec. Pantai Barat (Kab. Sarmi) D8 : Kec. Towe, Kec. Waris (Kab. Keerom) D9 : Kec. Supiori Utara, Kec. Supiori Barat, Kec. Kepulauan Aruri (Kab. Supiori)	Penguatan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura dan Biak, serta kecamatan perbatasan prioritas, melalui:	
		-	Pemenuhan layanan dasar, dengan output penyediaan rumah layak huni, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi di kawasan perbatasan, peningkatsn SPAM, SPAL, pengelolaan sampah berbasis 3R, serta peningkatan akses internet dan listrik
		-	Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas unggulan terutama di PKSN, dengan output peningkatan pelabuhan perikanan di lokasi SKPT (SKPT Jayapura dan SKPT Biak) yang dikelola dan operasional sesuai standar, penyaluran sarana budidaya ikan ke masyarakat, serta peningkatan kapasitas masyarakat di bidang kelautan dan perikanan di kawasan perbatasan
		-	Penataan ruang kawasan dan penanggulangan bencana kawasan perbatasan, dengan output: penyusunan dokumen harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) di Provinsi Papua
		-	Penguatan tata kelola pemerintahan, dengan output: piloting pengembangan kompetensi tematik bagi ASN di daerah kawasan perbatasan dan pengembangan platform digital manajemen ASN, bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kawasan perbatasan negara, serta bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kawasan perbatasan negara
D10		Pengembangan kawasan Transmigrasi Senggi, melalui:	

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi	
	Kawasan Afirmasi Kawasan Transmigrasi D10 : KT Senggi (Kab. Keerom)	-	Pembangunan intastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan output pembangunan dan pengembangan jalar non-status, jembatan, sistem drainase, sarana permukiman di kawasan transmigrasi, serta perluasan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, serta perluasan layanan penyiaran digital
		-	Pengembangan ekonomi kawasan tranmigrasi, dengan output pemberian bantuan sarana produksi pertanian di Satuan Permukiman dan pusat SKP (Satuan Kawasan Pengembangan), optimasi kawasan pertanian padi, optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, serta pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan
		-	Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan output: fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi
		-	Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil, dengan output perpindahan dan penempatan transmigran
		-	Penyediaan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja terampil, dengan output: tenaga pelatihan yang ditingkatkan kompetensinya, penyediaan instruktur yang berkinerja tinggi di kawasan transmigrasi
	Pengembangan sekolah terbuka: Kab. Waropen (Daerah Tertinggal) Pengembangan sekolah berpola asrama: Kab. Mamberamo Raya (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) Kab. Waropen (Daerah Tertinggal) Kab. Jayapura Kota Jayapura (PKSN Jayapura) Pengembangan sekolah sepanjang hari: Kab. Mamberamo Raya (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) Kota Jayapura (PKSN Jayapura) Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan: Seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua	Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, melalui:	
		-	Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik yang memprioritaskan Orang Asli Papua, dengan output penataan guru dikdas dan dikmen serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran
		-	Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik, dengan output: pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen
		-	Pemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik, dengan output: pemberian program Indonesia Pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paket c, dan SMK, serta pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK)
		-	Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan output pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA
		-	Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan, dengan output rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah
		-	Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan output pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan
		-	Peningkatan literasi, dengan output pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital
		-	Penyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah Papua, dengan output penyusunan model kurikulum dan penyediaan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	Provinsi Papua	Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, melalui: - Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan, dengan output: peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan dan pembinaan lembaga kebudayaan - Pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal, dengan output fasilitasi kemitraan warisan budaya, pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya, serta perlindungan warisan budaya - Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah, dengan output event prioritas bidang kebudayaan, produksi konten media kebudayaan, serta pengembangan event film dan musik berbasis budaya lokal - Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah, dengan output fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah, serta event prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah
	Pelayanan Kesehatan Bergerak Kab. Mamberamo Raya (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) Pembangunan RSUD Kabupaten: Kab. Supiori (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) Peningkatan RS dari tipe D menjadi tipe C Kab. Keerom (Kecamatan Perbatasan Prioritas) Kab. Waropen (Daerah Tertinggal) Kab. Supiori (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) Kab. Mamberamo Raya (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) Kab. Sarmi (Kecamatan Perbatasan Prioritas) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan: Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, melalui: - Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan telemedicine, dengan output pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta implementasi layanan telemedicine - Penyediaan moda tansportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak sesuai kondisi geografis wilayah - Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis dengan memprioritaskan Orang Asli Papua, dengan output penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer serta pendayagunaan dokter spesialis di Wilayah Papua - Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan - Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan output: peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes, pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil melalui konstruksi bangunan modular, serta percepatan operasionalisasi RSUD di Kab. Supiori - Pengembangan inovasi obat tradisional dan suplemen kesehatan - Penurunan kematian ibu dan anak melalui peningkatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas layanan
	Pengendalian penyakit TBC	Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan melalui:

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi	
	Kab. Jayapura Kab. Kepulauan Yapen Kab. Biak Numfor Kab. Sarmi Kab. Waropen Kab. Supiori Pengendalian penyakit malaria: Kab. Keerom Kab. Jayapura Kab. Sarmi Kab. Mamberamo Raya Kab. Waropen Kab. Kepulauan Yapen Kab. Biak Numfor Kab. Supiori Kota Jayapura Pengendalian penyakit filariasis, kusta, frambusia, dan HIV/AIDS Provinsi Papua	-	Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan output penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan layanan pencegahan dan pengendalian TBC, layanan penemuan aktif TBC, serta bantuan stimulan perumahan swadaya dan peningkatan kualitas hunian tidak layak
		-	Eliminasi penyakit kusta, dengan output penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta, pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL
		-	Eliminasi penyakit frambusia, dengan output: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian frambusia, serta tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian frambusia, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL
		-	Eliminasi penyakit filariasis, dengan output penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian filariasis, serta tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian filariasis, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL
		-	Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan output penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria, peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL
		-	Pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan output: penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih serta optimalisasi data
	Provinsi Papua	Penguatan percepatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting serta perbaikan gizi lainnya melalui:	
		-	Pendampingan secara khusus bagi pemerintah di Wilayah Papua
		-	Peningkatan gizi, dengan output pelaksanaan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting terjadi serta pemberian tata laksananya, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita dari buffer sfock, serta implementasi Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu, serta Penambahan Vitamin)
		-	Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dengan output peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL
		-	Peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan stunting, dengan output penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan stunting melalui berbagai media, komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan
		-	Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak, dengan output penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penguatan implementasi program KB
		-	Penguatan integrasi perbaikan sektor di luar kesehatan lainnya yang turut mendukung perbaikan gizi

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	Pemberantasan IUU Fishing: WPP 717 (Perbatasan perairan dengan palau) Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah: Provinsi Papua	Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah, termasuk pemberantasan IUU Fishing pada WPP 717, melalui:
		- Penegakan regulasi dan upaya pertahanan keamanan, dengan output peningkatan operasi kapal dan speedboot pengawas, serta patroli mandiri
		- Penguatan tata kelola dan kelembagaan, dengan output: Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional dan pemberantasan perburuan liar, pembalakan liar, perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar, serta IUU (Illegal, Unreported, Unregulated fishing)
		- Peningkatan infrastruktur/sarana prasarana pengawasan, dengan output pembangunan prasarana serta perawatan armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP)
		- Pelibatan tokoh adat, agama, dan perempuan dalam upaya pencegahan konflik sosial, dengan output peningkatan peran FKUB dalam pencegahan, advokasi, dan mitigasi konflik daerah, serta pendekatan hak asasi manusia dan pelibatan multipihak dalam mendorong situasi HAM yang kondusif di Papua
		- Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah, dengan output: fasilitasi pemberdayaan masyarakat pesisir peduli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum batas wilayah laut
	Provinsi Papua	Peningkatan pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, melalui:
		- Inventarisasi, penjaminan hak, dan pelestarian adat dan tradisi masyarakat hukum adat, dengan output peningkatan data inventarisasi tanah ulayat, penetapan hutan adat, dan pengembangan hutan adat
		- Peningkatan pemberdayaan masyarakat hukum adat dan kelembagaan adat, dengan output: penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat, serta pemberdayaan warga komunitas adat terpencil (KAT)
		- Percepatan penyusunan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dilengkapi peta delineasi tanah ulayat, dengan output pendampingan penyusunan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dilengkapi peta delineasi tanah ulayat
E1 E2 E3	Kawasan Konservasi E1 : TN Teluk Cendrawasih (Kab. Biak Numfor, Kab. Supiori, Kab. Waropen, Kab. Kepulauan Yapen) E2 : TN Mamberamo Foja (Kab. Mamberamo Raya, Kab. Jayapura, dan Kab. Keerom) E3 : KKN Padaido (Kab. Biak Numfor)	Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi melalui.
		- Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi, dengan output penegakan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi, kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), dan penanganan kasus tindak pidana LHK P21
		- Optimalisasi tata kelola kawasan konservasi, dengan output: optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi, penguatan perencanaan kawasan konservasi, dan pengendalian kebakaran di kawasan konservasi
		- Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem, dengan output: inventarisasi keterancaman spesies dan konservasi biota yang terancam punah

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi	
		-	Pengelolaan pemanfaatan kawasan konservasi, dengan output penyediaan fasilitas penelitian dan pengembangan, penyiapan kawasan hutan konservasi untuk implementasi nilai ekonomi karbon, pemanfaatan data dalam pengelolaan kawasan, dan peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan
		-	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, dengan output pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, serta pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas)
		-	Peningkatan sarana prasarana pengelolaan dan monitoring ekosistem
E4	Lingkungan Hidup Provinsi Papua Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi: E4 : Kota Jayapura	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta adaptasi perubahan iklim, melalui:	
		-	Peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat terhadap mitigasi bencana dan perubahan iklim, dengan output penguatan kampung/kelurahan tangguh bencana, pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur, serta fasilitasi dan pemberian fasilitas dan pembinaan dalam adaptasi perubahan iklim
		-	Pengembangan sistem dan sarana prasarana pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, dengan output: penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat, penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim, pembangunan pengaman pantai, pemulihan ekosistem mangrove, penerapan Nature-Based Solution dan Gray Infrastructure untuk mitigasi ancaman tsunami, serta retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik
		-	Pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, dengan output: pendampingan kelompok perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, dan perlindungan jalur jelajah satwa
		-	Pemulihan ekosistem yang terdegradasi, dengan output: pemulihan lahan rusak dan kritis, serta pemulihan ekosistem perairan
	Provinsi Papua	Peningkatan smart government, penguatan kapasitas ASN, dan peningkatan pelayanan publik yang menjangkau hingga tingkat kampung, melalui:	
		-	Optimalisasi sistem perencanaan dan penganggaran daerah, dengan output: optimalisasi penerapan SIPD, SIKD, dan SIPPP sebagai platform terintegrasi pemerintahan di daerah
		-	Peningkatan kapasitas SDM dan manajemen kinerja ASN, dengan output: pengembangan kompetensi Pengelolaan keuangan daerah kepada aparatur daerah, pengembangan kompetensi aparatur dalam perencanaan dan penganggaran SPM serta pengelolaan keuangan daerah
		-	Percepatan digitalisasi pelayanan publik untuk mendukung smart government, dengan output: portal peIayanan Publik dan administrasi serta penerapan PTSP berbasis OSS
		-	Peningkatan dan pemutakhiran data terpilih Orang Asli Papua (OAP)

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

b. Telaah Dokumen RIPPP Tahun 2022-2041

Rencana Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) adalah penjabaran dari tujuan dan cita-cita pembangunan yang tertuang dalam UUD 1945, yang kemudian disinergikan dengan Visi Indonesia Emas 2045 serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). RIPPP Tahun 2022-2041 disusun sebagai pedoman bagi pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di wilayah Papua. RIPPP ini berlandaskan pada tiga pendekatan dasar:

1. Partisipasi Masyarakat: Pembangunan di Papua mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Hal ini dilakukan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan, sehingga pembangunan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat.
2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar dengan Prinsip Keberlanjutan: Pelaksanaan pembangunan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Pembangunan dilakukan dengan tetap menjaga prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan pendekatan ini, pembangunan diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan tetapi juga menjaga kelestarian alam Papua.
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan harus berpegang pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi menjadi kunci dalam pelaksanaan setiap program pembangunan.

Dokumen RIPPP Tahun 2022-2041 memiliki visi yang ingin dicapai, yaitu "**Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera**". Untuk mencapai visi ini, ditetapkan tiga misi utama yang harus dijalankan:

1. **Papua Sehat**: Misi ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat. Dengan pelayanan kesehatan yang baik, diharapkan seluruh masyarakat Papua dapat menikmati kesehatan yang optimal.
2. **Papua Cerdas**: Misi ini berfokus pada pemberian pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi yang unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama. Pendidikan berkualitas akan menghasilkan generasi yang cerdas dan siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
3. **Papua Produktif**: Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing. Melalui pengembangan ekonomi lokal yang produktif, Papua diharapkan dapat menjadi daerah yang mandiri secara ekonomi dan mampu berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

2.3.2.3. Isu Regional Provinsi Papua

Pada saat RPJMD Kota Jayapura disusun, Provinsi Papua belum menyusun RPJMD sebab akan melaksanakan pemungutan suara Pilkada ulang. Untuk itu, telaahan kebijakan Provinsi Papua dilakukan terhafap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, khususnya kebijakan pada tahap I (2025-2029).

Visi RPJPD Provinsi Papua Tahun 2025-2045, adalah: "**Mewujudkan Provinsi Papua yang maju dan berkelanjutan berbasis ekonomi biru, agroekonomi, agroindustri, dan ekonomi kreatif.**"

Misi dalam rangka mewujudkan visi RPJPD Provinsi Papua, meliputi:

1. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat – Meningkatkan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
2. Pemberdayaan Ekonomi Lokal – Penguatan ekonomi berbasis potensi lokal dan sektor unggulan.
3. Pelestarian Lingkungan – Mendorong pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan.
4. Penguatan Kearifan Lokal – Menjaga dan memanfaatkan kearifan budaya dan adat Papua dalam pembangunan.

Tahapan pembangunan dalam RPJPD dibagi menjadi 4 (empat), dengan arahan makro sebagaimana dimuat pada gambar di bawah.

Gambar 2.43.
Tahapan Pembangunan Provinsi Papua Dalam RPJPD
Tahun 2025-2045

	TAHAP I 2025-2029	TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2045
	Penguatan fondasi transformasi dengan penekanan pada peningkatan kualitas SDM, serta pengembangan ekonomi berbasis sektor pertanian, kelautan, industri dan pariwisata yang bersinergi dengan pola penghidupan masyarakat adat	**Percepatan transformasi pembangunan** Provinsi Papua dengan penekanan pada peningkatan dan pemerataan kualitas SDM yang berkualitas dan inklusif, serta optimalisasi perekonomian berbasis sektor pertanian, kelautan, industri dan pariwisata	**Pemantapan pembangunan** Provinsi Papua dengan penekanan pada SDM yang berdaya saing, serta struktur perekonomian wilayah berbasis ekonomi biru dan agroindustri berlandaskan keunggulan kompetitif	**Perwujudan Provinsi Papua yang maju dan berkelanjutan** berbasis ekonomi biru dan agroindustri
Transformasi Sosial	**Pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar** kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial	**Percepatan pemerataan pembangunan SDM** berkualitas dan inklusif	**Penguatan daya saing SDM** dan keberlanjutan kesejahteraan	**SDM Papua yang unggul**
Transformasi Ekonomi	**Penguatan klaster-klaster ekonomi pertanian, kelautan, industri dan pariwisata** dengan penekanan pada hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja	**Peningkatan produktivitas secara masif** melalui keterkaitan antar klaster ekonomi, perluasan hilirisasi SDA dan perluasan akses pasar sektor pertanian, kelautan, industri dan pariwisata	Struktur perekonomian wilayah Papua berbasis **ekonomi biru dan agroindustri berlandaskan keunggulan kompetitif**	Struktur perekonomian wilayah Papua berbasis **ekonomi biru dan agroindustri bernilai tambah tinggi, berlandaskan keunggulan kompetitif, serta terhubung dengan jaringan pasar nasional dan global**
Transformasi Tata Kelola	**Kelembagaan tepat fungsi**, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil	**Kelembagaan kolaboratif** SDM ASN berkualitas, regulasi berbasis teknologi-informatif, partai politik berintegritas, dan masyarakat sipil partisipatif	**Kelembagaan adaptif,** SDM ASN kompetitif, partai politik modern, regulasi adaptif, dan masyarakat sipil mandiri	**Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif**

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025-2029

Selain itu, sebelum pilkada serentak pada tahun 2024 lalu, Pemerintah Daerah Provinsi Papua telah menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025-2029. Berikut ini diuraikan muatan utama dari dokumen tersebut.

Isu-isu strategis pembangunan Provinsi Papua untuk jangka menengah, dimuat pada gambar di bawah.

Gambar 2.44.
Isu Strategis Provinsi Papua Tahun 2025-2029



Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025-2029

2.3.2.4. Telaahan RPJPD Kota Jayapura Tahun 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun (RPJPD) 2025-2045 merupakan pedoman bagi pembangunan jangka menengah. Kota Jayapura telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Dalam RPJPD Kota Jayapura Tahun 2025-2045 terdapat beberapa isu strategis yang menjadi fokus bagi pembangunan jangka panjang. Mengingat pembangunan periode tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama pelaksanaan RPJPD, maka sangatlah penting untuk memepehatikan isu-isu dalam RPJPD.

Isu pembangunan jangka penjang Kota Jayapura, meliputi:

1. Potensi Sumber Daya Pembangunan
2. Mempertahankan dan Menghormati Keragaman Budaya Masyarakat
3. Demografi, Urbanisasi dan Keterkaitan Kota/Kampung
4. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan
5. Ketimpangan Ekonomi Daerah dan Ketenagakerjaan

6. Pendidikan dan Kesehatan
7. Disrupsi Teknologi dan Inovasi
8. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pembangunan Berkelanjutan
9. Transformasi Birokrasi dan Manajemen ASN
10. Perdagangan Antar Daerah dan Global Kompetitif

2.3.2.5. Telaahan Revisi RTRW Kota Jayapura

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jayapura telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013-2033. Sejak tahun 2024 telah dilakukan revisi terhadap RTRW Kota Jayapura Tahun 2013-2033 dan saat ini masih dalam proses menuju penetapan menjadi perda.

Adapun tujuan penataan ruang Kota Jayapura Tahun 2013-2033, yaitu: “Mewujudkan Kota Jayapura sebagai pusat pelayanan regional pendidikan, perdagangan dan jasa, pariwisata, serta beranda depan negara yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, serta menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal.”

Kebijakan penataan ruang merupakan arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan pemerintah daerah kota guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Kebijakan penataan ruang Kota Jayapura adalah:

1. penetapan fungsi kawasan perkotaan yang sinergis dan menunjang fungsi pelayanan regional.
2. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana kota yang terpadu dan merata.
3. peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung.
4. pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung, daya tampung, dan kearifan lokal.
5. pengembangan kawasan strategis kepentingan ekonomi, sosial budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

6. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Kota Jayapura menjadi kawasan yang memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta terdapat pembagian kewenangan yang jelas pada kota sehingga secara nasional dan provinsi, Kota Jayapura merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi. Sebagai bagian wilayah kota yang penataan ruangnya juga diprioritaskan memiliki pengaruh penting untuk ditinjau berdasarkan bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.

a. Kawasan Strategis Nasional

Kawasan strategis nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. KSN merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun dalam perencanaannya tetap harus dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan rencana tata ruang di daerah sehingga KSN di Kota Jayapura tetap dicantumkan dalam RTRW Kota.

Kota Jayapura menjadi salah satu kawasan strategis nasional dalam RTRWN, yaitu kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan terletak di Kawasan Perbatasan Negara RI-PNG. Kriteria penetapannya adalah diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional dan diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri pertahanan; atau merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas.

b. Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan strategis provinsi (KSP) adalah bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam, dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Berdasarkan Revisi RTRWP Papua, Kota Jayapura termasuk dalam kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu kawasan industri, pariwisata, dan jasa. Tujuan pengembangan kawasan industri, pariwisata, dan jasa adalah membentuk pusat kegiatan sektor tersier secara terpadu. Arahan pengembangan kawasan tersebut, meliputi:

1. penyediaan lahan untuk pengembangan industri dan pariwisata;
2. peningkatan peran perkotaan sebagai pusat jasa koleksi dan distribusi hasil industri;
3. pengembangan kawasan industri pengolahan hasil produk pertanian dan perikanan; dan
4. pengembangan objek dan akomodasi wisata.

c. Kawasan Strategis Kota Jayapura

Kawasan strategis kota (KSK) merupakan kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial-budaya, dan/atau lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi. Penentuannya dilakukan melalui identifikasi potensi masing-masing kawasan dan permasalahan yang dihadapi, dengan memperhatikan dan mendukung tujuan penataan ruang wilayah kota serta arah kebijakan pembangunan Kota Jayapura, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kota, intensitas konflik yang terjadi, skala pengaruh, mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan pemerintah daerah kota, potensi/penyerapan tenaga kerja dan pola interaksi wilayah, serta ditentukan kawasan-kawasan prioritas dan strategis Kota Jayapura. Kawasan strategis kota berfungsi:

1. mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kota;
2. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah Kota yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kota;
3. untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi di dalam rencana struktur dan rencana pola ruang; dan
4. sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kota.

d. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi kota dengan kriteria diantaranya adalah:

a. kawasan yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
b. kawasan yang memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kota;
c. kawasan yang memiliki potensi ekspor;
d. memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
e. kawasan yang didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
f. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
g. ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
h. memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
i. kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;

j. memiliki fungsi untuk mempertahankan pangan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
k. memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
l. memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi di Kota Jayapura:

1. Kawasan Kota Baru Jayapura terletak di Kampung Holtekamp, Kampung Koya Tengah, Kelurahan Koya Timur, Kelurahan Koya barat Distrik Muara Tami, serta Kampung Koya Koso Distrik Abepura.
2. Kawasan PPK Entrop terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan.
3. Kawasan Jayapura Kota terletak di Kelurahan Gurabesi dan Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara, dan Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan.
4. Kawasan Hamadi terletak di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan.
5. Kawasan Abe terletak di Kelurahan Wahno, Kelurahan Vim, Kelurahan Wai Mhorock, Kelurahan Kota Baru, Kelurahan Yobe, Kelurahan Awiyo, dan Kelurahan Asano Distrik Abepura.

e. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan kepentingan pertumbuhan sosial dan budaya dengan kriteria diantaranya adalah:

a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau perairan;
b. memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya;

c. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
d. merupakan aset kota yang harus dilindungi dan dilestarikan;
e. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya;
f. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya;
g. hasil karya cipta budaya masyarakat kota yang dapat menunjukkan jati diri maupun penanda (*focal point*, *landmark*) budaya kota;
h. tempat yang memiliki sejarah dan keterkaitan sosial budaya lokal kota; dan/atau
i. kriteria lainnya yang dikembangkan sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kota.

Dari pertimbangan tersebut, maka kawasan strategis dari kepentingan sosial dan budaya di Kota Jayapura dijelaskan berikut ini.

1. Kampung budaya Port Numbay terletak di:
   a. Kampung Kayobatu Distrik Jayapura Utara;
   b. Kampung Tahima Soroma dan Kampung Tobati Distrik Jayapura Selatan;
   c. Kampung Enggros, Kampung Nafri, dan Kampung Koya Koso Distrik Abepura;
   d. Kampung Waena dan Kampung Yoka Distrik Heram; dan
   e. Kampung Skouw Mabo, Kampung Skouw Sae, Kampung Skouw Yambe, dan Kampung Mosso Distrik Muara Tami.

   Kawasan-kawasan di atas ditetapkan dengan mempertimbangkan bahwa:
   a. kawasan tersebut merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat Port Numbay baik di daratan maupun perairan. Perkampungan yang berada di daratan/pesisir adalah sebagian Kampung Nafri, Kampung Koya Koso, Kampung Waena, sebagian Kampung Yoka, Kampung Skouw Mabo, Kampung Skouw Sae, Kampung Skouw Yambe, dan Kampung Mosso. Perkampungan yang berada di perairan/pesisir adalah Kampung Tahima Soroma, Kampung Tobati, Kampung Enggros,

sebagian Kampung Kayobatu, sebagian Kampung Nafri, sebagian Kampung Yoka;

b. memiliki bangunan rumah adat, benda, struktur, dan situs cagar budaya;
c. merupakan aset Kota Jayapura yang harus dilindungi dan dilestarikan karena mayoritas masyarakat adalah masyarakat Port Numbay;
d. tempat yang memiliki sejarah dan keterkaitan sosial budaya lokal kota;
e. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya kota; dan
f. tempat yang memiliki sejarah dan keterkaitan sosial budaya lokal kota.

Tujuan pengembangan kawasan Kampung budaya Port Numbay adalah memperkuat identitas kawasan strategis kota yang memiliki sejarah dan kearifan lokal Port Numbay. Arah pengembangan kawasan Kampung budaya Port Numbay dilakukan melalui pengembangan kawasan permukiman masyarakat Port Numbay untuk mendukung aktivitas wisata alam, wisata budaya, wisata edukasi, serta ekonomi masyarakat Port Numbay.

2. Kawasan permukiman perkotaan kepadatan tinggi terletak di:
   a. Kelurahan Gurabesi, Kelurahan Bhayangkara, Kelurahan Trikora, Kelurahan Mandala, Kelurahan Imbi, dan Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
   b. Kelurahan Numbai, Kelurahan Argapura, dan Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan; dan
   c. Kelurahan Yobe, Kelurahan Awiyo, dan Kelurahan Wai Mhorock Distrik Abepura.

f. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kriteria Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup Kota Jayapura meliputi kawasan yang memiliki nilai strategis dengan sudut kepentingan lingkungan hidup adalah:

a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
b. merupakan aset kota berupa kawasan lindung kota yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
c. memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian bagi kota;
d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro wilayah kota;
e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
f. rawan bencana alam skala kota; atau sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan; dan/atau
g. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan hidup.

Kawasan strategis dari kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kota Jayapura:

1. Kawasan Daerah Aliran Sungai Muara Tami
2. Kawasan Cagar Alam Pegunungan Cycloop terletak di Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Heram.
3. Kawasan Teluk Youtefa terletak di Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Abepura.
4. Kawasan pesisir Pantai Skouw terletak di Distrik Muara Tami

2.3.2.6. Telaahan KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Kajian Lingkungan Hidusp Strategis (KLHS) RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

Isu strategis KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Meningkatnya degradasi hutan dan deforestasi hutan.
2. Belum optimalnya penanganan kesehatan ibu dan anak.
3. Meningkatnya kerentanan masyarakat miskin akibat akses dan kualitas yang belum memadai di sektor pendidikan dan perlindungan sosial.
4. Belum optimalnya layanan air baku bagi semua rumah tangga.
5. Belum optimalnya akses dan mutu pendidikan.
6. Belum optimalnya kesetaraan gender dan belum meningkatnya pengetahuan pernikahan.
7. Menurunnya kontribusi sektor parawisata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
8. Meningkatnya degradasi lingkungan hutan dan perairan.

Arah Kebijakan KLHS RPJMD, meliputi:

1. Optimalisasi penanganan kesehatan ibu dan anak.
2. Perlindungan dan pengembangan infrastruk air minum.
3. Pengembangan akses dan mutu layanan pendidikan.
4. Mengatasi disparitas (kesenjangan) gender melalui keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD.
5. Diversifikasi ekonomi melalui sektor parawisata.
6. Perlindungan mangrove dengan prinsip kehati–hatian.

2.3.2.7. Isu Strategis RPJMD Kota Jayapura

Pembangunan Kota Jayapura diwarnai dengan berbagai permasalahan yang membutuhkan penanganan secara tepat. Berbagai permaalahan kota memberikan kontribusi terhadap perumusan isu strategis daerah. Isu strategis selain memperhatikan permasalahan daerah, juga mempertimbangkan isu internasional, nasional, dan regional provinsi, serta mempedomani RPJPD dan RTRW Kota Jayapura, dan tidak ketinggalan memperhatikan rekomendasi KLHS RPJMD.

Rumusan isu strategis Kota Jayapura untuk pembangunan jangka menengah periode tahun 2025-2029, yaitu:

1. **Penguatan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**

   Isu ini menunjukkan perlunya strategi komprehensif untuk memperkuat fondasi ekonomi Kota Jayapura. Upaya untuk mendorong sektor-sektor potensial seperti jasa, perdagangan, pariwisata, dan industri pengolahan perlu ditingkatkan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Disamping itu ketergantungan yang tinggi pada sektor konstruksi dan kurangnya diversifikasi ekonomi juga menjadi perhatian penting.

   Lebih lanjut, pengembangan perekonomian kota selain untuk mengejar pertumbuhan, juga tetap mengupayakan adanya inklusifitas. Pembangunan sektor ekonomi diarahkan untuk semakin banyak melibatkan dan memberdayakan masyakat lokal. Pemberdayaan masyarakat di tingkat distrik dan kampung akan terus diupayakan untuk memperkuat perekonomian masyarakat.

   Berkembangnya perekonomian yang didorong oleh investasi yang semakin meningkat, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja terutama tenaga kerja lokal yang semakin banyak. Selain penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor formal, diharapkan kewirausahaan di masyarakat juga dapat berkembang dengan baik.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Unggul dan Penguatan Modal Sosial

Pengembangan SDM di Kota Jayapura merupakan fondasi utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas SDM ini penting untuk mendukung daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu ini mencakup tantangan di bidang pendidikan dan kesehatan, serta penguatan modal sosial masyarakat. Penurunan partisipasi pendidikan di tingkat SMP dan SMA, serta distribusi fasilitas pendidikan yang tidak merata, menunjukkan perlunya peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Di sektor kesehatan, rasio dokter per penduduk yang masih rendah dan distribusi fasilitas kesehatan yang tidak merata serta Angka Kematian ibu dan bayi yang masih cukup tinggi menjadi fokus utama.

Isu lain yang menjadi perhatian pembangunan jangka menengah yakni penguatan modal sosial. Tantangan terbesar bukan hanya pada peningkatan jumlah tenaga kerja, tetapi pada peningkatan kualitas, pemerataan akses, dan pemberdayaan masyarakat lokal (OAP). Pemberdayaan orang asli Papua dan pelestarian budaya Papua merupakan hal penting dalam pembangunan. Keberadaan budaya Papua, menjadi penting karena budaya dalam kenyataannya memberi andil yang sangat besar bagi pembentukan jati diri bangsa, dan juga bagi proses regenerasi masyarakat Papua.

3. Pemenuhan Infrastruktur dan Konektivitas

Isu pemenuhan infrastruktur dan konektivitas di Kota Jayapura merupakan salah satu tantangan utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kondisi jalan di berbagai distrik masih memerlukan perbaikan, terutama di wilayah dengan topografi curam dan kawasan pesisir yang sering terdampak banjir. Selain itu,

distribusi fasilitas publik belum merata, di mana kawasan pusat kota seperti Jayapura Selatan dan Abepura lebih maju dibandingkan wilayah pinggiran seperti Heram dan Muara Tami. Ketimpangan infrastruktur ini berimplikasi pada terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan dasar, pergerakan barang dan jasa yang kurang efisien, serta rendahnya integrasi antarwilayah.

Konektivitas antarwilayah menjadi isu strategis karena perannya dalam memperkuat daya saing ekonomi dan menarik investasi. Peningkatan kualitas jalan, transportasi umum, serta jaringan telekomunikasi diperlukan untuk mendukung aktivitas perdagangan, pariwisata, dan distribusi logistik antar distrik maupun dengan wilayah hinterland di Papua.

Kondisi jalan yang masih perlu perbaikan, potensi kepadatan lalu lintas yang meningkat, serta distribusi fasilitas publik yang tidak merata antar distrik menunjukkan perlunya strategi pengembangan infrastruktur yang lebih terintegrasi. Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan ini, diperlukan pendekatan terpadu dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan Kota Jayapura. Perencanaan dengan mempertimbangkan keterbatasan lahan, serta strategi pembangunan yang menyeimbangkan aspek ekonomi dan lingkungan menjadi kunci dalam mengatasi tantangan geografis dan administratif kota. Pengelolaan secara cermat terhadap kawasan lindung, pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan, dan optimalisasi pemanfaatan lahan yang terbatas akan menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Jayapura.

4. Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Isu lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam tetap menjadi prioritas. Ancaman kekurangan pasokan air bersih pada titik kritis (2036-2038) sebagaimana hasil analisis KLHS dan *fase defici*t air (2038-2052) menjadikan isu ini memerlukan perhatian serius. Hal

ini memaksa Kota Jayapura untuk perlu menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan, termasuk perlindungan hutan, mangrove, dan sumber daya air. Hal ini penting untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan kualitas hidup masyarakat jangka panjang.

5. **Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan, serta Peningkatan Pemerataan Pembangunan**

Isu ini mencakup upaya mengurangi tingkat kemiskinan yang masih di atas 10%, mengatasi kesenjangan gender dalam berbagai aspek (termasuk ketenagakerjaan dan pembangunan manusia), serta mengurangi ketimpangan antar distrik dalam hal akses terhadap fasilitas publik dan peluang ekonomi.

Isu kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Kota Jayapura mencerminkan tantangan struktural dalam pembangunan ekonomi dan sosial daerah. Meskipun pertumbuhan ekonomi terus berlangsung, penurunan kemiskinan masih berjalan lambat dan tidak merata. Berdasarkan data 2020–2024, persentase penduduk miskin menurun dari 11,16% menjadi 10,72%, sementara garis kemiskinan meningkat dari Rp1.021.759 menjadi Rp1.179.015 per kapita per bulan. Kenaikan garis kemiskinan menunjukkan meningkatnya biaya hidup di wilayah perkotaan, terutama akibat inflasi kebutuhan pokok dan transportasi. Di sisi lain, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga meningkat, yang menandakan bahwa kelompok miskin semakin sulit keluar dari jerat kemiskinan.

Kesenjangan pendapatan di Kota Jayapura tampak nyata antara pusat kota dan wilayah pinggiran. Distrik Jayapura Selatan dan Abepura menjadi pusat pertumbuhan jasa dan perdagangan, sementara wilayah seperti Muara Tami dan Heram masih tertinggal dari sisi infrastruktur, akses pendidikan, dan peluang ekonomi. Struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor jasa menyebabkan

sebagian besar lapangan kerja berada di sektor informal dengan produktivitas rendah. Selain itu, Orang Asli Papua (OAP) masih menghadapi keterbatasan dalam akses pendidikan dan pekerjaan formal, memperdalam ketimpangan sosial-ekonomi. Kombinasi faktor ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Jayapura belum cukup inklusif untuk mengatasi ketimpangan dan memastikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Akibat ketimpangan dan urbanisasi, perlu diwaspadai terjadinya potensi konflik sosial. Berbagai permasalahan pembangunan perlu dimitigasi melalui pendekatan dialogis dan kultural. Strategi pembangunan yang inklusif dan merata menjadi kunci untuk menjamin tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan.

6. **Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Partisipasi Publik**

Berdasarkan KLHS dan data tata kelola pemerintahan seperti SPBE, secara umum menjadikan isu tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan merata menjadi penting. Ini mencakup upaya untuk peningkatkan layanan publik dan manajemen pemerintahan berbasis teknologi, serta meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, termasuk keterwakilan perempuan dan kelompok rentan. Penguatan tata kelola ini juga terkait dengan upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, serta memastikan implementasi kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

7. **Mewujudkan Kota yang Resilensi Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim**

Kota Jayapura memiliki kondisi geografis dan topografi yang kompleks, terdiri atas kawasan pesisir, dataran rendah, dan perbukitan curam dengan kemiringan di atas 40%. Sekitar 30% wilayahnya tergolong tidak layak huni karena rawan longsor, erosi,

banjir, dan genangan. Di sisi lain, urbanisasi yang cepat, konversi lahan, serta tekanan terhadap daerah tangkapan air menyebabkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Perubahan iklim global memperparah kondisi ini melalui peningkatan intensitas curah hujan ekstrem, kenaikan muka air laut, serta fluktuasi suhu yang berdampak pada sektor permukiman, infrastruktur, dan kesehatan masyarakat. Banjir di kawasan Abepura, Heram, dan Jayapura Selatan, serta abrasi pesisir di Teluk Youtefa dan Holtekamp, menjadi contoh nyata dari kerentanan iklim dan bencana yang dihadapi Kota Jayapura.

Resiliensi kota menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan sektor jasa dan perdagangan, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta menjamin keamanan dan kenyamanan investasi. Selain itu, penguatan kapasitas masyarakat menghadapi perubahan iklim menjadi isu penting yang perlu dikedepankan.

Tabel 2.141
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Daerah Kota Jayapura

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1. Kota Jayapura berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik dan Papua New Guinea (PNG), sehingga berfungsi sebagai *beranda depan negara* dengan potensi perdagangan lintas batas internasional.	1. Tekanan lingkungan akibat pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang tidak seimbang dengan kapasitas ekologis wilayah	1. Meningkatnya degradasi hutan dan deforestasi hutan.	1. Perubahan Iklim	1. Pertumbuhan ekonomi wilayah Papua melambat, dari 7,03 persen di tahun 2022 rnenjadi 4,87 persen di tahun 2023.	1.Ekonomi dan ketenagakerjaan	1.Penguatan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
2. Pusat Pemerintahan dan Pendidikan	2. Keterbatasan ruang layak bangun karena topografi bergunung, sehingga distribusi kegiatan ekonomi dan permukiman tidak seimbang antar distrik.	2. Belum optimalnya penanganan kesehatan ibu dan anak.	2. Ketimpangan Ekonomi Global	2. Sebagian besar IPM di Wilayah Papua tergolong dalam kategori sedang di Indonesia.	2. Pendidikan dan kesehatan	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Unggul dan Penguatan Modal Sosial

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
3. Kekayaan Alam dan Lingkungan	3. Struktur ekonomi Kota Jayapura didominasi sektor jasa dan perdagangan, sementara sektor produktif seperti pertanian, perikanan, industri kecil, dan pariwisata belum berkembang optimal.	3. Meningkatnya kerentanan masyarakat miskin akibat akses dan kualitas yang belum memadai di sektor pendidikan dan perlindungan sosial.	3. Keamanan Siber dan Privasi Data	3. Wilayah Papua memiliki persentase penduduk miskin (PPM) dan ketertinggalan daerah yang masih tinggi.	3. Disrupsi teknologi dan inovasi	3. Pemenuhan Infrastruktur dan Konektivitas
4. Infrastruktur Perkotaan Relatif Lengkap	4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia belum sejalan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi dan pelayanan publik.	4. Belum optimalnya layanan air baku bagi semua rumah tangga.	4. Ancaman dan Krisis Air Global	4. Wilayah Papua memiliki indeks risiko bencana kategori tinggi terutama dari banjir, longsor, tsunami, dan gempa bumi yang bersumber dari sesar-sesar normal.	4. Pengelolaan SDA dan pembangunan berkelanjutan	4. Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan
5. Keanekaragaman Sosial-Budaya	5. Masih menghadapi kesenjangan infrastruktur antarwilayah dan keterbatasan pelayanan dasar	5. Belum optimalnya akses dan mutu pendidikan.	5. Degradasi Lingkungan dan Hilangnya Keanekaragaman Hayati	5. Banyaknya kawasan konservasi yang berlokasi di sekitar kawasan pertumbuhan sehingga berpotensi terdampak oleh pengembangan kawasan pertumbuhan.	5. Transformasi tata kelola pemerintahan, birokrasi dan manajemen ASN	5. Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan, serta Peningkatan Pemerataan Pembangunan
	6. Belum optimalnya penerapan birokrasi yang efisien dan adaptif	6. Belum optimalnya kesetaraan gender dan belum meningkatnya pengetahuan pernikahan.	6. Urbanisasi dan Pertumbuhan Kota		6. Pendapatan antardaerah dan global	6. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Partisipasi Publik

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	7. Kota Jayapura menghadapi tantangan menjaga identitas budaya lokal di tengah arus modernisasi dan migrasi.	7. Menurunnya kontribusi sektor parawisata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.	7. Transformasi Digital dan Masa Depan Pekerjaan		7. Mempertahankan dan menghormati budaya masyarakat	7. Mewujudkan Kota yang Resilensi Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim
	8. Kerentanan tinggi terhadap bencana alam dan perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi pembangunan berkelanjutan kota.	8. Meningkatnya degradasi lingkungan hutan dan perairan.	8. Kebutuhan Respons Global		8. Potensi sumber daya pembangunan	
					9. Demografi, urbanisasi dan keterkaitan kota-kampung	
					10. Pengentasan kemiskinan dan pembangunan inklusif	

Sumber: hasil analisis, 2025

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

3.1.1. Visi dan Misi

Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai keadaan atau kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun. Visi RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029 dirumuskan dengan berpedoman pada RPJPD Kota Jayapura Tahun 2025-2045 dan RTRW Kota Jayapura Tahun 2013-2033.

Pembangunan jangka menengah Kota Jayapura tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama dari RPJPD Kota Jayapura Tahun 2025-2045. Visi Kota Jayapura dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, sebagai berikut:

"Jayapura Sebagai Kota Jasa Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Unggul, Berbudaya, Maju dan Berkelanjutan"

Visi RPJPD berfungsi sebagai payung besar yang menekankan arah pembangunan struktural dan sektoral berbasis ekonomi kerakyatan, budaya, dan keberlanjutan. Dengan demikian, keterkaitan antara kedua visi ini menunjukkan kesinambungan perencanaan pembangunan Kota Jayapura. RPJPD menekankan "arah dan cita-cita besar" pembangunan kota, sementara RPJMD berfungsi sebagai instrumen pencapaian secara bertahap, sekaligus menginternalisasi nilai budaya, religi, kemandirian, dan kesejahteraan menuju terwujudnya Jayapura Emas yang sesuai dengan cita-cita pembangunan jangka panjang.

Selain RPJPD, penyusunan RPJMD juga memedomani RTRW Kota Jayapura. Adapun tujuan penataan ruang Kota Jayapura 2013-

2033, yaitu: “Mewujudkan Kota Jayapura sebagai pusat pelayanan regional pendidikan, perdagangan dan jasa, pariwisata, serta beranda depan negara yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, serta menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal.”

Dokumen RTRW memberikan kerangka ruang yang menyiapkan prasyarat fisik, ekologis, dan spasial untuk mendukung terwujudnya visi RPJMD. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan penataan ruang RTRW dan visi RPJMD Kota Jayapura bersifat komplementer dan integratif. RTRW berfungsi sebagai landasan tata ruang yang memungkinkan terciptanya struktur kota yang produktif, adaptif, dan berkelanjutan. Sementara RPJMD memberikan arah kebijakan pembangunan sosial, ekonomi, budaya, dan religius yang akan diimplementasikan dalam kerangka ruang tersebut.

Fungsi Kota Jayapura sebagai pusat pendidikan, perdagangan dan jasa, serta pariwisata dalam RTRW sejalan dengan orientasi RPJMD yang menempatkan sektor jasa sebagai penggerak utama perekonomian. Prinsip keberlanjutan, kelestarian alam, dan kearifan lokal dalam RTRW memperkuat aspek “berbudaya, religius, dan berkelanjutan” sebagaimana termuat dalam visi RPJMD. Demikian pula, aman dan nyaman sebagai tujuan RTRW mendukung penciptaan kota yang maju, mandiri, dan sejahtera sesuai dengan sasaran RPJMD.

Dengan memerhatikan visi RPJPD dan RTRW, wali kota dan wakil wali kota merumuskan visi pembangunan jangka menengah Kota Jayapura tahun 2025-2029, yakni:

Visi:

TERWUJUDNYA KOTA JAYAPURA SEBAGAI KOTA JASA YANG BERBUDAYA, RELIGIUS, MAJU, MANDIRI, DAN SEJAHTERA MENUJU JAYAPURA EMAS

Visi RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029 terdiri atas beberapa pokok visi yang menjadi kata kunci, dengan penjelasan sebagai berikut:

Kota Jasa, bermakna bahwa Jayapura sebagai kota yang mampu menjadi pusat jasa antar pulau dan internasional, dengan mempertimvbangkan posisinya yang sangat strategis. Arah pembangunan kota dititikberatkan pada pengembangan sektor jasa sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Konsep kota jasa tidak hanya dipahami sebagai pusat transaksi ekonomi, tetapi juga mencakup penyediaan layanan publik, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta penciptaan ekosistem yang mendukung aktivitas perdagangan, perikanan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan logistik. Pengembangan kota jasa diarahkan pada upaya untuk lebih meningkatkan produktifitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Kota Jayapura secara inklusif dan berkelanjutan.

Berbudaya, bermakna bahwa modal sosial budaya yang menjadi ciri masyarakat Kota Jayapura semakin diperkuat dan dilestarikan. Masyarakat Kota Jayapura menghormati dan mempertahankan kearifan lokal dan nilai-nilai yang mengakar dalam masyarakat berlandaskan Pancasila, ditengah kemajuan teknologi dan informatika serta perkembangan kota yang dinamis.

Suku Port Numbay, yang merupakan penduduk asli di wilayah pesisir Teluk Youtefa dan sekitarnya, memiliki peran sentral dalam identitas budaya Kota Jayapura. Tradisi Port Numbay yang berakar pada kehidupan laut dan pesisir tetap dijaga melalui praktik adat, tarian, rumah adat, hingga kearifan lokal dalam menjaga lingkungan teluk.

Religius, bermakna bahwa agama menjadi pondasi pembangunan di Kota Jayapura. Untuk itu toleransi dan kerukunan antar umat beragama harus terus dijaga dan diupayakan bersama-sama.

Maju, bermakna bahwa Kota Jayapura sebagai kota berdaya saing tinggi, unggul, dinamis, tangguh, dan inovatif. Pembangunan diarahkan untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi Orang Asli Papua (OAP)

dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik, sehingga OAP dapat menjadi pelaku utama sekaligus penerima manfaat pembangunan. Hasil pembangunan diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara merata dan berkeadilan ditengah kondisi kota yang kondusif dan tentram. Kemajuan tidak hanya ditandai dengan tampilan fisik kota namun digerakkan oleh masyarakat yang sehat, cerdas, dan produktif, didukung infrastruktur dan utilitas kota yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Sejahtera, bermakna bahwa pembangunan ditujukan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, didukung pemerataan akses ke sumberdaya produktif, tata kelola pemerintahan yang baik, dan meningkatnya investasi dan usaha-usaha ekonomi yang menyerap tenaga kerja terutama masyarakat lokal. Percepatan pembangunan didukung oleh inovasi dan pengembangan kreatifitas dengan tetap menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Mandiri, bermakna seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal dan berkelanjutan dengan mendorong partisipasi berbagai pihak dalam pelaksanaan pembangunan. Penguatan alternatif pembiayaan pembangunan yang inovatif diharapkan dapat mengakselerasi perkembangan kota.

Jayapura Emas, bermakna bahwa Kota Jayapura menjadi daerah yang maju dan sejahtera serta berdaya saing tinggi. Dengan posisinya sebagai ibukota Provinsi Papua, Jayapura memikul tanggung jawab untuk menyediakan pusat pelayanan pemerintahan, sosial, budaya, dan ekonomi yang menjangkau daerah-daerah lain di Provinsi Papua.

Visi Kota Jayapura sebagai kota jasa mencerminkan orientasi pembangunan yang berfokus pada pelayanan, keterhubungan, dan keberlanjutan. Sebagai ibukota Provinsi Papua dan beranda depan negara, Kota Jayapura diarahkan untuk menjadi pusat perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang mendukung pertumbuhan Papua secara keseluruhan. Visi ini sekaligus menegaskan peran Kota Jayapura

tidak hanya sebagai pusat ekonomi lokal, tetapi juga sebagai simpul penting dalam jaringan perdagangan regional dan internasional.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, ditetapkan beberapa misi. Misi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029.

Visi pembangunan Kota Jayapura diarahkan untuk menjadikan Jayapura sebagai kota jasa yang maju dan mandiri, dengan tetap berakar pada nilai budaya dan religius, serta mengupayakan perwujudan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut, 6 (enam) misi pembangunan periode tahun 2025-2029, disusun sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Sejahtera Dengan Memegang Teguh Nilai–Nilai Keagamaan, Menjaga Keluhuran Adat Istiadat**

   Misi ini menegaskan pentingnya menjaga kerukunan dan memperkuat nilai-nilai moral masyarakat di tengah keberagaman etnis dan agama di Papua. Hal ini selaras dengan visi kota berbudaya dan religius, yang menjadikan kearifan lokal serta nilai-nilai keimanan sebagai landasan pembangunan. Kota Jayapura memiliki keanekaragaman budaya yang khas, dipengaruhi oleh keberadaan berbagai suku asli Papua dan masyarakat pendatang dari berbagai daerah di Indonesia. Kondisi ini menjadikan Kota Jayapura sebagai pusat multikultural di Papua, di mana nilai adat, bahasa lokal, dan budaya Port Numbay menjadi akar yang memperkuat harmoni dengan masyarakat pendatang, sekaligus mempertegas peran Jayapura sebagai beranda depan Papua.

2. **Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Ekonomi, Sosial yang Berkelanjutan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan**

   Misi ini berhubungan erat dengan cita-cita menjadikan Jayapura sebagai kota yang sejahtera. Melalui pemerataan infrastruktur, layanan dasar, dan perlindungan lingkungan, misi ini memastikan bahwa

seluruh lapisan masyarakat memperoleh manfaat pembangunan tanpa mengabaikan kelestarian ekologi. Hal ini bertujuan agar pembangunan berjalan adil, merata, dan ramah lingkungan.

3. **Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Bertumpu Pada Sektor Jasa Perdagangan, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Kelestarian Budaya Lokal**

   Kota Jayapura sebagai ibukota provinsi memiliki peran penting dalam perdagangan regional dan lintas batas dengan Papua New Guinea. Misi ini menekankan penguatan sektor jasa, perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya agar masyarakat lebih mandiri, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif yang selama ini menjadi isu utama di hampir seluruh wilayah Papua.

   Misi ini bertujuan untuk memaksimalkan peran strategis Kota Jayapura sebagai pusat jasa dan perdagangan regional dan lintas batas. Sebagai kota jasa, Jayapura diarahkan untuk mengutamakan kegiatan ekonomi berbasis pelayanan, baik jasa modern (pendidikan, kesehatan, keuangan, teknologi informasi, transportasi, logistik) maupun jasa tradisional (perdagangan, pasar rakyat, jasa perikanan, dan pertanian). Dalam lingkup provinsi, Kota Jayapura tidak hanya diposisikan sebagai daerah produksi tetapi juga sebagai pusat distribusi dan perdagangan. Potensi perikanan dan pertanian kota menopang ketersediaan bahan pangan dan protein ikan bagi masyarakat perkotaan, sekaligus memperkuat posisi kota sebagai pusat jasa perdagangan regional. Produk-produk perikanan dari kabupaten pesisir utara, seperti Sarmi, Supiori, dan Biak Numfor, maupun dari wilayah selatan seperti Merauke, pada umumnya dipasarkan melalui Kota Jayapura. Demikian pula hasil pertanian dari Keerom, Lanny Jaya, atau Pegunungan Tengah seringkali menjadikan Kota Jayapura sebagai pusat distribusi utama. Keterhubungan ini menegaskan bahwa meskipun dari sisi luasan dan volume produksi Kota Jayapura tidak sebesar kabupaten lain yang berbasis pertanian dan perikanan, namun fungsi intermediasi

dan hub distribusi menjadikan peran Kota Jayapura sangat vital dalam sistem pangan dan perikanan provinsi Papua.

Lebih lanjut, Kota Jayapura memiliki keunggulan geografis dan budaya yang menjadikannya gerbang utama pariwisata Provinsi Papua dan Indonesia bagian timur. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan kota jasa berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan beridentitas budaya Papua.

4. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Melalui Transformasi Digital Dengan Reformasi Birokrasi**

   Kota Jayapura menghadapi tantangan dalam kualitas birokrasi dan pelayanan publik. Reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat, menciptakan efisiensi, dan menegaskan peran Kota Jayapura sebagai pusat layanan pemerintahan yang modern, berbasis digital, dan akuntabel.

5. **Memperkuat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pendidikan Kesehatan untuk Melahirkan SDM Unggul, Produktif, dan Berkarakter**

   Misi ini berkaitan langsung dengan visi membangun sumber daya manusia unggul sebagai modal utama menuju kesejahteraan. Kesenjangan kualitas pendidikan dan kesehatan masih nyata di Papua. Oleh karena itu, Kota Jayapura direncanakan menjadi pusat layanan pendidikan dan kesehatan yang unggul, sehingga mampu mencetak generasi muda Papua yang sehat, cerdas, produktif, dan siap berkontribusi dalam pembangunan.

6. **Mengejewantahkan Daerah Berdasarkan Asta Cita**

   Misi ini memastikan pembangunan Kota Jayapura sejalan dengan prioritas nasional Asta Cita, dengan beberapa prioritas antara lain peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan ketimpangan, pembangunan berkelanjutan, dan penguatan ekonomi hijau. Dengan demikian, pembangunan kota tidak hanya berorientasi lokal, tetapi juga berkontribusi pada agenda pembangunan nasional di Papua.

3.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029. Tujuan diturunkan dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun.

Sementara Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Sasaran diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.

Kinerja pemerintah daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan merupakan kondisi yang dinyatakan dalam bentuk Tujuan dan Sasaran RPJMD. Tujuan dan Sasaran tersebut berasal dari pohon kinerja. Penyusunan pohon kinerja akan menjadi dasar dalam penjenjangan kinerja instansi pemerintah. Gambar 3.1. memuat pohon kinerja RPJMD sementara Tabel 3.1. memuat penjabaran tujuan dan sasaran pada setiap misi. Selanjutnya, dalam mengukur terwujudnya tujuan dan sasaran, maka digunakan beberapa indikator kinerja. Indikator kinerja pada masing-masing tujuan dan sasaran dilengkapi dengan target per tahun.

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

MISI	TUJUAN & SASARAN		INDIKATOR	BASELINE		TARGET				
				2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERAHLAK DAN SEJAHTERA DENGAN MEMEGANG TEGUH NILAI–NILAI KEAGAMAAN, MENJAGA KELUHURAN ADAT ISTIADAT	**1.1**	**Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat**	**Angka Konflik Bernuansa SARA (Angka)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.1.1	Meningkatnya kerukunan umat beragama serta pelestarian adat istiadat dan budaya	Persentase konflik yang ditangani (%)	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase cagar budaya dan kesenian tradisional yang dilestarikan (%)	100	100	100	100	100	100	100
2. MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI, SOSIAL YANG BERKELANJUTAN DENGAN MEMPERHATIKAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN	**2.1**	**Meningkatkan pengembangan kota yang berwawasan lingkungan**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)**	**75,50**	**75,53**	**75,57**	**75,60**	**75,64**	**75,67**	**75,71**
	2.1.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	92,26	92,27	92,28	92,29	92,30	92,31	92,31
			Indeks Kualitas Air (Indeks)	50,00	51,02	52,06	53,12	54,21	55,31	56,44
			Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	88,31	88,59	88,87	89,16	89,44	89,72	90,01
	2.1.2	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	103,94	103,86	103,79	103,71	103,63	103,55	103,48
	2.1.3	Meningkatnya pemenuhan	Indeks Infrastruktur (Indeks)	0,35	0,44	0,48	0,53	0,58	0,64	0,71

MISI	TUJUAN & SASARAN		INDIKATOR	BASELINE		TARGET				
				2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
		infrastruktur berkualitas dan merata								
3. MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI YANG BERTUMPU PADA SEKTOR JASA PERDAGANGAN, EKONOMI KREATIF, PARIWISATA, DAN KELESTARIAN BUDAYA LOKAL	**3.1**	**Penguatan fondasi transformasi ekonomi berbasis sektor unggulan daerah yang inklusif dan berkelanjutan**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)**	**3,56**	**3,67**	**3,78**	**3,89**	**4,01**	**4,13**	**4,13**
			PDRB Per Kapita (ribu rupiah)	**94.667**	**98.549**	**102.590**	**106.798**	**111.177**	**115.736**	**120.483**
			Rasio Gini	**0,293**	**0,283**	**0,273**	**0,263**	**0,253**	**0,243**	**0,233**
	3.1.1	Berkembangnya perekonomian yang bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, ekonomi kreatif, pariwisata, dan budaya lokal	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	18,79	19,50	20,24	21,00	21,79	22,62	23,47
			Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (%)	1,71	1,76	1,81	1,87	1,92	1,98	1,98
	3.1.2	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Investasi (rupiah)	4.405.433.397.138	4.845.976.736.852	5.330.574.410.537	5.863.631.851.591	6.449.995.036.750	7.094.994.540.425	7.804.493.994.468
	3.13	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,29	7,70	7,15	6,64	6,17	5,73	5,32

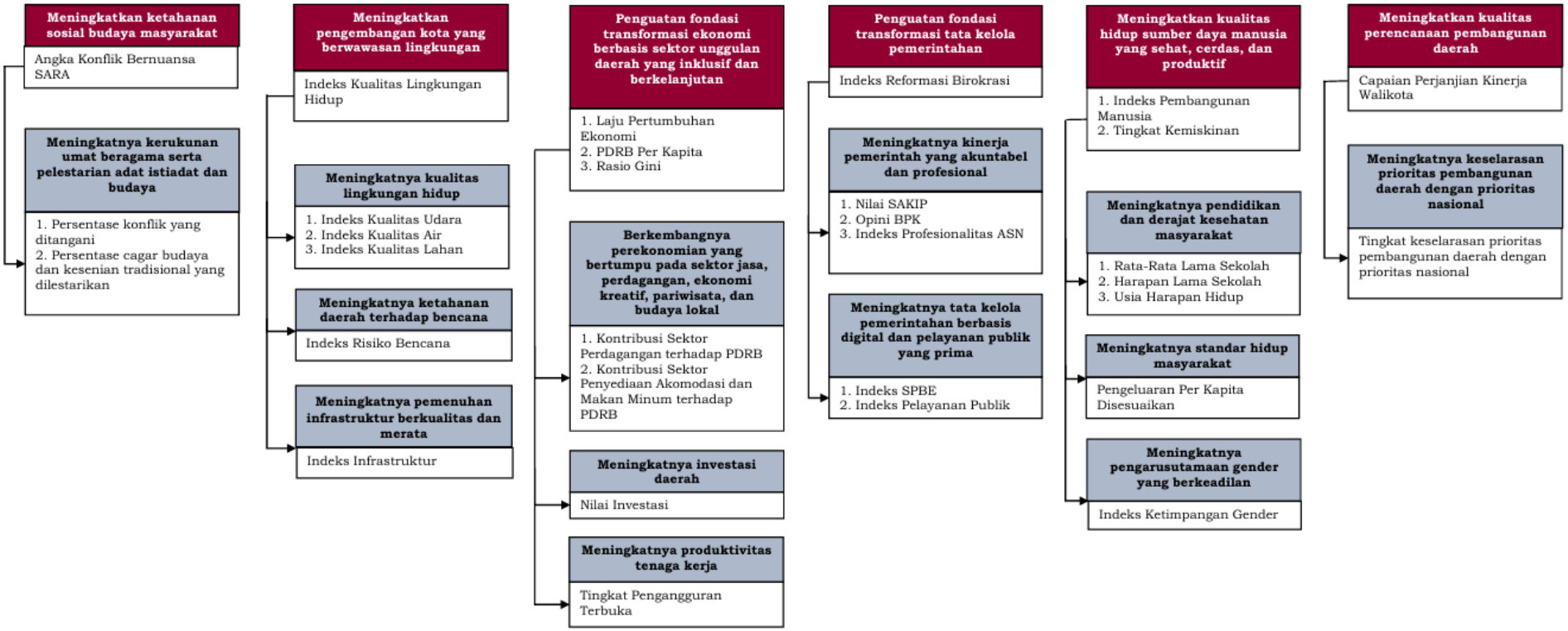
MISI	TUJUAN & SASARAN		INDIKATOR	BASELINE		TARGET				
				2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
4. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA MELALUI TRANSFORMASI DIGITAL DENGAN REFORMASI BIROKRASI	**4.1**	**Penguatan fondasi transformasi tata kelola pemerintahan**	**Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)**	**CC**	**CC**	**57 (CC)**	**57,6 (CC)**	**58,3 (CC)**	**59 (CC)**	**60 (B)**
	4.1.1	Meningkatnya kinerja pemerintah yang akuntabel dan profesional	Nilai SAKIP (Nilai)	61,31 (B)	62,16 (B)	63 (B)	63,5 (B)	64 (B)	65 (B)	66 (B)
			Opini BPK (Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	51	58	65	70	75	77	80
	4.1.2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pelayanan publik yang prima	Indeks SPBE (Indeks)	2,35	2,36	2,37	2,39	2,40	2,41	2,42
			Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	88,63	90,32	92	92,4	93	93,4	94
5. MEMPERKUAT PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDIDIKAN KESEHATAN UNTUK MELAHIRKAN SDM UNGGUL, PRODUKTIF, DAN BERKARAKTER.	**5.1**	**Meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif**	**Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)**	**81,98**	**82,39**	**82,79**	**83,20**	**83,61**	**84,03**	**84,44**
			Tingkat Kemiskinan (%)	**10,72**	**10,62**	**10,52**	**10,42**	**10,32**	**10,22**	**10,12**
	5.1.1	Meningkatnya pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	12,07	12,20	12,33	12,47	12,60	12,74	12,88
			Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,27	15,34	15,40	15,47	15,54	15,60	15,67
			Usia Harapan Hidup (tahun)	71,99	72,17	72,34	72,52	72,70	72,87	73,05
	5.1.2	Meningkatnya standar hidup masyarakat	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah/orang/tahun)	15.408	15.574	15.741	15.911	16.082	16.255	16.430

MISI	TUJUAN & SASARAN		INDIKATOR	BASELINE		TARGET				
				2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	5.1.3	Meningkatnya pengarusutamaan gender yang berkeadilan	Indeks Ketimpangan Gender (indeks)	0,35	0,350	0,345	0,340	0,335	0,330	0,325
6. MENGEJEWANTAHKAN DAERAH BERDASARKAN ASTA CITA.	**6.1**	**Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah**	**Tingkat Capaian Asta Cita yang diejawantahkan daerah (%).**	**N/A**	**N/A**	**90**	**92**	**94**	**96**	**98**
	6.1.1	Meningkatnya keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan prioritas nasional	Tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan prioritas nasional (%)	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: hasil analisis, 2025

Gambar 3.1

Pohon Kinerja RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029



Sumber: hasil analisis, 2025

3.1.3. Agenda Prioritas Kepala Daerah

Visi dan misi RPJMD Kota Jayapura tahun 2025-2029 dilengkapi dengan agenda prioritas dan program kerja yang nyata. Agenda prioritas memberikan gambaran fokus pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Adapun agenda prioritas tersebut merupakan janji wali kota dan wakil walikota yang diprioritaskan pelaksanaannya dan perlu didukung oleh seluruh perangkat daerah.

Adapun 9 agenda prioritas disajikan pada gambar di bawah. Lebih rinci mengenai program kerja pada masing-masing agenda prioritas dimuat pada halaman berikutnya.

Gambar 3.2

9 Agenda Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura Tahun 2025-2029



Tabel 3.2.

Agenda Prioritas dan Program Kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura Tahun 2025-2029

NO.	9 PRIORITAS & PROGRAM KERJA WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
I	**Pemulihan Ekonomi, Pembukaan Lapangan Kerja**		
1	Buka kesempatan berusaha seluas-luasnya untuk rakyat.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
2	Promosi daerah untuk tumbuhkan investasi dunia usaha yang inklusif dan menyerap banyak tenaga kerja.	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
3	Pelatihan kewirausahaan lahirkan 250 pengusaha baru pertahun.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnaker
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Disperindagkop
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Disperindagkop
		Program Pengembangan UMKM	Disperindagkop
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing kepemudaan	Dispora
4	Penerbitan aturan dunia usaha untuk mendorong penyerapan tenaga kerja lokal.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
5	Pengembangan pusat inovasi dan teknologi daerah	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
6	Investasi dan promosi daerah (Permuda proses perijinan dan berikan insentif bagi investor yang berkomitmen pada pembangunanberkelanjutan)	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
7	Kompetensi tenaga kerja lokal (Pelatihan dan sertifikasi, kompetensi tenaga kerja lokal agar dapat bersaing dijalur yang lebih luas)	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas PUPRPKP
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
II	**Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul**		
8	GERPEDSOS (Gerakan Bantuan Biaya Pendidikan dan Kepedulian Sosial)	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Tingkat kualitas dan pemerataan infrastruktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO.	9 PRIORITAS & PROGRAM KERJA WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
10	Tingkatkan fasilitasi penyerataan Kejar Paket A, B, C secara gratis.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11	Pemberian Beasiswa kuliah untuk anak muda berprestasi, anak yatim, warga kurang mampu, dan atlet berprestasi tiap tahun.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12	Pemberian insentif guru keagamaan.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra, Setda
13	Meningkatkan muatan pendidikan berbasis keagamaan dan muatan lokal di sekolah.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14	Subsidi biaya Pendidikan Dasar (Bebas Biaya Masuk Sekolah dan Uang Buku SD, SMP dan SMA/Sederajat bagi warga tidak mampu)	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15	Penyelenggaraan kompetisi olahraga tingkat Kota dan Provinsi	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16	Penguatan pendidikan berbasis budaya lokal (Memperkuat pendidikan yang berbasis budaya lokal Papua, agar generasi muda lebih mengenal dan melestarikan warisan budaya mereka)	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
III	**Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang Berorientasi pada Preventif**		
17	KESEHATAN/GERASNA NGIZI (Gerakan Asupan Makanan dan Minuman Bergizi)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
18	Tingkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara lebih merata	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
19	Bantuan nutrisi untuk kesehatan ibu dan balita serta peningkatan imunisasi.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
20	Penyediaan sumber daya manusia bidang kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan

NO.	9 PRIORITAS & PROGRAM KERJA WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
	secara memadai di seluruh fasilitas kesehatan.		
21	Perluas bantuan jaminan kesehatan bagi keluarga miskin.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
22	Penyejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
23	Tingkatkan kualitas kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM): Posyandu, Polindes, Kampung Siaga, Pos UKK (Upaya Kesehatan Kerja), Toga (taman obat keluarga).	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
24	Pembangunan Fasilitas Kesehatan dan Layanan Puskesmas 24 jam.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
25	Peningkatan insentif kader posyandu	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
IV	**Penguatan Produktivitas, Pertanian dan Perikanan**		
26	Tingkatkan bantuan alat mesin pertanian dan sarana produksi bagi petani/nelayan, mulai dari pupuk hingga bibit, benih dan alat tangkap.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan sarana pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
27	Tingkatkan pertanian organik melalui pengembangan pupuk dan pestisida organik.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
28	Bantuan asuransi petani, nelayan, dan peternak.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
29	Tingkatkan budidaya perikanan darat dan pesisir.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
30	Ciptakan Startup pertanian-perikanan yang digerakkan anak-anak muda.	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
31	Tumbuhkan kreativitas penelitian dan pengembangan pertanian.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Bappeda
32	Tingkatkan hilirisasi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Disperindagkop
33	Optimalisasi peran penyuluh dan mobil layanan keliling pertanian.	Program Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO.	9 PRIORITAS & PROGRAM KERJA WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
34	Subsidi pupuk petani	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
V	**Penguatan Sektor UMKM dan Pariwisata**		
35	Pembangunan Pasar Modern Dan Renovasi Pasar Tradisional	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Disperindagkop
36	Satu Distrik, satu rumah kreatif untuk fasilitas pelatihan, pendampingan, penguatan produksi, dan fasilitas permodalan, pemasaran UMKM, usaha rakyat, dan seniman lokal.	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas PUPRPKP
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
37	Fasilitasi total akses pemasaran UMKM dan pariwisata secara digital ke pasar nasional dan internasional.	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
38	BUMDES naik kelas gerakkan ekonomi desa.	Program Penataan Desa	DPMK
39	Jaga wisata berbasis tradisi dan sesuai nilai-nilai masyarakat lokal.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
40	Tingkatkan pariwisata berbasis masyarakat untuk kesejahteraan rakyat (BUMDES, kelompok sadar wisata, Karang Taruna, dan sebagainya).	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
41	Tingkatkan kesejahteraan pelaku pemberdayaan sanggar-sanggar seni. kesenian lokal	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
42	Penerbitan regulasi perkuat kampung wisata dan produk lokal (pewajiban pembelian produk lokal untuk setiap acara dari RT/RW, kampung/kelurahan, distrik, hingga kota).	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
43	Pengembangan kampung wisata dan Pelatihan pemandu wisata budaya lokal	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
44	Pengembangan Kawasan wisata Terintegrasi (Membangun dan mempromosikan destinasi wisata baru Kota Jayapura yang melibatkan masyarakat setempat, termasuk kawasan pesisir dan perbukitan)	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUPRPKP
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
45	Penyelenggaraan Festival budaya lokal	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO.	9 PRIORITAS & PROGRAM KERJA WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
VI	**Penguatan Keberdayaan Masyarakat Miskin dan Perlindungan Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas**		
47	Tingkatkan luasan dan kualitas bantuan sosial untuk warga miskin.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
48	1000 Bedah rumah warga miskin menuju Rumah Sehat Layak Huni.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas PUPRPKP
49	RUANG RINDU: Ruang Perlindungan Ibu dengan fasilitasi konseling dan bantuan hukum GRATIS terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak.	Program Perlindungan Perempuan	DP3KB
50	Edukasi dan pendampingan kepada pasangan calon pengantin dan orang tua untuk menjamin kesiapan berumah tangga dan mengurangi angka perceraian dan kasus KDRT.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DP3KB
51	RUMAH PERINTIS (pemberdayaan dan perlindungan gratis) untuk pelatihan keterampilan dan pendampingan kepada penyandang disabilitas menuju kemandirian.	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
52	Pendampingan penyandang masalah kesejahteraan sosial.	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
53	Integrasi dan inovasi program pengentasan kemiskinan menuju kemandirian ekonomi warga.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
VII	**Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan**		
54	GERSIH KOMPUNG (Gerakan Kebersihan Kota dan Kampung Kampung)	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
55	PENERANGAN KOTA (Mulai dari kelurahan hingga kampung kampung)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas PUPRPKP
56	Tingkatkan pembangunan infrastruktur fisik untuk menunjang pemerataan pembangunan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas perikanan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindagkop
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
57	Satu Kampung, satu taman/ruang bermain untuk warga.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas PUPRPKP
58	Perluas pembangunan infrastruktur dan kualitas	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Kominfo

NO.	9 PRIORITAS & PROGRAM KERJA WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
	layanan teknologi informasi untuk perkuat literasi digital warga.	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
59	Pemantapan tenaga teknis untuk percepat respons permasalahan infrastruktur fisik.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas PUPRPKP
60	Pengendalian alih fungsi lahan dan peningkatan rehabilitasi serta pencegahan lahan kritis.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUPRPKP
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
61	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam konservasi pesisir, lahan, dan hutan.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
62	Pembangunan rumah singgah.	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas PUPRPKP
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
63	Pengembangan energi terbarukan untuk fasilitas publik	-	tidak ada kewenangan pemerintah kota
64	Meningkatkan akses air bersih yang layak di seluruh wilayah Kota Jayapura dan Subsidi sambungan air bersih bagi warga tidak mampu.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPRPKP
65	Pengelolaan Sampah Terpadu sistem 3R (Mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien dan ramah lingkungan dengan meningkatkan fasilitas daur ulang dan pengolahan sampah)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
66	Konservasi Hutan dan Sumber Daya Alam (Melindungi kawasan hutan lindung dan sumber daya alam melalui konservasi dan patroli rutin)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
67	Percepatan Infrastruktur Transportasi (Memperbaiki dan memperluas jaringan jalan, jembatan, terminal dan transportasi umum untuk meningkatkan konektivitas antar distrik)	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUPRPKP
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
68	Pembersihan saluran/drainase, pengerukan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PUPRPKP

NO.	9 PRIORITAS & PROGRAM KERJA WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
	kali/sungai dan penyediaan rumah pompa	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PUPRPKP
VIII	**Pemantapan Ekosistem Sosial, Keagamaan, dan Kerukunan Warga**		
69	GERDUKAMTIBMAS (Gerakan Terpadu Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas Damkar dan Penyelamatan, Distrik
70	Memantapkan kerukunan antar-umat beragama.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kesbangpol
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra, Setda
71	Tingkatkan bantuan renovasi rumah ibadah	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas PUPRPKP
72	Perkuat budaya gotong royong dalam segala bidang kehidupan		Kesbangpol
73	Asuransi untuk warga tidak mampu/tenaga nonformal	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
74	Menjaga stabilitas keamanan/Kamtibnas dan Patroli keamanan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
75	Pencegahan dan penanganan konflik sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kesbangpol
76	Sistem keamanan terpadu berbasis teknologi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Diskominfo
77	Pengembangan forum dialog antara agama/etnis	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Kesbangpol
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra, Setda
78	Memberangkatkan wisata rohani petugas umat beragama.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra, Setda
79	Bebas biaya pemakaman.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas PUPRPKP
IX	**Pemantapan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi dengan Transformasi Digital**		
80	SMARTKELURAHAN Plus: Penguatan pelayanan publik unggul hingga ke Kampung.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Distrik Jayapura Utara
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Distrik Jayapura Selatan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Distrik Abepura

NO.	9 PRIORITAS & PROGRAM KERJA WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Distrik Heram
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Distrik Muara Tami
		Program Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil
		Program Pencatatan Sipil	Disdukcapil
		Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
81	Pengembangan portal layanan pengaduan dan data base aktivitas warga berbasis Dasawisma.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	DPMK
82	Pembudayaan inovasi hingga level RT/RW, reward dan peningkatan insentif untuk pengurus RT/RW.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Pemerintahan, Setda
83	Program reward kepada ASN agen perubahan/inovator baik di dinas maupun di masyarakat (ASNGot-Talent).	Program Kepegawaian Daerah	BKPP
84	Peningkatan Kompetensi Aparatur pemerintah	Program Kepegawaian Daerah	BKPP
85	Pengembangan Sistem Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPAD
86	Pelayanan langsung Walikota kepada masyarakat setiap hari senin, di lobi kantor Walikota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan, Setda
87	Pembangunan pusat data dan *command center* kota	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi Dan Informatika
88	Pembangunan jaringan internet broadband	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
89	Pemasangan Wifi Gratis	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
90	Perubahan jam kerja ASN (Masuk 07.30 dan pulang 15.30) dan menaikkan TPP ASN	Program Kepegawaian Daerah	BKPP
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
91	Penyediaan sarana dan prasarana berupa Armada Damkar dan Penambahan titik Hydrant	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Sumber: Naskah Visi, Misi, dan Program Kerja Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura, dianalisis

3.2. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1. Strategi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

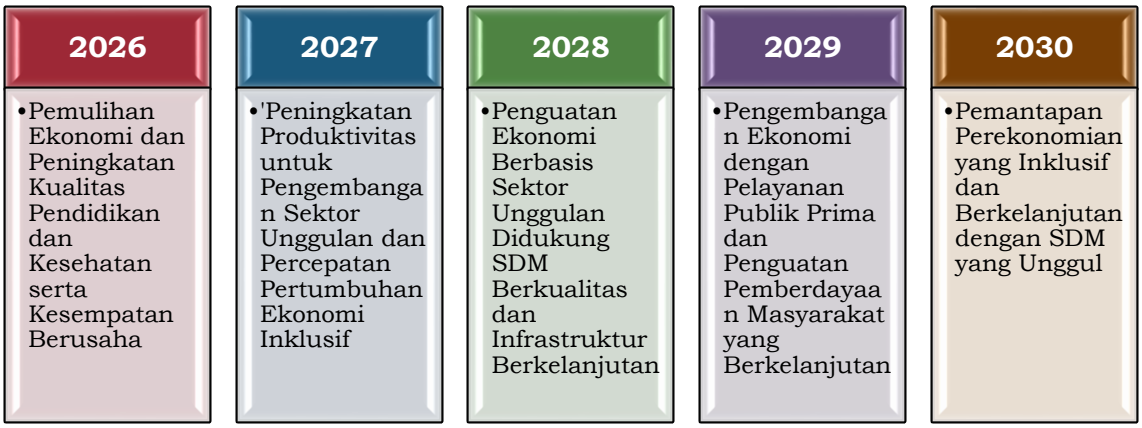
Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Penahapan pembangunan dapat disajikan seperti pada tabel di bawah. Pembangunan tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama dari RPJPD Kota Jayapura Tahun 2025-2045. Tema pembangunan pada tahap I (2025-2029) RPJPD adalah "Penguatan Fondasi Transformasi Pembangunan, dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia berkualitas profesional, serta pengembangan jasa dan perdagangan pada sektor unggulan yang berbasis pada ekonomi kreatif, pertanian, perikanan, pariwisata, industri, dan kesehatan".

Tema umum pembangunan jangka menengah pada periode I RPJPD diterjemahkan kedalam tema per tahun. Tema pembangunan per tahun dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Adapun tema pembangunan setiap tahun mulai tahun 2026 sampai dengan 2030 disajikan pada gambar di bawah.

Gambar 3.3

Penahapan Pembangunan Jangka Menengah Kota Jayapura Tahun 2025-2029



Sumber: hasil analisis, 2025

Penjelasan setiap tahapan pembangunan Kota Jayapura selama 5 (lima) tahun kedepan, diuraikan sebagai berikut:

a. Tahun 2026: Pemulihan Ekonomi serta Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Kesempatan Berusaha

Fokus pembangunan tahun ini diarahkan pada pemulihan daya beli dan perbaikan layanan dasar, terutama untuk kelompok rentan. Perlu dilakukan penguatan upaya-upaya perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan UMKM, serta padat karya produktif untuk segera mengurangi tekanan rumah tangga berpendapatan rendah.

Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan dilakukan dengan penguatan sarana-prasarana publik sesuai pengalokasian ruang untuk fasilitas pendidikan dan kesehatan, dilengkapi pemetaan kebutuhan sebaran layanan per distrik. Pada aspek lingkungan permukiman, diprioritaskan pada sanitasi dan air limbah melalui percepatan pembangunan/optimalisasi IPAL komunal untuk menahan tren kenaikan beban pencemaran (BOD, COD, TSS) yang mengancam kualitas Teluk Youtefa dan Teluk Yos Sudarso. Target utamanya adalah menekan beban limbah domestik dan memperluas cakupan layanan sanitasi aman. Strategi tata ruang memberi

prioritas pengendalian banjir dan drainase pada zona datar (0–8% kelerengan) yang mendominasi ±49% wilayah kota, bersamaan dengan konservasi lahan berlereng untuk menekan risiko longsor.

b. Tahun 2027: Peningkatan Produktivitas untuk Pengembangan Sektor Unggulan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Penopang produktivitas ekonomi diarahkan pada sektor jasa-perdagangan, perikanan, dan pertanian. Kota Jayapura memanfaatkan peran strategisnya sebagai "beranda depan" dan simpul logistik Pasifik—berbatasan dengan PNG dan berakses ke Samudera Pasifik—untuk memperluas jaringan niaga lintas batas serta memperkuat pasar hasil perikanan dan pertanian. Di sisi hulu, peningkatan produktivitas pertanian dilakukan melalui optimasi lahan, irigasi, jalan usaha tani, mekanisasi, dan penguatan kelembagaan ekonomi petani/UMKM agro; intervensi ini menutup celah ketergantungan pasokan dan memperbaiki ketahanan pangan yang masih menghadapi masalah ketersediaan/akses dan konversi lahan. Pengembangan sentra produksi per distrik diintensifkan, terutama Muara Tami sebagai basis padi/jagung dan diversifikasi komoditas, serta penataan rantai pasok dari Abepura/Heram/Jayapura Utara/Jayapura Selatan untuk mengakselerasi arus barang dan menekan biaya logistik perkotaan.

Potensi perikanan dan pertanian Kota Jayapura tidak dapat dipandang dari sisi luas areal semata, melainkan dari fungsi strategisnya sebagai ibukota provinsi, pusat perdagangan, distribusi, dan ekspor. Luas areal dan produksi perikanan dan pertanian Kota Jayapura memang tidak sebesar Merauke atau Keerom, namun memainkan peran sentral dalam menghubungkan produksi pangan dan perikanan dari kabupaten lain dengan pasar regional, nasional, hingga internasional (PNG dan Pasifik). Hal ini menjadikan Kota Jayapura sebagai simpul penting dalam menjaga ketahanan pangan

dan protein ikan di Provinsi Papua, sekaligus memperkuat perannya sebagai kota jasa berbasis ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.

Inklusivitas didorong melalui akses pembiayaan mikro, inkubasi usaha, dan digitalisasi UMKM, yang terhubung dengan pasar lintas batas dan pasar regional di kota. Kebijakan ini diharapkan dapat mereduksi disparitas pendapatan yang walaupun secara data lebih baik daripada provinsi, namun tetap memerlukan penguatan agar manfaat pertumbuhan merata.

c. Tahun 2028: Penguatan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan Didukung SDM Berkualitas dan Infrastruktur Berkelanjutan

Dengan orientasi pada jasa, Kota Jayapura berperan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif di daerah lain. Sebagai pusat layanan regional, Kota Jayapura berperan penting dalam melayani kebutuhan pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan transportasi bagi masyarakat dari berbagai kabupaten di Provinsi Papua.

Pembangunan pada tahun ini diarahkan untuk memperkuat daya saing sektor unggulan perikanan yang ditopang penguatan *cold chain* dan pasar ikan modern; dan pertanian dipacu lewat hilirisasi dan standar mutu. Sebagai simpul distribusi ekonomi, produk pertanian dari Keerom, pangan dari Merauke, hasil perikanan dari Biak dan Nabire, serta hasil hutan dari Sarmi seringkali dipasarkan melalui Kota Jayapura. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan mendorong kemitraan, pengaruutamaan gender, dan ekonomi hijau.

Investasi infrastruktur diarahkan pada infrastruktur biru–hijau (drainase, retensi air, ruang terbuka) dan konektivitas antardistrik, selaras profil kelerengan dan curah hujan untuk meningkatkan ketahanan banjir dan kontinuitas layanan kota. Lingkungan pesisir–teluk (Youtefa, Yos Sudarso) dijaga lewat batas emisi beban limbah, peningkatan IPAL, dan pengawasan kualitas

perairan untuk mendukung perikanan tangkap/budidaya serta pariwisata bahari.

Potensi wisata bahari (Teluk Youtefa, Pantai Hamadi), wisata budaya, dan ekowisata berbasis hutan/pesisir menjadi bagian dari jasa unggulan Kota Jayapura. Industri kreatif yang berkembang, seperti kerajinan lokal, kuliner, dan seni budaya, turut memperkuat daya tarik kota sebagai destinasi jasa.

Pembangunan kota secara terus menerus diarahkan untuk penguatan daya saing SDM. Penguatan dilakukan melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan yang merata, memanfaatkan alokasi ruang fasilitas publik serta laboratorium keterampilan vokasional untuk sektor maritim, agro, dan *hospitality*. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan peta potensi per distrik.

d. Tahun 2029: Pengembangan Ekonomi dengan Pelayanan Publik Prima dan Penguatan Pemberdayaan Masyarakat yang Berkelanjutan

Pembangunan tahun ini difokuskan pada reformasi layanan publik (perizinan, kependudukan, kesehatan, pendidikan) sebagai pengungkit efisiensi ekonomi kota jasa. Standar layanan dikalibrasi terhadap beban pertumbuhan penduduk dan dinamika kemiskinan, memastikan akses yang setara dan responsif.

Pemberdayaan masyarakat diperluas melalui penguatan koperasi, perluasan akses pembiayaan, dan pengembangan kewirausahaan lokal sebagai kelanjutan penguatan pasca panen/pasca tangkap dan hilirisasi produk unggulan. Melalui upaya tersebut, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat diikuti dengan peningkatan kuantitas dan kualitas keterampilan dan akses perempuan ke pekerjaan yang layak.

Lebih lanjut, pada tahun ini dilakukan penguatan terhadap bencana dan perubahan iklim melalui konservasi pada zona berlereng dan hulu DAS (termasuk sistem peringatan dini). Selain itu, dilaukan juga peningkatan kapasitas drainase pada zona datar/permukiman padat untuk menurunkan risiko banjir genangan dan menjaga kesehatan lingkungan.

e. Tahun 2030: Pemantapan Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan SDM yang Unggul

Tahap pemantapan menegaskan konsolidasi struktur ekonomi kota jasa, perdagangan, dan logistik di Papua serta gerbang Indonesia menuju Pasifik, yang terintegrasi dengan *hinterland* Papua dan pasar lintas batas. Posisi geostrategis yang berada di perbatasan PNG dan akses Pasifik dimaksimalkan melalui ekosistem logistik/niaga yang efisien dan standar mutu ekspor. Kemandirian pangan diperkuat dengan pengembangan kawasan swasembada padi dan pangan akuatik (blue food) pada simpul Kota Jayapura, didukung optimasi lahan, irigasi, dan mekanisasi berkelanjutan sekaligus menjaga kualitas perairan pesisir agar mendukung ekonomi biru.

Pemantapan pembangunan rendah karbon dengan mendorong sektor energi terbarukan, pariwisata berkelanjutan, dan perlindungan sumber daya alam. Untuk memastikan keberlanjutan, Kota Jayapura menargetkan stabilisasi beban air limbah melalui cakupan IPAL komunal dan praktik sanitasi layak yang mengikuti proyeksi kebutuhan daerah, serta pemantauan mutu air teluk/sungai sebagai indikator kinerja lingkungan.

Pemantapan daya saing SDM yang unggul menjadi salah satu fokus utama pembangunan pada tahun ini. Dengan penguatan pendidikan vokasi, kesehatan, dan pelatihan kerja berbasis potensi wilayah dan inovasi, Kota Jayapura berpotensi menjadi pusat SDM

unggul di Papua yang berdaya saing, produktif, dan adaptif terhadap transformasi ekonomi berbasis jasa dan digital.

Untuk mewujudkan sasaran RPJMD, strategi pembangunan Kota Jayapura disusun secara komprehensif, meliputi dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, tata kelola, SDM, dan sinergi dengan agenda nasional. Adapun strategi pembangunan jangka menengah Kota Jayapura dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 3.3.

Strategi Pembangunan Kota Jayapura

No.	Misi & Sasaran	Strategi
1	**Misi 1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berahlak Dan Sejahtera Dengan Memegang Teguh Nilai–Nilai Keagamaan, Menjaga Keluhuran Adat Istiadat**	
1.1	Meningkatnya kerukunan umat beragama serta pelestarian adat istiadat dan budaya	– Mengoptimalkan forum kerukunan umat beragama dan lembaga adat untuk pencegahan konflik SARA. – Menyelenggarakan festival budaya tahunan untuk melestarikan kesenian dan cagar budaya Port Numbay. – Mengintegrasikan muatan lokal adat dan bahasa daerah dalam kurikulum sekolah.
2	**Misi 2. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Ekonomi, Sosial yang Berkelanjutan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan**	
2.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	– Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan, air bersih, sanitasi, drainasedan telekomunikasi – Meningkatkan kualitas jalan kota dan akses antar-distrik, terutama di kawasan padat dan pinggiran. – Mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu. – Integrasi program pemberdayaan dengan perlindungan lingkungan dan adaptasi perubahan iklim. – Pemantapan pembangunan rendah karbon, antara lain dengan mendorong pariwisata berkelanjutan dan perlindungan sumber daya alam.
2.2	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Penataan ruang kota berwawasan lingkungan, pengendalian kawasan rawan banjir/longsor, dan pengelolaan limbah perkotaan.

No.	Misi & Sasaran	Strategi
3	**Misi 3. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Bertumpu Pada Sektor Jasa Perdagangan, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Dan Kelestarian Budaya Lokal**	
3.1	Berkembangnya perekonomian yang bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, ekonomi kreatif, pariwisata, dan budaya lokal	– Hilirisasi produk pertanian dan perikanan; pengembangan pariwisata bahari dan budaya; serta penguatan ekonomi kreatif – Peningkatan akses kelompok rentan terhadap peluang ekonomi, pemberdayaan koperasi, dan digitalisasi UMKM. – Mendorong UMKM kreatif (kuliner, kerajinan, seni pertunjukan) melalui inkubasi bisnis dan digitalisasi. – Menyediakan kawasan khusus UMKM/ekonomi kreatif di distrik pusat kota. – Memulihkan daya beli masyarakat melalui program padat karya, pemberdayaan UMKM, dan fasilitasi akses pembiayaan mikro. – Mengembangkan wisata bahari di Teluk Youtefa dan wisata budaya berbasis Port Numbay. – Optimalisasi sektor perikanan, pertanian, dan perdagangan melalui modernisasi alat produksi, peningkatan akses pasar, dan penguatan rantai pasok. – Peningkatan kualitas layanan jasa perdagangan, logistik, perbankan, pendidikan, dan kesehatan sebagai motor pertumbuhan ekonomi.
3.2	Meningkatnya investasi daerah	Peningkatan iklim usaha kondusif dengan penyederhanaan perizinan dan promosi investasi daerah.
3.3	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan kewirausahaan masyarakat	– Pengembangan kewirausahaan masyarakat – Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan vokasi, dan pelatihan dan keterampilan kerja berbasis sektor unggulan. – Pembukaan ruang usaha baru di sektor jasa dan perdagangan. – Penguatan kelembagaan ekonomi lokal, koperasi, dan BUMKAM. – Peningkatan peran perempuan dan pemuda dalam pembangunan ekonomi.
4	**Misi 4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Melalui Transformasi Digital Dengan Reformasi Birokrasi**	
4.1	Meningkatnya kinerja pemerintah yang akuntabel dan profesional	– Memperkuat kualitas dan kapasitas ASN yang profesional dan berintegritas

No.	Misi & Sasaran	Strategi
		– Memperkuat sistem pengukuran kinerja ASN untuk peningkatan profesionalitas. – Melakukan perampingan prosedur pelayanan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik. – Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan transparansi keuangan daerah
4.2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pelayanan publik yang prima	Mengimplementasikan *e-government* secara menyeluruh melalui aplikasi layanan publik digital.
5	**Misi 5. Memperkuat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pendidikan Kesehatan Untuk Melahirkan SDM Unggul, Produktif, dan Berkarakter**	
5.1	Meningkatnya pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	– Perluasan akses pendidikan dasar dan menengah pertama, peningkatan sarana prasarana sekolah, serta penguatan pendidikan vokasi. – Peningkatan penelitian, inovasi, serta penguatan budaya kerja produktif. – Memberikan beasiswa afirmasi bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk pendidikan tinggi dan vokasi. – Memperluas akses dan kualitas layanan kesehatan primer dan rumah sakit rujukan dengan distribusi tenaga medis yang merata. – Percepatan penanganan stunting, dan perluasan cakupan jaminan kesehatan.
5.2	Meningkatnya standar hidup masyarakat	Pengurangan ketimpangan dan pengentasan kemiskinan
5.3	Meningkatnya pengarusutamaan gender yang berkeadilan	Mengintegrasikan program kesetaraan gender dalam pendidikan dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
6	**Misi 6. Mengejewantahkan Daerah Berdasarkan Asta Cita**	
6.1	Meningkatnya keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan prioritas nasional	– Menyesuaikan prioritas pembangunan Kota Jayapura dengan RPJMN 2025–2029, terutama di bidang pengurangan kemiskinan, pembangunan SDM, transformasi ekonomi, dan ekonomi hijau. – Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Otsus. – Menjadi pusat implementasi program RIPPP (Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua) terutama pada pengembangan kawasan perkotaan, infrastruktur dasar, dan industri perikanan.

Sumber: hasil analisis, 2025

Selain penahapan pembangunan, bagian dari strategi dalam mencapai sasaran pembangunan yakni penentuan program prioritas pembangunan daerah. Program prioritas pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Penentuan program prioritas selain menjawab sasaran RPJMD, juga menjadi upaya dalam mewujudkan program kerja pada 9 agenda prioritas kepala daerah.

Tabel di bawah memuat program prioritas pembangunan daerah yang selanjutnya dirinci ke kegiatan dan sub kegiatan prioritas pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Tabel 3.4.

Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Jayapura Tahun 2025-2029

No.	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	**Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat**			**Angka Konflik Bernuansa SARA (Angka)**		
		Meningkatnya kerukunan umat beragama serta pelestarian adat istiadat dan budaya		**Persentase konflik yang ditangani (%)**		
				Persentase cagar budaya dan kesenian tradisional yang dilestarikan (%)		
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Yang dilaksanakan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas		
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat		
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya		
			Meningkatnya kualitas kebijakan kebijakan pemerintahan dan otononi daerah, serta kesejahteraan rakyat	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan		
			Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno Yang Dimiliki	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
2	**Meningkatkan pengembangan kota yang berwawasan lingkungan**			**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)**		
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		**Indeks Kualitas Udara (Indeks)**		
				Indeks Kualitas Air (Indeks)		
				Indeks Kualitas Lahan (Indeks)		
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
				Indeks Kualitas Udara		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			Meningkatnya kualitas pengendalian B3 dan Limbah B3	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

No.	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Tingkat Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Prsentase fasilitasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
				Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat		
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana		**Indeks Risiko Bencana (Indeks)**		
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana		
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana		
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan
			Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial
		Meningkatnya pemenuhan infrastruktur berkualitas dan merata		**Indeks Infrastruktur (Indeks)**		
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas PUPRPKP
				Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob		

No.	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
				Persentasi Luas Layanan Irigasi Multikomoditas		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas PUPRPKP
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas PUPRPKP
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Dinas PUPRPKP
			Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Tingkat Kcmantapan Jalan kabupaten /kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas PUPRPKP
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas PUPRPKP
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas PUPRPKP
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas PUPRPKP
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas PUPRPKP
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas PUPRPKP

No.	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang Ditangani	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas PUPRPKP
			Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase Luas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Dinas PUPRPKP
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas PUPRPKP
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas darat	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi ASDP	Persentase konektivitas sungai danau penyeberangan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dinas Perhubungan
3	**Penguatan fondasi transformasi ekonomi berbasis sektor unggulan daerah yang inklusif dan berkelanjutan**			**Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)**		
				PDRB Per Kapita (ribu rupiah)		
				Rasio Gini		

No.	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
		Berkembangnya perekonomian yang bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, ekonomi kreatif, pariwisata, dan budaya lokal		**Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)**		
				Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (%)		
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

No.	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Pariwisata
			Meningkatnya kapsitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Pariwisata
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Perikanan
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Perikanan
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Jumlah Produksi olahan hasil perikanan (ton)	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Perikanan
				Angka Konsumsi Ikan		

No.	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Produksi Tanaman Pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Produksi Hortikultura		
				Produksi Komoditas Peternakan		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi		
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)		
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Meningkatnya investasi daerah		**Nilai Investasi (rupiah)**		
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja		**Tingkat Pengangguran Terbuka (%)**		
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja
			Meningkatanya perlindungan terhadap pekerja	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Tenaga Kerja

No.	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan		
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
			Meningkatnya daya saing UMKM	Rasio kewirausahaan Pertumbuhan Wirausaha	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

No.	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan
4	**Penguatan fondasi transformasi tata kelola pemerintahan**			**Indeks Reformasi Birokrasi (indeks)**		
		Meningkatnya kinerja pemerintah yang akuntabel dan profesional		**Nilai SAKIP (nilai)**		
				Opini BPK (Opini)		
				Indeks Profesionalitas ASN (indeks)		
			Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Daerah
				Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP minimal B		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Bappeda
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		

No.	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKAD
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
				Persentase Penurunan SILPA		
				Persentase laporan keuangan tepat waktu		
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKAD
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Bapenda
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan		
			Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital		
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPP
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya		
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya		

No.	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik		
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BKPP
			Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan		
			Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi		
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis		
			Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	PROGRAM RISET DAN INOVASI	Bappeda
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah		

No.	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah		
			Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah		
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah		
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat

No.	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pelayanan publik yang prima		**Indeks SPBE (indeks)**		
				Indeks Pelayanan Publik (indeks)		
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi, Informatika
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase aplikasi yang memenuhi standar teknis pembangunan aplikasi	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi, Informatika
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi, Informatika
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak		
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		
				Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		

No.	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMK
				Prsentase fasilitasi tata kelola Desa		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Nilai IKM Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan
4	**Meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif**			**Indeks Pembangunan Manusia (indeks)**		
				Tingkat Kemiskinan (%)		
		Meningkatnya pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat		**Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)**		
				Harapan Lama Sekolah (tahun)		
				Usia Harapan Hidup (tahun)		

No.	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		
				Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama		
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik		
			Meningkatnya kelestarian bahasa dan sastra daerah	Persentase jenis bahasa dan satra yang dikembangkan	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
				Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita		
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya akreditasi pelayanan kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi	PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
				Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang Terakreditasi		
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

No.	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
				Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
				Persentase Kebutuhan Ber KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)		
		Meningkatnya standar hidup masyarakat		**Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah/orang/tahun)**		
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja
			Meningkatanya perlindungan terhadap pekerja	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Tenaga Kerja
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

No.	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan		
			Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial
				Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA		
				Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana kabupaten pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar		
			Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial
			Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial

No.	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi		
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
				Pertumbuhan Wirausaha		
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase desa Maju dan Mandiri	PROGRAM PENATAAN DESA	DPMK
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Tingkat efektivitas Pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pembangunan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sekretariat Daerah (Kesra)
				Persentase Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik		Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sekretariat Daerah (PBJ)
		Meningkatnya pengarusutamaan gender yang berkeadilan		**Indeks Ketimpangan Gender (indeks)**		
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan		

No.	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
6	**Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah**			**Capaian Perjanjian Kinerja Walikota (%)**		
		Meningkatnya keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan prioritas nasional		**Tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan prioritas nasional (%)**		

No.	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA		

Sumber: hasil analisis, 2025

3.2.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Arah kebijakan pembangunan merupakan upaya yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mencapai misi RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029.

Tabel 3.5.

Arah Kebijakan RPJMD Kota Jayapura

Misi RPJMD	Arah Kebijakan	
MISI 1. MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERAHLAK DAN SEJAHTERA DENGAN MEMEGANG TEGUH NILAI–NILAI KEAGAMAAN, MENJAGA KELUHURAN ADAT ISTIADAT	1	Penguatan fondasi untuk pelestarian budaya, cagar alam dan Port Numbay yang unggul pada sektor pendidikan nilai dan berkesinambungan
	2	Penguatan ketahanan sosial-budaya dan ekologi yang bertumpu pada keseimbangan antara kemampuan sumber daya alam dan lingkungan
	3	Pengembangan ideologi Pancasila untuk mewujudkan kedaulatan politik, kemajuan ekonomi, kebijakan dalam kebudayaan serta penguatan karakter
	4	Perlindungan dan pengembangan budaya literasi, ekspresi, dan kebudayaan
	5	Menjunjung “budaya lokal” (Port Numbay) menuju kancah nasional maupun global
MISI 2. MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI, SOSIAL YANG BERKELANJUTAN DENGAN MEMPERHATIKAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN	1	Peningkatan pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah
	2	Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang menjangkau ke seluruh wilayah
	3	Peningkatan koordinasi pengembangan transportasi perkotaan yang andal
	4	Penguatan pembangunan infrastruktur untuk menengah dan meminimalkan kerusakan alam serta mengendalikan pencemaran lingkungan
	5	Penguatan pemerataan ekonomi, pembangunan infrastruktur darat dan konektivitas fisik, penghubung wilayah kebutuhan dasar infrastuktur yang berkesinambungan
	6	Peningkatan jalur distribusi logistik dan transportasi menjadi tulang punggung yang aman dan efisien serta bermanfaat bagi pertanian, perdagangan dan jasa
	7	Mengembangkan infrastruktur pelabuhan yang mendukung ekspor dan impor barang

Misi RPJMD	Arah Kebijakan	
	8	Penguatan tata ruang, penyelamatan ruang dengan pengendalian tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
	9	Penguatan pembangunan infrastruktur untuk mencegah dan meminimalkan kerusakan alam serta mengendalikan pencemaran lingkungan
MISI 3. MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI YANG BERTUMPU PADA SEKTOR JASA PERDAGANGAN, EKONOMI KREATIF, PARIWISATA, DAN KELESTARIAN BUDAYA LOKAL	1	Memperluas infrastruktur yang mendukung sektor industri dan wirausaha
	2	Peningkatan akses pasar bagi pelaku usaha lokal
	3	Penguatan fondasi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, memperbaiki ketimpangan distribusi pendapatan, pemerataan pembangunan antar wilayah, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
	4	Peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global dimana kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
	5	Pengembangan kewirausahaan, kemitraan dan koperasi
	6	Menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif berkelanjutan terutama dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat Port Numbay
	7	Peningkatan produktivitas yang berkelanjutan melalui sektor ekonomi potensial daerah terutama pertanian, agroindustri, perikanan dan kelautan, pariwisata dan ekonomi kreatif
	8	Pemanfaatan teknologi digital pada sektor jasa, perdagangan, transportasi dan logistik
MISI 4. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA MELALUI TRANSFORMASI DIGITAL DENGAN REFORMASI BIROKRASI	1	Audit regulasi, penyederhanaan undang-undang
	2	Reformasi ASN berbasis pelatihan kompetensi
	3	Pengembangan sistem data nasional, pelatihan analisis data
	4	Kerangka awal manajemen risiko di lembaga pemerintah
	5	Pembangunan infrastruktur dasar layanan TI
	6	Peningkatan kapasitas, akses informasi
MISI 5. MEMPERKUAT PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDIDIKAN KESEHATAN UNTUK MELAHIRKAN SDM UNGGUL, PRODUKTIF, DAN BERKARAKTER.	1	Peningkatan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
	2	Penguatan melalui peningkatan sumber daya manusia kesehatan melalui IPTEK, inovasi, produktivitas dan berdaya saing serta profesional
	3	Pemerataan pelayanan dan sarana prasarana kesehatan menyeluruh
	4	Peningkatan pemerataan dan perluasan infrastruktur (sarana, prasarana dan limbah medis). TIK serta farmasi kesehatan
	5	Peningkatan perilaku dan lingkungan sehat serta ketahanan makanan tambahan berbasis pangan lokal
	6	Peningkatan tata kelola kesehatan

Misi RPJMD	Arah Kebijakan	
	7	Penguatan aksesibilitas penyelenggaraan pendidikan melalui percepatan pembangunan sarana prasarana pendidikan memadai terkareditasi yang merata
	8	Kerja sama dengan mitra lembaga pendidikan dalam menunjang pembangunan daerah
	9	Peningkatan tata kelola tata kelola pendidikan serta pemantapan sistem informasi pendidikan
	10	Perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan pada daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim
	11	Meningkatkan pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial

Sumber: hasil analisis, 2025

Pelaksanaan pembangunan jangka menengah kota dilakukan tidak saja terbatas pada pembangunan sektoral, namun juga kewilayahan. Pembangunan kewilayahan Kota Jayapura selaras dengan arahan dalam RPJMN Tahun 2025-2029, baik yang berlokasi di Kota Jayapura maupun kebijakan untuk seluruh wilayah di Provinsi Papua. Berikut ini dimuat *highlight* pembangunan Kewilayahan Kota Jayapura:

Tabel 3.6.

***Highlight* Pembangunan Kewilayahan Kota Jayapura**

No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	
A2	Kawasan Pertumbuhan A2: Kawasan perkotaan sedang Jayapura (Kota Jayapura)	Pengembangan Kawasan Perkotaan Sedang Jayapura, melalui:	
		-	Penyusunan rencana induk (masterplan) pengembangan dan penataan kawasan perkotaan, dengan output: rencana induk (masterplan)
		-	Penataan kawasan dan peningkatan citra kota dengan output penguatan branding kawasan dan penguatan promosi daya tarik kota
		-	Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual
		-	Peningkatan sarana prasarana pelayanan dasar perkotaan, dengan output pembangunan jalan strategis, SPAM, SPAL, infrastruktur listrik dan TIK, PSU bidang perumahan, pengelolaan sampah berbasis 3R, perluasan jaringan telekomunikasi dan ekses internet cepat, perluasan layanan penyiaran digital, serta pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya
B1	Kawasan Komoditas Unggulan:	Penyiapan pengembangan ekosistem sentra industri berbasis komoditas tuna-cakalang-tongkol, melalui:	

No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
	(Komoditas tuna-cakalang-tongkol) Sentra Industri B1 : Kota Jayapura	- Penguatan sentra produksi perikanan, dengan output: penyaluran bantuan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan serta penyaluran benih ikan air laut ke masyarakat
		- Pengembangan industri, tata niaga/pemasaran, promosi, dan peningkatan ekspor produk perikanan, dengan output peningkatan fasilitas tempat pelelangan ikan (TPl), pengembangan rantai dingin termasuk gudang beku dan kelengkapannya, penyediaan sarana penyimpanan dan distribusi logistik produk, pengembangan gerakan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan IKM/UMKM, fasilitasi dan pembinaan peningkatan digitalisasi bagi usaha kecil, koperasi berbasis komoditas, dan BUMDes, penumbuhan eksportir, industrialisasi koperasi melalui rantai pasok produksi, pembentukan dan penguatan koperasi, pelaku usaha, UMKM dalam rantai pasok, serta revitalisasi pasar rakyat
		- Peningkatan kualitas SDM dan pendampingan pengembangan industri, dengan output: pendidikan vokasi perikanan dan kelautan, serta penerapan kurikulum link and match dengan dunia kerja
		- Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan output pengembangan kampung nelayan dan desa perikanan cerdas (smart fisheries village), serta penguatan kelembagaan ekonomi nelayan
		- Peningkatan Sarana prasarana pendukung, dengan output pembangunan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan, serta perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat
		- Pengembangan riset dan inovasi teknologi perikanan, dengan output hilirisasi produk akuakultur dan produk hilirisasi pangan hasil laut, pemberian bantuan pendanaan matching fund (BOPTN Penelitian) terkait produk hilirisasi kelautan perikanan, serta penerapan Teknologi ekonomi digtal
	Provinsi Papua	Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah, melalui:
		- Pembangunan dan peningkatan jalan strategis, jalan trans, dan jalan 3TP, dengan output: pembangunan jembatan strategis, penanganan jalan daerah, serta pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong ruas jalan Jayapura & Sarmi
		- Pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi dan konektivitas perkotaan
		- Peningkatan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran, dengan output: pengendalian pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi
		- Peningkatan infrastruktur digital dan TlK, dengan output pembangunan BTS 4G/Lastmile dan peningkatan akses internet, perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, serta perluasan layanan penyiaran digital.
	Kota Jayapura (perikanan)	Penguatan pendidikan tinggi STEAM, serta pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK dan BLK) yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah (Perikanan dan pariwisata) sesuai kebutuhan DUDI, melalui:

No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	
		-	Penguatan dan penyediaan sarana prasarana pendidikan, serta pelatihan berkualitas, dengan output: jalan Menuju fasilitas pendidikan, revitalisasi sarana dan prasarana perguruan tinggi, serta revitalisasi fasilitas pendidikan dan balai latihan kerja (BLK)
		-	Pengembangan program studi, kurikulum, dan inovasi model pembelajaran perguruan tinggi, serta pendidikan dan pelatihan vokasi yang mengacu pada kebutuhan industri
		-	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengajar/tenaga pendidik, dengan output: peningkatan mutu dan kompetensi SDM pendidikan tinggi dan tenaga kependidikan vokasi, serta peningkatan tenaga kependidikan vokasi yang mengikuti upskilling dan reskilling berstandar industri
		-	Peningkatan kualitas tata kelola serta pengembangan kemitraan penyelenggara pendidikan dengan dunia kerja, dengan output: akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan pada pendidikan tinggi dan vokasi, serta peningkatan kemitraan satuan pendidikan vokasi dengan dunia kerja
C4	Kawasan Potensial Swasembada Pangan: C4 : Kota Jayapura* (Padi dan pangan akuatik) Keterangan *) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi	Penguatan kawasan swasembada pangan padi dan pangan akuatik/bluefood berbasis perikanan tangkap, melalui:	
		-	Penguatan produksi, dengan output: optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, pengembangan kawasan padi, pemberian pupuk bersubsidi, alat dan mesin pertanian pra panen, serta pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan
		-	Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan output: penyediaan sarana pasca panen dan sarana pengolahan hasil tanaman pangan, peningkatan jalan usaha tani, penyediaan alat dan mesin pertanian pra panen, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju sentra pangan lokal, serta pembangunan fasilitas logistik (gudang lumbung pangan) mendukung distribusi bahan pangan bergizi, serta peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan.
		-	Penguatan kapasitas SDM (petani dan nelayan), dengan output: fasilitasi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani serta pelatihan kelompok tani untuk GAP (*Good Agriculture Practices*), GHP (Good *Handling Practices*), dan PHT (Pengendalian Hama Terpadu), penyuluhan perikanan dan kelautan untuk kelompok pelaku utama, serta mendorong ownership petani dan nelayan pada aset dan lembaga yang telah dibentuk
		-	Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan petani dan nelayan yang mendukung pengembangan pangan lokal, dengan output: pelatihan kelompok tani, penyediaan inkubator usaha koperasi, pembentukan/pengembangan koperasi berbasis komoditas, serta penyusunan tata kelola dan strategi distribusi logistik

No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
		Penguatan kawasan rentan pangan dilakukan melalui penguatan diversifikasi pangan, dengan output: pengembangan kawasan padi, pembentukan koperasi berbasis bahan pangan, penguatan kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan, pemberian bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan, serta peningkatan jalan usaha tani, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, serta penyediaan sarana pra, pasca dan pengolahan hasil tanaman pangan
C2	Kawasan Potensial Swasembada Energi: C2 : Kota Jayapura	Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi melalui:
		- Percepatan pengembangan dan optimalisasi pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik beban dasar dan variabel serta pemanfaatan potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) sesuai dengan potensi daerah dan dedieselisasi, dengan output: pembangunan pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), pembangkit listrik Tenaga Surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga mini hidro (PLTM), pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG), penyiapan pembangunan pabrik ethanol dalam rangka industrialisasi energi, pemetaan potensi EBT lainnya, pembangunan sistem transmisi dan interkoneksi tenaga listrik, serta pembangunan infrastruktur gardu induk.
		- Penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan output penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit
		- Penguatan kawasan rendah elektrifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan, dengan output: pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T
D4	Kawasan afirmasi kawasan perbatasan PKSN dan wilayah pendukung D4 : PKSN Jayapura (Kota Jayapura)	Penguatan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura dan Biak, serta kecamatan perbatasan prioritas, melalui:
		- Pemenuhan layanan dasar, dengan output penyediaan rumah layak huni, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi di kawasan perbatasan, peningkatsn SPAM, SPAL, pengelolaan sampah berbasis 3R, serta peningkatan akses internet dan listrik
		- Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas unggulan terutama di PKSN, dengan output peningkatan pelabuhan perikanan di lokasi SKPT (SKPT Jayapura dan SKPT Biak) yang dikelola dan operasional sesuai standar, penyaluran sarana budidaya ikan ke masyarakat, serta peningkatan kapasitas masyarakat di bidang kelautan dan perikanan di kawasan perbatasan
		- Penataan ruang kawasan dan penanggulangan bencana kawasan perbatasan, dengan output: penyusunan dokumen harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) di Provinsi Papua

No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
		- Penguatan tata kelola pemerintahan, dengan output: piloting pengembangan kompetensi tematik bagi ASN di daerah kawasan perbatasan dan pengembangan platform digital manajemen ASN, bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kawasan perbatasan negara, serta bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kawasan perbatasan negara
	Pengembangan sekolah terbuka: Kota Jayapura (PKSN Jayapura) Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan: Seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua	Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, melalui:
		- Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik yang memprioritaskan Orang Asli Papua, dengan output penataan guru dikdas dan dikmen serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran
		- Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik, dengan output: pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen
		- Pemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik, dengan output: pemberian program Indonesia Pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paket c, dan SMK, serta pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK)
		- Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan output pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA
		- Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan, dengan output rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah
		- Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan output pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan
		- Peningkatan literasi, dengan output pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital
		- Penyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah Papua, dengan output penyusunan model kurikulum dan penyediaan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual
	Provinsi Papua	Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, melalui:
		- Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan, dengan output: peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan dan pembinaan lembaga kebudayaan
		- Pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal, dengan output fasilitasi kemitraan warisan budaya, pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya, serta perlindungan warisan budaya
		- Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah, dengan output event prioritas bidang kebudayaan, produksi konten media kebudayaan, serta pengembangan event film dan musik berbasis budaya lokal

No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
		- Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah, dengan output fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah, serta event prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah
	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan: Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, melalui:
		- Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan telemedicine, dengan output pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta implementasi layanan telemedicine
		- Penyediaan moda tansportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak sesuai kondisi geografis wilayah
		- Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis dengan memprioritaskan Orang Asli Papua, dengan output penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer serta pendayagunaan dokter spesialis di Wilayah Papua
		- Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan
		- Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan output: peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes, pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil melalui konstruksi bangunan modular, serta percepatan operasionalisasi RSUD di Kab. Supiori
		- Pengembangan inovasi obat tradisional dan suplemen kesehatan
		- Penurunan kematian ibu dan anak melalui peningkatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas layanan
	Pengendalian penyakit TBC Kota Jayapura Pengendalian penyakit filariasis, kusta, frambusia, dan HIV/AIDS Provinsi Papua	Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan melalui:
		- Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan output penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan layanan pencegahan dan pengendalian TBC, layanan penemuan aktif TBC, serta bantuan stimulan perumahan swadaya dan peningkatan kualitas hunian tidak layak
		- Eliminasi penyakit kusta, dengan output penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta, pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL
		- Eliminasi penyakit frambusia, dengan output: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian frambusia, serta tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian frambusia, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL
		- Eliminasi penyakit filariasis, dengan output penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian filariasis, serta tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian filariasis, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL

No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
		- Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan output penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria, peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL
		- Pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan output: penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih serta optimalisasi data
	Provinsi Papua	Penguatan percepatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting serta perbaikan gizi lainnya melalui:
		- Pendampingan secara khusus bagi pemerintah di Wilayah Papua
		- Peningkatan gizi, dengan output pelaksanaan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting terjadi serta pemberian tata laksananya, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita dari buffer sfock, serta implementasi Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu, serta Penambahan Vitamin)
		- Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dengan output peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL
		- Peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan stunting, dengan output penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan stunting melalui berbagai media, komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan
		- Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak, dengan output penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penguatan implementasi program KB
		- Penguatan integrasi perbaikan sektor di luar kesehatan lainnya yang turut mendukung perbaikan gizi
	Pemberantasan IUU Fishing: WPP 717 (Perbatasan perairan dengan palau) Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah: Provinsi Papua	Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah, termasuk pemberantasan IUU Fishing pada WPP 717, melalui:
		- Penegakan regulasi dan upaya pertahanan keamanan, dengan output peningkatan operasi kapal dan speedboot pengawas, serta patroli mandiri
		- Penguatan tata kelola dan kelembagaan, dengan output: Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional dan pemberantasan perburuan liar, pembalakan liar, perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar, serta IUU (Illegal, Unreported, Unregulated fishing)
		- Peningkatan infrastruktur/sarana prasarana pengawasan, dengan output pembangunan prasarana serta perawatan armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP)
		- Pelibatan tokoh adat, agama, dan perempuan dalam upaya pencegahan konflik sosial, dengan output peningkatan peran FKUB dalam pencegahan, advokasi, dan mitigasi konflik daerah, serta pendekatan hak asasi manusia dan pelibatan multipihak dalam mendorong situasi HAM yang kondusif di Papua

No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
		- Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah, dengan output: fasilitasi pemberdayaan masyarakat pesisir peduli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum batas wilayah laut
	Provinsi Papua	Peningkatan pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, melalui:
		- Inventarisasi, penjaminan hak, dan pelestarian adat dan tradisi masyarakat hukum adat, dengan output peningkatan data inventarisasi tanah ulayat, penetapan hutan adat, dan pengembangan hutan adat
		- Peningkatan pemberdayaan masyarakat hukum adat dan kelembagaan adat, dengan output: penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat, serta pemberdayaan warga komunitas adat terpencil (KAT)
		- Percepatan penyusunan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dilengkapi peta delineasi tanah ulayat, dengan output pendampingan penyusunan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dilengkapi peta delineasi tanah ulayat
E4	Lingkungan Hidup Provinsi Papua Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi: E4 : Kota Jayapura	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta adaptasi perubahan iklim, melalui:
		- Peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat terhadap mitigasi bencana dan perubahan iklim, dengan output penguatan kampung/kelurahan tangguh bencana, pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur, serta fasilitasi dan pemberian fasilitas dan pembinaan dalam adaptasi perubahan iklim
		- Pengembangan sistem dan sarana prasarana pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, dengan output: penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat, penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim, pembangunan pengaman pantai, pemulihan ekosistem mangrove, penerapan Nature-Based Solution dan Gray Infrastructure untuk mitigasi ancaman tsunami, serta retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik
		- Pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, dengan output: pendampingan kelompok perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, dan perlindungan jalur jelajah satwa
		- Pemulihan ekosistem yang terdegradasi, dengan output: pemulihan lahan rusak dan kritis, serta pemulihan ekosistem perairan
	Provinsi Papua	Peningkatan smart government, penguatan kapasitas ASN, dan peningkatan pelayanan publik yang menjangkau hingga tingkat kampung, melalui:
		- Optimalisasi sistem perencanaan dan penganggaran daerah, dengan output: optimalisasi penerapan SIPD, SIKD, dan SIPPP sebagai platform terintegrasi pemerintahan di daerah
		- Peningkatan kapasitas SDM dan manajemen kinerja ASN, dengan output: pengembangan kompetensi Pengelolaan keuangan daerah kepada aparatur daerah, pengembangan kompetensi aparatur dalam perencanaan dan penganggaran SPM serta pengelolaan keuangan daerah

No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	
		-	Percepatan digitalisasi pelayanan publik untuk mendukung smart government, dengan output: portal peIayanan Publik dan administrasi serta penerapan PTSP berbasis OSS
		-	Peningkatan dan pemutakhiran data terpilih Orang Asli Papua (OAP)

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029, diolah

3.2.3. Dukungan Terhadap Pembangunan Nasional

Pelaksanaan pembangunan di Kota Jayapura tidak terlepas dari pembangunan provinsi dan nasional. Dalam rangka mensinergikan pembangunan, maka RPJMD Kota Jayapura perlu memuat dukungan terhadap kebijakan pembangunan nasional, terutama dukungan terhadap Asta Cita yang juga merupakan Prioritas Nasional (PN), maupun Program Strategis Nasional (PSN).

Program Strategis Nasional adalah penerjemahan program/proyek yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang mencakup Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (ProP), dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun Program Strategis Nasional, meliputi:

a. Penanggulangan Kemiskinan dengan proyek/kegiatan:
   1) Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan
   2) Kemiskinan Ekstrem;
   3) Sekolah Rakyat; dan
   4) Pembangunan 3 Juta Rumah.
b. Ketahanan Pangan dengan proyek/kegiatan Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.

c. Kesehatan Untuk Semua dengan proyek/kegiatan:
   1) Jaminan Kesehatan Nasional; dan
   2) Makan Bergizi Gratis.
d. Perluasan Akses Pendidikan dengan proyek/kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah.
e. Pertumbuhan Ekonomi dengan proyek/kegiatan:
   1) Pengendalian Inflasi;
   2) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
   3) Kemudahan perizinan di daerah.
f. Program Strategis Nasional dengan proyek/kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Presiden.

Implementasi dari PSN di Kota Jayapura lebih lanjut akan dirinci pada RKPD dan Renja Perangkat Daerah terkait sesuai petunjuk teknis yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaanya dengan tetap memerhatikan kewenangan pemerintah kota dan karakteristik daerah.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah daerah melalui serangkaian strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah. Program prioritas pembangunan daerah yang dimuat pada bab sebelumya merupakan bagian dari program perangkat daerah. Program Perangkat Daerah atau disebut juga dengan Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Penentuan program perangkat daerah berdasarkan hasil identifikasi dalam menjawab permasalahan pembangunan, isu strategis, dan sasaran pembangunan. Dalam mencapai sasaran pembangunan jangka menengah terdapat berbagai kondisi yang diperlukan dan disebut dengan kinerja outcome. Guna mengukur pencapaian outcome maka ditetapkan indikator kinerja yang terukur. Berdasarkan otcome yang akan dicapai, maka dipilih nomenklatur program perangkat daerah yang tepat. Adapun program perangkat daerah untuk pelaksanaan pembangunan jangka menengah periode Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 4.1.

Program Perangkat Daerah Kota Jayapura Tahun 2025-2029

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
	PENDIDIKAN																
1	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persen	100	100	100	334.611.392.120	100	337.611.392.120	100	340.611.392.120	100	343.611.392.120	100	346.611.392.120	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pendidikan
2	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	74,15	90	100	255.682.191.217	100	258.242.191.2167	100	260.802.191.217	100	259.962.191.217	100	262.322.191.217	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pendidikan
			2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen		100	100		100		100		100		100		
			3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen		100	100		100		100		100		100		

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen		50	45		45		20		100		100		
3	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1. Indeks Pemerataan Guru	Indeks	0	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pendidikan
			2. Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Pesen	0	100	100		100		100		100		100		
4	Meningkatnya kelestarian bahasa dan sastra daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persen	100	100	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pendidikan

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
	KESEHATAN																
1	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan terhadap pelayanan Sekretarist Dinas Kesehatan	skor	77.1(BB: Sangat Baik)	77,60 (BB: sangat baik)	77,95 (BB: sangat baik)	65.468.600.000	78,15 (BB: sangat baik)	70.582.628.000	78,45 (BB: sangat baik)	71.932.080.560	78,85 (BB: sangat baik)	73.078.687.544	79,25 (BB: sangat baik)	79.057.682.548	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kesehatan
2	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	rasio	176 per 100.000 kelahiran hidup	125 per 100.000 kelahiran hidup	122 per 100.000 kelahiran hidup	434.800.754.789	109 per 100.000 kelahiran hidup	258.642.278. 959	97 per 100.000 kelahiran hidup	288.657.425.756	86 per 100.000 kelahiran hidup	232.062.238.335	77 per 100.000 kelahiran hidup	436.565.784. 349	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kesehatan
			2. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	persen	18,4	16,4	14,4		112,4		10,4		8,4		6,4		
			3. Cakupan Penerima Pemeriksaan Keseshatan Gratis	persen		36	40		50		60		70		80		
			4. Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	rasio	0,38	0,38	0,43		0,44		0,46		0,48		0,49		
			5. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	persen	90,4	100	100		100		100		100		100		

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			6. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	persen	91,9	100	100		100		100		100		100		
			7. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	persen	93,0	100	100		100		100		100		100		
			8. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	persen	99,4	100	100		100		100		100		100		
			9. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	100	100	100		100		100		100		100		
			10. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	67,8	100	100		100		100		100		100		
			11. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas	persen	78,0	100	100		100		100		100		100		

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar														
			12. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	100	100	100		100		100		100		100		
			13. Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	100	100	100		100		100		100		100		
			14. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	persen	100	100	100		100		100		100		100		
			15. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC	persen	57,5	100	100		100		100		100		100		

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			sesuai standar														
			16. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	persen	85,4	100	100		100		100		100		100		
3	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persen	52	73	37	5.331.400.000	33	5.671.112.000	37	5.865.204.240	33	6.072.228.325	37	6.451.106.035	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kesehatan
4	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.	persen	22	50	30	850.580.000	32	871.376.400	35	892.891.512	41	915.163.933	52	938.234.970	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kesehatan
5	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	persen	12	21	13	3.962.320.000	13	4.320.900.000	14	4.694.483.600	16	5.088.607.672	18	5.510.763.215	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kesehatan
6	Meningkatnya akreditasi pelayanan kesehatan	PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN	1. Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi	persen	77	77	81	422.000.000	89	492.500.000	94	1.677.875.000	100	823.768.750	100	590.207.188	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kesehatan

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			2. Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang Terakreditasi	persen	100	100	90		100		100		100		100		
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
1	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan terhadap pelayanan sekertariat PUPRPKP	Angka	80,00	85,00	87,00	18.298.351.795	90,00	20.128.186.975	93,00	6.741.680.672	95,00	8.015.848.739	97,00	53.184.068.181	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Persen	3,60	3,66	3,73	5.132.016.295	3,80	5.645.217.925	3,88	6.209.739.717	3,97	6.830.713.689	4,1	7.513.785.058	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			2. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	Persen	66,11	4,18	4,60		5,06		5,57		6,12		6,74		
3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas	Persen	33,6	35,4	37,55	4.256.837.000	39,94	4.682.520.700	42,56	5.150.772.770	45,45	5.665.850.047	48,6	6.232.435.052	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Kabupaten/ Kota														
4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Persen	36,73	37,49	38,76	60.585.000.000	40,16	66.643.500.000	41,70	73.307.850.000	43,39	80.638.635.000	45,25	88.702.498.500	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persen	29,02	29,63	30,36	3.959.200.000	31,16	4.355.120.000	32,04	4.790.632.000	33,00	5.269.695.200	34,07	5.796.664.720	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persen	63,51	63,45	63,45	32.400.000.000	63,46	35.640.000.000	63,46	39.204.000.000	63,46	43.124.400.000	63,47	47.436.840.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Tingkat Kcmantapan Jalan kabupaten /kota	Persen	4,16	2,45	16,44	86.546.705.010	40,95	95.201.375.512	60,48	104.721.275.512	82,10	115.193.664.371	100,00	126.713.030.809	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
8	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persen	6,54	2,62	2,62	500.000.000	2,62	550.000.000	2,62	605.000.000	2,62	665.500.000	2,62	732.050.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Persen	41,93	43,06	48,16	4.902.750.000	56,66	5.393.025.000	70,82	5.932.327.500	84,99	6.525.560.250	100,00	7.178.116.275	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Meningkatnya kualitas taman kota	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Taman Kota dalam kondisi baik yang dikelola	Ha	62,00	57,93	63,72	1.000.000	70,09	1.100.000	77,10	1.210.000	84,81	1.331.000	93,29	1.464.100	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
1	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	5,99	17,65	32,14	9.445.000.000	47,28	10.389.500.000	63,29	11.428.450.000	80,83	12.571,295.000	100	13.828.424.500	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
	Terpenuhinya rumah layak huni bagi Orang Asli Papua	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Orang Asli Papua	Persen	100	100	100	15.190.440.000	100	17.089.245.000	100	18.988.050.000	100	20.886.855.000	100	22.785.660.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang Ditangani	Persen	8,17	21,42	24,38	18.250.000.000	27,63	20.075.000.000	31,21	22.082.500.000	35,15	24.290.750.000	39,48	26.719.825.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
3	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Luas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani	Persen	100	100	100	7.000.000.000	100	7.700.000.000	100	8.470.000.000	100	9.317.000.000	100	10.248.700.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
4	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persen	54,68	61,36	68,57	11.909.400.000	76,50	13.100.340.000	85,23	14.410.374.000	94,83	15.851.411.400	100	17.436.562.540	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
1	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah	Persen	75,72	81,00	83,00	8.621.982.267	86,00	8.879.805.220	90,00	9.422.952.738	95,00	10.198.229.556	98,00	11.091.583.849	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
2	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persen	50,00	52,00	57,00	5586267500	62,00	5586267500	71,00	5586267500	81,00	5586267500	90,00	5586267500	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum		2. Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	50,00	52,00	57,00		67,00		74,00		79,00		82,00		
	Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat		3. Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persen	50,00	52,00	57,00		62,00		71,00		81,00		90,00		
	Meningkatnya kapasitas SDM PPNS		4. Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	60,00	64,00	76,00		81,00		89,00		93,00		97,00		
3	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Indeks Kepuasan terhadap	Persen	75,72	81,00	83,00	30.859.960.000,00	86,00	30.859.960.000,00	90,00	30.859.960.000,00	95,00	30.859.960.000,00	98,00	30.859.960.000,00	Perangkat Daerah Pelaksana

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
	tugas dan fungsi perangkat daerah	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah														Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan)
4	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1. Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran		0	65	70	5.607.000.000,00	75	5.607.000.000,00	80	5.607.000.000,00	90	5.607.000.000,00	100	5.607.000.000,00	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan)
	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		2. Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	0	100	100		100		100		100		100		

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
5	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	indeks	92,00	92,5	92.46	5.362.033.930	92,92	5.362.033.930	93,39	5.362.033.930	93,85	5.362.033.930	94,32	5.362.033.930	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (BPBD)
6	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persen	60	60	65	19.743.630.500	70	19.743.630.500	75	19.743.630.500	80	19.743.630.500	80	19.743.630.500	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (BPBD)
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat		2. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persen	75	80	80		90		90		90		90		
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana		3. Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persen	80		80		85		85		90		90		
	SOSIAL																

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
1	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat Dinas Sosial		92,00	76,61	77,65	5.139.450.680	79,15	5.291.905.890	80,45	5.407.408.000	81,77	5.904.998.800	82,88	6.447.747.880	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Ketenteraman Dan Sosial
2	Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial		0,00	74,40	75,45	1.000.000.000	77,15	1.30.000.000	78,91	1.060.000.000	79,83	1.090.000.000	80,96	1.110.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Ketenteraman Dan Sosial
3	Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	persen	17,34	19,75	33,48	3.810.000.000	35,54	4.040.000.000	43,12	4.430.000.000	59,11	4.590.000.000	60,11	4.700.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Ketenteraman Dan Sosial
4	Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	persen	76,00	78,80	80,00	6.833.371.000	82,00	6.900.000.000	84,00	6.970.000.000	87,00	7.150.000.000	88,52	7.260.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Ketenteraman Dan Sosial
5	Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau	persen	71	72,45	73,72	1.100.000.000	74,69	1.375.000.000	75,86	1.480.000.000	76,91	1.500.000.000	77,64	1.580.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana														Ketenteraman Dan Sosial
	TENAGA KERJA																
1	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan Pelayanan Sekretariat Dinas Tenaga Kerja	Indeks	84,00	89,05	89,94	9.999.651.535	90,84	9.917.770.097	91,75	10.306.230.812	92,67	10.714.114.569	92,67	11.142.392.504	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Tenaga Kerja
2	Terkelolanya informasi tenaga kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Persen	2.06	2.06	2.06	1,776,051,536	2.10	1,694,170,097	2.48	2,082,630,812	2.71	2,490,514,569	3	2,918,792,504	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Tenaga Kerja
3	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Persen	79.37	78.10	79.69	3,870,000,000	78.72	3,870,000,000	78.18	3,870,000,000	78.10	3,870,000,000	79	3,870,000,000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Tenaga Kerja
4	Meningkatanya perlindungan terhadap pekerja	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Jumlah	1070	1070	1070	650,000,000	2160	650,000,000	2160	650,000,000	2160	650,000,000	1120	650,000,000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Tenaga Kerja

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
1	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Indeks	50	55	60.5	4,124,680,590.00	66.55	4,537,148,649.00	73.21	4,113,637,000.00	80.53	4,525,000,700.00	88.58	4,967,385,170.00	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81.25	81.3	81.35		81.4		81.45		81.5		81.55		
			Indeks Kepuasan Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	Indeks	65.5	65.55	65.6		65.65		65.7		65.75		65.8		
2	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang melakukan Perencanaan dan Pengganggaran Responsif Gender (PPRG)	Prosentase	22.22	37.04	51.85	3,585,000,000.	66.67	4,268,250,000.	81.48	3,916,475,000.	96.30	4,097,362,500.	100	4,287,400,750.	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio KDRT	Prosentase	0.073	0.074	0.076	480,000,000	0.077	504,000,000	0.08	658,325,000	0.08	696,042,500	0.082	752,359,500	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
																	Perlindungan Anak
4	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Prosentase	51,68	51.73	51.78	165,000,000	51.84	173,250,000	51.89	220,000,000	51.94	244,000,000	51.99	270,000,000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	*Prosentase*		*25*	*27*	*50,000,000*	*30*	*52,500,000*	*32*	*55,125,000*	*35*	*66,150,000*	*37*	*72,765,000*	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	*45*	*45.5*	*46*	*525,000,000*	*46.5*	551,250,000	*47*	*603,662,500*	*47.5*	*643,828,750*	*50*	*694,594,500*	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	Prosentase	0.139	0.131	0.128	625,000,000	0.125	656,250,000	0.122	695,625,000	0.120	732,322,500	0.118	819,434,700	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
	terhadap anak																
	PANGAN																
1	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah	Indeks	88,00	89	90	4.396.397.255	91	4.535.868.850	93	4.690.623.500	94	4.807.814.460	94	4.956.041.300	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Ketahanan Pangan
			2. Nilai SAKIP		84	85	86		87		88		89		89		
2	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persen	43	50	55	550.000.000	55	600.000.000	55	700.000.000	55	750.000.000	55	750.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Ketahanan Pangan
3	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	86	87	88	3.818.750.000	86	4.200.000.000	86	4.000.000.000	86	4.430.000.000	90	4.600.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Ketahanan Pangan
4	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	52	53	54	1.050.000.000	55	1.150.000.000	57	1.100.000.000	59	1.250.000.000	60	1.300.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Ketahanan Pangan
5	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persen	80,48	80,49	80,53	450.000.000	80,75	480.000.000	80,93	535.000.000	90,27	585.000.000	90,3	635.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Ketahanan Pangan

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
	PERTANAHAN																
1	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. NILAI LAKIP	Nilai	65,00	70,00	75,00	298.595.000	75,00	320.000.000	77,00	352.000.000	77,00	370.000.000	80.00	375.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanahan
			2. Persentase Keberhasilan penyelenggaraan program lingkup Bagian Pertanahan	Persen	100,00	100,00	100,00		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanahan
2	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentasi terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	Persen	35,00	40,00	40,00	570.000.000	66,00	585.000.000	67,00	615.000.000	100,00	650.000.000	100,00	700.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanahan
3	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNANTANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentasi Penyelesaian Ganti kerugian dan Satuan Tanah untuk Pembangunan	Persen	82,00	90,00	90,00	2.050.000.000	98,00	2.200.000.000	98,00	2.350.000.000	100,00	2.550.000.000	100	2.570.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanahan

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	PROGRAM RETRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	luas tanah obyek Lanreform (TOL) yang siap diretrubusikan yang bersal dari tanah klebihan maksimum dan tanah absentee	Persen	83	85	85	270.520.000	86	283.600.000	90	292.000.000	100	322.000.000	100	350.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanahan
	LINGKUNGAN HIDUP																
1	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP		60,35	-	60,85	62.695.800.000	61,35	63.435.800.000	61,85	62.300.800.000	62,35	62.550.800.000	62,85	62.860.800.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
2	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persen	40,00	50,00	55,00	2.300.000.000	57,00	800.000.000	59,00	800.000.000	61,00	800.000.000	63,00	1.600.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
3	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	75,5	75,53	75,57	3.000.000.000	75,60	2.100.000.000	75,64	2.100.000.000	75,67	2.100.000.000	75,71	3.000.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN	Persentase RTH	Persen	0,05	0,06	0.08	1.100.000.000	1,00	700.000.000	1,05	800.000.000	1,10	800.000.000	1,25	800.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
	keanekaragaman hayati	HAYATI (KEHATI)															Lingkungan Hidup
5	Meningkatnya kualitas pengendalian B3 dan Limbah B3	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persen	10,00	10,00	10,20	700.000.000	10,40	700.000.000	10,60	700.000.000	10,80	700.000.000	11,00	700.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
6	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah	Persen	64,36	64,56	64,76	1.000.000.000	64,96	700.000.000	65,16	1.050.000.000	65,36	750.000.000	65,56	1.100.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
7	Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Persen	8,33	8,33	16,67	800.000.000	25,00	400.000.000	33,33	450.000.000	41,67	450.000.000	50,00	500.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
8	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	orang	10,00	10,00	10,20	900.000.000	10,40	950.000.000	10,60	1.000.000.000	10,80	1.000.000.000	11,00	1.000.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
9	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	persen			12,85	350.000.000	25,64	350.000.000	38,46	350.000.000	51,28	350.000.000	64,10	350.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
10	Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persen			0,5	500.000.000	10,00	500.000.000	15,00	500.000.000	20,00	500.000.000	25,00	500.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
11	Meningkatnya tata kelola persampahan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Persen	83,49	83,99	84,49	16.350.000.000	84,99	14.450.000.000	85,49	14.150.000.000	85,99	14.300.000.000	86,49	14.300.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Lingkungan HiduP
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
1	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Indeks Kepuasaan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah	Indeks	90,27	80	81	2.771.862.000	82	2.780.000.000	83	2.825.000.000	84	2.825.000.000	85	2.850.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2. Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Laporan	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
2	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	16,37	16,62	16,86	642.591.000	17,12	642.591.000	17,37	642.591.000	17,64	642.591.000	17,90	642.591.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	65,21	66,19	67,18		68,19		69,21		70,25		71,31		
3	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1. Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	93,92	94,01	94,48	242.700.000	94,95	242.700.000	95,43	242.700.000	95,50	242.700.000	96,38	242.700.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2. Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100	90	91		92		93		94		95		
			3. Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan	Persen	51,18	51,28	52,05		52,83		53,62		54,43		55,34		

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			bagi yang melaporkan														
			4. Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100	90	91		92		93		94		95		
4	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yg dimanfaatkan	persen	28	30	31	2.444.700.000	32	2.444.700.000	33	2.444.700.000	34	2.444.700.000	35	2.444.700.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Cakupan Pelayanan Profil Kependudukan	Laporan	1	1	1		1		1		1		1		
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
1	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan terhadap pelayanan sekretariatan perangkat Daerah	indeks		25	35	230.000.000	45	242.000.000	65	254.000.000	75	266.000.000	100	278.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
2	Meningkatnya kualitas penataan desa	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa Maju dan Mandiri	persen		14	25	789.406.000	45	950.000.000	75	1.050.000.000	85	1.350.000.000	100	1.350.000.000	
3	Meningkatnya kualitas penataan desa	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Persen		7	8	125.000.000	14	150.000.000	21	175.000.000	28	200.000.000	35	210.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
																	dan Kampung
4	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	persen		25	40	2.500.000.000	60	2.100.000.000	70	3.050.000.000	85	3.050.000.000	100	3.200.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
			2. Prsentase fasilitasi tata kelola Desa	persen		25	40		60		70		85		100		
5	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1. Prsentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatn Desa (LKD)	persen		10	30	4.850.000.000	40	5.250.000.000	65	5.600.000.000	85	5.750.000.000	100	5.750.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
			2. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persen		10	30		40		65		85		100		
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
2	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	Angka	3,95	3,39	3,72	298.750.000	3,31	199.625.000	3,26	2.908.952.326	3,22	3.042.472.822	3,18	3.213.243.390	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2. Indeks Pembangunan Keluarga *(i-bangga)*	Indeks	63.1	64.1	64.9		65.8		66.6		67.3		68		
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Angka	87.29	87.46	87.64	1,770,291,600	87.81	1,871,918,202	87.99	1,969,627,326	88.17	2,054,279,947	88.34	2,133,263,336	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Prosentase Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan yg melakukan pembinaan ketahanan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Prosentase	65	65.13	65.2603	1,517,472,000	65.39	1,547,821,440	65.52156208	1,578,777,869	65.65260521	2,354,260,234	65.78	2,401,345,439	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PERHUBUNGAN																

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
1	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP OPD	nilai	79,09	80	81	8.219.000.000	82	9.040.900.000	83	9.944.990.000	84	10.939.489.000	85	12.033.437.900	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pengendalian Perhubungan
2	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Konektivitas darat	Nilai	100	61,92	67,31	27.085.000.000	68,25	29.793.500.000	69,25	32.759.850.000	70,25	36.025.835.000	80,25	39.615.918.500	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pengendalian Perhubungan
3	Meningkatnya kualitas layanan transportasi ASDP	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase konektivitas sungai danau penyeberangan	Persen	25,71	30	35	5.050.000.000	35	5.555.000.000	35	6.110.000.000	35	6.721.000.000	35	7.393.705.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pengendalian Perhubungan
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
1	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SKM	Indeks	72,91	73	74	4.756.000.000	75	4.992.500.000	76	5.498.000.000	77	5.859.750.000	78	6.143.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika
2	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Persen	0	37,06	49,41	2.280.000.000	55,58	2.700.000.000	67,93	3.270.000.000	71,64	3.395.000.000	75,70	3.740.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi yang memenuhi standar teknis pembangunan aplikasi	Persen	58,93	59,65	60,34	2.925.000.000	61,02	3.925.000.000	61,67	5.200.000.000	62,30	5.625.000.000	62,90	6.185.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																
1	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	4.10	6.97	7.38	1,860,000,000	7.79	2,120,000,000	8.20	2,380,000,000	8.61	2,640,000,000	9.02	2,900,000,000	4.10	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persen	40.98	61.48	61.48	330,000,000	61.48	360,000,000	61.48	390,000,000	61.48	420,000,000	61.48	450,000,000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
3	Meningkatnya produktivitas koperasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persen	13,11	13,11	13,11	1.200.000.000	13,52	1.400.000.000	13,93	1.600.000.000	14,34	1.800.000.000	14,75	2.000.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
4	Meningkatnya kapasitas UMKM yang	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA	Persentase Usaha Kecil yang	Persen	;-	5.3	5.7	370,000,000	6.2	410,000,000	6.6	460,000,000	7.1	510,000,000	7.5	530,000,000	Perangkat Daerah Pelaksana

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
	tangguh dan mandiri	MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Bertransformasi dari Informal ke Formal														Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
5	Meningkatnya daya saing UMKM	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1. Rasio kewirausahaan	Angka	1,63	1,63	1,64	1.200.000.000	1,65	1.400.000.000	1,66	1.600.000.000	1,67	1.800.000.000	6,8	2.000.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
			2. Perumbuhan wirausaha	persen	4.4	7.4	4.5	1,200,000,000	4.7	1,400,000,000	4.9	1,600,000,000	5.1	1,800,000,000	5.5	2,000,000,000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	PENANAMAN MODAL																
1	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah	Persentase	89	89	90	5.059.000.000	91	4.967.000.000	92	5.162.000.000	93	5.316.000.000.	94	5.580.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Penanaman Moda
2	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	PROGRAM ENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total terhadap target Investasi	persentase	18,33	19,1	19,87	200.000.000	19,91	200.000.000	19,96	220.000.000	20	242.000.000	20,04	250.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Penanaman Moda
3	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	persentase	4,5825	4,775	4,9675	350.000.000	4,9775	350.000.000	4,99	385.000.000	5,00	422.000.000	5,01	450.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Penanaman Moda

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
4	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	persentase	67,5	67,5	67,64	820.000.000	67,64	820.000.000	68,5	902.000.000	70,34	964.000.000	70,34	1.000.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Penanaman Moda
5	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka Usaha	persentase	4,5825	4,775	4,9675	1.300.000.000	4,9775	1.300.000.000	4,99	1.220.000.000	5,00	1.242.000.000	5,01	1.250.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Penanaman Moda
6	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	persentase	4,5825	4,775	4,9675	150.000.000	4,9775	150.000.000	4,99	165.000.000	5,00	180.000.000	5,01	200.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Penanaman Moda
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																
1	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasaan terhadap pelayanan sekertariat perangkat daerah	Persen		76,95	77,95	3.125.000.000	78,87	3.500.00.00	80,00	3.700.000.000	82,00	3.800.000.000	82,00	3.900.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga
2	Meningkatnya daya saing kepemudaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio Wirausaha Pemuda	persen		50,00	50,00	300.000.000	55,00	300.000.000	60,00	350.000.000	70,00	375.000.000	75,00	400.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
																	Kepemudaan dan Olahraga
3	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet yang masuk pelatnas	persen	50,00		50,00	400.000.000.	75,00	500.000.000	75,00	525.000.000	80,00	550.000.000	85,00	575.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga
4	Meningkatnya kualitas kepramukaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPRAMUKAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Persen		70,00	70,00	2.820.000.000	75,00	2.820.000.000	76,00	2.920.000.000	77,00	2.220.000.000	77,00	2.220.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga
	STATISTIK																
1	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	59,52	61,90	64,29	680.000.000	69,05	765.000.000	71,43	850.000.000	76,19	990.000.000	78,57	1.180.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Statistik
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	59,52	61,90	64,29	680.000.000	69,05	765.000.000	71,43	850.000.000	76,19	990.000.000	78,57	1.180.000.000	

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
	PERSANDIAN																
1	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persen	49,61	50,20	50,50	2.750.000.000	51,00	3.025.000.000	51,50	3.327.500.000	52,00	3.535.000.000	52,20	3.730.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Persandian
	KEBUDAYAAN																
1	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Persen	100	100	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pendidikan
2	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1. Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Persen	0	100	100	6.150.000.000	100	6.150.000.000	100	6.150.000.000	100	6.150.000.000	100	6.150.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pendidikan
			2. Persentase Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	Persen	99,15	100	100		100		100		100		100		
	PERPUSTAKAAN																

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
1	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah	Indeks	72,00	74,00	76,00	3.872.060.000	78,00	4.168.620.000	80,00	4.522.182.000	81,00	4.911.100.200	82,00	5.338.910.220	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perpustakaan
2	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Persen	43,61	55,00	60,00	1.761.612.000	65,00	600.000.000	75,00	400.000.000	80.00	400.000.000	80,00	400.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perpustakaan
3	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno Yang Dimiliki	Persen		14,00	16,00	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perpustakaan
	KEARSIPAN																
1	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persen	15,00	20,00	25,00	280.000.000	30,00	200.000.000	35,00	200.000.000	40,00	200.000.000	45,00	200.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kearsipan
2	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Cakupan Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persen	0,00	35,00	43,00	50.000.000	-	-	-	-	-	-	45,0	100.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kearsipan
	KELAUTAN DAN PERIKANAN																
1	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	indeks	82,39	82,00	83,00	5,062,296,000	83,50	5,083,700,000	83,70	5,331,500,000	84,00	5,278,650,000	84,30	5,490,700,000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perikanan dan Kelautan

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
2	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	45,085.08	44,814.79	45,487.01	3,294,242,800	46,168.30	3,420,000,000	46,859.81	3,475,000,000	47,561.69	3,510,000,000	48,274.10	3,650,000,000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perikanan dan Kelautan
3	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	13,805.88	13,771.35	13,909.06	4,090,371,800	14,048.15	4,102,900,000	14,188.63	4,154,000,000	14,330.52	4,179,250,000	14,473.83	4,294,250,000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perikanan dan Kelautan
4	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1. Jumlah Produksi olahan hasil perikanan (ton)	ton	1,208.87	1,152.26	1,209.86	1,473,385,400	1,330.84	1,580,000,000	1,463.92	1,610,000,000	1,610.32	1,640,000,000	1,771.35	1,680,000,000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perikanan dan Kelautan
			2. Angka Konsumsi Ikan	kg/ kapita	44,4	44,89	45,79		48,54		51,93		54		54,81		
	PARIWISATA																
1	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah	Indeks	96	98	98	5,622,213,002	98	6,746,655,602	98	8,095,986,723	98	9,715,184,067	98	11,658,220,881	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pariwisata
2	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase	100%	80%	80%	3,416,615,283	85%	4,600,000,000	90%	4,500,000,000	95%	3,300,000,000	100%	4,200,000,000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pariwisata

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
3	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persentase	50,00	50,00	50,00	1.456.500.000	55,00	2.500.000.000	60,00	2.400.000.000	65,00	3.000.000.000	70,00	2.600.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pariwisata
4	Meningkatnya kapsitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang aktif dan Tervalidisai	Persentase	58%	60%	60%	2,830,000,000	60%	2,650,000,000	60%	1,850,000,000	65%	2,950,000,000	75%	1,900,000,000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pariwisata
5	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk yang Difasilitasi Hak Kekayaan Intelektualnya	Persentase	88%	90%	90%	2,506,500,000	90%	3,400,000,000	90%	5,350,000,000	90%	5,900,000,000	90%	2,550,000,000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pariwisata
	PERTANIAN																
1	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Produksi Tanaman Pangan	Ton	10	11	11,5	1.700.000.000	11,7	1.750.000.000	11,8	1.900.000.000	12	2.050.000.000	13	2.050.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanian
			2. Produksi Hortikultura	Ton	22	22,5	22,5		22,7		23		23,,3		24		
			3. Produksi Komoditas Peternakan	Ton	120	120,2	120,6		120,8		121		122		123		
2	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan	Persen	6,2	6,5	7,0	4.550.000.000	7,5	3.700.000.000	8,0	4.050.000.000	8,40	4.350.000.000	8,70	4.650.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanian

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
		N PRASARANA PERTANIAN	Menjadi LP2B														
3	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1. Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	persen	11,11	12,5	13	1.000.000.000	13,5	1.000.000.000	13,75	1.200.000.000	13,8	1.100.000.000	14	1.200.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanian
			2. Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	persen	17,02	20,51	25,81		34,78		53,33		114,29		114,29		
4	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1. Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persen	70,00	70,00	70,00	500.000.000	73	550.000.000	74	550.000.000	75	700.000.000	76	750.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanian
			2. Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Persen	70,00	70,00	70,00		75		77		80		83		
5	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang	Persen	80,00	82,00	83,00	1.300.000.000.	85,00	1.500.000.000.	86	1.200.000.000.	87	1.400.000.000.	90	1.600.000.000.	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanian

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Ditingkatkan														
			2. Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	Persen	80	82	83		85		86		87		90		
	PERDAGANGAN																
1	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persen	-	-	20	150,000,000	22	160,000,000	24	170,000,000	26	180,000,000	28	190,000,000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perdagangan
2	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persen	85.4	85.40	86.60	3,510,000,000	86.60	3,520,000,000	86.60	3,530,000,000	86.60	3,540,000,000	86.60	3,550,000,000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perdagangan
3	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting penting	Persen	54,00	54 laporan	64,00	2.220.000.000	64,00	2.240.000.000	64,00	2.260.000.000	64,00	2.280.000.000	64,00	2.300.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perdaganga

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
4	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	Persen	20,00	1000 unit	20,00	210.000.000	20,00	220.000.000	20,00	230.000.000	20,00	240.000.000	20,00	250.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perdagangan
5	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	Persen	-	-	11,76	450.000.000	14,71	470.000.000	17,65	490.000.000	20,59	510.000.000	23,53	530.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perdagangan
	PERINDUSTRIAN																
1	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat	Indeks	baik	baik	baik	2.113.700.000	baik	2.521.200.000	baik	2.428.700.000	baik	2.837.200.000	baik	2.744.700.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perindustrian
2	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Persen	20.69	23.02	19.83	3,060,000,000	19.91	3,170,000,000	20.00	3,280,000,000	20.09	3,390,000,000	20.17	3,500,000,000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perindustrian
	SEKRETARIAT DAERAH																
1	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Sekretariat PBJ			60	*70*	518,842,000	*71*	570,726,200	*72*	627,798,820	*73*	691,788,702	74	760,967,572	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sekretariat Daerah (PBJ)

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Terahadap Pelayanan Sekretariat Bagian Umum		85	86	88	5.636.320.000.	90	5.720.864.800	92	5.806.667.772	94	5.893.777.939	96	5.982.184.608	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sekretariat Daerah (Umum)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB / KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat		76	77	78	3.583.100.000	79	3.941.410.000	80	4.662.251.000	80	4.769.106.100	80	5.246.016.710	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sekretariat Daerah (Prokim)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB / KOTA	Nilai SKM		76	77	78	3.296.000.000	80	3.625.600.000	82	3.988.160.000	85	4.386.976.000	88	4.825.673.600	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sekretariat Daerah (P2K2)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persen	100	100	100	1.620.098.000	100	1.871.188.000	100	2.122.278.000	100	2.373.368.000	100	2.624.458.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sekretariat Daerah (Ortal)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Sekretariat Bagian Hukum	Indeks		76,8	77	350.000.000	77,5	375.000.000	78	400.000.000	78,5	425.000.000	75	450.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sekretariat Daerah (Hukum)
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Produk Hukum yang dihasilkan	persen		70	77	1.597.200.000	79	1.621.158.000	80	1.645.400.000	82	1.670.100.000	85	1.685.200.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sekretariat Daerah (Hukum)

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Jayapura	Indeks	0	505.789.000	111	2.268.000.000	138	2.548.000.000	141	2.738.000.000	141	2.928.000.000	141	3.118.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sekretariat Daerah (Kesra)
2	Meningkatnya kualitas kebijakan kebijakan pemerintahan dan otononi daerah, serta kesejahteraan rakyat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen		20	20	21.560.000.000	40	24.645.000.000	60	27.580.000.000	80	30.790.000.000	100	33.680.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sekretariat Daerah (Kesra)
3	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat efektivitas Pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persen		20	20	1.350.000.000	40	1.400.000.000	60	1.450.000.000	80	1.500.000.000	100	1.570.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sekretariat Daerah (Kesra)
			Persentase Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik	Persen	0.00%	30%	45%	1,050,000,000	50%	1,207,500,000	55%	1,388,625,000	60%	1,596,918,750	65%	1,836,456,563	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sekretariat Daerah (PBJ)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SKM	survey	76.25	77	78	270,000,000	79	680,500,000	80	786,900,000	82	869,425,000	85	956,778,000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sekretariat Daerah (Pemerintahan))

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SKM	survey	76.25	77	78	5,525,000,000	80	6,077,500,000	82	6,685,250,000	85	7,353,775,000	87	8,088,552,500	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sekretariat Daerah (Pemerintahan)
	SEKRETARIAT DPRD																
1	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah	Persen	80,48	80,50	80,60	40.241.089.800	80,70	45.272.913.780	80,80	49.800.205.158	80,90	54.780.225.674	80,90	60.258.248.241	Sekretariat DPRD
2	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan, serta penganggaran dan pengawasan	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1. Ketepatan Penetapan PERDA APBD Tahunan	Persen	80,00	95,00	90,00	73.035.600.000	92,00	80.339.160.000	95,00	88.373.076.000	100,00	97.210.383.600	100,00	97.210.383.600	Sekretariat DPRD
			2. Persentase Penetapan RANPERDA Tahunan	Persen	90,00	90,00	95,00		92,00		95,00		100,00		100,00		
			3. Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	95,00	95,00	95,00		92,00		95,00		100,00		100,00		

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
	PERENCANAAN																
1	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah	Indeks	72	75	78	6.141.363.200,00	82	6.200.000.000	85	6.250.000.000	90	6.300.000.000	95	6.350.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perencanaan
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	93	94	97	3.717.816.800,00	100	3.780.000.000	100	3.800.000.000	100	3.850.000.000	100	3.900.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persen		94	100		100		100		100		100		
3	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	95	96	96	2.705.089.957,00	96	2.750.000.000	100	2.800.000.000	100	2.850.000.000	100	2.900.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			2. Persentase Capaian Kinerja PD dibawah Koordinasi Bidang Sosbud			100	100		100		100		100		100		
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur		3. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang	Persen	95	96	96		96		100		100		100		

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
	dan kewilayahan		Infrastruktur dan Kewilayahan														
			4. Persentase Capaian Kinerja PD dibawah Koordinasi Bidang Sarpras			100	100		100		100		100		100		
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA		5. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persen	95	96	96		96		100		100		100		
			6. Persentase Capaian Kinerja PD dibawah Koordinasi Bidang Ekonomi			100	100		100		100		100		100		
	KEUANGAN																
1	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA	Indeks Kepuasan terhadap pelayanan sekretariat BPKAD	Indeks		90	93	23.060.377.385	95	23.277.689.893	97	23.500.526.235	99	23.729.5-09.947	100	23.874.810.616	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keuangan
2	Meningkatnya tata kelola anggaran	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktu	Persen	100		100	136,431,822,724	100	140.113.260.714	100	143,808,604,306	100	147,605,939,383	100	151,641.498.608	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keuangan

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			r Pelayanan Publik														
	Meningkatnya tata kelola perbendaharaan		2. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persen	100		100		100		100		100		100		
	Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan		3. Persentase Penurunan SILPA	Persen	70		60		50		40		30		0		
			4. Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persen	100		100		100		100		100		100		
3	Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen			30,00	7.070.000.000	33,00	6.839.032.658	37,00	7.012.609.969	40,00	7.126.950.805	46,00	7.308.474.647	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keuangan
4	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Terhadap Sekretariat Bapenda	Indeks	70,00	71,00	72,00	28.651.000.000	73,00	30.012.000.000	74,00	31.073.100.000	75,00	31.141.350.000	76,00	32.180.100.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keuangan (Bapenda)
5	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	41,86	35,91	45,71	5.300.000.000	47,28	5.325.000.000	49,03	5.349.000.000	50,81	5.375.000.000	50,82	5.708.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keuangan (Bapenda)
	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan		2. Cakupan pembinaan dan pengawasan	Persen	65	67	67		70		75		80		90		

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			pengelolaan pendapatan														
	Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital		3. Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persen	85	87	89		95		100		100		100		
	KEPEGAWAIAN																
1	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat BKPP	Indeks	81,64	88,5	88,9	17.778.021.039	90,00	17.632.446.974	92,5	18.323.077.318	95,00	19.048.239.188	100	92.591.443.653	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kepegawaian
2	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1. Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi (Pengadaan ASN)	Persen	50	2114 CPNS	-	-	288 CPN	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kepegawaian
	Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN		2. Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	Persen	100	193 ASN	300 ASN	6.000.000.000	350 ASN	6.000.000.000	400 ASN	6.000.000.000	400 ASN	700.000.000	500 ASN	8.000.000.000	
	Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN		3. Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan kompetensinya	Persen	100	25 ASN	50 ASN	500.000.000	60 ASN	500.000.000	60 ASN	500.000.000	60 ASN	500.000.000	60 ASN	500.000.000	

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
	Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN		4. Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Pangkat)	Persen	100	900 SK	900 SK	400.000.000	900 SK	400.000.000	900 SK	400.000.000	900 SK	400.000.000	900 SK	400.000.000	
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																
1	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1. Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional (Kelas Assesor)	Persen	100	20 ASN	30 ASN	425.000.000	30 ASN	425.000.000	30 ASN	425.000.000	30 ASN	425.000.000	30 ASN	425.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pelatihan dan Pendidikan
	Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi		2. Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (PIM/Latsar /Prajabatan)	Persen	13	805 CPNS	2246 CPNS	2.500.000.000	-	-	-	-	288 CPNS	1.000.000.000	-	-	
	Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi		3. Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Talent Scouting)	Persen	100	25 ASN	50 ASN	500.000.000	50 ASN	500.000.000	50 ASN	500.000.000	50 ASN	500.000.000	50 ASN	500.000.000	

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis		4. Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Spesialis Dokter)	Persen	100	5 ASN Dokter Spesialis	15 ASN	6.000.000.000	15 ASN	6.000.000.000	15 ASN	6.000.000.000	15 ASN	6.000.000.000	15 ASN	6.000.000.000	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
1	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persen		65	65	550.000.000	70	550.000.000	75	550.000.000	80	550.000.000	85	550.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persen		10	10,	350.000.000	10,5	375.000.000	10,55	375.000.000	20	400.000.000	25	450.000.000	

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
2	Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan	PROGRAM RISET DAN INOVASI	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Persen		45	45,65	550.000.000	47	575.000.000	49	600.000.000	52	625.000.000	55	650.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Persen		45	45,65	250.000.000	47	275.000.000	49	300.000.000	52	325.000.000	55	350.000.000	
	Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Persen		45	45,65	250.000.000	47	275.000.000	49	300.000.000	52	325.000.000	55	350.000.000	
	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah		Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	Persen		45	45,65	250.000.000	47	275.000.000	49	300.000.000	52	325.000.000	55	350.000.000	
	BADAN PENGELOLAAN																

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
	PERBATASAN																
1	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Indeks	62,35	65,00	67,00	3.610.500.000	68,00	3.848.500.000	70,00	3.906.500.000	72,00	3.906.500.000	86,00	5.892.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pengelolaan Perbatasan
	Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Jumlah Dokumen Pelaporan	Persen	2,00	3,00	4,00	4.800.000.000	5,00	5.025.000.000	6,00	5.075.000.000	7,00	5.125.000.000	8,00	24.925.000.022	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pengelolaan Perbatasan
	INSPEKTORAT DAERAH																
1	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Inspektorat	Indeks			75	10.143.487.000	78	10.218.487.000	80	10.524.487.000	83	10.704.487.000	85	11.012.287.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pengawasan
2	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1. Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persen	80.46	82	80.51	7,903,350,000	81	7,853,350,000	81.2	8,100,000,000	81.5	8,660,000,000	82	8,775,000,000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pengawasan
			2. Tindaklanjut Rekomendasi APIP Tahun Anggaran N-1	Persen	63.88	82	63.8		64		64.2		64.5		65		

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			3. Perangkat Daerah yang memiliki nilai evaluasi AKIP minimal B	Nilai	69.05	78	69.10		69.5		70		70.5		71		
			4. Hasil Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2.8	2.86	2.86		2.86		2.9		2.9		3		
3	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1. Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3.706.379.131	3,2	3.503.254.462	3,5	3.795.660.900	3,7	3.942.970.171	4	4.451.844.885	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pengawasan
			2. Survey penilaian integritas	Nilai	71.53	76.00	71.6		71.8		72		72.3		72.5		
	KEWILAYAHAN KECAMATAN																
1	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Distrik Jayapura Utara	indeks		67,5	68	15.191.840.858	68,25	15.191.840.858	68,55	15.191.840.858	69.75	15.191.840.858	70,25	15.191.840.858	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kewilayahan-Distrik Jayapura Utara & Kelurahan

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	indeks	67,05	67,05	70,05	475.000.000	72	475.000.000	75	475.000.000	80	475.000.000	82	475.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kewilayahan-Distrik Jayapura Utara
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat	Persen	100	100	100	2.047.886.000	100	2.047.886.000	100	2.047.886.000	100	2.047.886.000	100	2.047.886.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kewilayahan-Distrik Jayapura Utara & Kelurahan
4	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah			67,5	68	11.967.920.000	68,25	11.967.920.000	68,55	11.967.920.000	69.75	11.967.920.000	70,25	11.967.920.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kewilayahan-Distrik Jayapura Selatan & Kelurahan
5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM Kecamatan	Indeks		75	75	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kewilayahan-Distrik Jayapura Selatan

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
6	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat	Persen	100	100	100	1.985.200.000	100	1.985.200.000	100	1.985.200.000	100	1.985.200.000	100	1.985.200.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kewilayahan-Distrik Jayapura Selatan & Kelurahan
7	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah	Indeks		67,5	68	13.619.804.000	68,25	13.619.804.000	68,55	13.619.804.000	69.75	13.619.804.000	70,25	13.619.804.000	Distrik Abepura & Kelurahan
8	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM Kecamatan	Indeks		75	75	428.995.000	100	428.995.000	100	428.995.000	100	428.995.000	100	428.995.000	Distrik Abepura
9	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat	Persen	100	100	100	2.360.265.000	100	2.360.265.000	100	2.360.265.000	100	2.360.265.000	100	2.360.265.000	Distrik Abepura & Kelurahan
10	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah	Indeks		67,5	68	6.548.540.400	68,25	6.548.540.400	68,55	6.548.540.400	69.75	6.548.540.400	70,25	6.548.540.400	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kewilayahan-Distrik Heram & Kelurahan

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
11	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM Kecamatan	Indeks		75	75	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Distrik Heram
12	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat	Persen	100	100	100	1.635.934.000	100	1.635.934.000	100	1.635.934.000	100	1.635.934.000	100	1.635.934.000	Distrik Heeram & Kelurahan
13	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah	Indeks		67,5	67,5	7.165.264.500	74,43	7.165.264.500	78,15	7.165.264.500	82,06	7.165.264.500	100	7.165.264.500	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kewilayahan-Distrik Muara Tami & Kelurahan
14	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM Kecamatan	Indeks		75	75	490.007.800	100	490.007.800	100	490.007.800	100	490.007.800	100	490.007.800	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kewilayahan-Distrik Muara Tami
15	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan pemberdayaa	Persen	100	100	100	873.628.000	100	873.628.000	100	873.628.000	100	873.628.000	100	873.628.000	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kewilayahan-Distrik

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			n masyarakat														Muara Tami & Kelurahan
	PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
1	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	77,86	77,86	80	4.584.883.000	85	4.676.580.660	88	4.770.112.273	90	4.770.112.273	95	4.865.514.519	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER BANGSA	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	70	70	70	3.225.200.000	75	3.289.704.000	80	3.355.498.000	85	3.355.496.080	70	3.422.608.042	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Meningkatnya etika dan budaya politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Pesentase Pendidikan Politik Pada Kader Partai Politik	Persen	47,49	47,49	47,49	3.397.900.000	60	3.465.858.000	60	3.535.175.160	60	3.535.175.160	60	3.605.876.663	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	25,00	25,00	25,00	2.556.773.090	25,00	2.607.908.552	25,00	2.660.066.723	25,00	2.660.066.723	25,00	2.713.268.057	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO.	OUTCOME	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	Satuan	BASELINE		TARGET										PERANGKAT DAERAH
					2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
5	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Yang dilaksanakan	Persen	45	45	45	1.289.580.000	45	1.315.371.600	45	1.341.679.032	45	1.341.679.032	45	1.368.512.613	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang diselesaiakan	Persen	15	15	15	1.054.752.000	15	1.075.847.040	15	1.097.363.981	15	1.097.363.981	15	1.119.311.260	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: hasil proyeksi, 2025

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak). Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan. Subbab ini memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) disjaikan pada tabel di bawah.

Tabel 4.2.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Jayapura Tahun 2025-2029

NO.	INDIKATOR	*BASELINE*		TARGET				
		2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Angka Konflik Bernuansa SARA (Angka)	0	0	0	0	0	0	0
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	75,5	75,53	75,57	75,60	75,64	75,67	75,71
3	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	103,94	103,86	103,79	103,71	103,63	103,55	103,48
4	Indeks Infrastruktur (Indeks)	0,35	0,44	0,48	0,53	0,58	0,64	0,71
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,56	3,67	3,78	3,89	4,01	4,13	4,13
6	PDRB Per Kapita (ribu rupiah)	94.667	98.549	102.590	106.798	111.177	115.736	120.483
7	Rasio Gini	0,293	0,283	0,273	0,263	0,253	0,243	0,233
8	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	18,79	19,50	20,24	21,00	21,79	22,62	23,47
9	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (%)	1,71	1,76	1,81	1,87	1,92	1,98	1,98
10	Nilai Investasi (rupiah)	4.405.433.397.138	4.845.976.736.852	5.330.574.410.537	5.863.631.851.591	6.449.995.036.750	7.094.994.540.425	7.804.493.994.468
11	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,29	7,70	7,15	6,64	6,17	5,73	5,32
12	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	CC	CC	57 (CC)	57,6 (CC)	58,3 (CC)	59 (CC)	60 (B)
13	Nilai SAKIP (Nilai)	61,31 (B)	62,16 (B)	63 (B)	63,5 (B)	64 (B)	65 (B)	66 (B)
14	Opini BPK (Opini)		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

NO.	INDIKATOR	*BASELINE*		TARGET				
		2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
15	Indeks SPBE (Indeks)	2,35	2,36	2,37	2,39	2,40	2,41	2,42
16	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	88,63	90,32	92	92,4	93	93,4	94
17	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	81,98	82,39	82,79	83,20	83,61	84,03	84,44
18	Tingkat Kemiskinan (%)	10,72	10,62	10,52	10,42	10,32	10,22	10,12
19	Indeks Ketimpangan Gender (indeks)	0,35	0,350	0,345	0,340	0,335	0,330	0,325
20	Capaian Perjanjian Kinerja Walikota (%)	N/A	N/A	90	92	94	96	98

Sumber: hasil proyeksi, 2025

Selain IKU, pembangunan jangka menengah diukur dengan IKD. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Penyajian IKD dikelompokkan atas Aspek Demografi dan Geografi, Aspek Kesejahteraaan Masyarakat, Aspek Daya Saing, Aspek Pelayanan Umum, dan Indikator Kinerja Kunci. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau disebut juga dengan IKD disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 4.3.

Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Daerah Kota Jayapura Tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75,50	75,53	75,57	75,60	75,64	75,67	75,71
2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	92,26	92,27	92,28	92,29	92,30	92,31	92,31
3	Indeks Kualitas Air	Indeks	50,00	51,02	52,06	53,12	54,21	55,31	56,44
4	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	88,31	88,59	88,87	89,16	89,44	89,72	90,01
5	Indeks Risiko Bencana	Indeks	103,94	103,86	103,79	103,71	103,63	103,55	103,48
6	Indeka Ketahanan Pangan	Indeks	78,35	78,65	78,95	79,25	79,55	79,85	80,15
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,56	3,67	3,78	3,89	4,01	4,13	4,13
2	PDRB Per Kapita	ribu rupiah	94.667	98.549	102.590	106.798	111.177	115.736	120.483
3	Rasio Gini	Angka	0,293	0,283	0,273	0,263	0,253	0,243	0,233
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,29	7,70	7,15	6,64	6,17	5,73	5,32
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	67,81	67,83	67,85	67,87	67,89	67,91	67,93
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	51,68	51,73	51,78	51,84	51,89	51,94	51,99
7	Rasio Kewirausahaan	Angka	1,63	1,63	1,64	1,65	1,66	1,67	1,68
8	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81,98	82,39	82,79	83,20	83,61	84,03	84,44
9	Tingkat Kemiskinan	Persen	10,72	10,62	10,52	10,42	10,32	10,22	10,12
10	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	12,07	12,20	12,33	12,47	12,60	12,74	12,88
11	Harapan Lama Sekolah	tahun	15,27	15,34	15,40	15,47	15,54	15,60	15,67
12	Usia Harapan Hidup	tahun	71,99	72,17	72,34	72,52	72,70	72,87	73,05
13	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	ribu rupiah/orang /tahun	15.408	15.574	15.741	15.911	16.082	16.255	16.430

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
14	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,35	0,350	0,345	0,340	0,335	0,330	0,325
15	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,72	94,72	94,74	94,76	94,78	94,80	94,81
16	Persentase Desa Mandiri	Persen	N/A	N/A	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%
III	**ASPEK DAYA SAING**								
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	Persen	17,97	18,44	18,92	19,41	19,92	20,44	20,97
2	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (%)	Persen	1,71	1,76	1,81	1,87	1,92	1,98	1,98
3	Nilai Investasi	Rupiah	4.405.433.397.138	4.845.976.736.852	5.330.574.410.537	5.863.631.851.591	6.449.995.036.750	7.094.994.540.425	7.804.493.994.468
4	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	7,12	7,12	7,13	7,13	7,13	7,14	7,14
5	Indeks Infrastruktur	Indeks	0,35	0,44	0,48	0,53	0,58	0,64	0,71
6	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,61	3,62	3,63	3,64	3,65	3,66	3,67
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC	CC	57 (CC)	57,6 (CC)	58,3 (CC)	59 (CC)	60 (B)
2	Nilai SAKIP	Nilai	61,31 (B)	62,16 (B)	63 (B)	63,5 (B)	64 (B)	65 (B)	66 (B)
3	Opini BPK	Opini		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	51	58	65	70	75	77	80
5	Indeks SPBE	Indeks	2,35	2,36	2,37	2,39	2,40	2,41	2,42

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	88,63	90,32	92	92	93	93	94
7	Capaian Perjanjian Kinerja Walikota	Persen	N/A	N/A	90	92	94	96	98
8	Tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan prioritas nasional	Persen	100	100	100	100	100	100	100
9	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	35,66	35,86	36,06	36,26	36,46	36,66	36,86
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**								
	PENDIDIKAN								
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	81,04	82,09	83,14	84,22	85,30	86,40	87,52
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	99,33	99,36	99,39	99,42	99,45	99,48	99,52
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	96,42	96,80	97,18	97,56	97,94	98,33	98,71
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	KESEHATAN								
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio Daya tampung per 1.000 Penduduk	3,81	3,85	3,88	3,92	3,96	3,99	4,03
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	90,35	91,06	91,78	92,51	93,24	93,98	94,72

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	91,94	92,01	92,08	92,15	92,23	92,30	92,37
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	92,96	93,71	94,47	95,23	96,00	96,78	97,56
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	99,37	99,49	99,62	99,74	99,86	99,99	100,00
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	120	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	67,75	68,89	70,04	71,22	72,41	73,63	74,86
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	77,99	79,23	80,49	81,76	83,06	84,38	85,72
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	57,53	58,48	59,44	60,42	61,42	62,43	63,46
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	85,42	86,24	87,06	87,90	88,74	89,59	90,45

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Persen							
1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	4,65	4,76	4,87	4,98	5,10	5,22	5,34
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	33,08	33,09	33,11	33,12	33,14	33,15	33,16
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	61,57	65,08	68,80	72,73	76,88	81,26	85,90
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	91,21	91,22	91,23	91,24	91,25	91,27	91,28
5	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	59,65	61,76	63,95	66,22	68,57	71,00	73,51
7	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	42,77	42,04	41,32	40,61	39,92	39,23	38,56

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	3,22	2,98	2,76	2,55	2,36	2,19	2,02
3	Persentase rumah yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	96,77	96,94	97,12	97,29	97,47	97,64	97,81
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	4,23	4,34	4,46	4,57	4,69	4,82	4,94
3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	72,5	72,50	72,50	72,50	72,50	72,50	72,50
5	Rata-Rata Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	12,6	12,40	12,20	12,00	11,81	11,62	11,44
	SOSIAL								
1	Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	52,38	54,06	55,80	57,60	59,45	61,36	63,34
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	TENAGA KERJA								
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	1,01	1,11	1,23	1,35	1,49	1,64	1,81
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Orang	229.412.782,-	206.204.201,-	210.328.285,-	214.452.369,-	218.576.453,-	222.700.737,-	226.824.621,-
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Persen	0,325	0,64	1,25	2,44	4,77	9,35	18,30
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	61,91	63,98	66,12	68,34	70,62	72,99	75,43
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	Indeks Perlindungan Anak	Indeks		62,62	63,50	64,38	65,28	66,19	67,11
2	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	1,49	1,52	1,55	1,58	1,61	1,64	1,68
3	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Persen	0,225	0,31	0,42	0,57	0,78	1,07	1,46
4	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	per 100.000 penduduk perempuan	111,327	99,19	88,37	78,74	70,15	62,50	55,69
	PANGAN								
1	Persentase Cadangan Pangan	Persen	0	86,49	88,02	89,58	91,16	92,77	94,40
	PERTANAHAN								
1	Persentase sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	68	65,82	63,72	61,68	59,70	57,79	55,94
	LINGKUNGAN HIDUP								

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Sampah yang ditangani	Persen	83,49	84,46	85,45	86,44	87,45	88,46	89,49
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1	Persentase Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	Persen	75,74	77,34	78,97	80,64	82,34	84,08	85,85
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	65,08	67,85	70,73	73,74	76,88	80,15	83,55
3	Tingkat Kepemilikan akta kelahiran	Persen	93,55	93,97	94,40	94,82	95,25	95,68	96,11
	PEMBERDAYAANN MASYARAKAT DAN DESA								
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Rasio Angka Kelahiran Total	15,05	15,44	15,83	16,24	16,66	17,09	17,53
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/mCPR)	Persen	87,29	87,29	87,29	87,29	87,29	87,29	87,29
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	Persen	17,86	16,57	15,37	14,26	13,22	12,27	11,38
	PERHUBUNGAN								
1	Rasio konektivitas	Rasio Konektivitas	2	2,19	2,39	2,62	2,86	3,13	3,43
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	4,76	5,53	6,44	7,48	8,70	10,12	11,76

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Presentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Persen	20	25,33	32,09	40,65	51,48	65,21	82,60
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Persen	1,27	95,85	96,51	97,17	97,84	98,51	99,18
	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
1	Persentase Koperasi yang berkualitas	Persen	24,62	30,81	38,55	48,23	60,35	75,52	94,49
2	Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Persen	13,13	16,93	21,83	28,16	36,31	46,83	60,38
	PENANAMAN MODAL								
1	Persentase peningkatan investasi	Persen	31,98	36,02	40,58	45,71	51,48	57,99	65,32
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	0,03	0,04	0,06	0,09	0,13	0,19	0,28
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	1,09	1,35	1,66	2,05	2,53	3,12	3,85
3	Jumlah Prestasi Olahraga	Medali	5	6,11	7,47	9,13	11,16	13,64	16,67
	STATISTIK								
1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	PERSANDIAN								
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	49,61	50,69	51,79	52,91	54,06	55,24	56,44
	KEBUDAYAAN								
1	Persentase cagar Bidaya yang dilestarikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	PERPUSTAKAAN								
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Poin	43,61	46,56	49,71	53,07	56,66	60,49	64,58
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	27,87	31,20	34,94	39,11	43,79	49,03	54,90
	KEARSIPAN								
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen	4,77	7,06	10,46	15,49	22,94	33,98	50,32
	KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	PARIWISATA								
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	Persen	n.a	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24
3	Tingkat hunian akomodasi	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	30,46	33,03	35,81	38,82	42,09	45,64	49,48
	PERTANIAN								

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton Per Hektar Per Tahun	1.218,30	1.238,10	1.258,23	1.278,68	1.299,46	1.320,58	1.342,04
2	Persentase Penurunan Kejadian/Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	7,5	7,61	8,46	9,40	10,44	11,61	12,90
	PERDAGANGAN								
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	Persen	5,6	8,63	13,30	20,50	31,59	48,68	75,02
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	72,83	84,42	84,75	85,00	85,25	85,50	85,75
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	97,64	97,71	97,77	97,84	97,90	97,97	98,04
	PERINDUSTRIAN								
1	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah	Persen	0	0,50	0,75	1,13	1,69	2,53	3,80
	PENGAWASAN DAN KEUANGAN								
1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persen	14,33	15,33	16,39	17,53	18,75	20,05	21,44
2	Rasio PAD	Persen	16,61	18,15	19,84	21,69	23,70	25,90	28,31
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	Persen	72,43	74,01	75,63	77,28	78,97	80,69	82,45
4	Opini Laporan Keuangan	Jumlah 1 - 10 Opini WTP	10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 2,8	2,86	2,88	2,9	2,93	3,00	3,05
6	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 3	3	3	3	3	3	3

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	PENGADAAN								
1	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	14,24	14,66	15,08	15,52	15,98	16,44	16,92
2	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	13,18	13,40	13,63	13,86	14,09	14,33	14,57
3	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Persen	14,49	17,85	22,00	27,10	33,40	41,15	50,70
	KEPEGAWAIAN								
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	70,22	73,25	76,41	79,71	83,14	86,73	90,47
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	2,84	2,85	2,87	2,88	2,89	2,90	2,92
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	100	1,21	1,50	1,87	2,32	2,88	3,58
	MANAJEMEN KEUANGAN								
1	*Budget execution*: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen (%)	4,7	5,90	7,41	9,31	11,69	14,68	18,43
2	*Revenue mobilization*: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Persen (%)	0,83	0,98	1,15	1,36	1,60	1,89	2,22
3	*Assets Management*	Jumlah Manajemen	3	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Aset 1, 2, 3, 4.							
4	*Cash Management*: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	Persen	4,41	5,75	7,50	9,78	12,75	16,62	21,67
	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK								
1	Persentase Informasi tentang Anggaran untuk Unit Pelayanan yang dapat diakses di website pemda	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: hasil proyeksi, 2025

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jayapura Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program unggulan wali kota dan wakil wali kota, yang menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen RPJMD dijabarkan lebih rinci kedalam Renstra Perangkat Daerah yang disusun oleh setiapo perangkat daerah. Selanjutnya, kedua dokumen ini menjadi pedoman penyusunan rencana tahunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Visi RPJMD Kota Jayapura "**Terwujudnya Kota Jayapura Sebagai Kota Jasa yang Berbudaya, Religius, Maju, Mandiri, dan Sejahtera Menuju Jayapura Emas**" dijabarkan secara konsisten ke dalam misi, tujuan, sasaran, dan penahapan pembangunan tahunan hingga 2030. Visi tersebut diterjemahkan melalui misi yang menekankan penguatan identitas budaya dan religiusitas, pemerataan pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan, kemandirian ekonomi berbasis jasa, transformasi tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tujuan dan sasaran RPJMD kemudian disusun untuk mengukur keberhasilan visi tersebut, antara lain melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat (IPM, pendidikan, kesehatan), pertumbuhan ekonomi inklusif (PDRB, investasi, produktivitas), perbaikan tata kelola pemerintahan (reformasi birokrasi, pelayanan publik), serta penguatan daya dukung lingkungan dan infrastruktur.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka memastikan RPJMD dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan maka diperlukan beberapa kaidah pelaksanaan. Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Wali kota mempublikasikan peraturan daerah tentang RPJMD.
2. Wali kota dan wakil wali kota mengarahkan pelaksanaan RPJMD.
3. DPRD Kota Jayapura melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
4. Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD dengan mendorong koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta masyarakat termasuk dunia usaha, akademisi, dan media.
5. Perangkat Daerah berkewajiban menyempurnakan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029, yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun.
6. Dokumen RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029 merupakan pedoman penyusunan RKPD Kota Jayapura Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030.
7. Pemerintah Daerah mendukung dan melaksanakan Program Strategis Nasional yang ditetapkan Pemerintah, sesuai karakteristik dan kewenangan daerah.
8. Pemerintah Daerah melakukan manajemen risiko untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka menengah sesuai dengan rencana sehingga dapat mencapai sasaran pembangunan.
9. Pelaksanaan RPJMD membutuhkan pembiayaan yang memadai untuk memastikan perencanaan dapat berjalan dengan baik dan mampu mencapai target kinerja. Untuk itu perlu peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan sektor non publik.

10. Perubahan RPJMD dapat dilakukan dengan memedomani peraturan yang berlaku.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka mengetahui capaian rencana sebagaimana telah dimuat dalam RPJMD, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi. Evaluasi terhadap Hasil RPJMD dilakukan dengan kaidah sebagai berikut:

1. Bappeda melaksanakan evaluasi hasil terhadap RPJMD untuk mengetahui realisasi pembangunan terhadap target pembangunan.
2. Kepala Bappeda melaporkan evaluasi kepada wali kota. Selanjutnya, wali kota menyampaikan laporan tersebut kepada gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.
3. Hasil evaluasi RPJMD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.
4. Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD.
5. Pemerintah Daerah melakukan pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah maupun akuntabilitas kinerja pemerintah daerah setiap tahun dengan berpedoman pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

5.4. Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kota Jayapura Tahun 2025-2029 berlaku selama 5 (lima) tahun kedepan. Pada saat dokumen RPJMD ini akan berakhir, maka untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah perlu disusun RPJMD periode berikutnya. Penyusunan RPJMD periode berikutnya dilakukan berdasarkan tahapan dan tatacara yang diatur oleh pemerintah pusat, dengan berpedoman pada RTRW dan RPJPD Kota Jayapura.

Selanjutnya, pada tahun 2029 akan dilakukan penyusunan RKPD Kota Jayapura tahun 2030. Penyusunan RKPD Kota Jayapura

tahun 2030 dilakukan dengan memedomani rencana tahun 2030 dalam RPJMD Kota Jayapura tahun 2025-2029 serta permasalahan dan isu strategis daerah yang terkini. Mengingat RPJMD Kota Jayapura periode berikutnya sedang disusun, maka RKPD Kota Jayapura Tahun 2030 juga memedomani arah kebijakan RPJPD pada periode berkenaan, serta peraturan yang berlaku.